

FORT
ROTTERDAM
BENTENG DI SIMPANG MASA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FORT ROTTERDAM

BENTENG DI SIMPANG MASA

Editor:
Iwan Sumantri

Penanggung Jawab:
Laode Muhammad Aksa

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2021

FORT ROTTERDAM, BENTENG DI SIMPANG MASA

@Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

ISBN: 978-623-99092-0-8

Editor: Iwan Sumantri

Penanggung Jawab: Laode Muhammad Aksa

Redaktur: Andini Perdana

Layout dan Sampul: Ahmad Abdul

Fotografer: Firman dan Nasruddin

Sekretariat: Hj. Rachmiyana, Chunjunarsih
Muhammad Akram, dan Ayu Muliana

Penerbit

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Ujung Pandang No.1, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111.

Tlp. (0411) 3621701

Faks (0411) 3621702

Website: bpcbsulsel.id

Cetakan Pertama, 2021

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FORT ROTTERDAM, BENTENG DI SIMPANG MASA

Makassar: Penerbit Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Puji dan syukur, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan, dan kesabaran sehingga buku yang sudah lama dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Kini buku yang berjudul **“Fort Rotterdam, Benteng di Simpang Masa”** dapat tersaji dan kita nikmati bersama. Penerbitan buku ini merupakan salah satu upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengomunikasikan sekaligus menyebarluaskan informasi salah satu Cagar Budaya berperingkat Nasional di Sulawesi Selatan, yaitu Benteng Rotterdam.

Fort Rotterdam, Benteng di Simpang Masa merupakan judul yang terpilih setelah diskusi panjang yang kami lalui. Benteng Rotterdam sebuah benteng *“simpang antara masa lalu dan masa kini; simpang arsitektur Nusantara dan Eropa; simpang politik Kolonial dan Indonesia; simpang fungsi, pertahanan, politik ekonomi, dan budaya”*. Benteng yang menjadi bukti kebesaran Kerajaan Gowa, keberadaan Kolonial di Makassar, serta cikal bakal terbentuknya Kota Makassar.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan atau bunga rampai yang membahas Benteng Rotterdam dari sisi cagar budaya, sejarah, fungsi, arsitektur, tata ruang, hingga pengelolaannya. Pembahasan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan menggelitik dari tulisan *“Fort Rotterdam Undercover”*. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban atas pertanyaan tersebut pada tulisan Benteng Rotterdam dalam naskah lontara, aneka penamaan benteng dan fungsinya, penetapannya sebagai Cagar Budaya, sistem penataan ruang dalam benteng, serta arsitekturnya. Tulisan yang tak kalah

menarik adalah Pangeran Dipenogoro yang pernah ditahan didalam benteng, bukti eksistensi generasi muda yang berujung pada vandalisme, penerawangan” masa depan benteng Rotterdam dan peran benteng saat ini sebagai ruang public.

Tak lupa juga, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah meluangkan waktu dan berkenan merangkai data sehingga terbitlah tulisan yang lengkap ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan buku.

Buku ini dicetak untuk masyarakat luas, sehingga kami berharap kita bersama-sama dapat mendapatkan inspirasi dari Cagar Budaya Tingkat Nasional Benteng Rotterdam dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Inspirasi agar kita mampu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun juga sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, November 2021

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan	v
Daftar Isi	vii
Pengantar Editor	viii
Fort Rotterdam <i>Undercover</i> (Iwan Sumantri)	1
Kawasan Benteng Rotterdam sebagai “Urban Heritage” (Laode Muhammad Aksa)	21
Serba-Serbi Benteng Ujungpandang dalam Narasi Lontara (Muhlis Hadrawi)	33
Peranan Dan Penamaan Benteng Ujungpandang dari Masa ke Masa (Muhammad Ramli)	79
Bermula dari Benteng Ujung Pandang: Telisik Nilai Penting Dibalik Fort Rotterdam (Yadi Mulyadi)	103
Fort Rotterdam: Pelabuhan Terakhir Sang Pangeran Diponegoro (Nusriat)	135
Sistem Penataan Ruang Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Iswadi)	157
Arsitektur Fort Rotterdam (Adang Sujana dan Nafsiah Aswawi)	189
Vandalisme di Benteng Rotterdam: Eksistensi Keliru Generasi Muda (Yusriana)	225
Pengelolaan Benteng Ujungpandang di Masa Mendatang (Andini Perdana)	243
Benteng Rotterdam Sebagai <i>Public Space</i> (Anggi Purnamasari)	283

PENGANTAR EDITOR

Letaknya di Jalan Ujungpandang Nomor 1, satu-satunya bangunan yang berdiri pada jalan ini. Dia berdiri kokoh, menjadi *land mark*, penuh dengan peristiwa heroik, yang menandai perjalanan sejarah budaya dan budaya Makassar. Itulah Fort Rotterdam, sebuah nama yang julukannya sering dipertukarkan menjadi Benteng *Pannynyua*, Benteng Jumpandang, ataupun Kotayya. Pada tempat ini, di benteng ini, sering pula dilaksanakan berbagai *event*, baik *event* bertaraf lokal, nasional, maupun internasional. Ya, benteng ini sejak jaman awal pembangunannya hingga saat ini, telah menjadi salah satu penanda jaman perjalanan sejarah Kota Makassar bahkan provinsi Sulawesi Selatan.

Tetapi, *“beberapa mall di Makassar lebih terkenal di mata penduduk daripada Benteng Rotterdam”* kata salah seorang temanku yang kebetulan sejarawan dalam suatu kesempatan. *“Padahal, benteng ini merupakan cikal bakal pertumbuhan Kota Makassar sebagai implikasi Perjanjian Bongaya tahun 1669. Sejarah kota ini bermula dari sini, dari benteng Rotterdam dan sekitarnya ini, itu fakta historik”* kata temanku itu melanjutkan kalimatnya dengan nada sedikit kesal. Masih dengan nada kesal, temanku itu melanjutkan; *“elit penguasa kotapun seolah melupakan. Saya curiga, tidak satupun elit penguasa kota sekarang yang pernah menginjakkan kakinya di Rotterdam. Atau mungkin saja mereka tidak tahu menahu tentang benteng ini”*.

Dalam sebuah perkuliahan saat saya menempuh pendidikan lanjutan, kami memperoleh topik ekonomi filantropik. Dalam bahasan itu, sang dosen pengampuh mata kuliah berceritera soal alat tangkap yang bernama bagang. Kata dosenku itu: *“bagang dipenuhi oleh penerangan dengan kekuatan ribuan watt untuk memancing ikan datang dan berkumpul disitu. Ketika ikan berkumpul, diangkatlah jaring. Terjaringlah ikan yang jumlahnya banyak sekali”*. Dosenku itu melanjutkan: *“Mall juga demikian, diterangi oleh lampu mulai dari jalan masuk hingga ke relung paling dalam. Semua itu digunakan untuk mengundang pengunjung datang kesitu. Dalam konteks itu, pengunjung dipersepsikan sama dengan ikan, secara tidak langsung diundang datang kesitu, disiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang kenyamanannya. Tapi, jangan lupa, Anda akan membelanjakan uang Anda disitu, entah saat itu juga atau nanti”*.

Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Brian Fagan, dia mencatat bahwa salah satu ciri kedewasaan seseorang adalah ketika dia mencoba menelusuri sejarah asal usulnya. Bangsa yang besarpun demikian; menjaga, melestarikan warisan sejarah budayanya sebagai identitas jati diri. Berkaca pada tulisan Fagan itu, dapat dianggap seluruh masyarakat kita belum beranjak dewasa.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (BPCB Sul-Sel) telah melakukan berbagai upaya agar Benteng Rotterdam menjadi lebih terkenal lagi, lebih dikenang oleh publik, dilirik sebagai tempat kunjungan untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam soal pemeliharaan, tiap tahun BPCB melakukan upaya perkuatan struktur bangunan; penggantian kayu

lapuk dimakan usia, penggantian genteng yang pecah dan sedapat mungkin identik dengan aslinya. Masih dalam soal pemeliharaan, ditempatkan sejumlah juru pelihara untuk mengurus kebersihan lingkungan; memotong rumput, membersihkan sampah, dan membenahi tanaman. Status juru pelihara ini ada pegawai negeri sipil (PNS) dan ada pula pegawai honorer.

Agar pengunjung mendapatkan pengetahuan tentang Fort Rotterdam, ditempatkan papan bicara persis di dekat gerbang masuk, sudut taman. Dari papan bicara itu pengunjung dapat melihat lokasi-lokasi penting yang ada dalam lingkungan benteng. Tetapi, sering kali pengunjung tidak tahu menahu soal isi papan bicara itu meskipun bentuk dan rupanya sudah sangat informatif dan *eye catching*. Dalam sebuah kesempatan, pada suatu hari Minggu pertengahan tahun 2019, sebelum pandemi melanda dunia, saya bertanya kepada salah seorang pengunjung wanita belia tentang maksud dan tujuan dia ke Fort Rotterdam. Dia, wanita belia itu menjawab: "janjian teman ketemu disini...". Saya coba menyelidik lebih jauh, bertanya soal pengetahuannya tentang Fort Rotterdam, sang wanita belia tadi menjawab sambil bertanya balik: "tempat apa inikah?"

Untuk memenuhi pelayanan kepada publik, BPCB yang berkantor disitu mendirikan kelompok kerja (pokja) yang mengurus soal surat permintaan izin penggunaan *space* Fort Rotterdam. Selain itu, pokja ini juga memberikan layanan informasi terkait dengan eksistensi Fort Rotterdam. Tempat pokja ini berkantor adalah puing yang dibangun ulang berdasarkan foto beberapa puluh tahun lewat. Kebetulan pula, ada seorang Warga Negara

Asing yang datang untuk menelusuri jejak leluhurnya yang pernah berfose pada puing bangunan itu sebelum runtuh akibat pengeboman saat perang. Begitulah salah satu cara kerja institusi ini dalam upaya rekonstruksi peninggalan purbakala. Masih banyak lagi cara dan strategi kerja-kerja lainnya yang tidak dapat disebutkan disini untuk melekatkan arti penting bangunan cagar budaya yang lekat dengan jati diri bangsa.

Walaupun di Fort Rotterdam ini berkantor dua institusi yaitu BPCB dan Museum Lagaligo, namun keaslian ruangan diupayakan tetap terjaga. Kalaupun ada sedikit penambahan, itu dianggap bukan sebuah pelanggaran namun sebuah adaptasi. Salah satu contoh disini adalah pembangunan toilet yang menurut saya sudah memadai. Struktur dari luar masih asli, namun di dalam sudah tersedia fasilitas yang memadai. Berkunjunglah ke Pokja Bawah Air (pojok kiri dalam Fort Rotterdam) untuk membuktikannya. Disitu, Anda juga akan dapat menikmati hidangan dari warung yang disiapkan disitu. Dahulu, sebelum dipindahkan kesitu, warung terletak pada bangunan pokja yang mengurus perizinan dan pelayanan. Tetapi mungkin atas dasar penataan agar lebih baik lagi, maka warung kemudian dipindahkan.

Semua yang ditulis di atas merupakan sebagian dari upaya dan kerja-kerja BPCB Sul-Sel untuk merawat, melindungi, melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan struktur dan bangunan cagar budaya yang bernama Fort Rotterdam. Tidak sedikit dana yang telah digelontorkan untuk maksud dan tujuan tersebut. Namun sayang sekali, apresiasi kebanyakan masyarakat belum sesuai dengan harapan kita semua.

Dari diskusi dengan kawan-kawan dari BPCB Sul-Sel wilayah kerja Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, kami mencoba introspeksi kondisi kekinian Benteng Rotterdam. Dalam sebuah diskusi ringan, mengemuka introspeksi itu; kemungkinan memang kita belum terlampau agresif melakukan deseminasi soal keberadaan Benteng Rotterdam. Untuk maksud deseminasi itulah buku yang berjudul "**Fort Rotterdam, Benteng di Simpang Masa**" ini diterbitkan walaupun disadari belum memenuhi ekspektasi publik.

Buku ini berisi kumpulan catatan penulis dengan latar dan profesi berbeda dengan prespektif gaya tulisan sejarah budaya (*culture history*). Sejarah budaya secara sederhana dapat diartikan sebagai: *diskripsi* tentang budaya-budaya manusia masa lampau yang terbentang selama ratusan bahkan ribuan tahun. Para arkeolog yang bekerja pada suatu daerah dengan cara paradigma sejarah budaya, akan menghasilkan penggambaran budaya prasejarah pada daerah tersebut. Sejarah budaya bersumber pada studi tentang *artefak*, *situs*, dan *struktur* yang berada pada situs dalam konteks *temporalis* dan *spasial*. Penelitian terhadap kelompok situs prasejarah dan berbagai artefak di dalamnya, memungkinkan terciptanya urutan-urutan (*sequences*) sejarah manusia masa lampau secara lokal maupun regional yang terbentang ratusan atau bahkan hingga ribuan tahun. Kebanyakan aktivitas penelitian sejarah budaya adalah diskriptif, yaitu mengakumulasi data-data arkeologik secara rinci dalam kerangka spasial dan kronologik, sebagai dasar untuk mengamati bagaimana budaya-budaya tertentu telah berkembang dan berubah sepanjang masa prasejarah. Diskripsi sejarah budaya

adalah sebuah langkah pertama atau tingkat awal yang esensial dalam kerja-kerja arkeologi menuju pendiskripsian cara-cara hidup (*lifeways*) atau proses kebudayaan (*cultural process*) manusia masa lampau.

Kebanyakan arkeolog yang bekerja dalam bingkai kerangka sejarah budaya merasa kesulitan untuk merangkai artefak-artefak yang tersimpan dalam situs dalam upaya penarikan kesimpulan (*inferences*) yang ditujukan—terutama—pada aspek-aspek manusia prasejarah yang tidak dapat diraba atau tidak mudah dimengerti misalnya religi, organisasi sosial, dan interaksi. Argumen mereka adalah: bahwa arkeolog hanya mendapat legitimasi untuk menangani temuan-temuan material dari tingkah laku manusia masa lampau. Sayangnya, argumen itulah yang menyebabkan munculnya pandangan sempit terhadap aliran sejarah budaya yang tidak menguntungkan bagi aliran ini, yang diberikan oleh kebanyakan orang terhadap usaha yang panjang, seksama, dan penuh keasyikan dalam penciptaan banyak tipe-tipe artefak dan kronologi lokal yang sebetulnya telah membuka arkeologi ke dalam penciptaan berbagai macam tipe klasifikasi.

Laode Muhammad Aksa, Kepala BPCB Sul-Sel dengan judul tulisan “Kawasan Benteng Rotterdam Sebagai *Urban Heritage*” membahas tentang jejak sejarah dan kisah perjalanan Kota Makassar dan Benteng Ujung Pandang pada saat didirikan oleh Kerajaan Gowa hingga kini menjadi sebuah *urban heritage*. Dalam tulisan tersebut juga diidentifikasi perubahan terkait urbanisasi pada kawasan benteng Rotterdam.

Saya sendiri, Iwan Sumantri, seorang Dosen Aktif di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas

Hasanuddin, lebih banyak melontarkan pengalaman dan pertanyaan-pertanyaan menggelitik di dalam tulisan saya. Jawaban atas tulisan yang berjudul “Benteng Rotterdam *Undercover*” tersebut tentunya terdapat dalam kumpulan tulisan pada buku ini.

Muhlis Hadrawi, seorang doktor lulusan Malaysia, lekat dengan naskah Lontara. Dalam buku ini, dia menorehkan catatan Fort Rotterdam. Dasar tulisannya bersumber dari naskah Lontara yang telah lama dia telisik, yang kemudian dia lekatkan dengan narasi. Banyak pengetahuan baru yang dapat diperoleh melalui tulisan Muhlis Hadrawi dalam buku ini, terutama pada toponimi daerah di seputar Makassar. Selain itu, Muhlis Hadrawi juga mencatat beberapa peristiwa dan orang penting terkait dengan Fort Rotterdam sesudah penyerahan benteng ini ke tangan Speelman.

Muhammad Ramli sahabat saya di Arkeologi Unhas telah menghabiskan waktu yang lama bahkan sempat menetap di Benteng Rotterdam. Dalam tulisannya yang berjudul “Peranan dan Penamaan Benteng Ujungpandang dari Masa ke Masa” melukiskan tentang nama atau sebutan yang melekat pada Benteng Rotterdam. Selain itu, terjadi alih fungsi terhadap Benteng Rotterdam, mulai dari pendiriannya oleh Raja Gowa di tahun 1545, kemudian dikuasai oleh VOC dan Jepang, dilanjutkan setelah masa kemerdekaan hingga kini.

Doktor Yadi Mulyadi, alumni Pascasarjana Universitas Indonesia dan Dosen tetap pada Arkeologi Unhas, menulis soal nilai penting Fort Rotterdam sehingga ditetapkan sebagai struktur cagar budaya peringkat nasional. Sebagai Tim Ahli Cagar Budaya

(TACB) Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya, tentu saja beliau ahli pula menelisik tentang arti dan nilai penting yang melekat pada Fort Rotterdam. Dari tulisan beliau inilah kemudian kita dapat memahami upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak agar benteng ini tetap lestari sepanjang hidupnya.

Pada sebelum penghujung tahun 1990, Ketika kami semua mahasiswa Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin menghayalkan soal *absolute dating* atau pertanggalan absolut, Nusriat yang ketika itu masih mahasiswa tingkat akhir, telah melakukan *dating* di situs sekitar Benteng Somba Opu. Dalam buku ini, beliau menulis sosok Pangeran Diponegoro yang dikaitkan dengan Fort Rotterdam. Dalam pengalaman empiriknya yang disertai dengan penelusuran teks, dia percaya bahwa pada salah satu sudut dari Fort Rotterdam terdapat ruang tahanan Sang Pangeran. Tulisan Nusriat ini perlu dibaca untuk mendapatkan prespektif tentang ruang tahanan Pangeran Diponegoro selama diasingkan sampai wafatnya di Makassar.

Iswadi, terlibat dalam Zonasi Benteng Ujungpandang melalui tulisannya yang berjudul Sistem Penataan Ruang Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar menggambarkan permasalahan aspek keruangan benteng. Keberadaan benteng tidak terlepas dari adanya potensi ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan degradasi potensi tinggalan budaya dan nilai penting yang dikandungnya. Pada akhir tulisannya Iswadi mengusulkan perlunya penataan ruang baik dalam hal perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam buku ini Adang Sujana berkolaborasi dengan Nafsiah Asmawi menulis arsitektur Fort Rotterdam. Keduanya diketahui memiliki latar belakang ilmu arsitektur yang dalam proses selanjutnya sempat mengenyam pendidikan lanjutan bidang arkeologi. Oleh sebab itu masuk akal jika keduanya kemudian menulis soal arsitektur Fort Rotterdam. Keduanya kemudian menggunakan gaya penjelasan “sejarah menjelaskan arsitektur” atau “arsitektur sebagai bukti”. Penjelasan seperti itu kerap kali ditemukan dalam gaya penjelasan sejarah budaya. Dengan cukup rinci kedua penulis ini mencatat bagian-bagian tertentu Fort Rotterdam yang terhubung dengan situasi dan kondisi kebudayaan saat itu.

Bukan kebetulan jika Yusriana menorehkan catatan diskriptifnya sekaligus juga analitik terkait dengan vandalisme di Fort Rotterdam. Dalam beberapa tahun belakangan, memang ada saja tangan yang selau jahil menoreh pada bagian tertentu Fort Rotterdam. Padahal, meskipun secuil torehan itu jelas merupakan pengrusakan dan diatur dalam Undang-undang Cagar Budaya Nomor 10 Tahun 2011. Selain itu, Yusriana juga mencatat pemanfaatan ruang Fort Rotterdam dari masa ke masa.

Saat ini Pengelolaan Benteng Ujungpandang berbasis pelestarian dilakukan oleh BPCB Sul-Sel. Andini Perdana berusaha untuk “menerawang” bagaimana model pengelolaan Benteng Rotterdam di masa mendatang tanpa melupakan pengembangan dan pemanfaatan saat ini. Benteng dapat dijadikan sebagai Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah air, *Archaeological Open-Air Museum*, bahkan bagian yang sangat penting dalam Kota Tua

Makassar. Konsep pengelolaannya dapat bersifat Badan Layanan Umum (BLU).

Anggi Purnamasari, dari Kelompok Kerja Pelayanan Publik dari BPCB Sul-Sel akan menceritakan tentang pengalamannya “melayani orang yang akan memanfaatkan Benteng Rotterdam dengan beragam tujuannya”. Dengan tulisan berjudul Benteng Rotterdam sebagai *Public Space*, dijelaskan terkait pembagian ruang di Benteng Rotterdam, pengelolaan Cagar Budaya sebagai *public space*, sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan BPCB.

Selamat membaca, dan selamat berselancar dalam peristiwa sejarah dan budaya pada arus budaya yang semakin deras ini.

Makassar, November 2021

Iwan Sumantri



Fort Rotterdam

FORT ROTTERDAM UNDERCOVER

Oleh

Iwan Sumantri

Pada tahun 1968, saat saya berusia 9-10 tahun, kelas III Sekolah Dasar (SD), kami sekeluarga hijrah dari Parepare ke Makassar. Mula-mula kami tinggal sementara di Jalan Chairil Anwar, lalu kemudian menetap di Kompleks Pertanian, Jalan Amirullah. Ketika tinggal di Jalan Chairil Anwar, kami sekeluarga sering 'main' ke Pantai Losari. Jaraknya memang dekat; lempeng saja ke Barat, sudah sampai di Pantai Losari. Dari Pantai Losari, biasanya kami jalan kaki menyusuri Jalan Penghibur arah ke Utara menuju Pelabuhan. Saat tiba di depan Benteng Rotterdam, ayah saya sering kali berhenti sejenak di depan benteng yang ketika itu masih sangat kusam. Disitu, almarhum ayahku sedikit berceritera tentang KNIL. "Disini (dulu) markasnya tantara KNIL. Ada keluarga kita jadi korban mereka". Saat ini, mungkin hanya orang-orang tua dan sepuh yang masih mengingat bahwa Fort Rotterdam pernah dijadikan sebagai hunian tantara KNIL.

Setelah kurang lebih 6 (enam) bulan numpang di rumah M. Asyik, pengusaha sukses ketika itu, di Jalan Chairil Anwar, ayahku mendapat rumah dinas di Kompleks Pertanian, Jalan Amirullah. Saat menetap di Kompleks Pertanian itu, persinggungan dengan Fort Rotterdam tidak putus, walaupun kami sama sekali belum pernah masuk ke dalam benteng. Kami masih sering lewat di depan benteng, entah dengan jalan kaki pada pagi hari maupun dengan kendaraan Fiat jip ataupun Jeep

CJ 5 kami. Dalam sebuah kesempatan, ayahku mengantar ibuku ke Jalan Somba Opu. Kami berempat dengan seorang adik perempuanku. Pada saat itu, mungkin karena bosan hilir mudik di depan beberapa toko emas, ayahku mengajakku jalan ke depan Fort Rotterdam. Di depan benteng, sambil melihat-lihat konstruksi dinding, seseorang menghampiri kami sambil berujar: "dinding benteng ini dibangun dengan putih telur untuk merekatkan antara satu batu dengan batu lainnya". Dalam perjalanan balik ke Jalan Somba Opu, ayahku bertanya: "apakah kau percaya perkataan orang tadi, bahwa *spesi*nya terbuat dari campuran putih telur ayam?".

Ceritera tentang *spesi* yang dibuat dengan campuran putih telur untuk merekatkan antar batu membentuk dinding Fort Rotterdam berkembang dan dibicarakan oleh berbagai kalangan. Bahkan diceriterakan oleh *guide* lokal kepada pengunjung local pula sebagai bumbu atraksi. Tentu saja cerita itu tidak benar. Saat pembangunan dinding benteng belum ditemukan teknologi *portland cement* (PC) sebagaimana semen yang kita gunakan saat ini. Namun demikian, *spesi* itu dibuat dari batu kapur, yang dibakar dan dihaluskan menjadi kapur untuk campuran semen, banyak digunakan untuk mendirikan bangunan, baik bangunan tempat tinggal maupun untuk bangunan publik. Sampai akhir tahun 1970-an batu kapur yang dihaluskan dan dicampur dengan semen itu menjadi salah satu bahan dasar untuk merekatkan antar batu bata untuk membangun rumah. Itulah pula sebabnya dinding bangunan yang dibangun sampai dengan akhir tahun 1970-an mudah terkelupas karena "letupan" dari dalam.

Ada dua permainan masa kanak-kanak kami yang masuk dalam memoriku yaitu "ode-ode" dan "gokar-gokaran". Ode-ode



Pemugaran dinding sisi barat Fort Rotterdam
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

adalah sebuah permainan yang berbasis pada kertas pembungkus rokok. Pembungkus rokok cap telur (lupa namanya) bernilai lima kali lebih tinggi dibanding Kansas, misalnya. Permainan gokar-gokaran dibuat dari *simpe* yang dijalin sedemikian rupa membentuk badan gokar. Bannya dibuat dari sendal jepit dan "mesinnya" dibuat dengan memasang busi pada bagian samping tempat duduk. Kedua permainan itu sangat asyik sebab membuat kami harus memiliki kreatifitas tinggi.

Kreatifitas tinggi ditunjukkan dengan cara mencari dan menemukan bahan dasar pembuatan permainan. Lokasi pencarian kami arahkan pada Pelabuhan Makassar. Dalam upaya pencarian itulah kami kemudian bersinggungan dengan Fort Rotterdam. Di depan Fort Rotterdam, di bibir pantai, dekat dengan Tugu Wilhelmina, dahulu tumbuh beberapa pohon Ketapang. Cukup

rindang sebagai tempat berteduh untuk meluruskan *simpe* dan membuka lem pembungkus rokok secara hati-hati. Pada saat itulah, selain membicarakan perolehan kami masing-masing, kami juga saling membicarakan soal Fort Rotterdam dengan kapasitas pengetahuan kami masing-masing. Ada yang berceritera bahwa benteng di depan kami dibangun oleh Sultan Hasanuddin, ada pula yang berceritera bahwa dibangun oleh Arung Palakka. Bahkan ada yang berceritera bahwa benteng itu dibangun oleh Belanda. Walaupun ceritera kami dari berbagai versi, namun kami sepakat mengaguminya sebagai bangunan kuat dan tahan lama.

Belakangan saya ketahui bahwa benteng itu didirikan jauh sebelum masa Sultan Hasanuddin berkuasa di Gowa. Dan, walaupun Arung Palakka pernah dilantik disitu sebagai raja, tetapi beliau tidak memilih Rotterdam sebagai istananya. Dari catatan sejarah pula saya ketahui bahwa Speelman pernah berkantor disitu. Sassus kalangan tertentu juga saling berbisik soal Colliq Pujie, sang penulis *lontaraq I Laga Ligo*, sering menyelinap ke dalam benteng ini untuk bertemu dengan Mattes.

Ketika saya menginjak usia remaja, kami penduduk Makassar mempunyai kebiasaan yakni bagadang pada malam Tahun Baru. Tempat paling pavorit bagi kami adalah pertigaan depan RRI hingga taman segitiga depan Kantor Garuda sekarang. Disitu, pada secuil taman rumput disitu, kami bercengkrama. Ada yang duduk, sebagian besar lainnya tiduran. Kami lakukan itu sepanjang malam hingga pagi. Bagi yang kebetulan pasangan, biasanya mereka mengendap-endap menuju ke depan Fort Rotterdam. Di depan Rotterdam memang agak temaram dan banyak tumbuh pohon-pohonan. Entahlah apa yang mereka

obrolkan disitu. Mungkin amat sangat rahasia sehingga harus menjauh dari kami.

Ketika saya menggeluti hobby sepeda, saat saya sudah tua, tahun 2017, saya kepincut dengan sebuah sepeda antik merek Gazelle, dengan narasi luar biasa. Dalam sebuah *klipping* koran mungkin terbitan tahun 1940-an, disitu terdapat sebuah sepeda yang dikendarai dengan sangat atraktif oleh Letnan Satu Andi Mattalatta. Dia mengendarainya dengan cara *stand up* dimana tangan kanan beliau bertumpu pada stir, tangan kiri bertumpu pada sadel, dan kedua kakinya tegak lurus ke atas. Sepeda itu ditawarkan dengan harga yang pasti tidak dapat saya tebus. Tapi, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Tempat atau lokasi atraksi beliau tepat di samping kanan RRI sekarang, berhadapan dengan Gedung *Societeit de Harmonie*. Dari berbagai sumber, termasuk foto, menjelaskan kemudian bahwa areal Rotterdam dan *Societeit de Harmonie* menjadi satu kesatuan, tempat berkumpulnya para elit baik lokal maupun Eropa.

Menjelang akhir tahun 1970-an, saya mendapatkan motor pengganti Vespa Superku yaitu Honda 70 CC. Setelah beberapa bulan, ada kegiatan balap motor resmi. Sirkuitnya di depan Rotterdam, memutari tugu sebelah kiri RRI menuju Jalan Ribura'ne, belok kanan taman di samping Kantor Walikota sekarang lalu menuju ke arah barat dan tikungan kiri ke depan Rotterdam. Saya ikut turun arena itu. Tentu saja saya tidak dapat juara. Seingat saya, *pad dock* teman-teman klub adanya persis di depan pintu gerbang Fort Rotterdam yang dahulunya disebut Benteng Ujungpandang. Seingat saya pula, sebelum turun arena, atau mungkin sekali saat saya gugur pada babak penyisihan, saya sempat memperhatikan batuan penyusun dinding benteng. Ada

seorang orang Jawa, nama panggilannya Mas No, kebetulan mahasiswa Fakultas Teknik Unhas, Jurusan Mesin yang mengutak-atik motor team kami, berceritera bahwa banyak lobang pada dinding benteng pertanda bahwa benteng ini pernah dihujani oleh tembakan. Ketika itu saya membantahnya; “bagaimana mungkin tembakan dapat membuat lobang sebesar lingkaran jari orang dewasa?”. “Bukan pistol tolol, tapi meriam atau kanon !!!”. “Tuh di dalam sono, ada tuh bangunan yang hancur kena bom waktu perang. Coba masuk sono....” katanya dengan nada ketus karena (mungkin) saya membantahnya. Bangunan yang dimaksud oleh Mas No saat itu adalah Bangunan B, kantor tempat Pelayanan Publik BPCB Makassar sekarang.

Persinggungan saya dengan Fort Rotterdam sesungguhnya baru terjadi pada awal tahun 1981. Ketika itu, di Semester II, kami mendapat Mata Kuliah Prasejarah. Dosen kami saat itu adalah Bapak Harun Kadir, seorang dosen yang paling saya hormati. Tempat beliau memberi kuliah di Pokja Bawah Air BPCB sekarang. Waktu kuliah pukul 15.00 sesudah jam kantor. Kebetulan Pak Harun saat itu diperbantukan sebagai Kepala Museum Laga Ligo. Mulai dari tahun 1981 itu sampai sekarang saya bersinggungan dengan Fort Rotterdam, baik secara fisik maupun secara mental.

Menurut penuturan Bapak Harun Kadir, dirinyalah yang sebetulnya ditunjuk sebagai kepala BPCB (dahulunya disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, lalu diubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, kemudian Balai Peninggalan Cagar Budaya), tetapi memilih Pak Hadimulyono sebagai kepala kantor itu. Beliau sendiri memilih menjadi dosen di Universitas Hasanuddin. Sejak tahun 1981 itu, saya bersinggungan



Bangunan diseberang jalan Fort Rotterdam 1947
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)

pula dengan para kepala kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang berkantor di dalam lingkungan Fort Rotterdam baik secara langsung maupun tidak. Mulai dari Bapak Hadimulyono, Pak Masduki, Pak Thalib, Prof. Darmawan, Pak Bahru Kalluppa, Mas Gunadi, Mas Agus Waluyo, Pak Said, dan Pak Laode Muh. Aksa.

Salah seorang teman kuliah Angkatan 80 saya bernama Edward Malessy. Dia berasal dari Ambon, dikenal sebagai seorang yang memiliki indera ke enam. Menurut pengakuannya, dia lahir dengan ari-ari yang masih membungkusnya. Saat-saat kami menunggu perkuliahan ataupun pada akhir perkuliahan di Rotterdam, kami seringkali masih harus nongkrong di taman yang belum tertata serapi sekarang. Saat kami nongkrong itu, Edward (nama panggilannya Edy) seringkali menunjukkan wajah terkejut atau wajah ketakutan. Disaat seperti itu salah seorang sahabat kami; Muhammad Ramli berujar "*acini mi seng anjo*" (dia melihat lagi sesuatu jika demikian). Biasanya, Nasruddin (nama panggilan Unding) akan bertanya "apa yang ose lihat Ed?" (Apa lagi yang kamu lihat Ed?) sembari masuk ke lengan kanan Edy yang diangkat. Baik Edy, Ramli maupun Unding akan menceriterakan apa yang dia lihat; ada roh kulit putih dengan uniform tantara VOC berlarian di selasar antara Museum Laga Ligo dengan ruang kantor Kelompok Kerja (Pokja) Pemanfaatan dan Pengembangan BPCB. Wahab, Nawir, almarhum Dubel, Syafik, Syamsul Hidayah dan saya biasanya tidak ikut menyaksikan. Saya takut, terlebih lagi almarhum Dubel Driwantoro.

Ceritera berbau horror seperti itu bukan hanya dialami oleh kami berdelapan, tetapi juga beberapa orang yang semulanya bertempat tinggal di dalam lingkungan Fort

Rotterdam, diantaranya Bapak Muhammad Ramli. Beliau selama bertahun-tahun nginap di lingkungan itu. Bahkan, saat beliau menjadi pejabat Kepala Sub bagian tata usaha, beliau memilih salah satu bangunan di Bastion Mandarsyah sebagai rumah keduanya. Dari penuturan beliau dan juga teman sekantornya yang sering bersama dengannya diperoleh ceritera horror lainnya; ada orang tidur dipindahkan tempatnya, tidur dengan kepala di barat pindah dengan posisi sebaliknya, suara air kran mengalir, ada suara kaki berjalan di atas lantai dua, seseorang dengan wujud tua berjenggot panjang gentayangan di depan garasi mobil, di bawah Bastion Mandaryah, dan lain sebagainya. Bagi beberapa orang yang seringkali bermalam di dalam lingkungan Fort Rotterdam, kisah seperti itu bukanlah “gangguan” tetapi “teman jaga malam”. Memang, bulu lengan dan kuduk agak bergidik juga jika mengingat itu semua, tetapi semua itu bisa sirna tatkala kita lebih percaya dan menyerahkan semua kepadaNya.

Selain dari ceritera beraroma horror di atas, terdapat juga ceritera lainnya. Cerita ini boleh jadi bersifat horror bagi sebagian orang tetapi bagi sebagian lagi menganggapnya sebagai ceritera yang menarik. Antara tahun 1985 hingga saat ini, jumlah pengunjung bertambah setiap tahunnya. Walaupun saya tidak memiliki data statistik, tetapi saya percaya pada pengamatan yang saya lakukan. Bukan satu dua kali saja kejadiannya berlangsung tapi berkali-kali.

Bagi banyak orang, terdapat beberapa bagian dalam lingkungan Fort Rotterdam yang *instagramable* dan beberapa lainnya juga (mungkin) bersuasana romantis. Tidak usahlah saya bahas disini spot foto yang *instagramable* itu. Semua fotografer yang biasa nongkrong disitu tahu tempatnya. Tetapi mungkin



Spot ini sangat cocok dengan fose mereka yang berkostum jadal (jaman dulu). (sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

belum banyak yang tahu *spot* itu pada malam hari, ketika lampu menyala. Sangat indah...

Sebagaimana diketahui bersama, lanskap benteng dilengkapi oleh lima bastion; Mandaryah, Bacan, Buton, Amboina, Bone. Konon, bastion itu digunakan sebagai tempat menerima tamu dari kelima kawan erat Arung Palakka, sekaligus juga sekutu Speelman. Pada bagian bawah setiap bastion tersebut terdapat bangunan yang menyerupai penjara. Ini harus dibaca sebagai *sign* ancaman kepada kelima atau salah satu sekutu bahwa jika dia bertindak diluar kendali maka ancamannya adalah penjara itu. Ya, dia bersifat *panoptic*. Mungkin begitu.

Beberapa tempat yang sangat romantis antara lain Bastion Mandarsyah dan Bastion Amboina yang jauh di timur. Jauh dari jangkauan amatan sekuriti, jauh pula dari mata pengunjung yang hanya bersileweran pada bagian tengah hingga bagian depan. Beberapa sekuriti yang berpengalaman tahu betul membedakan mana pasangan yang ingin menikmati lingkungan Fort Rotterdam, dan mana pasangan pengunjung yang *cartem*; sebuah istilah yang digunakan bagi pasangan yang tidak punya modal untuk menyewa losmen paling murah sekalipun. Pasangan *cartem* ini seringkali ditangkap oleh sekuriti dan keempat orang tua mereka dipanggil agar melakukan pembinaan kepada kedua putra dan putri mereka.

Dengan penataan yang dilakukan saat ini sesungguhnya Fort Rotterdam menjadi objek yang menarik untuk dikunjungi. Pada sebuah sudut persis melewati pintu gerbang, terdapat sebuah papan bicara yang menurutku cukup komunikatif. Disitu tertera semua informasi dan tata letak berkenaan dengan bangunan yang ada dalam lingkungan benteng ini. Bahkan, dalam

papan bicara itu terdapat sejarah ringkas pendirian benteng ini. Namun, tidak sedikit orang yang tidak membacanya. Dalam sebuah kesempatan pada suatu sore bulan Juni tahun 2019 saya berkesempatan berbincang dengan dua orang. Kebetulan keduanya gadis dan masih muda. Sebutlah dia dengan nama Si A dan Si B. Kepada keduanya, di spot yang berbeda, saya bertanya. Pertanyaanku standar saja: Apakah Anda tahu nama lokasi ini? Jawabannya standar juga: benteng. Pertanyaan kedua apakah Anda mengetahui tempat ini. Jawaban yang saya peroleh masih standar juga: benteng. Pertanyaan ketiga: Apakah Anda tahu siapa yang mendirikan benteng ini? Mulai terdapat perbedaan jawaban. Si A menjawab: Belanda, dan Si B menjawab tidak tahu. Lalu, saya bertanya lagi, tujuan mereka berdua ke lokasi ini. Si A menjawab: cuma jalan karena bete tinggal di rumah. Si B menjawab: janji ketemu cowoknya. Seketika hampir meledak marahku. Tapi saya langsung introspeksi diri. Kolega saya sendiri, sesama arkeolog, belum tentu pernah membawa keluarganya ke Fort Rotterdam. Hanya segelintir kolegaku yang anaknya pernah berkunjung ke tempat ini. Lalu, bagaimana kita dapat menyebarluaskan informasi tentang Fort Rotterdam jika dalam keluarga saja tidak terjadi deseminasi tentangnya?

Paradoks dengan kedua gadis yang saya ajak berbincang di atas. Kejadiannya pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Kalau saya tidak salah itu bulan Maret tahun 2021, menjelang bulan suci Ramadhan. Saat itu, kunjungan ke dalam Fort Rotterdam ditutup untuk umum. Sebuah rombongan yang terdiri dari dua orang pria dewasa dan dua orang perempuan dewasa pula ingin masuk ke dalam Fort Rotterdam. Mereka berempat seolah mengemis meminta izin kepada sekuriti untuk masuk lingkungan Fort Rotterdam. Salah satu kalimat yang terekam



Papan informasi singkat Benteng Rotterdam
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

dalam otakku ketika itu adalah: *"tolonglah kami diizinkan masuk pak. Perjalanan ini udah lama kami rencanakan nih pak. Benteng ini sangat historik pak....."*. Lalu salah seorang wanita menimpali: *"rugi pak kalau kami tidak masuk melihat-lihat. Kami dari jauh lho pak....Mumpung kami lagi di Makassar nih"*.

Dari gaya bicaranya, jelas dia orang terdidik. Itu tercermin ketika saya ajak mereka berdiskusi dengan memperlihatkan daun pintu gerbang. Selain mengira-ngira ketebalan daun pintu, si wanita yang sedikit gempal lalu bertanya: *"pak, apakah sudah ada percobaan XRF pada metal yang digunakan sebagai engsel daun pintu. Soalnya itu terkait dengan industrialisasi di Eropa lho pak"*. Lalu, yang lainnya menimpali: *"Juga terkait dengan ketersediaan sumberdayanya Yang...."*.

Saya belum pernah melakukan perbincangan sedemikian beratnya dengan kolega lain selain dengan Pak Rustan, Iswadi, Supriadi, Yadi, dan Ihsan. Tinjauan mereka rata-rata menghubungkan Fort Rotterdam dengan konteks dunia. Pula, mereka menghubungkannya dengan teori-teori yang berkembang belakangan ini misalnya dekonstruksi ataupun mashab Frankfurt. Berbincang dengan mereka pasti hangat, tidak sekedar membicarakan Fort Rotterdam dalam bentuk, ukuran, lokasi, fungsi, histori, pengelolaan dan pemanfaatan semata.

Salah satu yang seringkali dituding sebagai musik elit adalah musik jazz. Pada bulan Nopember 2021 dilakukan festival jazz di dalam Fort Rotterdam. Itu bukan festival jazz pertama, tetapi sudah yang kesekian kalinya. Berjubel orang datang menyaksikan festival itu. Festival jazz itu sendiri bukanlah festival satu-satunya yang dilaksanakan di dalam lingkungan areal Fort Rotterdam, tetapi masih banyak lainnya. Sebutlah misalnya festival

kebudayaan, termasuk tari-tarian. Dalam rangka memperkenalkan Jalur Rempah Indonesia, Fort Rotterdam terpilih pula sebagai lokasi pelaksanaan festival kuliner yang menggunakan rempah di dalam setiap masakan. Juga sebuah festival yang bertajuk Makassar Writer Fest sudah berkali-kali dilaksanakan di Fort Rotterdam. Para penulis, baik penulis manca negara maupun penulis lokal hadir dan tumpah ruah disitu. Festival itu bukan festival kaleng-kaleng. Hanya seorang yang memiliki intelektualitas memadai yang mampu menulis dengan indah dan menggugah. Itulah pula yang menegaskan mengapa penulis selalu menempati urutan atas dan terhormat dalam profesi. Penulis selalu menampilkan realitas yang menggugah. Dia bahkan mampu mengendalikan pembacanya melebihi ancaman bedil. Itu kata orang pintar, dan mereka—para penulis itu—memang pintar. Dan, orang pintar itu menjadikan Fort Rotterdam sebagai tempat mereka menampilkan diri.



Panggung seni
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

Sesungguhnya, semua festival yang dilaksanakan dalam lingkungan Fort Rotterdam bertujuan untuk memperkenalkan Fort Rotterdam ke publik. Itu salah satu dari tujuan pemanfaatan. Tujuan pemanfaatan lain adalah edukasi; soal sejarah pendirian, soal sejarah dibalik pendirian, soal kedudukan historik pada masanya, soal kesinambungan, soal pelajaran yang dapat dipetik darinya, dan sebagainya.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel (BPCB Prov. Sul-Sel) dan Museum Laga Ligo institusi negara institusi yang berkantor dalam lingkup Fort Rotterdam. BPCB dibawah oleh Direktorat Jendral Kebudayaan, dan Museum Laga Ligo milik Provinsi Sulawesi Selatan. BPCB sendiri sebetulnya adalah institusi vertikal, sering kali disangka sebagai institusi provinsi. Maka tidak jarang terdapat penyebutan "orang provinsi" jika staf institusi ini berkunjung ke kabupaten. Salah satu tugas institusi ini adalah melestarikan objek cagar budaya baik dalam bentuk benda, struktur, situs, maupun wilayah cagar budaya. Wilayah kerja institusi ini meliputi Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Kebersihan lingkungan Fort Rotterdam ditangani oleh Juru Pelihara (jupel) yang digaji oleh negara. Kurang lebih terdapat 30-an orang jupel yang bekerja untuk menangani kebersihan disitu. Status para jupel ini terbagi atas dua kelompok besar yaitu pegawai negeri sipil (PNS) golongan I dan II, dan honorer.

Walaupun secara kasat mata Fort Rotterdam terletak tidak jauh dari pantai dan posisinya agak rendah di banding dengan daratan pemukiman lainnya di Makassar, namun lingkungan Fort Rotterdam tidak pernah tergenang air. Suatu kegiatan ekskavasi pernah dilakukan pada jalan masuk Fort Rotterdam memberi

petunjuk bahwa lingkungan benteng ini dilengkapi dengan *drainase* yang cukup baik. Padahal, *drainase* itu sudah berusia cukup lanjut, sekitar 300-an tahun. Sebuah perencanaan dan pekerjaan yang amat sangat matang. Tentu saja temuan itu menjadi pelajaran bernilai tinggi bagi anak bangsa ini. Namun, saat ini, halaman Fort Rotterdam mulai terendam. Tudingan diarahkan ke sejumlah bangunan di depan Fort Rotterdam yang menutup pipa saluran menyebabkan genangan air di dalam halaman menjadi kurang lancar mengalir ke laut.

Jika Anda berkeliling pada dinding Fort Rotterdam, maka Anda akan menjumpai sepinggal dinding terpinggal pada bagian Selatan. Pada lokasi sebelah Selatan itu pernah dilakukan ekskavasi dan ditemukan struktur batu yang membentuk dinding. Selain struktur batu, ditemukan juga batuan serupa dengan batuan pembentuk dinding benteng berserakan disitu. Secara berkelakar saya pernah mengatakan bahwa kondisi likuiditas keuangan VOC hancur akibat Perang Makassar saat pembangunan itu berlangsung. Secara berkelakar pula saya mengatakan bahwa Speelman ingin menghapus stigma negative pada dirinya sebagai orang yang bermasalah pada daerah tugasnya sebelumnya dengan cara menghamburkan uang kas VOC untuk memenangkan perang itu. Menurut Bapak Muhlis Hadrawi, berdasarkan catatan lontaraq yang tentu saja telah dinilai validitasnya, memang diberitakan pernah terjadi pembangunan dinding benteng bagian Selatan itu.

Dalam sebuah ekskavasi yang dilakukan pada bagian yang kita bincangkan ini, sekitar tahun 1987, saya berdiskusi dengan almarhum Bapak Bahru Kalluppa. Beliau menganggap bahwa bagian Selatan itu memang dibiarkan terbuka sebagai implikasi dari benteng ini sebagai pusat perdagangan rempah. Hal itu akan



Foto sisi selatan Fort Rotterdam tahun 1924-1932 tidak terlihat dinding benteng, namun hasil ekskavasi pada tahun 2015 ditemukan struktur. (sumber: nationaalarchief.nl/, dan BPCB Prov. Sul-Sel)

memudahkan bagi kapal bersandar dan melakukan proses bongkar muat disitu. Argumentasi beliau didasarkan pada beberapa buah biji kenari yang diperoleh dari kotak ekskavasi disitu. Memang, berdasarkan sumber foto yang diambil dari udara tahun 1933 terdapat sungai yang mengelilingi benteng ini, melewati sebelah Selatan benteng dan terus sampai ke pantai. Sungai itu dahulunya dikenal dengan nama Sungai Makassar. Masih banyak

orang Makassar yang mengingat lebar sungai; 9-10 meter. Sayang sekali, sungai itu sekarang menyempit menyerupai drainase.

Fort Rotterdam adalah satu-satunya benteng Kerajaan Gowa yang tidak dihancurkan sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Bongaya tahun 1669. Perjanjian itu mengakhiri Perang Makassar antara dua tokoh; Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka. Pertarungan keduanya bukanlah perang antar etnis; Bugis dan Makassar. Secara fakta sejarah, beberapa daerah kuasa orang Bugis berpihak ke Sultan Hasanuddin, dan beberapa wilayah kuasa etnis Makassar berpihak ke Arung Palakka.

Ketika Benteng Somba Opu—pusat kekuasaan Kerajaan Gowa—dihancurkan, maka pusat kuasa berpindah ke Fort Rotterdam. Dengan berbagai alasan, masyarakat yang berdiam di sekitar Benteng Somba Opu berbondong-bondong pindah—dan dipindahkan—ke daerah sekitaran Fort Rotterdam. Daerah sekitaran benteng ini kemudian bertumbuh menjadi daerah pemukiman baru, pusat pertumbuhan, dan pusat ekonomi. Boleh disebut, Perjanjian Bongaya yang meyakini Fort Rotterdam sebagai satu-satunya benteng di wilayah Kerajaan Gowa menjadi cikal bakal pertumbuhan dan perkembangan Kota Makassar sekarang ini. Oleh sebab itu patut disebut bahwa Fort Rotterdam adalah salah satu jejak penting dalam merangkai sejarah Kota Makassar.

Fort Rotterdam yang dahulunya bernama Benteng Juppandang ataupun Ujungpandang dibangun pertama kali pada abad ke XVI. Dalam sejarahnya, benteng ini telah berkali-kali mengalami perbaikan dan perkembangan konstruksi. Dalam pada itu nampak sekali pengerjaannya sangat mempertimbangkan konstruksi. Pilihan materialnya dari bahan nomor satu ketika itu.

Konstruksi lansekapnya—baik dari dalam, dari luar, dan lingkungan sekitaran—juga sangat dipertimbangkan.

Bekerja dalam lingkungan Fort Rotterdam menjadi sangat nyaman dimana tinggi plafon mencapai ukuran rata-rata diatas 3,5 meter. Daun pintunya pun lebar dan tinggi, menjadikan sirkulasi udara setiap ruangan menjadi sangat baik. Kemungkinan bangunan ini memang dirancang untuk kenyamanan. Tetapi dibalik kenyamanan yang sengaja diciptakan, (kemungkinan) tersebutnya agenda panoptikon di dalamnya.

Ruangan pavorit yang paling sering saya kunjungi adalah Gedung H dan I, berdampingan dengan yang diduga sebagai tempat Pangeran Diponegoro sekeluarga “dipaksa” beristirahat. Terdapat sebuah ruangan pada bagian Selatan Fort Rotterdam yang selalu dibicarakan sebagai tempat penahanan Pangeran Diponegoro. Ruangannya sempit dan pengap. Pintunyunya cukup rendah. Pintu itu ditafsirkan bahwa jika Pangeran Diponegoro keluar dari ruangan maka beliau akan menunduk dan itu kemudian—sekali lagi-ditafsirkan—bahwa Sang Pangeran tunduk pada opsir VOC. Opsir, bukan petinggi !!! . Lalu, bagaimana mungkin Sang Pangeran diperlakukan seperti itu, sementara diketahui bahwa petinggi VOC menaruh respek yang tinggi terhadap Sang Pangeran ? Topik ini menjadi penting untuk dibicarakan.

Tetapi bagaimana membicarakan sebuah topik jika kita tidak pernah terlibat secara intens di dalamnya? Oleh sebab itu mari kita mengunjungi, melindungi, dan melestarikan Fort Rotterdam. Disitu, pada benteng itu, Fort Rotterdam itu, banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik bersama. Pelajaran itu harus kita maknai sebagai modal dasar pembangunan manusia menuju Indonesia yang lebih tangguh.

KAWASAN BENTENG ROTTERDAM SEBAGAI "URBAN HERITAGE"

oleh

Laode Muhammad Aksa

Pendahuluan

Jejak sejarah dan kisah perjalanan Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam merupakan salah satu bangunan bersejarah perkotaan yang menjadi bukti nyata kisah panjang masa kolonialisme di Kota Makassar. Dicerminikan melalui ciri khas arsitektur Kolonial Belanda pada bangunan bangunan utama benteng. Benteng Rotterdam terletak di tepi pantai barat Kota Makassar dan berada dekat dengan jantung Kota Makassar. Sebagai bagian dari bangunan bersejarah Kota Makassar, Benteng Rotterdam memiliki karakteristik yang merepresentasikan gaya dan corak arsitektur kolonial Belanda.

Benteng Rotterdam memiliki kekayaan nilai sejarah didalamnya yang menjadikan benteng ini sebagai bangunan bersejarah perkotaan di Kota Makassar. Bangunan ini adalah saksi bisu peristiwa bersejarah yang harus dilestarikan agar memberikan gambaran kondisi kota di masa lampau. Benteng merupakan warisan budaya dan bukti peradaban pada masanya.

Urban heritage atau warisan budaya perkotaan merupakan representasi rancangan yang muncul dan ditemukan dalam bentuk yang bervariasi dan memiliki peradaban sebagai respon terhadap kehidupan ekonomi, sosial, politik dan religius (Rossi, 1982).

Menurut Rossi (1982), artefak perkotaan merupakan sesuatu yang memiliki sejarah dan karakteristik. Sejarah memberikan nilai dan ciri khas/karakteristik pada artefak perkotaan, sedangkan karakteristik lebih ditekankan pada unsur bentuk dibanding unsur materialnya. Sehingga dalam artikel ini diperlukan tinjauan mengenai sejarah dan karakteristik Benteng Rotterdam. Adapun prinsip artefak perkotaan adalah selalu berkaitan dengan tempat, peristiwa, dan wujud.



Benteng Rotterdam saat ini berfungsi sebagai kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Propinsi Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat menjadi BPCB Sulsel) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riser, dan Teknologi, ruang publik, obyek destinasi wisata kota Makassar, dan Museum Lagaligo yang menyimpan semua rekam sejarah dan kebudayaan masyarakat Sulawesi



Gerbang Fort Rotterdam
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

Selatan. Kondisi bangunan pada Benteng Rotterdam sudah banyak mengalami perbaikan akibat kerusakan yang dialaminya dan setiap tahunnya BPCB Sul-Sel melakukan konservasi perawatan terhadap dinding benteng dan bangunan yang berada dalam benteng. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga bangunan cagar budaya atau warisan budaya tersebut agar tetap berdiri kokoh dan terpelihara sebagai bukti perjuangan bersejarah. Pada perkembangannya warisan bersejarah tersebut menjadi aset pariwisata yang potensial. Oleh karena itu, artikel ini akan mengemukakan Benteng Rotterdam sebagai situs bangunan bersejarah perkotaan di Kota Makassar sebagai *urban heritage*.

Pengetahuan saat ini tentang *urban heritage* dapat memberikan panduan yang baik untuk menyusun strategi yang efektif dalam konsep pelestarian cagar budaya yang berada perkotaan. Dengan membandingkan upaya pelestarian bangunan bersejarah di dua Kota Tua Jakarta dan Kota Lama Semarang dan menunjukkan bahwa pendekatan yang memerlukan perjuangan dan mengalami perkembangan yang baik dari perhatian pemerintah setempat dan masyarakat pemilik bangunan bersejarah maupun komunitas pecinta bangunan bersejarah diperkotaan, akan membantu Benteng Rotterdam dan kawasannya dengan baik.

Kami percaya bahwa pendekatan *urban heritage* dapat menjadi model bagi upaya pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah di Kota Makassar karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Dan juga dibutuhkan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Berkelanjutan Warisan Bersejarah Benteng Rotterdam

Banyak bangunan dan area bersejarah di Kota Makassar yang hilang karena pertumbuhan penduduk, perluasan ruang, dan peningkatan area kota yang memiliki nilai ekonomi untuk berkembang. Upaya melestarikan warisan semacam itu sering kali menggunakan pariwisata sebagai kunci pelestarian. Memang pariwisata dapat membantu melestarikan warisan yang dibangun dan pendapatan dari pariwisata dapat mendanai dan mempertahankan upaya konservasi. Namun, menarik wisatawan ke bangunan bersejarah memerlukan pengembangan infrastruktur baru yang dapat mencakup integritas sejarah daya tarik utama. Dengan kata lain, pendekatan berkelanjutan untuk pelestarian sejarah seringkali sangat kompleks. Perbedaan dalam konteks kebijakan di mana pelestarian bangunan bersejarah dan kawasan bersejarah di perkotaan menjadi lokus perjuangan pelestarian untuk menyelamatkan warisan bersejarah.

Urbanisasi adalah kejadian yang lumrah dan tak terhindarkan di mana-mana. Sementara pertumbuhan dan ekspansi bermanfaat bagi banyak orang dan bisnis, ada potensi hilangnya kawasan bersejarah yang merupakan nilai warisan bagi masyarakat.

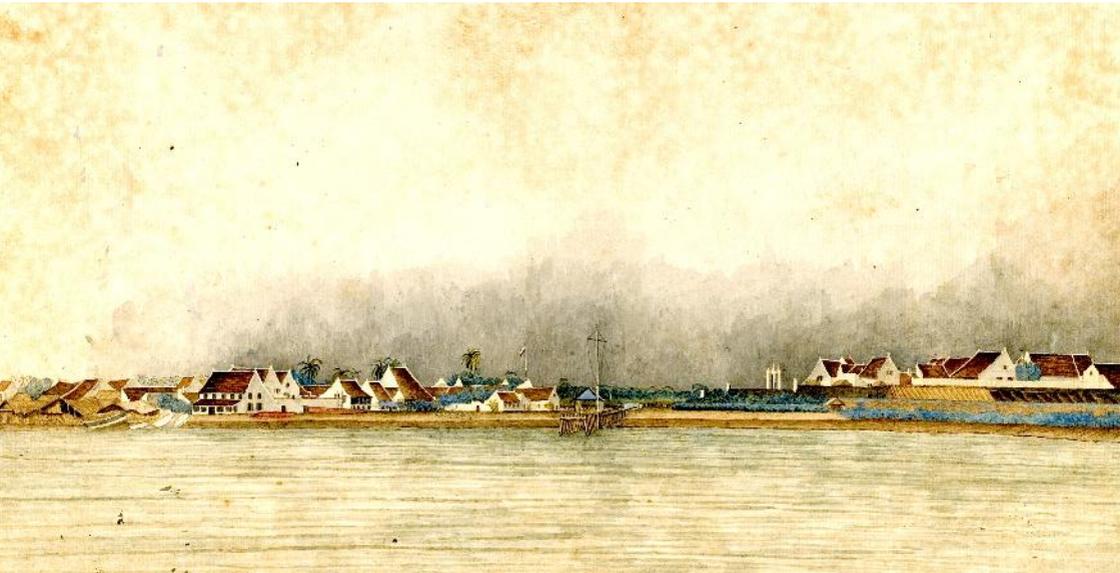
Namun, selama dua dasawarsa terakhir, Kawasan Benteng Rotterdam telah dilanda oleh tekanan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu, hanya sedikit perhatian terhadap atribut historis dari warisan bersejarah yang dibangun. Khususnya, di kawasan bersejarah benteng Rotterdam, pertumbuhan dan modernisasi yang merajalela dengan cepat menggantikan karakteristik warisan sejarah dengan desain amorf, kontemporer, dan global. Pengaturan fisik kota, terutama

bangunan, sedang di bangun secara permanen dengan keseluruhan struktur dan tempat tersebut akan menjadi kenangan beberapa struktur bangunan dan foto yang tersisa.

Kehadiran fisik Benteng Rotterdam dapat memberikan kegembiraan bagi masyarakat ketika memberikan fokus untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik. Ada nilai tak berwujud dalam aspek visual tempat tersebut, tampilan lanskap dalam benteng, bahan atau material dari mana untuk membangunannya seperti batu bata, pelapis batu, jendela dekoratif, tembok batu, genteng, penampilan bangunannya di pesisir pantai yang sudah tertutup oleh dominasi bangunan baru dan ketinggian bangunan asli benteng sudah tidak sebanding dengan gedung disekitarnya. Dua lantai elemen arsitektur benteng Rotterdam, tembok gerbang lengkung, jendela lengkung, tembok pembatas susunan batu andesit, pilaster bagian teras gedung, atap genteng dengan kap atap segi tiga, sehingga mengekspos karakteristik bangunan bersejarah.

Di sisi lain, proses urbanisasi di kawasan Benteng Rotterdam dengan tekanan pembangunan, meningkatkan kecepatan pendirian bangunan komersial yang tidak memiliki pengaturan dalam pembangunannya, sehingga menyebabkan perubahan penggunaan lahan bangunan. Dalam proses ini, pembangunan terus berjalan dan campur tangan orientasi ekonomi mengakibatkan hilangnya pengaturan warisan bersejarah disekitar Benteng Rotterdam.

Pemandangan jalanan dan gedung bertingkat sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kawasan Benteng Rotterdam. Mengenai warisan binaan kota yang signifikan, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harus dibatasi segera, dan langkah-langkah yang tepat untuk menyeimbangkan urbanisasi dan pengaturan warisan kawasan bersejarah harus dilakukan.



Pemandangan Makassar tahun 1840 dan tahun 2021
(sumber: nationaalarchief.nl/ dan BPCB Prov. Sul-Sel)

Kecerobohan mengabaikan potensi efek samping dari intervensi baru karena atas nama pembangunan ekonomi dan tuntutan pembangunan kota, faktor-faktor ini mengancam tatanan kawasan Benteng Rotterdam yang dibangun sejak 400 tahun yang lalu.

Dampak urbanisasi berfokus pada perubahan jumlah luas lahan terbuka, Namun tulisan ini berfokus pada benteng Rotterdam sebagai *urban heritage* dan dampak pengaruh urbanisasi terhadap kawasan bersejarah tersebut, maka data tentang pemanfaatan lahan terbuka hijau dianggap tidak sesuai karena pusat sejarah kawasan benteng Rotterdam merupakan asal mula Kota Makassar mengalami tingkat perubahan penggunaan lahan terbuka menjadi bangunan memiliki tingkat perubahan tertinggi. Di sisi lain, sebagian besar bangunan menjadi kawasan komersil.

Penutup

Dalam penulisan ini, kami melihat dan mengidentifikasi yang berkorelasi dengan perubahan terkait urbanisasi pada bangunan di kawasan benteng Rotterdam di kota Makassar. Urbanisasi menyebabkan perubahan pada kawasan bersejarah yang secara bertahap merusak karakter kota bersejarah.

Hasil pengamatan penulis secara gamblang menjelaskan bahwa bangunan dengan tingkat perubahan yang tinggi terjadi di kawasan bersejarah benteng Rotterdam yang disebabkan oleh berbagai kepentingan. Khususnya, perubahan lahan untuk bangunan, elemen arsitektur, tinggi bangunan, penggunaan lahan untuk bangunan dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi karakter kawasan bersejarah.

Dengan mengendalikan faktor-faktor tersebut di atas, kita dapat menghidupkan kembali karakter kawasan bersejarah yang membutuhkan rencana pengembangan lokal yang tepat dengan

konsep *urban heritage*. Tanpa peraturan dan arahan, para perencana kota dengan ide-ide yang termasuk pelestarian kawasan dan bangunan bersejarah. Bahkan ketika bangunan kuno dibiarkan, dan begitu dikembangkan dengan penggantian menjadi bangunan gaya arsitektur kontemporer saat ini sehingga menjadi menyakitkan untuk dilihat.

Dalam mempersiapkan Rencana Pembangunan Daerah untuk kota seperti Makassar, sangat penting untuk fokus pada kawasan bersejarah yang dibangun dan pengaruh karakteristiknya terhadap kehidupan sosial budaya kota untuk melestarikan sebanyak mungkin kawasan dan bangunan bersejarahnya. Secara umum, pengamatan penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diidentifikasi sangat terkait dengan perubahan aspek fisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya dari kawasan *urban heritage* di mana pembangunan dengan karakteristik uniknya.

Dalam hal faktor fisik pengembangan kawasan bersejarah benteng Rotterdam di Kota Makassar, seperti ketinggian bangunan, pedoman rencana pembangunan pemerintah kota perlu lebih mempertimbangkan kawasan bersejarah dalam struktur perkotaannya. Tekanan komersial seperti yang disorot dalam faktor pembangunan gedung hotel, café dan rumah toko, menekankan betapa pentingnya aspek perencanaan kota ini untuk menghentikan penurunan karakter warisan tradisional kota. Faktor sosial ekonomi seperti jumlah penghuni, perubahan nilai tanah dan jenis kepemilikan juga sangat penting dalam mengembangkan strategi untuk memungkinkan pengembangan dan intervensi baru tanpa mengorbankan integritas sejarah.

Masukan langsung dari para pemangku kepentingan juga sangat diperlukan dalam menyusun dokumen perencana kota, karena pengamatan secara umum dalam penulisan ini, kami menunjukkan dengan jelas bahwa rencana pengembangan bangunan di Kota Makassar perlu memperhatikan faktor dunia



nyata ketika membuat keputusan, yang mempengaruhi tingkat perubahan pada kawasan bersejarah di sekitar benteng Rotterdam.

Pengaturan warisan kota bersejarah yang dibangun dan diturunkan dari generasi ke generasi menjadi kenangan paling berharga dari sebuah kota tidak dihilangkan sedikit demi sedikit. Semua karakter warisan sejarah yang berusaha menumbuhkan pemahaman yang lebih kaya tentang Kota Makassar berkonflik dengan tekanan urbanisasi. Dalam konteks kota-kota bersejarah seperti Makassar, pedoman yang jelas dan positif perlu dibuat untuk pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya guna mempertahankan dan menghidupkan kembali karakter kota.

Sementara urbanisasi dan pengembangan kota tidak dapat dihindari, hal itu bukannya tidak sejalan dengan pertumbuhan dalam pelestarian karakteristik unik yang berharga dari warisan arsitektur dan menciptakan kota yang dapat disebut rumah oleh orang-orang. Otoritas perencanaan, arsitek lokal, pemangku kepentingan, dan penduduk kota, bersama-sama, harus mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan dan menikmati keindahan dan cita rasa warisan sejarah milik kita bersama.

Referensi

E.H.K. Yung, Q.Zhang,E.H.Chan. 2017. "Underlying social factors for evaluating heritage conservation in urban renewal districts" dalam *Habitat Int.*, 66 (2017), pp. 135-148. Diakses pada <https://www.sciencedirect.com> tanggal 10 November 2021

- Feilden, B 2003. *Conservation of Historic Buildings*. Burlington: Routledge.
- Mc Donald, Susan, 2011. Contemporary Architecture In Historic Urban Environments, diakses pada <https://www.getty.edu> tanggal 12 November 2021.
- Pearl. 2015. *Urban heritage in Indian Cities, Compendium of Good Practice*. Indian National Trust of Arts & Cultural heritage.
- R.A. Oppong, A.B. Marful, Y.K. Sarbeng. 2018. Conservation and Character Defining Elements Of Historical Towns: A Comparative Study Of Cape Coast and Elmina Streets and Castles, diakses pada <https://www.sciencedirect.com> tanggal 10 November 2021.
- Yani Said, Shahrul, A.Hasnizan, et al. 2013. Heritage Conservation and Regeneration of Historic Areas in Malaysia, diakses pada <https://www.sciencedirect.com>, tanggal 10 November 2021.

SERBA-SERBI BENTENG UJUNGPANDANG DALAM NARASI LONTARA

oleh

Muhlis Hadrawi

A. Pendahuluan

Menilik keberadaan Benteng Ujungpandang beserta tiga belas benteng Makassar¹ lainnya yang membentuk formasi berjejer di sepanjang pesisir wilayah barat, maka fakta yang terbayangkan adalah betapa agungnya pandangan aristokrat Gowa-Tallo di abad XVI silam. Paling tidak, penduduk Sulawesi Selatan bukanlah sesederhana yang seperti disangkakan. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebab, berbagai kalangan kerap kali memberi cap kalau cara berpikir penduduk Sulawesi Selatan pada masa itu masih gelap dan berperadaban rendah. Gagasan pembangunan benteng-benteng Makassar sebagai elemen yang menyimpan cerita panjang, sekaligus menampik prasangka rendah

¹Raja Gowa ke XIV Sultan Alauddin (1593-1639), disebutkan mendirikan Benteng Panakkukang, Benteng Garassi, Benteng Galesong dan Benteng Ana Gowa. Benteng-benteng ini memperkuat benteng yang didirikan oleh Tumaparrisi' Kallonna (Raja Gowa ke IX) dan Tunipallangga (Raja Gowa X) yaitu Benteng Somba Opu, Benteng Kale Gowa, Benteng Tallo, Benteng Sanrabone, Benteng Ujungpandang, Benteng Barombong dan Benteng Ujungtanah. Benteng lainnya yaitu Benteng Mariso, Benteng Bontorannu dan Benteng Bayoa yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin (lihat Polelinggomang dan Iqbal (2004)).

itu. Bahkan sebaliknya, kita dapat mengatakan bahwa gagasan pendirian benteng-benteng Makassar merupakan wujud budaya Sulawesi Selatan yang pada zaman itu sudah terkoneksi dalam kerangka budaya dunia. Kejatuhan Melaka pada 1511 ke tangan Portugis, serta-merta membangkitkan kesempatan Makassar muncul sebagai pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara (Abdul Rahman, 2013:18). Peluang itu bagi Makassar dimungkinkan karena letak geografis Sulawesi Selatan yang strategis dan sudah menjadi kawasan perdagangan rempah sejak abad ke-16. Diperkirakan 1530 Gowa yang merupakan kerajaan utama Makassar sudah merintis kuasa politik dan perdagangan dengan memusatkan kendalinya di Sombaopu. Sombaopu sebagai pelabuhan sekaligus kota berlokasi di tepi Selat Makassar yang memisahkan daratan Sulawesi dan Kalimantan. Pada masa itulah Sombaopu perlahan-lahan muncul sebagai pesaing ekonomi dan politik di kawasan timur Nusantara yang sekaligus menggantikan pelabuhan enterport Melaka di kawasan barat.

Sebagai upaya meraih prestise politik dan ekonomi, penguasa Gowa kemudian menempuh langkah jitu dengan menyatukan kekaisarannya dengan Tallo sebagai dua kerajaan bersaudara kembar. Impak dari unifikasi Gowa dan Tallo itu berhasil wujud sebagai kuasa baru di kawasan pantai barat Sulawesi Selatan. Raja Gowa, Tumaparrisir' Kallonna (1511-1548), disebut-sebut sebagai penggagas dasar infrastruktur memindahkan istana Gowa dari bukit Tamalate ke Sombaopu. Program kemudian dilanjutkan Tunipallangga (1548-1566), kemudian diteruskan oleh Karaeng Tunijallo' (1566-1577). Agenda Gowa-Tallo tampil sebagai penguasa politik dan ekonomi di kawasan timur Indonesia terus berjaya hingga paruh kedua abad ke-17.

Patut dicatat bahwa, perpindahan Istana Gowa ke Sombaopu sebagai fase baru dalam visi Gowa-Tallo untuk merangkai kuasa maritim. Mesin perang Gowa-Tallo berjalan yang diawali dengan gerakan penaklukan di daratan Sulawesi Selatan dan Barat, baik yang besar, maupun yang kecil, melalui diplomasi damai dan paksaan. Selanjutnya, penguasa Gowa-Tallo secara berkesinambungan memperluas kuasanya hingga menyeberang ke pulau-pulau terutama di kawasan Timur Indonesia melalui diplomasi dan perang. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, Gowa-Tallo menandai era baru Makassar menjadi penguasa dunia maritim Asia Tenggara dalam urusan pelabuhan dan perdagangan yang menggantikan Melaka (Abdul Rahman: 2013).

Keberadaan benteng-benteng Makassar menjadi penanda wujudnya monarki Gowa-Tallo yang merangkai infrastruktur ekonomi dan politik yang mulai dirintis pada abad ke-16, serta merta diikuti strategi mempertahankannya dari kemungkinan-kemungkinan terburuk. Itulah sebabnya Karaeng Tumaparrisir' Kallonna serta pengikutnya terutama Tunipallangga (1548-1566), mengagendakan program konstruksi ulang benteng-benteng agar lebih kokoh serta lebih fungsional. Pada saat yang sama, Tunipallangga kemudian melanjutkan penaklukan dengan jalan mengokupasi wilayah-wilayah utara Sulawesi Selatan yang pada umumnya berlatar etnik Bugis, Mandar dan Toraja. Di samping bermotif politik, salah satu hal terpenting ialah perluasan penguasaan wilayah pertanian dan komoditi alam yang vital lain dalam rangka penguatan aktivitas perdagangan dan pelayaran di Sombaopu.

Naskah kode rol 30/16 h. 96-99 (ANRI) secara terperinci mencatat nama toponimi-toponimi kerajaan yang berhasil direbut

Karaeng Tumaparrisi' Kallonna dan mengonversinya menjadi wilayah taklukan Gowa. Nama-nama toponimi taklukan tersebut adalah Garessi', Katingang, Parigi, Siang, Sidenre Manai', Lembanga, Bulukumba, Silaja (Selayar), Panaikang, Madello, Céppaga, Maru' dan Polombangkeng. Kerajaan-kerajaan taklukan Tumaparrisi' Kallonna itu pada umumnya dikenal sebagai kerajaan-kerajaan yang secara sosial-geografis berlatar belakang etnik Makassar. Pada naskah yang sama tercatat nama-nama toponimi kerajaan yang ditaklukkan oleh Tunipallangga, yaitu: Bajéng, Léngkésé', Pasopalu, Lamuru, Soppéng, Cé(n)rana, Salomékkko, Cina, Kenynyi, Pattuku, Kalubibi, Raja, Lamatti, Samagi, Cé(n)rana, Béngo, Cempa, Sidénréng, Otting, Bulu Cénrana, Wajo, Sawitto, Suppa', Léтта, Duri, Pannaikang, seluruh lili Suppa', Bacukiki, Bulukumpa, Ujungloé, Mengkoka, Palaongi, Gattareng, Wéro, Silaja, Baraé, dan Riwawo Bulué. Tunipallangga dicatat juga sebagai raja Gowa yang paling banyak menaklukkan negeri-negeri kerajaan di daratan Sulawesi Selatan melalui perang.

Disebutkan pula bahwa Tunipallangga sebagai aristokrat Gowa yang memberlakukan kebijakan menawan dan memboyong raja-raja dan rakyat taklukannya ke Makassar untuk menjalankan kerja paksa. Hingga tahun 1615 menurut kesaksian seorang Inggris bernama Cockayne (dalam Reid, 1981:11) mengatakan, terdapat mobilisasi besar-besaran tenaga kerja untuk membuat batu merah yang akan digunakan untuk membangun istana pusat, terutama istana Gowa dan Tallo yang sudah berada di dalam benteng. Disebutkan juga Tunipallangga sebagai raja yang mula menerapkan perjanjian dengan negeri taklukannya dengan semboyan, "Saya bertitah, kalian mengiyakan", yang bermakna sebagai otoritas kuasa raja Gowa terhadap raja-raja taklukan.

Raja Gowa Tunipallangga melakukan banyak perubahan dalam tubuh kerajaan termasuk sebagai pihak yang menggagas pengorganisasian pekerjaan secara profesional. Tunipallangga menata setiap pekerjaan dengan cara melantik *Jannang* (kepala) terhadap setiap pekerjaan sesuai keahlian seseorang yang diangkat sebagai pejabatnya. Tersebutlah pengangkatan beberapa jurnal, umpamanya *Jannang Pandai Bessi*, *Jannang Pandai Emas*, *Jannang Arsitek Rumah*, *Jannang Ahli Perahu*, *Jannang Penombak*, *Jannang Ahli Senjata tiup*, *Jannang Penembak*, *Jannang Tukang Gulinra*, *Jannang Pengukir*, dan *Jannang* (kepala) *Pembuat Tali*. Tunipallangga pula yang disebut sebagai raja Gowa yang mula mendirikan kesyahbandaran Sombaopu dengan pejabat yang pertama bernama Karaeng Mangewai. Pada saat yang sama, Karaeng Tunipallangga sekaligus menggagas pendirian jabatan *Tomailalang* jabatan yang setara menteri dalam negeri dengan pejabat pertamanya bernama Daéng Pamatté.

Satu hal lagi yang penting dicatat dari kebijakan Tunipallangga adalah memberlakukan kebijakan baik hati terhadap pedagang imigran di Makassar. Tunipallangga menerima peniaga-peniaga luar terutama orang Melayu seperti Minangkabau, Patani, Melaka, Johor, dan Pahang, sekaligus memfasilitasinya dengan tanah perkampungan di Mangallekana menjadi pemukiman khusus pedagang pendatang imigran tersebut.

"(.. h. 99) Makkedai Anakoda Bonang ri Karaénta Tunipallangga: "Eppa'i rupanna uwéllau-llau ridi'". Makkedai Karaénggé: "Agana kuwaé muillau?" Makkedai Anakoda Bonang: "Uwillau-llai tenri uttamaiyyé ri laleng sappommeng, tenriénrekiyé bolammeng, tenri gau'

bawangngé, narékko engka anammeng tenri salosoi ko engka appasalammeng/ Nakadoiwi Karaéngngé/ Makkedani Karaéngngé: "Toddo'ku' kennéng posso' upaddemmé, matane' upalésso', allaikko pasi' padakku' tau, naékiya teppaunoko ritanaku' narékko tekkuissengngi"/ Makkeda toi Karaéngngé: "Siagai ...

(h.99) "rupanna muparilalengngada?" Makkedai Anakoda Bonang: "Sininna Mallipa', Pakkambangngé, kuwaé Pataniyaé, Cé(m)paé, Marakaboé, Jasoroé, Paayangngé/

terjemahan:

"(h. 99) ... Anakoda Bonang berucap kepada Karaéng Tunipallangga: "Empat perkara yang kami minta kepada Tuan". Karaéng berkata: "Apa gerangan yang engkau minta?"

Anakoda Bonang berkata lagi: "Aku mohon tidak diterobos pagar kami, rumah kami tidak digeledah, kami tidak diperlakukan semena-mena. Jika ada di antara kami berbuat salah, maka tidak serta-merta kami tidak disangkut-pautkan." Karaéng menyetujui permintaan itu. Berkatalah Karaéng: "Ketetapanku ini adalah kekal selamanya, kecuali jika berat, maka akan kuturunkan beban. Kalian menempati tanah khusus, namun jangan membunuh tanpa sepengetahuan Saya". Bertanya lagi sang Karaéng: "Berapa (h.99) kelompok yang ikut perjanjian ini?" Berkatalah Anakoda Bonang: "Semua yang bersarung dan yang berjubah, mencakup orang Patani, Campa (Kamboja), Minangkabau (Marakabo), Johor (Jasoro), dan Pahang (Paayang). ..." (sumber: ms 30/16)

Tunipallangga pun memberikan hak bermukim dan jaminan keamanan diri dan harta benda orang-orang Melayu sehingga secara hukum kehidupan mereka dapat tenteram di atas tanah Makassar. Adapun maksud kebaikan hati Tunipallangga

terhadap penjaga Melayu dan Jawa itu adalah agar para pedagang-pedagang memberikan sokongan dalam aktivitas perdagangan di Sombaopu.

Bermula abad ke-16 kemajuan yang diraih oleh Gowa serta-merta diikuti rancangan untuk memelihara keamanan wilayah dari serangan musuh yang boleh saja setiap saat tiba-tiba muncul. Itulah sebabnya pembesar kerajaan Gowa-Tallo kemudian membangun benteng-benteng sebagai basis pertahanan disepanjang pesisir barat termasuk keberadaan Benteng Ujungpandang sebagai kekuatan pertahanan maritim dengan kawalan dinding-dinding benteng yang kokoh. Menurut Bulbeck (ed. Robinson: 2005:113), benteng-benteng yang dibangun itu sebanyak 14 buah dengan tata letak yang memanjang dengan radius 10 kilometer. Benteng Ujungpandang termasuk dalam kelompok ini, namun kuasa Gowa-Tallo memposisikan Sombaopu sebagai pusat aktivitas, sebagai kota dan pelabuhan dagang. Dapat dikatakan bahwa setelah perang Makassar, situasi politik yang dikendalikan oleh VOC kemudian menjadi titik balik yang sangat menentukan masa depan Benteng Ujungpandang, baik dari segi kedudukannya, maupun fungsinya.

B. Istilah 'Benteng' Dalam Bahasa Makassar dan Bugis

Salah satu sumber yang patut pula dirujuk untuk menelusuri makna 'benteng' dalam bahasa Makassar adalah Kamus i yang disusun oleh Matthes (1859). Matthes mendaftarkan kosa kata Makassar yang bermakna 'benteng' yaitu '*bata*'. Perkataan *bata* dalam logat Makassar sesuai kaidah bahasa formal sehari-hari yang selalu diikuti fonem 'ya' sebagai enklitik. Kata

dasar 'bata' yang dibubuhi enklitik 'ya' (bata+ya) kemudian membentuk kata *bataya*. Kata *bataya* dalam kamus memiliki arti 'fort' dalam bahasa Belanda, atau kata 'benteng' dalam bahasa Indonesia.

Rupanya kata 'bata' dalam bahasa Makassar, digunakan juga secara utuh dalam kosakata bahasa Bugis dengan sedikit perbedaan pada enklitik yang menggunakan 'é' menjadi 'bataé'. Baik *bataya* (mks) dan *bataé* (bgs) kedua-duanya merujuk pada arti yang sama, yaitu 'benteng'. Diduga kuat kalau kosa kata 'bata' dalam Bugis merupakan akomodasi dari bahasa Makassar. Kata *bata* atau *bataya* (mks) atau *batae* (bgs), dalam bahasa Belanda sebagaimana yang didaftar oleh Matthes merujuk pada arti 'fort'. Kata *fort* di dalam KBBI hanya memiliki satu arti yaitu 'benteng' saja. Adapun defenisi kata benteng menurut KBBI yaitu 'bangunan tempat berlindung atau bertahan dari serangan musuh'; sebagai contoh: 'hanya yang sempat berlindung di dalam bentenglah yang selamat'.

Selanjutnya, Matthes dalam *Makassaarsch–Hollandsch* memberikan arti yang lain pada kata 'bata' dalam bahasa Makassar, merujuk pada padanan kata '*gebakken steen*' dalam bahasa Belanda yang berarti 'batu panggang'. Konteks kata '*gebakken steen*' merujuk pada benda yang disebut batu bata atau batu merah. Penggunaan '*gebakken steen*' oleh karena aktivitas masyarakat Makassar memproduksi batu bata itu dilakukan dengan proses pembakaran atau pemanggang. Dalam tradisi Makassar, penggunaan kata '*gebakken steen*' atau 'batu panggang' merujuk konteks benda 'batu merah' yang digunakan sebagai bahan dasar konstruksi benteng-benteng Makassar. Batu merah atau 'bata' diproduksi dengan cara membakar atau

memanggangnya pada tungku-tungku pembakaran. Merujuk konteks penamaan benteng dalam bahasa Makassar tersebut, maka meyakinkan kita kalau kosakata 'bata' atau 'bataya' adalah kosakata asli Makassar yang dipastikan lahir pada abad ke-16 terkait masa pendirian benteng-benteng Makassar yang menggunakan bahan batu merah atau batu panggang.

Bahasa Bugis memiliki empat kosakata yang merujuk objek atau makna 'benteng' yaitu: *bata*, *palla'*, *kotaé*, dan *benteng*². Keempat kosakata itu merujuk pada arti benteng yang penggunaannya digunakan secara berganti-ganti dalam naskah lontara. Hal yang sama pada Benteng Ujungpandang sebagai objek yang paling utama dirujuk dalam lontara menyebutkan dengan 'bata' atau dengan pembubuhan fonem enklitik /é/ pada akhir kata *bata+é* yang membentuk kata *bataé*. Kata *bataé* dalam bahasa Bugis memiliki dua arti yaitu 'batu bata' dan 'benteng' itu sendiri. Seperti yang diungkapkan di atas, kata /bata/ dalam bahasa Bugis ini lebih terkesan sebagai akomodasi atau pinjaman dari bahasa Makassar dengan konteks dan arti yang sama dengan kata *bataya* dalam bahasa Makassar dialek Lakiung.

Selain kata 'bataé' terdapat juga satu kosakata dalam bahasa Bugis yang secara khusus merujuk pada arti sebagai 'benteng' yaitu kata 'palla'. Kata *palla'* inilah yang dipastikan sebagai kosakata paling dominan digunakan di dalam catatan

²Empat kosa kata bahasa Bugis itu tertuang di dalam sumber-sumber lokal yaitu lontara catatan harian Raja Bone La Patau (1696-1714) dan Catatan Harian La Tenritappu (1775-1812). Kata 'bata' memiliki arti primer yaitu batu panggang atau batu bakar yang lazimnya berwarna merah sehingga biasa disebut batu merah (batu cella). Selain itu, empat kata itu dijumpai pula pada sumber lontara attoriolong atau kronik, baik kronik Bone, maupun Gowa.

harian raja-raja Bone, baik La Patau (1696-1714), maupun La Tenritappu (1775-1812). Jika menengok pemakaian kata '*palla*' di dalam Kamus Bahasa Bugis, maka dijumpai arti primernya yaitu merujuk pada dua arti yaitu 'pagar' dan 'kebun'. Kata '*palla*' lebih terkesan sebagai kosa purba Bugis yang kemudian mengalami perluasan makna sehingga merujuk pula pada penamaan bangunan benteng. Kata *palla'* misalnya digunakan La Tenritappu dengan menulis pada catatan hariannya:

"1778 9 Pebruari kamis.

Uttama' ri palla'e silaong to Bone passalama'i Tomarajae 1 jemma mukka purana mattaumbu."

Terjemahan:

1778 9 Pebruari kamis.

(Aku masuk ke benteng bersama orang Bone memberi ucapan selamat kepada Tomarajae 1 orang budak setelah ia bertahun baru)."

Di dalam catatan harian La Tenritappu dari tahun 1775 sampai 1790 menggunakan kata '*palla*' untuk konteks bangunan benteng secara umum, namun konteks yang selalu menjadi objek yang dikisahkan adalah Benteng Ujungpandang. Diprediksi kuat bahwa asal-usul penamaan benteng dengan kata *palla'* dalam bahasa Bugis didasari oleh struktur dindingnya yang menggunakan batu. Ini terkait dengan fungsi utama benteng yaitu sebagai pagar yang dalam bahasa Bugis disebut dengan kata *palla'*. Itulah sebabnya sehingga orang Bugis lazimnya menyebut Benteng Ujungpandang dengan nama *palla'é* dengan konteks bangunan atau rumah yang berpagar yang terbuat dari susunan batu-batu atau tiang-tiang kayu yang ditancapkan. Kosakata *palla'*

atau *palla'é* yang terdapat pada Catatan Harian La Tanritappu itu secara jelas digunakan sebagai kata utama untuk menyebut Benteng Ujungpandang yang pada masa kuasanya sebagai raja Bone disebutnya sebagai tempat tinggal *Goronadoro* (Gubernur) Belanda. Selain kata *palla'é*, kosakata Bugis juga menggunakan kata yang berbeda, yaitu kata *benteng* dan *kotae*. Dua kata ini secara jelas merupakan kata Bugis yang terakomodasi dari bahasa Melayu yang artinya merujuk konteks Benteng Ujungpandang yang sudah menjadi pusat kota Ujungpandang pada abad ke-18.

C. Benteng Dalam Sumber Lokal

Tanpa mengenyampingkan sumber modern sumber-sumber pribumi Sulawesi Selatan disebut lontara baik yang ditulis dalam bahasa Makassar, maupun dalam bahasa Bugis dapat membantu kita memperoleh data mengenai keberadaan Benteng Ujungpandang. Informasi yang dimaksudkan itu tidak lain adalah konteks sosial-politik yang melatari pembangunannya, kebijakan pemfungsian sebelum dan sesudah Perang Makassar 1666-1667. Sumber-sumber pribumi yang dapat digunakan antara lain: 1) Catatan Harian Raja Gowa-Tallo; 2) Catatan Harian Raja-raja Bone; 3) Lontara *Patturioloang* Gowa; dan 4) Lontara *Attoriolong* Bone. Muatan informasi dari manuskrip lokal Sulawesi Selatan dapat memberi penjelasan kepada kita mengenai jejak historis Benteng Ujungpandang yang sampai hari ini. Bahkan tercatat pula bahwa Benteng Ujungpandang sebagai benteng yang paling terawat di Asia Tenggara. Alasan penting penggunaan naskah lontara sebagai sumber dalam tulisan ini tiada lain adalah untuk menemukan narasi-narasi gaya lokal Sulawesi Selatan, yang tentu

saja lahir dari cara pandang (*point of view*) Bugis-Makassar, ditulis oleh tangannya sendiri, dan dalam aksara lokalnya.

Perlu dikemukakan bahwa korpus lontara yang menjadi sumber data pada tulisan ini, dilakukan dengan menggunakan metode filologi. Pelbagai lembaran lontara yang menjadi sumber dibuka kemudian dikategorikan teksnya dengan menyelaraskan informasi yang diperlukan. Teks-teks yang dijumpai dalam teks lontara yang menjadi sumber menunjukkan peristiwa dan tokohnya dalam bentangan masa yang panjang, yakni sekitar tiga ratus tahun yang terhitung sejak pendirian Benteng Ujungpandang pada XVI hingga penggunaannya pada XVIII. Terkait data yang tersedia itu, tulisan ini kemudian mendesain isu Benteng Ujungpandang yang berkisar pada latar belakang keberadaannya, fungsinya, dan dinamika sosial-politik yang terkait.

Gaya teks lontara menceritakan sebuah objeknya yang lebih rinci terutama pada naskah diary, namun pada sisi yang sama menjadi keunggulan yang perlu diapresiasi seperti substansi teks yang menyajikan peristiwa dan tokoh secara polos atau apa adanya. Gaya penceritaan Bugis dan Makassar inilah yang disebutkan lebih khas dan berbeda dengan gaya naratif Jawa dan Melayu yang cenderung alegoris plus hiperbola. Gaya penyajian teks Bugis dan Makassar itu telah dicermati para sarjana Eropa yang kemudian memberikan impresinya. Kalangan Eropa menyebutkan kandungan naskah lontara sebagai teks yang disusun berdasarkan cerita dan catatan sejarah dalam masa yang panjang, menggunakan huruf lontara dan bahasa lokal. Baik lontara Bugis, maupun lontara Makassar seperti penilaian Cense (1972), menurutnya selain menarik bagi dirinya, lontara juga menurutnya memiliki nilai yang tinggi dan sangat penting sebagai

sumber data sejarah lokal Sulawesi Selatan. Menurutnya, jika membandingkan dengan apa yang tercatat sebagai cerita-cerita sejarah di daerah Indonesia yang lain, maka terlihat betapa ringkas dan realistis orang Bugis-Makassar mencatat fakta-fakta kehidupannya yang dituangkan di atas lontara.

Penilaian yang sama juga dikemukakan R.A. Kern dengan mengatakan, naskah Bugis dan Makassar baginya memiliki kualitas tinggi. Itu memberi kesan bahwa orang Sulawesi Selatan mencatat perkara-perkara yang berlaku secara sederhana dan polos. Tentu saja apa yang dikemukakan oleh Cense (1972) dan Kern (dalam Cense, 1972) tersebut, menjadi alasan bagi orang-orang Eropa lainnya untuk menjadikan naskah-naskah lontara sebagai bahan penting dalam pembuatan catatan serta penulisan sejarah lokal kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar.

Patutlah dicatat nama-nama sarjana Eropa yang telah mengarahkan perhatiannya terhadap kajian naskah lontara, seperti Crawford (1820) dalam tulisannya *History of the Indian Archipelago*; Roelof Blok dengan tulisannya ikhtisar Sejarah yang bersumber pula dari naskah-naskah lontara; S.A. Buddungh (1843) dengan tulisan *Het Nederlandsche Gouvernement van Makasser op het eiland Celebes* yang dipublikasi dalam *Tidjschrift v.Ned. Indië*, V, Jilid I. Tidak dapat dilupa dan patut dicatat yaitu J.A. Bakkers yang telah menulis Sejarah Keradjaan Pindjaman Bone yang menggunakan sumber naskah lontara Attoriolong. Yang terakhir, nama yang tidak boleh dilupa karena kepakaran dalam sejarah lokal Sulawesi Selatan adalah Campbell Macknight, dengan karya terkininya selain beberapa karya terdahulunya berjudul *The Bugis Chronicle of Bone* (2020). Dalam tulisannya, Macknight banyak menggunakan naskah-naskah lontara (baca

manuskrip) dengan menyandingkan data-data kolonial dalam karya-karyanya yang telah terpublikasi dalam bentuk jurnal, majalah, dan buku-buku.

Benteng Ujungpandang dalam usia lima abad adalah satu-satunya benteng yang berdiri megah dan terawat hingga abad XXI ini. Apa yang diungkap dari sumber-sumber lokal, dalam hal ini naskah lontara, merekam peristiwa yang meyakinkan kalau Benteng Ujungpandang justru baru meraih fungsinya secara signifikan setelah perang Makassar 1666-1667. Ini adalah fakta yang sekaligus membedakannya dengan Benteng Sombaopu dan benteng-benteng lainnya justru terbengkalai dan ditinggalkan setelah perang Makassar. Hal yang sama pula benteng-benteng lainnya seperti Kale Gowa, Benteng Tallo, Benteng Sanrobone, Benteng Ujungpandang, Benteng Barombong, Benteng Ujungtana, Benteng Mariso, Benteng Bontorannu, dan Benteng Bayoa yang pada umumnya mengalami nasibnya yang sunyi dan hanya tinggal cerita setelah usainya perang Makassar.

Secara khusus, berita-berita yang berkenaan dengan Benteng Ujungpandang beserta aneka peristiwa yang terkait dalam kurun 1667 hingga 1790 pada catatan lokal (lontara) Bugis dan Makassar, paling tidak dapat dijumpai pada dua korpus. Dua korpus itu adalah naskah-naskah catatan harian raja-raja dan kronik-kronik. Terkait dengan sumber lokal itu, maka pertanyaan yang mengantar perbincangan artikel ini adalah: "Apa dan bagaimana Benteng Ujungpandang ternarasikan di dalam lontara dalam kurun satu abad setelah Perang Makassar"?

D. Gagasan Pendirian Benteng-Benteng Makassar

Seorang pengelana Spanyol bernama Navaratte mengunjungi Makassar pada tahun 1657 menuturkan kesaksiannya, bahwa diperkirakan tahun 1580-an Makassar bukanlah negeri terpandang, bahkan sama sekali tidak diperhitungkan. Akan tetapi, kawasan Makassar menurutnya, sudah berkembang dengan pesatnya. Perkembangan itu membuat para biarawan menetap di sana sambil menunggu datangnya kapal-kapal dari Manila, Goa (India), Macau, Inggris, dan Belanda. Itulah sebabnya, kemeriahan pelabuhan Makassar yang disaksikan kemudian oleh Navarette ketika berada di Makassar menyaksikan beragam komoditas berharga dari seluruh penjuru Nusantara tersedia di pasar-pasar dan pelabuhan-pelabuhan di situ. Tampaknya gerakan pembangunan Sombaopu yang digagas oleh Tumaparrisi' Kallonna dan diteruskan oleh Tunipallangga dan membuahkan hasilnya dengan gemilang pada pertengahan abad ke-17 seperti kesaksian Navarette tersebut.

Beberapa sumber meyakinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa, Raja Gowa IX bernama Daeng Matanre Karaeng Tumaparrisi' Kallonna sebagai tokoh terpenting yang telah menggagas pembangunan benteng-benteng Makassar. Hal ini dikuatkan oleh narasi lontara kode 30/16 (ANRI) yang mengungkapkan pembangunan sejumlah benteng Makassar yang disebutkan mulai dirintis olehnya sebagai Raja Gowa pada pertengahan abad ke-16. Benteng-benteng yang terbangun di pesisir pantai Barat wilayah Makassar menjadi bangunan monumental buah tangan yang diwariskan Karaeng Tumaparrisi' Kallonna dan Tunipallangga.

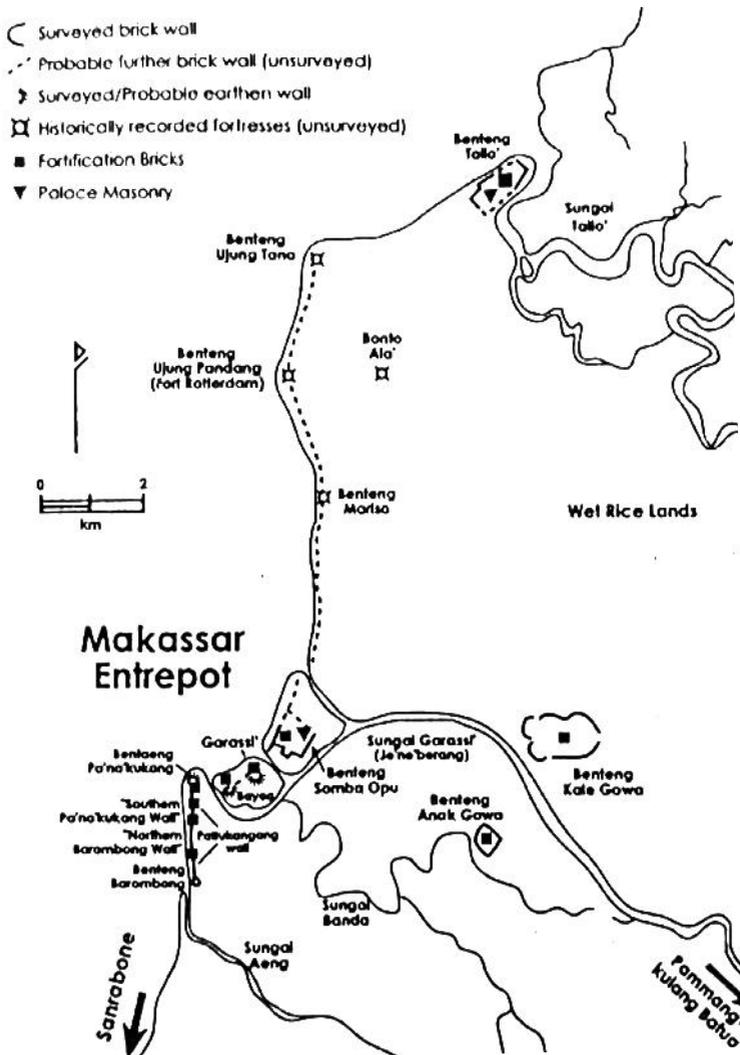
Bulbeck (2013) telah meneliti benteng dan membuat sketsa romantisasi benteng-benteng pertahanan pantai Makassar, ia mengatakan sudah pasti Benteng Ujungpandang sama dengan benteng-benteng lainnya yang didirikan oleh Tumaparrisi' Kallonna. Dipastikannya pula bahwa, pada awalnya bahan-bahan yang digunakan membangun benteng-benteng itu adalah dari tanah liat. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang menyentuh Makassar, maka sekitar tiga tahun ke depan tepatnya tahun 1548 Tunipallangga yang telah dilantik menjadi Raja Gowa X oleh Batesalampang, serta-merta ia melakukan konstruksi ulang dengan menerapkan teknologi baru terhadap dinding benteng yang didesain lebih kokoh dengan susunan batu bata yang menggantikan tanah liat.

Penggantian bahan dinding benteng-benteng dengan batu bata diaplikasikan oleh Tunipallangga terutama pada dua benteng utama yaitu Kalegowa dan Sombaopu. Kronik Gowa dalam bahasa Bugis menguatkan alasan itu sebagaimana yang terbaca pada petikan teks lontara sebagai berikut:

" (Tunipallangga)...Yitopa unge' manciji éwangeng battowa ri Bénténg Lompoé/ Yito unge' ma(ng)kasa unge' ppinru ubba', manguki' ulaweng, mabbiru' bata/ Yitonaé arung bunge' bbatai Gowa silaong Somba Opu.../ " (ms 30/16, ANRI).

"(Tunipallangga) yang mula memasang senjata berat di dalam benteng utama/ Pada masa beliau Makassar mula membuat bahan peledak/ menulis surat emas/ membuat batu bata/ dia pula yang mula membuat bata (dinding) benteng Sombaopu/ ..."

Apa yang tertulis di dalam lontara kode ms 30/16 di atas memuat narasi yang sejalan dengan ulasan Sagimun M.D. (1975)

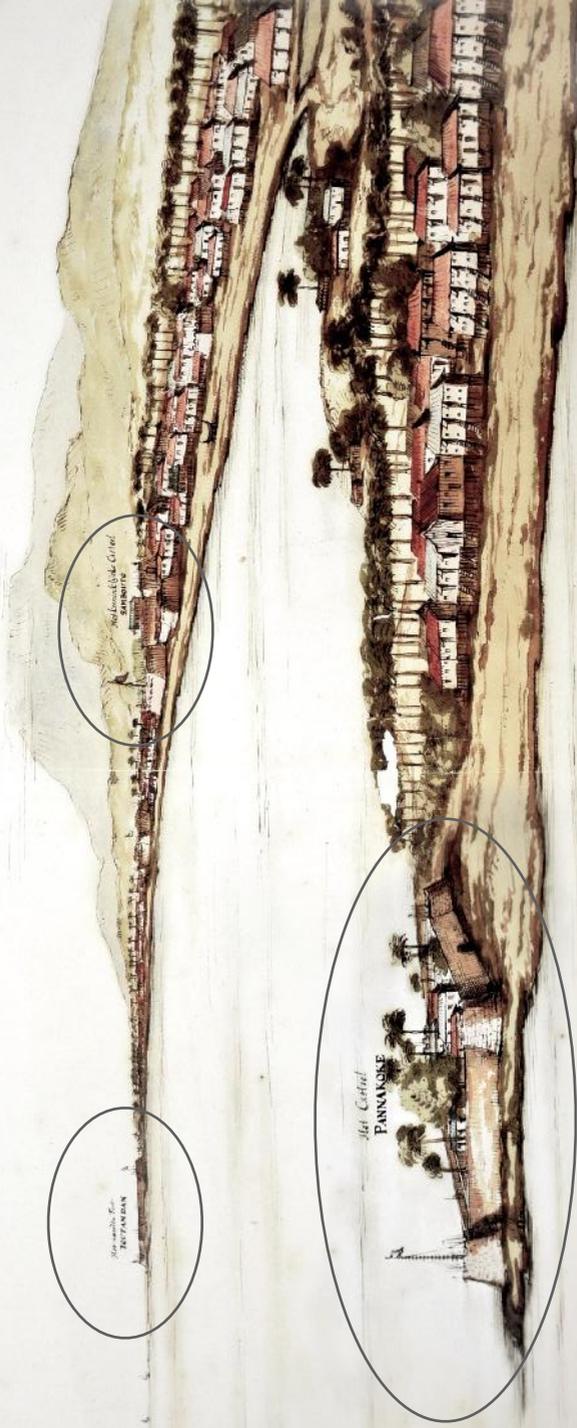


Tata Letak Benteng-Benteng Makassar tahun 1667
 (sumber: David Bulbeck 2013:115)

MACASSAR



1811



Benteng Pana'kukang, Benteng Somba Opu dan Benteng Jupandang
(sumber: nationaalarchief.nl)

yang menyatakan bahwa, 'Tunipallangga telah mengusahakan pembuatan batu bata untuk keperluan bangunan dinding Benteng Kale Gowa dan Benteng Sombaopu'. Memang disebutkan kalau dua benteng ini didirikan oleh Tumaparrisi Kallonna, namun dindingnya masih terbuat dari tanah liat biasa. Pada masa Tunipallangga, Benteng Kalegowa dan Sombaopu kemudian mengalami peningkatan taraf fungsi daripada sekadar benteng pertahanan menjadi istana Gowa dengan segala kegiatan elit politik di dalamnya.

Selain difungsikan sebagai benteng hunian, Benteng Sombaopu lebih istimewa lagi menjadi tempat berdirinya istana baru Gowa yang disebut *Maccini Sombala*, sehingga menjadi benteng tervital dan terlengkap dari segi fungsinya pada abad ke-16. Benteng Sombaopu menjadi ibukota baru negeri Gowa, sekaligus sebagai pusat perdagangan, pelabuhan dan pelayaran. Itulah sebabnya mengapa Benteng Kalegowa yang memang menjadi istana awal dan tetap dipertahankan sebahagian fungsinya. Tunipallangga fokus kebijakan pertamanya yakni melakukan restorasi benteng-benteng Makassar pertahanan yang sekian banyak jumlahnya dengan formasi berbaris di sepanjang pantai.

Secara tersirat, Karaeng Tumaparrisi Kallonna terkesan ia sudah membaca nasib yang menimpa Melaka serta dampak sosial, ekonomi dan politik akibat dilumpuhkan oleh Portugis 1511. Penaklukan kerajaan pribumi Melaka oleh Portugis (Eropa) menjadi lonceng peringatan kerajaan-kerajaan Gowa-Tallo yang mengagendakan mengambil alih peranan Melaka di kawasan timur Nusantara sebagai pusat perdagangan.

Menurut Pelras (2005), fenomena kejatuhan Melaka, agaknya secara sosial-politik orang Makassar dan Bugis paling siap mengambil alih perubahan regional itu. Hal itu didasarkan pada ciri spesifik modernitas yaitu konsep pikiran terbuka terhadap dunia luar yang mengendap dalam batin orang Bugis dan Makassar. Singkatnya, masyarakat Sulawesi Selatan yang berpikiran terbuka itu, ia pun diikuti dengan kemampuan beradaptasi, dan mereka berpikir ekonomis yang cepat melihat peluang-peluang perdagangan. Ekspresi ciri modernitas ini telah hidup sepanjang sejarah mereka sehingga menjadi modal terutama bagi Gowa-Tallo pada masa itu menafsirkan dan merebut peluang ekonomi. Tradisi ciri modernitas itu telah terbentuk pada abad ke-16, kemudian memudahkan wujudnya Sombaopu sebagai bandar pelabuhan regional yang terpenting di Asia Tenggara sejak paruh kedua abad ke-17. Dalam kontes itulah Karaeng Tumaparrisi' Kallonna memandang benteng-benteng pertahanan menjadi vital bagi keamanan negeri dari gempuran luar. Itulah sebabnya Tumaparrisi' Kallonna menjalankan agenda pembangunan benteng-benteng di pesisir lautan sebagai infrastruktur pertahanan maritim.

Pembaharuan konstruksi benteng-benteng Makassar yang dijalankan Tunipallangga yakni menaikkan ukuran tinggi dindingnya sekaligus mengganti bahannya dari tanah liat menjadi batu bata. Fakta ini secara jelas menandai suatu fase lakonik sejarah Gowa yang mendasari wujudnya benteng-benteng monumental di Makassar. Konstruksi Benteng ujungpandang itu kemudian menjadi bagian dari kebijakan restorasi Tunipallangga yang konon konsepnya mengadopsi gaya benteng Eropa. Tunipallangga mengonstruksi benteng yang memungkinkan benteng-benteng Makassar dapat bertahan dari serangan dan



Dinding sisi barat Benteng Somba Opu setelah dipugar
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

gempuran senjata lawan. Performa benteng berdinding batu bata dari dengan ketebalan antara 2,5 sampai 4 meter memiliki daya tahan yang kuat terhadap hantaman peluru meriam. Bulbeck (2005) mengungkapkan, meskipun musuh sudah menggunakan senjata yang canggih di masa itu, seperti senjata yang menggunakan bubuk mesiu dengan daya ledak kuat, namun dipastikan tidak dapat dengan mudah menembus dinding benteng yang memiliki ketebalan antara antara 2,5 sampai 4 meter itu.

Aristokrat Gowa-Tallo, Karaeng Tunipallangga, telah mengazaskan Sombaopu sebagai bandar perdagangan dengan tidak melupakan bagaimana upaya dan strategi membuat infrastruktur pertahanan negeri yang lebih kokoh. Boleh jadi, ide Tunipallangga itu diduga membaca nasib tragis yang menimpa Melaka yang memang menjadi incaran oleh kekuatan luar untuk menguasainya. Fakta sejarah yang terbaca pada Melaka kemudian menjadi memori peringatan bagi Gowa-Tallo yang mungkin saja suatu saat, diduga atau tidak diduga akan menemui nasib serupa. Boleh saja suatu ketika Gowa-Tallo mendapat gempuran dari korporasi Eropa, terutama VOC, yang memang terus-menerus berhasrat merebut dominasi perdagangan rempah-rempah Nusantara. VOC tidak dapat dikecualikan sebagai pihak yang



Struktur dinding Benteng Somba Opu
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

selalu mengintai kelengahan Gowa-Tallo untuk melumpukannya sekaligus mengambil-alih peran Gowa pada dunia maritim. Sementara itu, kejutan serangan tidak menutup kemungkinannya justru muncul dari kerajaan pribumi Makassar dan Bugis sendiri yang puluhan jumlahnya, pada suatu ketika mungkin saja akan melakukan tindakan balas setelah mereka ditaklukkan oleh Gowa satu per satu melalui perang.

Sebagai ujung perbincangan bagian ini, perlu dikemukakan mengenai periode pembangunan benteng-benteng khususnya Benteng Ujungpandang, tidak lain adalah dibuat sezaman dengan benteng Sombaopu, Kalegowa, Tallo', dan Sanrabone. Kemungkinan masih ada satu atau dua lagi benteng yang lainnya yang menjadi hasil buah tangan Tumaparrisi' Kallonna yang memerintah pada paruh kedua abad ke-16. Adapun benteng-benteng yang lainnya baru dilakukan pada fase kedua abad ke-16 masa Tunipallangga seperti Benteng Pana'kukang

serta beberapa benteng lainnya yang dibuat pada abad ke-17 disebutkan fungsinya hanya sebagai basis bantuan pertahanan saja khususnya pada zona Pana'kukang dan sepanjang sungai Garassi (van der Chijs dalam Bulbek 2005).

E. Dari Ujungpandang ke Rotterdam, Kembali ke Ujungpandang

Domingo Navarette, seorang pengelana Spanyol, menuturkan selang pandang pengalamannya ketika ia melakukan kunjungan di Ujungpandang pada tahun 1657-1658, mengatakan, 'pelabuhan Makassar sudah terkenal dan menjadi pusat perdagangan. Ramai pelayar dari seantero Nusantara seperti Siam (Thailand), Kamboja, Inggris, Prancis, Denmark, Portugal, Belanda dan Spanyol berkunjung ke wilayah ini'. Navarette memperkirakan sekitar 3000 orang Portugis asal Melaka yang ditaklukkan oleh Belanda pada 1641 sudah menetap di Makassar. Navarette sebagai pencerita ulung lanjut mengungkapkan kesaksiannya dengan mengatakan bahwa, 'pasa masa itu, Kota Makassar, terutama di Sombaopu menjadi sebuah kekuatan politik, ekonomi, dan agama (dalam Miller 2011:25-26)'. Secara khusus, tidak luput menceritakan keindahan Kota yang disebutkan menjadi tempat berdirinya sebuah Benteng Ujungpandang. Suasananya dalam sekilas pengalamannya pada suatu sore hari, di mana Navarette seringkali berjalan kaki memutar kota sambil melemparkan pandangannya pada lingkungan sekelilingnya. Sebuah momen di sore hari ia deskripsikan manakala ia pulang menuju tempat menginapnya yang melewati taman-taman natural di tengah kota.



Taman kota dengan latar Benteng Ujungpandang. Sekitar tahun 1905
(sumber: universiteitleiden.nl)



“...Kami kembali ke rumah melewati barisan pohon palem yang terbaik dan terindah di dunia. Sinar matahari bahkan tidak bisa menembus dedaunannya. Panjang barisan pohon palem itu lebih dari 1 liga (kurang lebih 4 kilometer) walaupun kami tidak berjalan sejauh itu. Dengan alasan yang tepat, pengalaman ini benar-benar akan menjadi suatu kenangan manis di antara kami.” (dalam Miller, 2011:28)

Kata ‘palem’ yang disebut Navarette konteksnya merujuk sebuah pohon yang memesonakan dimata Navarette tidak lain adalah pohon lontar (mks = *tala*) salah satu jenis pohon yang banyak tumbuh di alam Sulawesi Selatan. Pada abad ke-17 pohon palem lontar ini banyak tumbuh di tengah-tengah kota Makassar, tidak terkecuali di seputar Benteng Ujungpandang. Suasana Ujungpandang pada masa kejayaan Sombaopu belum tumbuh menjadi kota penting dan ramai, namun pesona dan keindahannya sudah tercipta dan memberi kesan istimewa.

Kota Ujungpandang memasuki babak baru dengan meyakinkan menggantikan sejarah Sombaopu sebagai kota utama negeri Gowa setelah kejatuhan Sombaopu pada tahun 1667. Wilayah di sekitar Benteng Ujungpandang oleh kalangan VOC kemudian memberinya nama Belanda *Stad Vlaardingen*. *Stad Vlaardingen* kian hari kian ramai. Penduduk dari berbagai kalangan, terutama sekutu-sekutu Belanda, termasuk sekian banyak suku bangsa pribumi seperti Jawa, Melayu, Bugis, Buton, Ternate dan Makassar sendiri banyak hidup di kota ini. Kota Ujungpandang kemudian menjadi kota sekaligus pusat kekuasaan secara sosial, ekonomi, dan politik menggantikan peranan Sombaopu.

Perbincangan kembali pada tema perubahan nama Benteng Ujungpandang. Sumber-sumber lokal seperti kronik-

kronik dan catatan harian raja-raja, mengungkapkan bahwa pergantian kuasa di Makassar yang bermula dari kekalahan Gowa dalam Perang Makassar dari VOC dan Bone serta-merta membuat perubahan nama Benteng Ujungpandang menjadi Fort Rotterdam. Sejarah mencatat bahwa se usai Perjanjian Bungaya (*Bongaish Verdrag*) pada tanggal 18 Nopember 1667 Benteng Ujungpandang pun disebutkan berpindah tangan dari Gowa-Tallo kepada VOC.

Ketika orang Belanda mengambil dan menduduki Benteng Ujungpandang itu, serta-merta mereka menggantikan nama 'Benteng Ujungpandang' menjadi 'Fort Rotterdam'. Konon,



Parit sisi barat Benteng Ujungpandang tahun 1900
(sumber: universiteitleiden.nl)

alasan VOC memilih nama Fort Rotterdam sebagai nama baru benteng itu, dilakukan mengikuti selera pribadi Cornelis Speelman yang mengadopsi nama sebuah kota di Belanda bernama 'Rotterdam' yang tidak lain adalah tempat kelahirannya di tanah Eropa. Dalam berbagai sumber menyatakan bahwa, manakala Benteng Ujungpandang berpindah tangan kepada orang-orang Belanda dilakukannya perombakan secara besar-besaran termasuk penambahan fasilitas bangunan hunian dan tempat ibadah di dalam area benteng (Sagimun MD, 1975: 59-60).

Pergantian kuasa dan nama kemudian membentuk cerita panjang dan pemanfaatan bangunan Benteng Ujungpandang dari masa ke masa menjadi hunian kolonial. Hal yang berbeda dengan 13 buah benteng-benteng lainnya, termasuk Benteng Sombaopu, disebut-sebut semakin hari semakin sepi yang akhirnya ditinggalkan sama sekali. Namun, berbeda dengan Benteng Ujungpandang, justru mencatat sejarah barunya, memiliki kedudukan penting, serta meraih fungsi yang lebih lengkap. Jika pada awalnya hanya benteng pertahanan saja, maka ketika Perang Makassar usai Benteng Ujungpandang pun menuai fungsinya lebih kompleks dalam urusan politik, sosial, dan ekonomi.

Peralihan pertuanan Benteng Ujungpandang kepada VOC tertuang di dalam Perjanjian Bongaya (mks = *Cappaya ri Bungaya*) ditetapkan menjadi bagian dari beberapa objek vital yang harus diserahkan kepada Belanda. Pengambil alihan Benteng Ujungpandang itu menjadi alasan penting di balik agenda Kompeni agar mereka terus-menerus dapat berada di Makassar. Redaksi Perjanjian Bungaya pada pasal 11 dengan ketentuan bahwa, Benteng Ujung Pandang yang terletak di sebelah utara harus dikosongkan oleh pasukan-pasukan kerajaan Gowa dan

segera diserahkan kepada Kompeni Belanda (VOC) dalam keadaan baik-baik. Apa maksud VOC atas pasal ini, tidak lain mereka akan menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai bagi pasukan-pasukannya. Adapun perkampungan dan tanah di sekitar Benteng Ujungpandang juga merupakan objek yang harus pula diserahkan kepada VOC. Hal sama terhadap perkampungan-perkampungan yang berada di sekitar Benteng Ujungpandang yang dinamakan "Stad Vlaardingen" dimasukkan sebagai zona atau wilayah Kota Ujungpandang. Terdapat pula loji Kompeni Belanda yang didirikan oleh *Vespreet* beberapa tahun sebelum Perang Makassar. Setelah VOC mengambil alih Benteng Ujungpandang, loji itu kemudian dibangun kembali di tempat yang sama.

Pengambilalihan Benteng Ujungpandang oleh Belanda, menurut Bulbeck (20013:113), pada dasarnya tidak lain karena adanya keinginan Kompeni agar mereka dapat kekal berada di Makassar. Kepentingan yang dirancang oleh Kompeni ialah akan mengawasi secara permanen, penghancuran seluruh benteng Makassar yang lain yang masih berdiri di pantai, kecuali Benteng Sombaopu dipertahankan sebagai tempat tinggal Sultan Gowa. Perkembangan fungsi Benteng Ujungpandang itu secara jelas dilatari oleh kebijakan VOC yang membuat pilihan dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal atau pemukiman, perkantoran pemerintahan, pusat komando militer, perdagangan, dan sel tahanan dan segala urusan lainnya. Melankolisme Benteng Ujungpandang mulai terangkai bersama dengan ponggawa VOC bernama Laksamana *Speelman* yang baru saja memenangkan Perang Makassar bersama Pangeran Bone, Arung Palakka.

Bulbeck kemudian mengatakan, sebenarnya Arung Palakka dan Speelman tidak sedikit pun memperlihatkan keinginannya untuk menghancurkan sejumlah benteng-benteng Makassar, termasuk Sombaopu. Bahkan, pasukan Bugis dan Belanda meninggalkannya begitu saja pada tahun 1669. Pada perkembangannya kemudian gerakan pemberontakan sesekali muncul dan menjadikan benteng-benteng seperti Panakkukang dan Sombaopu sebagai basis pertahanan. Dampak kekacauan yang timbul akibat keberadaan benteng itu sehingga VOC melakukan proyek penghancuran benteng pun menjadi agenda Speelman dan Arung Palakka.

Benteng Ujungpandang menjadi pilihan hunian paling strategis kemudian lingkungan sekitarnya menjadi lokasi vital sebagai kota baru bernama Ujungpandang menggantikan kedudukan Benteng Sombaopu. Benteng Ujungpandang seakan-akan kemudian mongonversi fungsi, bahkan simbolik, Benteng Sombaopu sebagai lingkungan ter vital menjadi ibu kota baru, pusat perdagangan, pelabuhan dan pelayaran. Fenomena sejarah menandai era baru Benteng Ujungpandang sekaligus membedakannya dengan Benteng Sombaopu serta benteng-benteng lainnya yang justru terbengkalai dan kehilangan fungsinya akibat Perang Makassar.

Setelah perjanjian Bungaya ditandatangani Speelman tidak hilang keseimbangan dalam memikirkan dan melakukan apa yang mesti diperbuatnya. Pada situasi yang sangat mendesak untuk merancang agenda dan tindakan strategis demi stabilitas kuasanya di Makassar untuk merancang semua gagasannya. Pada saat yang sama Benteng Ujungpandang kemudian menjadi tempat tinggal Speelman sekaligus menjadi kantornya. Benteng

pun disiap-siagakan dengan perbaikan sana sini yang dilengkapi dengan persenjataan memadai. Meriam-meriam VOC yang telah melaksanakan tugas dalam Perang Makassar pun diperbaiki dan dinaikkan di tembok-tembok benteng. Peralatan perang dipersiapkan oleh Speelman yang melengkapi peralatan pertahanan benteng termasuk untuk menyerang. Benteng Ujungpandang yang telah resmi berubah nama menjadi 'Fort Rotterdam', maka Speelman kemudian mengangkat Densmaert van der Straaten menjadi komandan benteng.

Sejak Perjanjian Bungaya ditandatangani faktanya keadaan Makassar tidak segera membaik sesuai harapan Speelman. Bahkan, sesekali keadaan muncul lebih buruk lagi akibat gempuran yang dilakukan oleh Karaeng Karunrung dan petinggi Gowa lainnya yang menolak Perjanjian Bungaya. Tercatat pada tanggal 20-21 April 1668, perang kembali pecah yang dipimpin pemberontak Karaeng Karunrung yang bergerak menggempur Fort Rooterdam. Pertempuran terjadi dengan sengitnya. Dalam *Lontara Diary* seorang sayap komando prajurit Arung Palakka bernama To Gelli menjadi korbannya yang disebut dalam teks naskah Bugis yaitu '*nariposso' To Gelli'* artinya 'To Gelli terbunuh'. Rentetan perang yang dikobarkan oleh Karaeng Karunrung tersebut berlangsung sampai bulan Mei dengan menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Mei 1668 Arung Palakka memilih mendirikan posisi pertahanan di Taeng sebagai strategi untuk memblokode pertambahan jumlah parajurit Karunrung yang senantiasa datang dari arah selatan.

Memang perdamaian sudah tercapai dalam Perjanjian Bungaya, namun Speelman selalu saja kurang meyakini kalau perdamaian itu tidak akan selalu berjalan mulus. Bahkan Speelman

selalu cemas dengan situasi keamanan sehingga ia berusaha agar bala bantuan dari pasukan Jawa harus dilakukan. Catatan Harian Bone kemudian merekam pada tanggal 5 November 1668 bala bantuan Belanda dari kalangan orang Jawa 'nangka to Jawa' mendarat di Makassar. Speelman juga melakukan konsolidasi agar Benteng Ujungpandang selalu siap-siagakan. Meriam-meriam bekas operasional Perang Makassar diperbaiki ulang kemudian disimpan di atas dinding-dinding Benteng sebagai senjata yang siap menyala suatu ketika.

Pembenahan persenjataan untuk mendukung pertahanan Fort Rotterdam rupanya terekam pula di dalam Lontara Catatan Harian Bone. Catatan peristiwa yang berkenaan pemasangan meriam-meriam pada Benteng Fort Rotterdam:

1669 3 Januari: *naripalélé mariangngé duwa* (dua meriam ditempatkan dibenteng)

1669 6 Januari: *narirui mariang Cempagaé, dua, lompoé* (dua meriam Cempaga yang besar di tarik naik)

Pembenahan pertahanan Fort Rotterdam didasari oleh keadaan kacau dan pertimbangan keamanan pihak Kompeni untuk merasa aman dari serangan. Itulah sebabnya Kompeni melakukan segala daya upaya untuk memastikan benteng yang menjadi pemukimannya cukup tangguh menangkis bahaya yang setiap saat mengancam dari pihak musuh terutama elite-elite Gowa dan sekutu-sekutunya yang menentang penyerahan Hasanuddin. Empat nama sekutu Hasanuddin yang membantu peperangan namun tidak turut bertanda tangan adalah Karaeng Lengkesé', Karaeng Karunrung, Maharajalela, dan To Sengngeng Arung Matowa Wajo. Keempat orang ini oleh Kompeni dianggap masih

berbahaya, sebab masing-masing membawahi ribuan prajurit setia. Mereka itu sewaktu-waktu dapat saja melakukan serangan mendadak dengan sasaran pemukiman VOC di Benteng Ujungpandang (Mattulada 1982: 88-89).

Kegundahan hati Speelman mulai mereda karena Karaeng Lengkesé' yang membawahi sejumlah prajurit setia kemudian bersedia menandatangani kontrak tambahan (*naeder contracten*) pada tanggal 31 Maret 1668. Sikap yang berbeda dengan elit lainnya yaitu Arung Matowa Wajo dan Karaeng Karunrung, keduanya masih tegas menentang Perjanjian Bungaya. Bahkan, keduanya pun mendesak Sultan Hasanuddin agar mau membatalkan perjanjian Bungaya yang sudah ditandatanganinya itu. Desakan Karaeng Karunrung tidak juga kunjung mereda kepada Hasanuddin untuk bangkit kembali menentang VOC. Pada sisi yang sama kengototan Karaeng Karunrung, tampaknya tidak dapat pula dicegah oleh Sultan Hasanuddin, sehingga Karaeng Karunrung tetap saja melakukan serangan darat terhadap basis-basis VOC dan Arung Palakka.

Kekhawatiran menjadi nyata, dugaan Speelman rupanya tidak meleset sebab hal yang dikhawatirkannya dari gerakan Karaeng Karunrung rupanya terbukti juga. Secara tidak terduga oleh Speelman, prajurit Gowa yang dipimpin langsung Karaeng Karunrung, tiba-tiba datang dan langsung menyasar Fort Rotterdam. Tepatnya pada tanggal 21 April 1668 perang kembali berkobar. Konon pertempuran ini sungguh merepotkan Speelman, hingga banyak pasukan Belanda tewas dan luka-luka. Bahkan, salah seorang kepala prajurit Arung Palakka bernama To Gelli terbunuh di tengah pertempuran.

Rupanya, hasrat perang Karaeng Karunrung tidak pernah surut. Pada tanggal 5 Agustus 1668 ia kembali memancing kembali pertikaian dengan menyusupkan parjuritnya ke samping Fort Rotterdam. Selang tujuh hari kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1668 Karaeng Karunrung melakukan serangan massal lagi pada tanggal 27 Agustus 1668. Walaupun sudah sekuat tenaga tetapi untung tak dapat pula diraih, serangan Karaeng Karunrung berhasil dikandaskan oleh pasukan Bugis Arung Palakka dan Speelman. Selain gagal dalam misi perlawanannya, Karaeng Karunrung pun menderita kalah, 27 pucuk meriam miliknya berhasil disita lawan. Pada saat Karaeng Karunrung mengambil jalan mundur, justru pada saat yang sama Arung Palakka dan prajurit andalannya menerobos memasuki kubu lawan. Karaeng Karunrung pun dapat dilumpuhkan, sementara Karaeng Bontomajannang tertembak mati di tengah peperangan itu.

Sagimun (1978) mengemukakan, pasukan-pasukan Bugis pada masa itu sudah terbentuk sebagai kekuatan besar dengan jumlah prajurit ribuan dan tak tertandingi lagi. Di bawah komando Arung Palakka pasukan Bugis kini menampakkan dirinya sebagai tulang punggung pasukan-pasukan penyerang dalam melakoni Perang Makassar³. Di mata Speelman, Arung Palakka dengan pasukan Bugisnya merupakan laskar utama bagi pertahanan VOC

³Istana Arung Palakka di Bontoala didirikan pada tahun 1667 kemudian mulai ditempati pada 7 April 1668. Catatan Harian Bone mencatatkan kalau Arung Palakka sudah memasuki istananya *Bola Marajaé* di Bontoala dan langsung menginap pada hari pertama itu juga. Istana *Bola Marajaé* ini menjadi istana utama Arung Palakka, kemudian tetap memenuhi fungsinya sebagai istana setelah La Patau Matanna Tikka diangkat menjadi raja Bone yang mewarisi Arung Palakka, sang paman. Arung Palakka wafat pada tanggal 6 April 1696. Istana Bontala juga menjadi pusat La Patau menjalankan roda pemerintahan kerajaan Bone. Istana Bontoala disebutkan pula seringkali dikunjungi oleh Gubernur

dalam menghadapi gempuran lawan-lawan yang tidak pernah berhenti. Itulah sebabnya Speelman sangat bergantung kepada Arung Palakka terutama dari segi keamanan.

Stapel (dalam Sagimun) mencermati situasi yang dialami Speelman itu dengan menulis, itulah sebabnya Speelman merasa sangat gelisah pada suatu ketika mendengar berita kalau Arung Palakka berencana berangkat ke Bone. Bagi Speelman, jika hal itu terjadi, maka keamanan VOC di Ujungpandang menjadi terancam karena sudah pasti tidak ada Arung Palakka yang menolongnya kalau seketika bahaya datang. Speelman dan komunitas Belanda sangat gelisah kalau orang-orang Bugis betul-betul akan meninggalkan orang-orang Belanda di Ujungpandang. Namun, nasib untung masih berpihak kepada VOC karena Arung Palakka tidak mengurungkan niatnya untuk pulang ke Bone. Putusan Arung Palakka itu didasari pertimbangan analisa strategi politik di Makassar yang perlu diciptakan dengan baik pasca Perang Makassar. Arung Palakka juga menilai kalau Ujungpandang adalah posisi yang paling strategis dapat kontrol mengontrol kuasa-kuasanya di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau luar.

Setelah Perjanjian Bungaya mulai reda, Arung Palakka pun tidak mengulur-ulur waktu, dengan segera ia membangun istana baru di Bontala. Lontara menyebutkan istana Arung Palakka itu dinamakan *Bola Marajae* bertempat di lokasi istana Bontoala berdekatan dengan Benteng Ujungpandang. Istana *Bola Marajaé* itu diberitakan mulai ditempati oleh Arung Palakka pada 7 April 1668. Posisi istana *Bola Marajaé* Bontoala itu kemudian disebut sebagai pintu atau dinding sisi timur memasuki *Staad Vlaardingeng* atau Kota Ujungpandang. Demikianlah lokasi istana *Bola Marajaé* menjadi pos pelaporan bagi aristokrat-aristokrat

Bugis-Makassar sebelum melanjutkan perjalanan masuk ke Benteng membawa urusannya menemui Gubernur Belanda di Makassar. Terbaca di dalam teks-teks lontara kalau para tetamu yang akan berurusan dengan Gubernur Belanda (Bgs = *Goronadoro*) di dalam Benteng Ujungpandang terlebih dahulu ia melapor dan mempersaksikan dirinya kepada Arung Palakka. Istana Arung Palakka di Bontoala ini kemudian diwarisi oleh La Patau Matanna Tikka sebagai istana Bone yang mewarisi tahta sang Paman, Arung Palakka.

Catatan dalam Lontara Bilang beberapa Raja Bone mencatat berbagai peristiwa yang berkenaan dengan aktivitas di Benteng Ujungpandang dalam kurun 1667 hingga 1690. Catatan Harian terawal adalah naskah yang menceritakan peristiwa Sulawesi Selatan yang berkenaan dengan berita tentang sepak terjang Arung Palakka dalam Perang Makassar serta masa-masa pemerintahannya. Sementara itu, catatan yang terakhir dikutip dari Diary La Tenritappu yang menulis akhir penanggalan dalam catatannya tahun 1790.

F. Desain Politik dan Kuasa dari dalam Fort Rotterdam

Bagian akhir tulisan ini diajukan sebuah pertanyaan: 'bagaimanakah Benteng Ujungpandang atau Fort Rotterdam difungsikan setelah Perang Makassar? Sumber-sumber lontara berupa Catatan Harian dan Kronik Bone dan Kronik Gowa, menuntun kita menemukan fakta-fakta sejarah yang berkenaan dengan fungsi Benteng Ujungpandang. Data dalam naskah memberi penjelasan kepada kita bahwa Benteng Ujungpandang menemui babak baru secara signifikan setelah Perjanjian Bungaya

ditandatangani. Faktanya, Benteng Ujungpandang mengalami situasi yang sangat berbeda dengan benteng-benteng Makassar lainnya, semisal Benteng Kale Gowa, Benteng Tallo, Benteng Sanrabone, Benteng Ujungpandang, Benteng Barombong, Benteng Ujungtana, Benteng Mariso, Benteng Bontorannu, dan Benteng Bayoa yang pada umumnya kehilangan fungsinya lagi. Jika Benteng Ujungpandang meraih fungsinya yang lebih kompleks dibawa pendudukan VOC, maka benteng-benteng lainnya justru mengalami situasi sepi, kehilangan fungsinya, ditinggalkan begitu saja, bahkan kemudian ada yang dihancurkan.

Memanglah fungsi Benteng Ujungpandang secara signifikan menjadi posisi pertahanan walaupun sudah beralih tuan dari Gowa kepada VOC. Sejak diduduki oleh VOC, Benteng Ujungpandang kemudian meraih fungsinya lebih vital dalam banyak aspek. Demikian pula hanya setelah bagi segala urusan Belanda sepanjang masa, mulai tahun 1667 sampai pada tahun 1949 masa KNIL. Benteng Ujungpandang tampaknya menjadi hunian pilihan utama Belanda dalam menjalankan kuasanya di Makassar dalam kurun XVII-XX. Benteng Ujungpandang telah mengalami rekonstruksi ulang oleh VOC dan Belanda sehingga memiliki struktur yang relevan sebagai hunian yang nyaman sekaligus sebagai tempat pertahanan yang ideal dari serangan musuh-musuh dari laut, maupun daratan.

Meskipun penandatanganan Perjanjian Bungaya yang menjadi penanda berakhirnya Perang Makassar, tetapi faktanya kekacauan tidak putus-putusnya mengancam keamanan orang-orang Belanda. Kekacauan itu muncul karena pemberontakan Karaeng Karunrung, Karaeng Lengkese', Maharajalela, dan Arung Matowa Wajo, yang membentuk sayap pasukan Makassar yang

menolak menyerah. Gerakan empat sayap pejuang itu sesekali waktu memunculkan serangannya untuk mendobrak pertahanan VOC di Benteng Ujungpandang. Itulah sebabnya Speelman dihinggapi rasa gelisah karena memikirkan keselamatan jiwanya, sehingga ia meminta Arung Palakka agar terus-menerus menyokongnya dan tidak meninggalkannya di Makassar.

Situasi itu terbaca pada dokumen Catatan Harian Bone yang menyebutkan bahwa pada tanggal 14 April diberitakan meletus perang tahap kedua setelah Perjanjian Bungaya ditandatangani. Redaksi Catatan Harian menulis: "*nammula mammusu, nasiwuno tauwé, perrié ri munrié* (terjadi lagi perang, Orang-orang saling berbunuhan pada perang tahap kedua). Rangkaian perang susulan itu dicatat dalam naskah. Pada tanggal 20-21 April 1668 Fort Rotterdam mendapat serangan dahsyat dari pimpinan Karaeng Karunrung yang telah membangkang dari Perjanjian Bungaya. Pada tanggal 12 Agustus 1668 Karaeng Karunrung membuat lagi serangan keduanya dengan menusuk langsung kepada dari arah Selatan Benteng Rotterdam. Target utama Karaeng Karunrung tidak lain adalah VOC dan sekutunya dan bermaksud menggagalkan Perjanjian Bungaya. Situasi yang dialami VOC itu dengan jelas menjadi lonceng peringatan kalau urusan keamanan di Makassar bukanlah hal yang remeh-temeh. Speelman seakan-akan dipaksa memahami fakta kalau urusan Makassar bukanlah persoalan pendek, tetapi serius dan panjang masanya. Oleh karena itu, Speelman harus mendapat perlindungan dari pasukan Bugis sambil meminta pasukan tambahan dari pulau Jawa kepada Gubernur Jendral Batavia. Pada saat yang sama Speelman pun menata ulang kekuatan pertahanan dengan menempatkan meriam-meriam dan persenjataan VOC di atas dinding-dinding Benteng. Situasi yang dihadapi Speelman itu

sebenarnya berat, sebab dalam situasi perang pada saat yang sama wabah kolera (wabah hitam) sedang menjangkit meluas di Makassar menyusup masuk ke dalam Benteng Ujungpandang.

Masa-masa awal pendudukan Benteng Ujungpandang, pihak VOC tidak sekadar menjadikannya sebagai markas pasukannya saja, akan tetapi Speelman yang menjadi laksamana VOC pada saat itu menjadikannya juga sebagai hunian prajurit dan aparaturnya. Benteng Ujungpandang di bawah pendudukan VOC kemudian menjadi pusat administrasi politik dan kuasa Belanda di Sulawesi Selatan dengan pimpinan tertingginya bernama Gubernur (Bgs = *gorondoro/Goronadoro*)⁴. Berita-berita mengenai aktivitas VOC dan Belanda selama berada di Benteng Ujungpandang beberapa hal yang direkam ke dalam lontara semisal Catatan Harian Raja-raja Bone serta maupun kronik-kronik Bone dan Gowa.

Dokumen lokal berupa Catatan Harian (diary) secara terperinci terbaca pada Catatan Harian Bone antara tahun 1667-1696, catatan harian La Patau dan Diary La Tenritappu: Januari 1794 Belanda di dalam Benteng menerima ucapan selamat tahun baru raja Bone La Tenritappu. Raja Bone ini secara rutin tiap tahunnya masuk Benteng Ujungpandang kediaman Gubernur Belanda di mulai tahun 1696 sampai pada tahun 1812. Demikian pula raja Bone La Patau, juga membuat tradisi

⁴Pendirian jabatan *Goronadoro* Gubernur Belanda yang berkedudukan di Benteng Ujungpandang/Fort Rotterdam ialah pada tanggal 8 Pebruari 1695. Teks dalam naskah ditulis: "8 pebruari: *Nawunge' engka Goronadoro ri Ujungpandang* (mula adanya Gubernur di Ujungpandang). Dicatat pula bahwa pertemuan pertama antara Arung Palakka dan pejabat Gubernur Belanda baru terjadi pada 14 Juni 1695.

mengucapkan 'selamat bertahun baru' mewakili Bone kepada Belanda. Tradisi ini dimulai oleh Arung Palakka pada tanggal 1 Januari tahun 1696 dengan berkunjung langsung ke Benteng Ujungpandang untuk menemui Gubernur Belanda. Pada kunjungan menghantar ucapan selamat tahun baru kepada Gubernur Belanda di Makassar. Jika mencermati informasi pada catatan harian raja yang ada, maka paling tradisi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Belanda dilakukan oleh La Patau Matanna Tikka, La Temmassonge', dan La Tenritappu. Tetapi sangat menyakinkan kalau dilakukan pula oleh seluruh raja- Bone seteah Arung Palakka hingga La Tenritappu, yaitu La Patau Matanna Tikka (1696-1714), Bataritoja Daeng Talaga (1714-1715), La Paddasajati (1715-1718), La Pareppa' To Sappewali (1718-1721), La Panaongi (1721-1724), Bataritoja Daeng Talaga (1724-1749), La Temmassonge' (1749-1775), dan La Tenritappu (1775-1812). Tradisi pemberian selamat tahun baru terhadap Belanda menjadi penanda sebuah hubungan baik antara Belanda dan Raja Bone.

Aneka aktivitas VOC—kemudian Belanda—selama bermukim di dalam Benteng Ujungpandang secara detail tercatat rapi di dalam catatan harian raja-raja Bone. Sedikit banyaknya melankolisme kehidupan di dalam Benteng Ujungpandang terekam pula Stapel (1936) di dalam tulisannya yang berjudul Cornelis Janszoon Speelman. Di dalam catatan harian, aneka aktivitas di dalam Benteng Ujungpandang dapat disebutkan sedikit dari sekian banyak. Pada masa-masa awal pengambilalihan Benteng oleh Speelman bersama Arung Palakka, menjadi tempat perancangan politik dan kekuasaan VOC di Makassar, termasuklah pembaharuan-pembaharuan teks perjanjian Bungaya, perjanjian dan kerjasama dengan kerajaan lainnya seperti Buton, Ternate, dll.

Yang jelasnya dapat dikatakan bahwa Benteng Ujungpandang menjadi basis kendali VOC –kemudian Belanda– dalam menjalankan agenda politiknya secara khusus di Sulawesi Selatan, secara umum pada Kawasan Timur Indonesia.

Satu hal lagi yang patut diketengahkan pada tulisan ini terkait dengan fungsi Benteng Ujungpandang ketika berada di tangan VOC dan Belanda, yakni menjadi tempat menyimpan tahanan politik dan pelanggar-pelanggar hukum dari kalangan elit. Salah satu peristiwa tercatat dalam Catatan Harian La Patau menyebutkan seorang pengacau keamanan bernama Marakusu dijebloskan dalam penjara di dalam Benteng Ujungpandang pada 4 November 1703. Tindakan Marakusu ini sudah masuk laporannya dalam bentuk surat yang dirapatkan oleh La Patau dan Gubernur Belanda di Benteng Ujungpandang pada 7 September 1703. Pada tanggal 12 Oktober 1703 antara La Patau dan Gubernur memutuskan melawan Marakusu yang saat itu telah menyerang Banjarmasin. Tindakan yang akan dilakukan oleh Gubernur Belanda di Makassar terhadap Marakusu pun sudah disetujui oleh Gubernur Jendral di Batavia. Hasilnya, sepak terjang Marakusu pun dapat dilumpuhkan oleh prajurit Belanda bersama laskar raja Bone La Patau. Marakusu pun kemudian ditangkap kemudian ia dijebloskan ke dalam penjara di Benteng Ujungpandang. Hal yang sama dalam Catatan Harian La Tenritappu pada tanggal 6 Oktober 1777 menuliskan satu kasus pemenjaraan seorang yang disapa 'anakna Karaeng Kanjilo' (anaknya Karaeng Kanjilo). Anak Karaeng Kanjilo ditangkap karena melakukan tindakan mata-mata dengan melakukan penyusupan ke dalam Benteng Ujungpandang yang menyamar sebagai pangantar makanan seorang tahanan. Tindakan anak Karaeng Kanjilo inilah dianggap sangat berbahaya

sehingga ia pun diputuskan dipenjarakan di dalam Benteng Ujungpandang. Itu pula sebabnya La Tenritappu dan Gubernur Belanda (*Goronadoro*) melakukan rapat rahasia pada tanggal 29 Januari 1778 dengan membuat keputusan untuk menutup ruang terbuka dinding sisi selatan Benteng Ujungpandang.

Terkait sebagai penjara kaum elit, maka salah satu kasus yang penjara di Benteng Ujungpandang yang tertuang di dalam kronik Bone adalah La Pasompereng atau Arung Teko putra La Maddaremmeng Matinroe Ribukaka, Raja Bone ke-13 (1631-1644). Secara genealogi ia menjadi putra mahkota yang berhak mewarisi mahkota Bone. Oleh karena kasus yang bercampur rekayasa politik maka ia pun dipenjara di dalam Benteng Ujungpandang setelah menikam Daeng Mabani. Di samping karena istrinya (Karaeng Balla' Kaerie) diselingkuhi oleh Daeng Mabani, di sisi lain La Patau merasa terganggu kemunculan La Pasompereng di Makassar secara tiba-tiba sepulang dari Timor. La Patau yang baru saja menempati tahta Bone sangat khawatir kalau *Ade' Pitue* akan bersimpati kepada La Pasompereng. Jika itu terjadi, maka dapat saja mereka mengalihkan tahta kepada La Pasompereng.

Atas kecerdasan La Patau mengatur siasat bagaimana menghentikan niat tersembunyi La Pasompereng untuk meraih tahta kerajaan Bone, maka tidak ada jalan kecuali memenjarakannya. Drama yang dirancang La Patau pun menuai hasil gemilang karena La Pasompereng berhasil membunuh Daeng Mabani atau Sulle Datu (putra mahkota) Soppeng terkait perselingkuhan tersebut. Jebakan bagi La Pasompereng bercampur baur antara perselingkuhan dengan intrik politik, sukses dijalankan oleh La Patau. Ujung kecerdasan La Patau kemudian mengakibatkan La Pasompereng ditangkap dan dituduh

bersalah karena kasus pembunuhan. Lontara Bone menampilkan kisahnya dengan penggalan teks sebagai berikut:

(...) La Patau Raja Bone menyelenggarakan acara sabung di Ujuppandang. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Walhasil, benar ada ayam yang dikirim oleh Raja Bone ke rumah Arung Téko. Arung Téko pun sudah mengetahui kalau bahwa orang yang ditunggu-tunggunya itu sudah datang di acara sabungan ayam/

[103]

Pengikutnya pun sudah bersedia di jalan yang langsung menuju istana Gowa. Acara sabung pun sudah usai menjelang hari menuju malam. Adapun Puwatta' Malaésanra dengan sigap segera menemui Gubernur Belanda di Ujuppandang meminta serdadu Kompeni Belanda agar segera melakukan antisipasi di sore hari. Sebab, sebentar lagi akan terjadi peristiwa pembunuhan di jalur menuju istana Gowa. Barangsiapa yang melakukan pembunuhan, maka harus ditangkap bersama dengan seluruh pengikutnya dan memasukkannya dalam penjara dan membelenggunya/ Jangan sekali-kali mengeluarkannya. Maka pada sore harinya para serdadu Kompeni Belanda sudah bersembunyi dan berjaga-jaga untuk melumpuhkan kelompok penghadang yang tidak lain adalah Arung Téko dan pengikutnya.

Pesta sabung sudah selesai, bubar jugalah para penyabung, tidak terkecuali Daéng Mabani. Dia pun berjalan bersama pengikutnya menuju istana Gowa. Saat hari masuk petang terjadilah peristiwa saling bunuh itu. Daéng Mabani Sullé Datu Soppéng pun mati di tempat, pada saat itu pula Arung Téko bersama pengikutnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara serta memutuskan hubungan dengan pihak luar.

(sumber; Hadrawi dkk, 2020: 102-103).

Ketika di dalam penjara, hubungan antara Kompeni Belanda dan Inggris semakin genting. Pulau Kalimantan telah berhasil direbut oleh Inggris. Mata-mata Inggris pun kemudian berhasil meloloskan surat kepada Arung Téko dan pengikutnya ke dalam penjara Benteng Ujungpandang. Inggris mengajak secara rahasia La Pasompereng bersedia bersekutu melawan Kompeni Belanda. Imbalan yang dijanjikan kepada La Pasompereng, Gubernur Inggris bersedia memberi bantuan kepada prajurit Arung Teko untuk melawan Kompeni Belanda. Surat itu diselipkan penyusup Inggris ke dalam Benteng Ujungpandang melalui rantang makanan yang diantar kepada Arung Téko. Selebar surat rahasia yang terselipkan pada lapisan rantang terbawah kemudian tidak berhasil tiba di tangan Arung Teko karena lebih dahulu ditemukan oleh petugas jaga penjara. Isi surat itu Inggris menyampaikan janji kepada Arung teko : “jika dia membantu pasukan Gebernur Inggris melawan pasukan Kompeni Belanda di pulau-pulau Sulawesi Selatan, maka Arung Téko akan dibantu merebut dan menggantikan singgasana Petta Torisompaé sebagai raja diraja”.

Permaisuri La Patau Puwatta' Malaésanra meminta agar Arung Téko bersama pengikutnya diasingkan saja ke tempat yang jauh yang membuatnya tidak dapat pulang sampai mati di sana. Maka dipilihlah tempat pengasingan yaitu Séiland atau ujung tanah Afrika Selatan. Dibawalah Arung Téko bersama pengikutnya menuju ke Seiland. Konon, beliau di tempat pengasingannya itulah ia bersama pengikutnya meninggal satu per satu. Sudah diketahui kalau negeri Seiland adalah tanah pembuangan orang-orang pesalah terhadap Kompeni Belanda. Negeri itu dikenal juga tanah hasil rampasan Belanda yang menjadi laluan pelayaran antara negeri Eropa menuju kawasan timur Nusantara.

Pengasingan La Pasompereng ke negeri Seiland menciptakan ketenangan hati La Patau. Beliau sudah merasa aman menduduki tahtanya sebagai raja Bone setelah La Pasompereng ditangkap dan diasingkan jauh tempat pembuangannya. Sebagai kalimat penutup dapat dikatakan bahwa desain politik di Sulawesi Selatan yang dijalankan oleh Belanda dan penguasa pribumi Bugis-Makassar didesain dari Benteng Ujungpandang.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Zulkarnaen. 2013. *Hubungan Sejarah Melaka-Makassar*. Melaka: IKSEP dan Malaysian Institute of Historical Patriotism Studies.
- Basiah. 1999 Lontara Bilang (Catatan Harian) Raja Bone ke16 La Patau Matanna Tikka Walinonoe Matinroe Ri Nagauleng Jjanuari 1692-September 1714).
- Bulbeck, David. (ed.Robinson, Kathryn dan Paeni). 2005. "Sejarah Konstruksi dan Benteng-Benteng Pertahanan Makassar (h. 113-172)" dalam *Tapak-Tapak Waktu*. Innawa: Makassar.
- Cummings, William. 2010. *The Makassar Annals*. Leiden: KITLV Press.
- Hadrawi, Muhlis, dkk. 2020. *Lontara Sakke' Attoriolong Bone; Transliterasi dan Terjemahan*. Makassar: Innawa.
- Hadrawi, Muhlis. 2020. *Integrasi Melayu di Sulawesi Selatan: Kajian Berdasarkan Lontara*. Jakarta: Perpunas Press.
- Macknight, Campbell, Muhlis Paeni, dan Muhlis Hadrawi. 2020. *The Chronicle Bugis of Bone*. Camberra: ANU Press.
- M.D., Sagimun. 1975. *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C.*. Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Pelras, Christian. (ed. Robinson, Kathryn dan Paeni). 2005. Budaya Bugis: sebuah Tradisi Modernitas (h.37-52), dalam *Tapak-Tapak Waktu*. Ininnawa: Makassar.
- Poelinggomang, L. Edward. 2016. *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: KPG.
- Reid, Anthony. 1981. "A Great seventeenth-century Indonesia Family: Matoaya and Patingaloang of Makassar" dalam *Masyarakat Sejarawan Indonesia*.
- Van der Chijs, J.A. 1889. *Dagh-Register gehouden in 't Casteel batavia van 't passerende daer ter plaetsr als over geheel Nederlandts-India Anno 1663*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Naskah Sumber Data

1. Ms rol 30/16 h. 96-99 (ANRI);
2. Catatan Harian Raja Gowa-Tallo;
3. Catatan Harian Raja-raja Bone;
4. Lontara Patturioloang Gowa;
5. Lontara Attoriolong Bone.

PERANAN DAN PENAMAAN BENTENG UJUNGPANDANG DARI MASA KE MASA

oleh
Muhammad Ramli

Benteng Ujungpandang, Benteng Jum pandang, Benteng Panyyua, Kotayya, dan Fort Rotterdam merujuk pada tempat yang sama, yaitu bangunan dan struktur yang secara administratif Benteng Ujungpandang berada di Jalan Ujung Padang nomor 1. Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan secara astronomis berada pada $5^{\circ} 07' 55'' - 5^{\circ} 08' 08''$ LS dan $119^{\circ} 24' 14'' - 119^{\circ} 24' 26''$ BT Adapun batas-batas Benteng Rotterdam sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Riburane
- Sebelah Timur : Jalan Slamet Riyadi
- Sebelah Selatan : Jalan WR. Supratman
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Benteng ini memiliki 16 bangunan berarsitektur Eropa yang dilengkapi oleh pintu gerbang dan dikelilingi oleh struktur tembok dengan material batuan andesit dan tufa, serta memiliki parit keliling. Benteng seluas 12,41 Ha ini berbentuk penyusung yang disetiap sudutnya memiliki bastion, yaitu Bastion Buton di sudut

Timur Laut dan Mandarsyah di sudut Tenggara, Bastion Bacan di sudut Barat Laut dan Bastion Amboina di sudut Barat Daya, serta Bastion Bone di bagian barat, atau di sisi pintu gerbang.



Denah Benteng Ujungpandang dan kelima bastionnya
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

Bukan hanya nama yang beragam, Benteng Ujungpandang juga mengalami perubahan fungsi dari masa ke masa. Hal ini disebabkan adanya perpindahan kepemilikan atau penghunian di dalam benteng. Pada awal pendiriannya difungsikan sebagai benteng pertahanan Kerajaan Gowa dan saat ini menjadi gedung perkantoran dan museum.

Tulisan ini akan membahas tentang perubahan penamaan dan peranan Benteng Rotterdam dari masa ke masa.

Penamaan Benteng Ujungpandang

Benteng Ujungpandang kerap memiliki nama yang berbeda, hal ini disebabkan oleh peranannya yang selalu berubah. Beberapa cerita Lontarak yang mengungkapkan bahwa penamaan benteng erat kaitannya dengan tanaman *pandang* (pandan) yang banyak sekali tumbuh pada sebuah tanjong (ujung) lokasi pendirian benteng, sehingga ia dinamai *Benteng Ujungpandang*.

Ia juga pernah bernama *Benteng Pannyua*. Agaknya penamaan ini erat kaitannya dengan bentuk fisik yang seolah-olah menyerupai seekor penyu sedang merayap kelaut. Pernah pula bernama *Fort Rotterdam* sebuah nama yang diberikan Gubernur Belanda, Speelman untuk mengenang kota kelahirannya di negeri Belanda, Rotterdam. Pada zaman pendudukan Belanda juga disebut dengan nama *Kotayya* karena benteng difungsikan sebagai pusat pemerintahan atau kota.

1. Benteng Ujungpandang atau Jumpandang

Benteng Ujungpandang terletak di sebuah tanjong (ujung) dengan banyak tumbuh pohon "*pandang*" (pandan), oleh karenanya masyarakat menyebutnya dengan nama Benteng Ujungpandang. Kata "*pandang*" merupakan Bahasa Daerah Makassar, berarti pohon pandan yang daunnya dapat dianyam menjadi tikar dan bukan kata "pandang" yang dalam bahasa Indonesia berarti memandang atau melihat (ke arah jauh). Penyebutannya terkadang berubah menjadi Jumpandang untuk menunjukkan tempat yang sama.

2. Benteng Pannyuwa

Bentuk Benteng Ujungpandang berbentuk seperti pannyuwa atau penyu yang memiliki bagian badan, kepala dan kaki ekor. Pada masa peperangan antara Jepang dan Belanda, bagian ekor penyu hancur akibat perang sehingga hanya tersisa bagian kepala dan badan. Nama ini diberikan oleh rakyat Gowa karena melihat bentuk Benteng Ujungpandang itu seperti seekor penyu yang sedang merayap menuju kelaut yaitu Selat Makassar. Bentuk penyu itu pula mengandung makna tentang cita-cita kerajaan, bahwa penyu sejenis hewan yang hidup didua alam yaitu didarat dan diair. Kerajaan Gowa ingin memegang hegemoni di daratan dan di lautan.

Makna lain yang ditafsirkan bahwa penyu banyak bertelur tetapi diam-diam yang berarti orang Gowa memiliki banyak karya untuk orang banyak namun tidak banyak bicara. Punggung penyu yang kuat dan keras digunakan untuk melindungi dirinya dan ditafsirkan bahwa Benteng Ujungpandang sebagai pelindung rakyat dan kerajaan Gowa.

Bentuk penyu bukan hanya menjadi representasi filosofi karakteristik pemimpin Kerajaan Gowa, melainkan menjadi ciri khas bentuk benteng kolonial belanda. Hal ini diperkuat dengan adanya kesamaan bentuk beberapa benteng kolonial di Indonesia

3. Fort Rotterdam

Pada tahun 1686, nama benteng Ujungpandang diubah menjadi Fort Rotterdam oleh petinggi VOC Panglima Admiral Cornelis Speelman, untuk mengabadikan tempat kelahirannya di



Kampung Baru Makassar tahun 1900-an
(sumber: nationaalarchif.nl)

Belanda yaitu Rotterdam. Pada saat yang bersamaan juga di bangun gedung kediaman untuk Speellman.

4. Kotayya

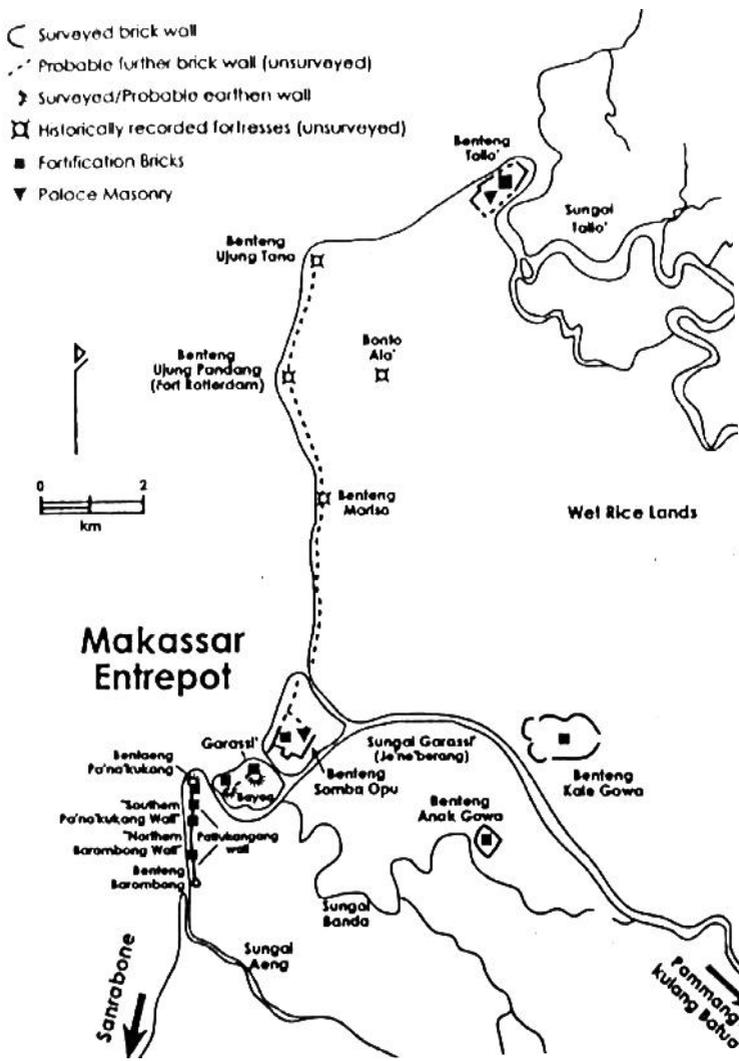
Pada zaman pendudukan Belanda, Benteng Ujungpandang disebut *Kotayya* karena difungsikan sebagai pusat pemerintahan atau kota. Nama ini sudah sangat jarang sekali didengar, kecuali oleh orang tua yang masih sekali-sekali menyebut nama *Kotayya* untuk benteng. *Kotayya* adalah bahasa Makassar yang dapat diartikan sebagai kota. Penyebutan ini menunjukkan secara pasti bahwa benteng pada masa lalu pernah menjadi pusat (kota) tempat kedudukan pusat pemerintahan.

Gagasan Pembangunan Perbentengan Di Kerajaan Gowa

Gagasan pembangunan benteng dalam wilayah Kerajaan Gowa bermula pada masa Raja Gowa IX Daeng Matenre Karaeng Manguntungi Tumapparisi Kallonna (1511-1548). Ia memerintahkan kepada panglima perangnya untuk mendirikan kubu pertahanan di garis pantai Makassar pada dekade keempat abad ke-16, yang dikenal sebagai benteng pada masa sekarang. Konstruksinya berbahan tanah isian berlapis bata seperti struktur benteng yang masih tersisa hingga saat ini. Benteng-benteng tersebut, seperti Panakukang, Benteng Garassi dan Benteng Bajoa mempunyai arti penting dari sisi strategis pengamanan dan penataan ruang pengamanan. Pada masa ini pula Portugis tiba ke Makassar untuk pertama kalinya.

Para penguasa Makassar mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik bangunan perbentengan, mengadopsi ide-ide segar yang dianggap bermanfaat untuk kemajuan perekonomian, politik, budaya, bahkan menelikung masuk ke dalam wilayah-wilayah profan. Tidak hanya itu, Raja Gowa ke-IX juga melakukan penataan administrasi pemerintahan dan hukum serta kodifikasi tradisi literasi dengan menetapkan aksara lontarak sebagai standar penulisan dalam kerajaan. Tulisan lontara dituliskan oleh Daeng Pamatte, seorang Syahbandar dan Tumailalang.

Setelah Raja Tumaparisi Kallonna wafat, ia digantikan oleh puteranya yang bernama Tunipalangga Ulaweng I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung sebagai raja Gowa ke-X (1546-1565). Ia melanjutkan usaha mendiang ayahnya untuk memperluas pengaruh kerajaan Gowa. Selain itu, ia memulai tonggak baru dalam konstruksi bangunan benteng, yaitu memperkuat struktur dinding dengan bata, membuat bubuk



Tata Letak Benteng-Benteng Makassar tahun 1667
 (sumber: David Bulbeck 2013:115)

mesiu, mengembangkan kerajinan emas dan logam, memperkenalkan sistem timbangan dan ukuran, dan memobilisasi aneka pengrajin dalam serikat kerja. Raja inilah yang mendirikan Benteng Ujungpandang.

Gagasan pembangunan yang melampaui zamannya ini, terbilang sukses ketika I Manrabbia Sultan Alauddin sebagai Raja Gowa XIV Tumenangari Gaukanna melakukan mengekspose proyek baru, yakni perluasan kekuasaan dan perkuatan pondasi ekonomi lewat sejumlah program, dan yang paling impresif adalah keseriusannya membangun armada maritim yang tangguh dan juga memperkuat sistem pertahanan.

Kekuatan pertahanan dengan sistem perbentengan ini terlihat pada tradisi literasi Gowa yang merekam dengan baik bahwa atas perintah Sultan Alauddin, **"namanjama tau ia bata butta sanggenna Juttana nasanggenna Sombaopu"** (rakyat membuat tembok bata dari Ujung Tana hingga Somba Opu) pada 23 Maret 1634. Pada saat pengerjaan Sultan Alauddin beserta keluarganya untuk sementara menempati istananya yang lain di Benteng Panakukang. Pada waktu yang sama renovasi ringan terhadap benteng ini pun dimulai pada 29 Juli 1634.

Sultan Alauddin yang membatu-batai Tallo, Ujungpandang, Panakukang Ujung Tanah, dia juga raja yang pertama-tama membuat benteng dari batu. Pada abad ke-XVI ini bandar Makassar mulai ramai dan difungsikan sebagai lalu lintas perdagangan. Sultan Alauddin mengetahui bahwa VOC menonopoli perdagangan rempah di Maluku. Bangsa Portugis mulai mengunjungi kota ini. Sejak awal abad XVII dan menjadikan basis utama mereka di Asia Tenggara.

Setelah kejatuhan Malaka ditahun 1641, di Benteng Somba Opu, Sultan Alauddin mengizinkan maskapai Dagang Hindia Belanda VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) membuka kantor dagang pada tahun 1607, disusul Perusahaan Dagang Inggris EIC (*East India Company*) ditahun 1613 dan membangun hubungan khusus pada tahun 1630-an sebagai penyuplai senjata dan amunisi serta kain India. Bangsa Demark mengikuti jejak mereka pada tahun 1618, pedagang prancis dari St. Malo pada tahun 1622, Cina pada tahun 1619 dan pada tahun 1650 India membuka perwakilan dagang di Makassar.

Sultan Alauddin juga berhasil menciptakan uang logam, memperkuat angkatan laut dengan membangun kapal cepat dan perahu layar dan meningkatkan usaha swasembada beras. Langkah prestisius yang dipilih sultan selanjutnya selanjutnya adalah mengontrol wilayah-wilayah pedalaman dengan kombinasi dan tujuan pragmatis penaklukan dengan misi suci untuk menyampaikan cahaya kebenaran kepada kepada mereka yang belum islam. Ekspansi militer dan diplomatik dibungkus dengan slogan islamisasi ini menyelimuti ambisi perluasan kekuasaan, politik, dan ekonomi.

Data lainnya yang juga sangat menarik adalah terdapatnya kitab tentang hukum laut yang bernama *Amanna Gappa* dan peta laut. Selain itu ditemukan juga naskah-naskah dalam bahasa daerah yang berisi ramalan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan laut misalnya naskah yang disebut "***kotika tiliq***", (untuk mengetahui baik dan buruknya maksud perahu dan kapal yang dijumpai) dan naskah yang disebut "***kotika yahoro***", berisi ramalan tentang berhasil dan tidaknya suatu serangan laut.

Peranan Benteng Ujungpandang Dari Masa Ke Masa

1. Masa Kerajaan Gowa

Sejarah Benteng Ujungpandang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Kerajaan Gowa, karena kerajaan inilah yang melatar belakangi berdirinya benteng. Sebagai salah satu kerajaan yang muncul dalam lembaran Sejarah Sulawesi Selatan sekitar abad ke-XIII, Gowa telah dikenal melalui berbagai sumber, antara lain dari cerita rakyat, benda- benda peninggalan sejarah, tulisan yang berasal dari luar, dan naskah Lontara.

Pada zaman pemerintahan raja Gowa ke-IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kallonna terjadi perombakan pemerintahan yang awalnya statis berubah menjadi pemerintahan yang dinamis dan kreatif. Karaeng Tumaparisi Kallonna melakukan pembaharuan di segala bidang serta perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Salah satu yang dilakukan oleh Karaeng Tumaparisi Kallonna adalah mulai membentengi dengan batu bata di sekeliling ibukota Kerajaan Gowa, Somba Opu.

Setelah wafat, Karaeng Tumaparisi Kallonna digantikan oleh puteranya, Raja Gowa X, I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung atau Tunipalangga Ulaweng (1546-1565). Ia membangun Benteng Ujungpandang pada tahun 1545. Lokasi dipilih karena strategis untuk menerima tamu-tamu kerajaan Gowa dan Tallo. Pada awalnya benteng ini berbentuk segi empat seperti halnya benteng gaya Portugis. Bahan dasarnya adalah campuran batu dan tanah liat yang dibakar hingga kering.

Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Gowa XIV, mulai memasang batu-batu padas hitam, batu karang dan batu

merah serta menggunakan kapur dan pasir sebagai perekatnya untuk memperkuat Benteng Ujungpandang ini. Batu padas hitam didatangkan dari daerah Gowa dan Takalar. Pada tanggal 23 Juni 1635, dibangun lagi dinding tembok kedua di dekat pintu gerbang. Pada masa ini pula Bandar Niaga Somba Opu semakin ramai sebagai Pelabuhan transito rempah-rempah. VOC pun mulai menjalin hubungan dengan Raja Gowa dan mengajak Kerajaan Gowa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, namun ditolak oleh Sultan Alauddin.

Benteng Ujungpandang dan benteng-benteng lainnya difungsikan sebagai benteng pertahanan Kerajaan Gowa. Benteng Ujungpandang merupakan benteng pelindung Benteng Somba Opu (sebagai benteng utama bagi kerajaan Gowa, dan tempat kediaman raja Gowa). Adapun benteng yang dimiliki Kerajaan Gowa adalah Benteng Ujungpandang, Benteng Somba Opu, Benteng Ana Gowa, Benteng Balangnipa, Benteng Baro Boso, Benteng Barombong, Benteng Galesong, Benteng Garassi, Benteng Kale Gowa, Benteng Mariso, Benteng Panakkukang, Benteng Sanrobone, Benteng Tallo, dan Benteng Ujung Tanah, yang mengitari seluruh ibukotanya.

Secara geopolitik benteng-benteng yang mengelilingi "pintu depan" ini seakan lebih menegaskan bahwa Makassar sebagai "kota tepian air" (*front water city*) membutuhkan kekuatan pengaman yang dapat menjamin distribusi barang dan jasa berjalan lancar. Sehingga diperlukan sarana dan jaringan infrastruktur pertahanan yang memadai yang sanggup melantahkan infiltrasi luar, aksi perompakan para bajak laut yang mengganggu keamanan negara.

Semangat membangun ini makin bersemay subur ketika para petinggi kerajaan menyambut hangat bahkan membentuk aliansi strategis dengan bangsa asing seperti Portugis untuk berbagai kepentingan.

Pada tahun 1655-1669 VOC yang dipimpin oleh Admiral Cornelis Janszoon Speelman menyerang Kerajaan Gowa yang saat itu dipimpin Sultan Hasanuddin. Hal tersebut membuat Benteng Ujungpandang hancur. Tujuan penyerangan tersebut adalah untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, memperluas wilayah kekuasaan, dan memudahkan Belanda membuka jalur perdagangan ke negeri rempah, yaitu Banda dan Maluku.

2. Masa Pemerintahan VOC

Sebelum diduduki oleh VOC, didalam Benteng Ujungpandang terdapat bangunan-bangunan khas rumah-rumah Makassar yang bertiang tinggi dan terbuat dari bahan-bahan kayu. Pasca perjajian Bungayya, pada tanggal 21 November 1667, Speelman mulai menguasai dan menempati benteng. Untuk mengenang tempat lahirannya di Rotterdam Belanda, Speelman mengubah nama Benteng Ujungpandang menjadi Rotterdam. Ketika diserahkan oleh Kerajaan Gowa kepada VOC, bentuk Benteng Ujungpandang belum teratur seperti yang terlihat saat ini. Penataan benteng dilakukan dengan membangun sebuah Gedung (Gedung D) pada tahun 1668 untuk kediaman para petinggi VOC.

Penataan Benteng Ujungpandang dilakukan VOC setelah benteng ini dikuasai dan ditempati VOC, namun selalu tertunda akibat peperangan. Hal tersebut terjadi hingga perjanjian

Bungayya kedua ditandatangani. Pada tanggal 15 Juli 1669, benteng mulai dikerjakan dan dapat diselesaikan dalam Benteng Ujungpandang sekarang. Bastion-Bastion yang tadinya bulat diubah pada tahun 1667. Perubahan bastion dan bangunan dalam benteng yang dibangun menurut selera dan bangunan Belanda di abad ke-XVII.

Setiap pejabat Kompeni Belanda yang berkedudukan di dalam Benteng Ujungpandang kecuali bendaharawan-bendaharawannya berdiam di luar benteng. Dinding benteng dan bangunan di dalamnya masih dapat kita lihat sampai sekarang. Kecuali dinding benteng belakang Museum La Galigo (dinding selatan) telah rusak sesudah Perang Dunia Kedua. Selain itu, terdapat dua parit mengelilingi dan dilengkapi dengan jembatan. Satu untuk pintu gerbang utama dan satunya lagi terletak di sebelah timur yang menuju kantor pos, sekarang ini sudah tidak ada.

Rumah Speelman adalah bangunan yang tertua di dalam benteng Ujungpandang di bangun pada tahun 1686. Rumah tersebut disediakan sebagai rumah Gubernur selama hampir dua abad. Dibelakang rumah speelman terdapat ruangan-ruangan untuk senjata, mandor kepala, ruangan tempat kediaman dokter ahli bedah, dan kediaman sekertariat. Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Tuan Ness sebagai *Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden* didirikan museum di bekas kediaman Cornelis Speelman yang diberi nama Celebes Museum. Museum ini kemudian ditutup pada saat Jepang masuk. Pada tanggal 23 Mei 1940 bangunan ini didaftar sebagai monumen bersejarah dengan Nomor Registrasi 1010 sesuai *Monumenten Staatsblad* Tahun 1931.

3. Masa Pemerintahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda menyerahkan segala kekuatan pemerintahan kepada Jepang, demikian pula di Sulawesi Selatan termasuk Benteng Ujungpandang diserahkan kepada Jepang. Jika Benteng Ujungpandang pada zaman kerajaan Gowa dan zaman Belanda berperan sebagai benteng pertahanan militer, maka pada zaman Jepang, peranan benteng berubah, artinya tidak lagi berperan sebagai benteng pertahanan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan-perubahan sosial.

Pada masa kerajaan Gowa Benteng Ujungpandang mempunyai letak sebagai benteng pengawal yang strategis.



Bangunan buatan Jepang mirip dengan tipe bangunan sekitarnya
(sumber : digitalcollections.universiteitleiden.nl).

Namun, pada masa ini dengan adanya penemuan teknologi modern, seperti pesawat udara, sehingga tidak dapat berperan sebagai benteng pertahanan karena penyerangan sering terjadi dari udara. Jepang menggunakan benteng sebagai kantor-kantor, pusat penelitian ilmiah, terutama pertanian dan Bahasa. Dikarenakan kurangnya tempat untuk kantor, maka dibangun sebuah bangunan pada sudut utara sebelah timur benteng. Bangunan ini meniru tipe bangunan yang sudah ada, Sesudah Jepang menyerah dan kemerdekaan Indonesia diproklamkan Benteng Ujungpandang menjadi kosong.

4. Pasca Kemerdekaan

Pada tanggal bangsa 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tak lama berselang, yaitu pada bulan oktober 1945 Benteng Ujungpandang dijadikan sebagai tempat pengamanan bagi orang-orang Ambon. Sejak saat itu Benteng Ujungpandang menjadi perumahan sampai 27 Desember 1949.

Pada tahun 1949 gedung dalam Benteng Ujungpandang banyak mengalami kerusakan-kerusakan, meskipun telah diadakan pemugaran sebelum perang. Pada bulan Februari 1949 diadakan perbaikan ulang dibawah pengawasan dinas Purbakala (L.P.P.N) sehingga tetap terjaga bentuknya, lingkungan dan nilai kepurbakalaannya tetap terlestarikan.

Pada tahun 1950 Benteng Ujungpandang kembali berfungsi sebagai pertahanan yaitu ketika terjadi pertempuran antara KNIL (*Koninklijk Nedcrlandsch-Indische Leger*) dengan kesatuan- kesatuan TNI (*Tcntara Nasional Indonesia*) dibantu oleh

pasukan- pasukan gerilya dan pejoang-pejoang putera Sulawesi Selatan. Sejak tanggal 15 Mei 1950, benteng kembali menjadi perumahan militer atau bekas militer dengan keluarganya maupun orang-orang sipil yang sangat membutuhkan perumahan. Benteng makin tidak terpelihara dan mengalami kerusakan-kerusakan berat.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Purbakala tanggal 4 April 1953 No. 504/D.4, Benteng Ujungpandang hanya diperuntukkan untuk kegiatan atau usaha kebudayaan. Kemudian direalisasikan dengan pengosongan penghuni benteng melalui anggaran tahun 1969/1970 Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1970 tercatat kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) jiwa yang berhasil dipindahkan dari dalam benteng oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan dengan bantuan dan kerjasama dengan pihak Komando Daerah Militer (Kodam) Hasanuddin.

Kesadaran akan Benteng Ujungpandang sebagai sebuah monumen atau bangunan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan, maka benteng wajib dipelihara dan dilestarikan. Pada PELITA I dan PELITA II, dalam Tahun Anggaran 1969/1970 sampai dengan Tahun Anggaran 1978/1979 telah dikeluarkan biaya pemugaran atau rehabilitasi bangunan dan pengadaan peralatan serta koleksi museum dalam Benteng Ujungpandang.

Pendirian museum telah dirintis pada tahun 1966, namun terealisasi pada tahun 1970 pendirian, berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 182/V/1970 tanggal, 1 Mei 1970 dengan nama "*Museum La Galigo*". Pada Tanggal 24 Februari 1974, Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. I. Bagus Mantra meresmikan gedung pameran tetap di dalam Benteng

Ujungpandang_Pada tanggal 28 Mei 1979 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 093/0/1979, museum ini resmi menjadi "*Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan*" dan merupakan Unit Pelaksana Teknik di bidang Kebudayaan, khususnya bidang Permuseuman.

Pada tahun 1970-1976 dilakukan pemugaran bangunan dalam Benteng Ujungpandang dan benteng dijadikan sebagai Pusat Pengembangan Kebudayaan. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 014/A/1/1974 penetapan Benteng Ujungpandang sebagai pusat budaya. Pembentukan Dewan pembinaan Benteng Ujungpandang sebagai pusat pengembangan kebudayaan benar-benar dimanfaatkan. Dibangun sebuah panggung tempat pertunjukan kesenian ditengah lapangan dalam benteng. Sejak adanya panggung ini telah banyak kegiatan yang telah dilaksanakan seperti perlombaan seni tari, *bissu*, pertunjukan, drama, pameran, kesenian, purbakala, parade seni dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang ada dalam benteng digunakan oleh instansi yang bergerak dibidang kebudayaan, seperti Kantor Purbakala dan Peninggalan Nasional kantor Lembaga Purbakala (BPCB), Kantor Lembaga Sejarah Dan Antropologi Cabang II Ujungpandang (BPNB), Kantor Bidang Pendidikan Masyarakat, Kantor Konservasi Tari Indonesia (SMK), Balai Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia (Balai Bahasa), Kantor Arsip Nasional (sudah ada sejak zaman Kolonial), dan Museum La Galigo Bidang Kesenian.

Bagan Peranan Benteng Ujungpandang dari masa ke masa

Masa Pemerintahan Kerajaan Gowa	Benteng Ujung Pandang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gowa X yang bernama I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung atau Karaeng Tunipalangga Ulaweng
	Benteng pengawal Kerajaan Gowa untuk melindungi Benteng Somba Opu sebagai Pusat Kerajaan.
	Pada tanggal 9 Agustus 1634, Sultan Gowa XIV (I Mangerangi Daeng Manrabbia atau Sultan Alauddin) membuat dinding tembok dengan batu padas hitam , batu karang, dan batu bata, serta menggunakan kapur dan pasir sebagai perekatnya
	Pada tanggal 23 Juni 1635, dibangun lagi dinding tembok kedua di dekat pintu gerbang.
Masa Pemerintahan Belanda	Pada tahun 1667, Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada VOC dan diubah namanya menjadi Benteng Rotterdam. VOC mulai melakukan penataan di dalam benteng dan membangun gedung-gedung.
	Pada masa Kolonial Belanda (1667-1942) benteng ini berfungsi sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, dan pemukiman bagi para pejabat tinggi Belanda.
	Pangeran Diponegoro ditawan di benteng ini sejak tahun 1833 sampai dengan wafatnya pada 8 Januari 1855
	Pada tahun 1937, Benteng Ujung Pandang diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam.
	Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mendirikan museum di bekas kediaman Cornelis Speelman yang diberi nama Celebes Museum
	Pada tanggal 23 Mei 1940 bangunan ini didaftar sebagai monumen bersejarah dengan Nomor Registrasi 1010 sesuai <i>Monumenten Staatsblad</i> Tahun 1931.
Masa Pemerintahan Jepang	Benteng Ujung Pandang (1942-1945) dijadikan sebagai kantor dan pusat penelitian ilmiah khususnya pada ilmu pertanian dan Bahasa
	Jepang membangun satu Gedung berarsitektur Eropa, sama dengan bangunan lainnya didalam benteng

Pasca Indonesia Merdeka	Pada tahun 1945-1949, Benteng Ujung Pandang dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menumpas pejuang-pejuang Republik Indonesia.
	Pada tahun 1950, Benteng Ujung Pandang menjadi tempat tinggal anggota TNI dan warga sipil
	Pada tahun 1950, Benteng Ujung Pandang dikuasai Belanda dan dijadikan Pusat Pertahanan Tentara Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) dalam melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tahun yang sama KNIL dibubarkan dan Benteng dikuasai TNI
	Berdasarkan Surat Kepala. Dinas Purbakala No. 504/0.4 tanggal 4 April 1953 bahwa ruangan-ruangan di dalam benteng Ujung Pandang yang bisa menempati usaha yang bersifat kebudayaan saja
	Pada tahun 1970, Benteng Ujung Pandang dikosongkan dan kemudian dipugar.
	Pada tanggal 21 April 1977, Benteng Ujung Pandang secara resmi dijadikan Pusat Kebudayaan Sulawesi Selatan.
	Pada tahun 1970, Salah satu gedung di dalam kompleks Benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan atau dikenal dengan nama Museum La Galigo
Saat ini	Pada tanggal 22 Juni 2010 Benteng Ujung Pandang ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya
	Pada tanggal 27 April 1977, Benteng Ujung Pandang diresmikan sebagai Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Saat ini berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan
	Pada tahun 2018, Benteng Ujung Pandang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota sesuai melalui Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 574/432.2/tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Benteng Fort Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.



Penutup

Benteng Ujungpandang ini mulai dibangun pada tahun 1545 masa pemerintahan Raja Gowa ke-IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-X. Bahan dasar dinding pada awal pembangunan adalah dari tanah liat, kemudian bertahap diganti dengan bata pada masa pemerintahan raja Gowa ke-14, Tumenangari Gaukanna Sulatan Alauddin diganti dengan lapisan batu dalam tahun 1634. Pada masa ini benteng difungsikan sebagai benteng pengawal untuk melindungi benteng Somba Opu sebagai pusat Kerajaan Gowa.

Pertama kali dinding benteng Ujungpandang mengalami perubahan bentuk site plan baik arsitektur maupun bahan dasar batu bata menjadi batu padas yaitu masa pemerintahan VOC pada tahun 1667. Selain itu, VOC juga membangun bangunan di dalam benteng, dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan, pengaturan pertahanan, ekonomi, perdagangan, dan pemukiman bagi para pejabat tinggi Belanda.

Benteng Rotterdam dikategorikan sebagai monumen bersejarah oleh VOC. Untuk menghindari pemanfaatan gedung dalam benteng yang tidak sesuai dengan sifat monumen bersejarah, maka Yayasan Fort Rotterdam didirikan pada tahun 1936. Tugasnya untuk memelihara monumen bersejarah Fort Rotterdam. Pada tahun 1937, Benteng Ujungpandang diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam. Benteng Rotterdam mulai dikosongkan dan pada tanggal 23 Mei 1940, benteng terdaftar dalam *Monumenten Ordonantie* sebagai monumen bersejarah dengan No. 1010 MO. Stbl 1931 No. 238, dengan nama Fort Rotterdam.

Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, Benteng Ujungpandang dijadikan sebagai kantor dan pusat penelitian ilmiah khususnya pada ilmu pertanian dan Bahasa. Jepang juga membangun satu buah gedung yang bearsitektur Eropa.

Pasca kemerdekaan, fungsi benteng berubah. Benteng yang mengalami banyak kerusakan pun diperbaiki. Akan tetapi dengan adanya peristiwa KNIL di tahun 1950, benteng dijadikan sebagai pusat kegiatan perlawanan dalam melawan TNI. Kemudian dialihfungsikan Kembali sebagai tempat pemukiman tentara dan sipil.

Berdasarkan Surat Kepala. Dinas Purbakala No. 504/0.4 tanggal 4 April 1953 bahwa ruangan-ruangan di dalam benteng Ujungpandang yang bisa menempati usaha yang bersifat kebudayaan saja. Atas dasar ini maka pada tahun 1970 benteng Rotterdam dikosongkan oleh Pemerinah Daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dr.Sjarif Thajeb mengeluarkan Surat Keputusan No.014/A/1/1974 menetapkan Benteng Ujungpandang sebagai pusat Kebudayaan. Pada tahun 1974, dilakukan pemugaran dan penataan benteng. Pada tanggal 21 April 1977, benteng secara resmi dijadikan Pusat Kebudayaan Sulawesi Selatan. Saat ini Benteng Ujungpandang difungsikan sebagai Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Taman Budaya Museum La Galigo, Provinsi Sulawesi Selatan; serta Dewan Kesenian Makassar.

Benteng Ujungpandang merupakan salah satu warisan budaya yang menjadi bukti nyata kisah panjang masa kolonialisme di Makassar yang dicerminkan melalui ciri khas arsitektur Eropa.

Benteng memiliki nilai penting yang membuatnya ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya pada tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010.

Pada tahun 2014, benteng ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/M/2014 tentang Penetapan Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Selain itu, Status Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 574/432.2/TAHUN 2018 tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Benteng Fort Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Daftar Pustaka

- Andaya, Leonard. 2004. *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan*. Terjemahan oleh Nurhadi Sirimorok. Makassar: Inninawa.
- Anonim. 2011. *Museum La Galigo*. Makassar: Gramajapa Bersaudara Mandiri.
- Anonim. 1996. *Pemugaran Benteng Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Marlborough Bengkulu, Duurstede, Maluku*. Jakarta: Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakla, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Borahima Ridwan dkk. 1975. *Sejarah Kerajaan Tallo*. Ujung Pandang: Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi
- Brune, H.F. 1938. *Gids van Makassar En Zuid- Celebes*. Makassar: NV. Celebes Drukkerij.

- Hadimujono. 1979. *Sejarah Kuno Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang
- Mangngemba H.D. 1986. *Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok*. Makassar: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo.
- Mappangara Surjadi. 1993. *Eksistensi Kerajaan Gowa sampai Ditanda tanganinya Perjanjian Bungaya*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin
- Mappangara, Suriadi. 2012. *Perang Makassar*. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 4, Kolonisasi dan Perlawanan. Makassar: PT. Ichtar Baru Hoeve.
- Masdoeki, dkk. 1986. *Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam)*. Makassar: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1982. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700)*. Ujung Pandang: Bhakti Baru-Berita Utama.
- Nasir Muhammad, dkk. 2013. *Bangunan Bersejarah di Kota Makassar*. Makassar: Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.
- Nuraeda. Siti, dkk. 2008. *Album Sejarah dan Kepurbakalaan Sulawesi Selatan (Wisata Kultural Historis)*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Rachmah, dkk. 1985. *Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad XIV- XIX*. Makassar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan.
- Pabittei Aminah 1975. *Benteng Ujung Pandang*. Ujung Pandang: Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi.
- Patunru, A. R. (1967). *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- Foto Fort Rotterdam bersumber dari <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

BERMULA DARI BENTENG UJUNG PANDANG: TELISIK NILAI PENTING DIBALIK FORT ROTTERDAM

oleh

Yadi Mulyadi

Setidaknya tiga nama dilekatkan pada objek yang menjadi *landmark* Kota Makassar ini, beragam nama ini memiliki latar sejarahnya sendiri yang terkait dengan kandungan nilai pentingnya sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya. Benteng Ujungpandang (Ujung Pandang) atau Jumpandang menjadi salah satu nama yang dikenal oleh masyarakat selain Benteng *Panynyua* dan Fort Rotterdam.

Bermula di dekat benteng Ujungpandang sekarang ini, membujurlah suatu tanjung yang ditumbuhi rumpun-rumpun pandan. Sekarang Tanjung ini tidak adalagi, nama Jumpandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-X, Tunipalangga yang pada tahun 1545 mendirikan benteng Jumpandang sebagai kelengkapan benteng-benteng Kerajaan Gowa yang sudah ada sebelumnya, antara lain Barombong, Somba Opu, Panakkukang dan benteng-benteng kecil lainnya.

Beberapa tahun kemudian Benteng Ujungpandang jatuh ketangan VOC Belanda, usai perang Makassar, dengan

disetujuinya Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, benteng itu diambil alih oleh VOC Belanda yang kemudian mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam, mengacu pada nama tempat kelahiran Cornelis Janzoon Spellman yang merupakan Laksamana Armada Perang VOC pada saat Perang Makassar. Pasca pengambil alihan tersebut, benteng ini dibangun ulang oleh Belanda yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan sekaligus benteng pertahanan. Bangunan-bangunan bermotif Gowa di Fort Rotterdam perlahan-lahan diganti dengan bangunan gaya barat seperti yang dapat kita saksikan sekarang.

Dalam perjalanannya benteng ini beberapa kali beralih fungsi, banyak peristiwa penting yang terjadi pada setiap masanya. Pada periode awal pendiriannya, benteng ini menjadi salah satu benteng pertahanan Kerajaan Gowa Tallo yang memiliki peran penting dalam menunjang Makassar sebagai Pelabuhan internasional. Demikian juga VOC Belanda masih memfungsikannya sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat pemeritahan di awal masa kekuasaannya di Makassar. Pada periode ini, Belanda juga menjadikan benteng ini sebagai penjara bagi Pangeran Diponegoro dari Jawa. Setelah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya keluar Benteng Rotterdam, pada 1937 Benteng Rotterdam diserahkan oleh Pemerintah Belanda kepada Yayasan Fort Rotterdam. Pada 1938, salah satu gedung di dalam benteng ini yang sebelumnya merupakan kediaman Cornelis Speelman difungsikan sebagai Museum Celebes yang menjadi museum pertama di Sulawesi Selatan. Pemerintah Belanda pada 23 Mei 1940 mendaftarkan Benteng Rotterdam ini sebagai monumen bersejarah dengan Nomor Registrasi 1010 sesuai Monumen *ten Staatsblad* Tahun 1931. Pada

masa pendudukan Jepang (1942-1945) Museum Celebes kemudian ditutup, lalu dialihfungsikan sebagai pusat penelitian ilmu pertanian dan bahasa.

Benteng Rotterdam digunakan sebagai pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Republik Indonesia. Pada tahun 1950 benteng sempat menjadi tempat tinggal anggota TNI dan warga sipil, sebelum jatuh kembali ketangan Belanda pada tahun yang sama dalam rangka Pembentukan Negara Indonesia Timur dan dijadikan Pusat Pertahanan Tentara Koninklijke Nederlandsch Indische Leger (KNIL) untuk menghadapi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada 1970, Benteng Rotterdam dipugar oleh pemerintah dan difungsikan sebagai perkantoran. Salah satu bangunan difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama Museum La Galigo. Kemudian pada 27 April 1977, kantor Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Wilayah IV ditempatkan di benteng ini. Sejak itu Benteng Rotterdam dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai kantor pemerintahan yang menangani bidang kebudayaan.

Mengingat peristiwa bersejarah yang telah banyak terjadi di benteng ini, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 tanggal 22 Juni 2010 Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya. Surat keputusan tersebut masih mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang memuat pengertian benda cagar budaya sebagai "benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50

(lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan”.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 ini menegaskan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Seiring adanya peraturan baru terkait cagar budaya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, status penetapan Benteng Rotterdam kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 025/M/2014 tentang Penetapan Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Status Benteng Rotterdam sebagai cagar budaya juga diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 574/432.2/TAHUN 2018 tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Benteng Fort Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Narasi nilai penting yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya, baik pada surat keputusan tahun 2010 maupun 2014 dan 2018 tetap merujuk pada nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nilai penting sejarah Benteng Rotterdam dalam surat keputusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sejarah awal pendirian benteng ini oleh Kerajaan Gowa Tallo yang di satu sisi secara tinggalan materialnya sudah tidak terlihat jejaknya pada konstruksi benteng yang ada saat ini. Hal ini karena bangunan maupun struktur dinding Benteng Rotterdam saat ini merupakan

konstruksi yang dibangun oleh VOC Belanda pasca Perjanjian Bongayya, tanpa menysisakan konstruksi yang dibangun oleh Kerajaan Gowa Tallo. Adapun narasi nilai penting terkait ilmu pengetahuan, lebih pada pemaknaan Benteng Rotterdam sebagai objek kajian beragam ilmu pengetahuan baik arkeologi, sejarah, arsitektur dan disiplin ilmu lainnya.

Benteng Ujung pandang

☀ Bermula dari sebuah Ikrar para Raja

Salah satu dari sekian banyak kerajaan bercorak Islam di Sulawesi Selatan adalah Kerajaan Gowa Tallo yang dalam literatur sejarah dikenal dengan Kerajaan Makassar atau Kesultanan Makassar. Gowa Tallo merupakan dua buah kerajaan yang berikrar untuk bergabung menjadi satu kerajaan.

Dalam lontarak dikisahkan bahwa Raja Gowa Tunatangka Lopi' mempunyai dua putra, yang sulung bernama Batara Gowa dan bungsu disebut Karaeng Loeri Sero'. Pada suatu waktu timbul perselisihan diantara dua pangeran tersebut, yang dikhawatirkan oleh Tuna tangka Lopi dapat menimbulkan perang saudara didalam Kerajaan Gowa, maka untuk mencegah hal tersebut Raja Gowa Tuna tangka Lopi' memisahkan Gallarrang-Gallarrang di Gowa dalam dua golongan yang pertama ditetapkan untuk dikuasai oleh Batara Gowa, dan yang kedua dikuasai oleh Karaeng Loeri Sero. Batara Gowa dalam hal ini menguasai enam wilayah Gallarang yaitu, Gallarang Paccelekang, Gallarrang Pattallassang, Gallarrang Bontomanai Timur, Gallarrang Bontomanai Barat, Gallarrang Tombolo, dan Gallarrang Mangasa. Sedangkan Karaeng Loe ri Sero' menguasai empat wilayah gallarang yaitu,

Gallarrang Samata, Gallarrang Panampu, Gallarrang Mongcong Loe, dan Gallarrang Parang Loe.

Kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tumbuh dan berkembang mulai awal abad XVII-XX, periode dimana pelayaran dan perdagangan menjadi aktifitas utama dalam kaitanya dengan eksistensi dan supremasi kekuasaan kerajaan. Pusat-pusat kerajaan pada masa itu berada di daerah pesisir, seperti Kerajaan Gowa yang menempatkan pusat kerajaannya di Somba Opu dan Kerajaan Tallo di Tallo.

Setelah Raja Tunatangka Lopi' mangkat, yang mewarisi tahta Kerajaan Gowa ialah Batara Gowa. Perselisihan diantara Batara Gowa dengan Karaeng Loe ri Sero masih saja berlangsung, sehingga Karaeng Loeri Sero meninggalkan Gowa dan pergi ke Jawa. Sementara itu gallarrang-gallarrangnya terpaksa ikut pada Batara Gowa, hal mana berarti bahwa Batara Gowa mendaulat kekuasaan dari Karaeng Loe ri Sero' atas gallarrang-gallarrangnya. Kemudian Karaeng Loe ri Sero' kembali dari Jawa, maka beliau pergi tinggal di atas sebuah tempat dekat sungai yang diberi nama *Passi'nang* (yang bersedih), hal mana nama itu lazim disebut *Pacci'nang*. Nama tersebut diberikan oleh Karaeng Loe ri Sero' karena dia bersedih hati akibat perbuatan Batara Gowa terhadap beliau, sehingga beliau pergi ke Jawa dan kembalinya dari Jawa tinggal ditempat tersebut.

Sementara Karaeng Loe ri Sero' tinggal di Paccinang, maka Karaeng Loe ri Bantang dan Karaeng Loeri Bira, mewujudkan suatu persahabatan dengan beliau, kedua Karaeng Loe itu meminta kiranya Karaeng Loe ri Sero' sudi tinggal di kampung Bontoa, dalam wilayah Karaeng Loeri Bira. Beberapa waktu kemudian Karaeng Loe ri Bantang dan Karaeng Loe ri Bira



Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dan Kompleks Makam Raja-Raja Tallo. (sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

bersepakat untuk mengakui dan memperlakukan Karaeng Loe ri Sero, sebagai Raja yang kedudukannya lebih tinggi dari pada kedudukan mereka itu. Karaeng ri Bantang dan Karaeng Loe ri Bira, menyuruh rakyatnya menebang sebuah hutan yang bernama Talloang, dekat sungai Bira, maka ditempat itu didirikanlah istana untuk Karaeng Loe ri Sero' yang kemudian diberi nama Tallo.

Pada waktu itulah mulai berdiri Kerajaan Tallo dan Karaeng Loe ri Sero' sebagai Rajanya yang pertama, dengan wilayah yang terdiri dari empat wilayah kekaraengan dan tujuh gallarang. Wilayah kekaraengan Kerajaan Tallo yaitu Karaeng Loe ri Bira di Biringkanaya, Karaeng Loe ri Bantang di Sudiang, Karaeng Loe ri Bulu Loe di Paccerakkang, dan Dampang Parang Loe. Adapun gallarangnya terdiri dari, Gallarang MoncongLoe, Gallarang RappoJawa, Gallarang Rappokalling, Gallarang Kalukuang, Gallarang Kaluku Bodoa, Gallarang Pannampu, dan Gallarang Tallo. Sebelum berikrar untuk bersatu, kedua kerajaan ini selalu berselisih walaupun sebenarnya masih memiliki hubungan saudara antara Raja Gowa dan Tallo. Perselisihan kedua kerajaan diperkirakan berakhir pada 1528 setelah Raja Gowa yang bernama Daeng Matanre Karaeng Manguntungi dengan gelar Tumaparissi Kallona berhasil menaklukan Kerajaan Tallo yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Mangngayoang Berang Karaeng Tunipasuru.

Pasca berakhirnya perselisihan tersebut, dibuatlah suatu perjanjian yang berisi sumpah untuk menyatukan dua kerajaan, yang berbunyi *la-iannamo tau ampesiewai Gowa Tallo ia mona calla rewata* yang artinya barang siapa yang mengadu domba Gowa dan Tallo akan dikutuk Dewata.

Sejak saat itu, dikenal ungkapan *Rua Karaeng Nase're Ata* yang artinya dua raja tetapi hanya satu rakyat. Kedua kerajaan

tersebut menjadi bersaudara dan sangat erat hubungannya. Raja Gowa berperan selaku pemikir utama sedangkan Raja Tallo selaku pelaksana yang dikenal dengan sebutan *Pa'bitjara-Butta* (Mangkubumi) Kerajaan Gowa (Alam, 2009).

Hal ini menjadikan Tallo sebagai kerajaan otonom didalam Kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa Tallo ini kemudian terus berkembang dan menjadi kerajaan besar yang berpengaruh yang dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Guna menunjang aktifitas perdagangan di Pelabuhan Makassar, Kerajaan Gowa Tallo membangun benteng-benteng pertahanan sepanjang pesisir pantainya termasuk membangun Benteng Ujungpandang.

Kerajaan Makassar mencapai puncak kegemilangannya dan menjadi kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Salah satu bukti kegemilangan tersebut yaitu pada saat bangsa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511 M. Gowa-Tallo telah dikenal sebagai kerajaan maritim dan menjadi pusat perdagangan terpenting di Indonesia bagian timur (Laffan, 2015). Hal tersebut menjadi daya tarik bagi saudagar-saudagar muslim datang dan memilih Gowa-Tallo sebagai basis perdagangan dan bahkan beberapa diantara memilih untuk menetap di kerajaan ini (Utomo, 2013).

Para saudagar muslim dari tanah Melayu ini bukanlah saudagar yang hanya memiliki profesi sebagai pedagang, akan tetapi, mereka adalah mubalig yang memiliki komitmen tinggi terhadap penyebaran Islam. Dakwah mereka terpusat pada masjid yang mereka bina atas patronase pembesar dan raja Kerajaan Gowa. Aktifitas dakwah para saudagar muslim tersebut dibantu pula oleh tiga ulama yang datang dari Minangkabau, Sumatera Barat pada akhir abad 16, yaitu Abdullah Ma'mur Chatib Tunggal

(dikenal sebagai Dato'ri Bandang), Chatib Sulaiman (dikenal sebagai Dato'ri Pattimang) dan Chatib Bungsu (dikenal sebagai Dato'ri Tiro).

Sampai kemudian Kerajaan Gowa Tallo menjadi kerajaan Islam yang diawali dengan masuk Islamnya Raja Tallo yang bernama I Mallingkang Daeng Mannyonri Karaeng Tumenangari Bontobiraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini kemudian memakai nama Islam dengan gelar "Sultan Alauddin Awwalul Islam". Peristiwa masuknya Islam Raja Tallo pertama terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah (Noorduyn, 1956: 10; Azra, 2007:35). Peristiwa masuk Islamnya Raja Tallo kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar kerajaan, keluarga diraja, dan yang terpenting di antaranya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia, pangeran di Kerajaan Gowa, yang kemudian bergelar Sulṭān 'Alā al-Dīnatau Sultan Alauddin, yang merupakan kakek dari Sultan Hasanuddin.

Kerajaan Gowa dan Tallo yang kemudian menjadi kerajaan kembar yang disebut dengan Kerajaan Makassar, dimana Raja Gowa menjadi Raja Makassar dan Raja Tallo menjadi Mangkubumi atau perdana menteri dari Kerajaan Makassar. Dalam statusnya sebagai kerajaan kembar, Benteng Ujung pandang memiliki kedudukan istimewa, selain karena letaknya yang strategis, benteng ini menjadi representasi Kerajaan Gowa dan Tallo yang posisinya berada diantara Benteng Tallo sebagai pusat Tallo dan Benteng Somba Opu sebagai pusat Gowa.

✿ Penempatan yang strategis

Pesatnya perkembangan Kerajaan Gowa dalam melakukan perdagangan rempah-rempah dengan pedagang Inggris dan pedagang Portugis, menimbulkan kebencian bagi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan dagang Belanda itu, ingin menguasai perdagangan di Makassar dan tidak menginginkan pedagang dari negara lain berada di Makassar (Poelinggomang, 2002). Keinginan VOC Belanda ini tentunya mendapat perlawanan keras dari Raja Gowa ke XIV Sultan Alauddin (1593-1639), dengan mengambil langkah antisipatif pertahanan berupa pembangunan Benteng Panakkukang, Benteng Garassi, Benteng Galesong dan Benteng Ana Gowa. Pembangunan benteng-benteng tersebut untuk memperkuat benteng pertahanan yang telah dibangun sebelumnya oleh Raja Gowa ke IX dan X seperti Benteng Somba Opu, Benteng Kale Gowa, Benteng Tallo, Benteng Sanrobone, Benteng Ujung pandang, Benteng Barombong dan Benteng Ujung Tanah. Disusul pembangunan Benteng Mariso, Benteng Bontorannu dan Benteng Bayoa yang dibangun oleh Raja Gowa ke XVI Sultan Hasanuddin (1653-1669).

Dalam beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa raja Gowa IX Karaeng Tumapakrisi Kallonna yang mengawali pembangunan Benteng Kale Gowa dan Benteng Somba Opu dari gundukan tanah liat dan disebutkan bahwa hampir setiap raja yang memerintah membangun benteng atau minimal memberikan penguatan-penguatan tertentu pada benteng yang telah dibangun raja. Hal inilah yang mendukung mengapa kerajaan Gowa memiliki benteng pertahanan yang cukup banyak yaitu 14 buah antara lain: Benteng Somba Opu, Benteng Tallo, Benteng Ujung Tanah, Benteng Ujungpandang, Benteng Mariso, Benteng

Bontorannu, Benteng Panakkukang, Benteng Bayoa, Benteng Garassi, Benteng Barombong, Benteng Kale Gowa, Benteng Ana Gowa, Benteng Galesong, Benteng Sanrobone (Iqbal, 2004:6).

Untuk mengantisipasi serangan Belanda, Kerajaan Gowa Tallo kemudian menempatkan beberapa ribu pasukan dikerahkan untuk mempertahankan wilayah itu di bawah pimpinan Daeng Tulolo, saudara Sultan Hasanuddin bersama Sultan ar-Rasyid (Raja Tallo) dan beberapa orang inti pembesar kerajaan tetap tinggal di dalam Benteng Somba Opu. Adapun Benteng Ujung pandang dipercayakan kepada Karaeng Bontosunggu dan Benteng Panakukang dipercayakan kepada Karaeng Popo. Benteng Ujungpandang menjadi salah satu di antara empat belas benteng pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo yang didirikan di pesisir Selat Makassar. Benteng ini diambil alih oleh Belanda melalui Perjanjian Bongayya 18 November 1667 (Yusriana, 2011:1-2). VOC Belanda kemudian membangun ulang benteng ini, termasuk melengkapinya dengan lima bastion dan dua pintu, selain itu mengganti namanya menjadi Benteng Rotterdam.

Pintu gerbang utama terdapat di sebelah barat benteng yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan penutup daun pintu kembar dua sedang pintu sebelah dalam berukuran lebih kecil dengan pasak-pasak dari besi (*angkur*). Adapun pintu gerbang kedua merupakan pintu kecil terdapat di sebelah timur. Letak dan nama kelima bastion tersebut masing-masing adalah:

- Bastion Bone, terletak di sebelah barat, tepatnya di bagian tengah benteng.
- Bastion Bacan, terletak di sudut barat daya.
- Bastion Buton, terletak di sudut barat laut.
- Bastion Mandarasyah, terletak di sudut timur laut.

- Bastion Amboina, terletak di sudut tenggara.

Tiap bastion dihubungkan dengan dinding benteng kecuali bagian selatan yang tidak mempunyai dinding yaitu antara bastion Bacan dan bastion Amboina.

☀ **Beragam Nama, Beragam Makna**

Pada tanggal 1 November 1667, Speelman mulai tinggal di dalam Fort Rotterdam, meriam-meriam diletakkan di atas tembok, peralatan perang dipersiapkan baik untuk pertahanan dan penyerangan serta merombak semua bangunan yang ada dalam benteng dengan corak arsitektur kolonial. Nama lain dari Benteng Ujungpandang atau Fort Rotterdam adalah benteng *Panynyua* (Penyu) sesuai dengan bentuknya apabila dilihat dari udara menyerupai seekor penyu yang hendak bergerak ke laut. (Rasyid, 1983 ; 74). Speelman tidak tinggal diam, ia kemudian memperkuat Benteng Ujungpandang yang telah ia ganti namanya menjadi "Fort Rotterdam". Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta dan digantikan oleh putranya yang bernama I Mappasombala (Rasyid, 1983).

Setelah Benteng Somba Opu diratakan dengan tanah, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri ke Benteng Kale Gowa di Maccini Sombala. Sementara dilakukan konsolidasi tenaga perlawanan dikalangan orang Makassar. Walaupun secara *de facto*, Kerajaan Gowa telah kalah dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, namun masih terjadinya perpecahan dan perlawanan oleh para pembesar kerajaan Gowa, sehingga Speelman memutuskan untuk melakukan pukulan terakhir

terhadap benteng-benteng Kesultanan Gowa yang masih bisa bertahan yaitu Benteng Kale Gowa dan Benteng Ana' Gowa.

Pada 27 Juli 1669, terjadi lagi perjanjian baru untuk perdamaian, Raja Gowa I Mappasombala tidak datang karena sakit, tetapi tetap membubuhkan tanda tangan dan stempel kerajaan beliau diwakili oleh Karaeng Karunrung (juga membutuhkan tanda tangan dan sekali lagi disumpah dibawah Al Quran) dengan ditandatanganinya perjanjian kedua ini adalah sebagai bukti kemenangan pihak Belanda dan Arung Palakka terhadap Kerajaan GowaTallo, dan sebagai akhir dari perang Makassar. Belanda kemudian melakukan pesta kemenangan pada tanggal 20 Desember 1669 di Batavia, yang dihadari oleh Karaeng Tallo, Karaeng Bisei, Raja Gowa I Mappasombala, Karaeng Karunrung diwakili oleh putranya, Raja Ternate, Arung Palakka, Speelman dan Kapten Jonker van Manipa serta Gubernur Jenderal Maetsuyker (Mappangara, 2012: 281-282).

Menjadi Rotterdam, Menjadi Cagar Budaya

Mengacu pada denah dan fungsi bangunan dalam Benteng Rotterdam tahun 1767, VOC Belanda yang telah mengganti nama Benteng Ujungpandang menjadi Benteng Rotterdam, mulai membangun sarana dan prasarana baru. Pada bagian tengah benteng dibangun sarana dan fasilitas peribadatan bagi umat nasrani berupa bangunan Gereja. Deretan bangunan pada bagian utara difungsikan sebagai rumah tinggal, yaitu Kediaman Gubernur Jenderal Belanda, kediaman kepala pimpinan dagang, kediaman Capilyns, kediaman pendeta protestan. Pada bagian timur merupakan bangunan perkantoran Gubernur Belanda dan

stafnya. Pada bagian selatan merupakan bangunan yang difungsikan sebagai gudang senjata dan barak militer. Sedangkan pada bagian barat bangunan yang ada di fungsikan sebagai gudang, dan pos jaga.

Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC di wilayah Nusantara bagian timur. Speelman menata Makassar menjadi empat elemen. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar, dengan pembagian ruang, blok-blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya.

Sekutu Belanda dimasing-masing bastion yang ada dihuni oleh suku dan etnis yang berbeda dapat diuraikan sebagai berikut: Pasukan Arung Palakka dan orang Bone menempati Bastion bone dibagian barat (depan) sedangkan Arung Palakka sendiri dan para pengawalnya menempati tempat khusus (Istana) di Bontoala disebelah selatan Benteng Ujung Pandang, pasukan dan tamu dari Buton menempati Bastion Buton di bagian barat laut, pasukan dan tamu dari Bacan menempati Bastion Bacan di bagian barat daya, tamu dan orang Buton menempati Bastion Buton di bagian barat laut, tamu dan pasukan dari Mandar menempati Bastion Mandarsyah di bagian timur laut dan tamu dan pasukan dari Ambon menempati Bastion Amboina di bagian tenggara Benteng Ujung Pandang.

Pada awal pembangunannya, Benteng Ujung pandang dibuat menggunakan tanah liat sebagai bahan baku bangunannya, kemudian pada tahun 1634 saat masa pemerintahan raja Gowa

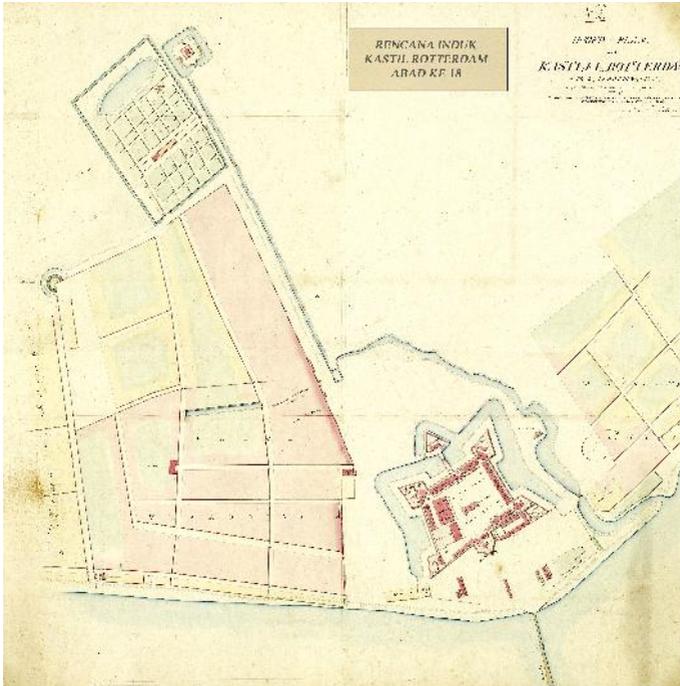
ke-14 yaitu Tumanenggari Gaukanna atau disebut juga dengan nama Sultan Alauddin, bahan baku bangunan diganti dengan bahan batu bata. Pada jaman VOC Belanda, konstruksi benteng diperkuat dengan batu andesit dan lempung pasiran. Terkait dengan batuan pada Benteng Rotterdam ini terdapat beberapa pendapat mengenai sumber batuan pada benteng. Salah satu pendapat tersebut mengungkapkan bahwa batu-batu tersebut berasal dari Maros dan Pangkep, hal ini dimungkinkan mengingat bahwa dahulu merupakan kerajaan yang ada di wilayah tersebut tunduk di bawah kekuasaan Gowa Tallo. Pendapat lain mengatakan bahwa batu-batu tersebut berasal dari Sungai Jeneberang karena di sekitar daerah itu terdapat tempat yang bernama *Pamangkulang batua* yang berarti tempat memotong batu (Tjandrasmita, 1986:9). Berdasarkan hasil analisis data sejarah dan laboratorium yang telah dilakukan oleh Isbahuddin (2016) ia menyimpulkan bahwa sumber bahan baku batuan pada struktur Benteng Rotterdam kemungkinan besar diambil dari dua tempat yaitu Maros dan Gowa, hal ini ditunjukkan oleh sampel yang telah dianalisis dari tempat kedua tempat tersebut terdapat kesesuaian antara sampel batuan dari wilayah Maros dan Gowa dengan sampel batuan dari Benteng Rotterdam. Analisis sumber bahan batuan Benteng Rotterdam ini menggunakan analisis mineral dan unsur kimia dengan metode analisis *thin section* dan *X-Ray Fluorescence (XRF)* yang ada di Benteng Ujung Pandang. (Isbahuddin, 2016).

Jenderal Speelman, sebagai penguasa Makassar yang baru, memilih wilayah Benteng Rotterdam dan daerah sekitarnya sebagai pusat pemukiman baru. Pemilihan didasarkan pada keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan pelabuhan dibanding benteng-benteng lainnya.

(Poelinggomang, 2002). Berdasarkan kondisi lingkungannya, pemilihan Benteng Rotterdam dan sekitarnya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan oleh pemerintah Belanda pada saat itu sangat tepat. Data lingkungan menunjukkan bahwa stratigrafi tanah di sekitar Fort Rotterdam yang merupakan endapan pantai sepanjang sekitar 2 km dan endapan sungai di daerah sekelilingnya. Menurut Ibrahim Maulana, dkk (1992), bahwa dataran pantai di kota Makassar merupakan daerah yang cocok untuk pemukiman.

Daerah ini pada umumnya sangat jarang (*permeable*), kering karena tidak dapat menahan air permukaan, air hujan yang turun akan langsung meresap kedalam tanah dan membentuk air tanah, di samping itu daerah ini bebas banjir (Maulana, dkk 1992; 2-3 dalam Mansyur, 2002:106). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Fort Rotterdam dan sekitarnya tidak akan kekurangan air sebagai sumber kehidupan yang ditandai dengan adanya sumur yang berada dalam lokasi benteng. Pertimbangan lain bahwa daerah yang merupakan endapan aluvium sungai Jeneberang dan sungai Tallo yang cocok untuk daerah pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah penyangga bagi Kota Makassar.

Keletakan Benteng Rotterdam yang berada di daerah pesisir pantai yang cenderung datar, selain itu daerah ini rawan terhadap ancaman banjir. Sehingga Belanda kemudian memodifikasi lanskap disekitar benteng, hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat kanal (*parit*) yang mengelilingi benteng (kecuali pada bagian depan yang langsung berhadapan dengan Selat Makassar, kanal ini kemudian terhubung dengan Sungai Makassar di sisi selatan benteng dan pada bagian timur dengan



Rencana Induk Kastil Rotterdam Abad ke 18
(sumber: nationaalarchif.nl)

Koningsplein (Lapangan Karebosi), kedua membuat beberapa saluran air dari dalam benteng keluar ke Selat Makassar, hal ini dilakukan sebagai sistem pembuangan air dari dalam benteng ke Selat Makassar (sistem pengendalian banjir dalam benteng).

Ketinggian Kota Makassar dari permukaan laut 0-25 M.dpl. Sedangkan di sekitar Benteng Rotterdam sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut. Sehingga Belanda membuat sistem pengendalian air dengan mengaktifkan kembali Sungai Makassar (memperluas dan memperdalam) untuk mencegah ancaman akibat adanya

banjir di Kota Makassar. Selain berapa kanal besar di buat di sisi timur kota yang terhubung langsung ke Pantai Losari (Selat Makassar), beberapa saluran air masih dapat dijumpai saat ini, namun sebagian lagi tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyempitan Sungai Makassar dari timur yang melewati pasar baru sampai bermuara ke Selat Makassar, begitu juga kanal disekitar Lapangan Karebosi yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Kondisi saat ini kanal di bagian utara lapangan Karebosi di tutup dengan pelat beton dan difungsikan sebagai pedestrian. Hal yang sama juga terjadi pada kanal di bagian timur Lapangan Karebosi yang mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi dengan baik.

Pada perang dunia kedua Benteng Rotterdam banyak mengalami kerusakan, hampir sebagian besar bangunan dalam benteng hancur baik oleh serangan Jepang maupun serangan sekutu, serangan yang dilakukan tidak hanya di darat tetapi juga di udara. Namun setelah Jepang memenangkan peperangan benteng ini mengalami perbaikan baik pada dinding maupun pada bangunan, Jepang kemudian mendirikan sebuah bangunan baru pada sisi timur laut (berdekatan dengan Bastion Mandarsyah), konflik akibat peperangan yang terjadi dalam perebutan benteng ini masih dapat dilihat pada bagian dinding berupa lubang peluru dan meriam. Kerusakan dan kehancuran bangunan akibat konflik peperangan yang hingga dapat terlihat di bagian barat benteng, tepat di Bastion Bone, 1 buah bangunan mengalami kehancuran total dan 1 buah bangunan masih menyisakan dinding dan pilar dan 1 buah bangunan lainnya dapat direkonstruksi walaupun pada bagian lantai 2 tidak dikembalikan ke bentuk semula, mengingat data yang diperoleh kurang memadai, selain itu reruntuhan sisa bangunan dapat menunjukkan bukti bahwa benteng ini pernah

mengalami kerusakan yang hebat akibat adanya konflik peperangan.

Walaupun telah mengalami kerusakan, secara bertahap pemerintah memugar benteng ini sebagai bukti kepedulian pemerintah dalam upaya melestarikan Benteng Rotterdam sebagai warisan budaya bangsa, karena benteng ini adalah rekaman perjalanan sejarah penting perjuangan Kerajaan Gowa Tallo dalam melawan penjajahan, sekaligus terkait dengan sejarah lahirnya Kota Makassar.

Memaknai Nilai Penting

Kerajaan Gowa dan Tallo memang merupakan kerajaan yang memiliki cukup banyak benteng, tepatnya sebanyak 14 benteng yang tersebar di beberapa lokasi. Keberadaan benteng-benteng tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi perang yang diterapkan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo, hal ini terbukti menyulitkan pihak Belanda.

Pengertian benteng oleh beberapa ahli sangat beragam dan kompleks seperti yang dikemukakan, Muhammad Ali (1963) benteng merupakan kubu pertahanan, Nurhadi (1989) berpendapat bahwa benteng sebagai bangunan tembok keliling yang berfungsi sebagai pagar atau pengaman satuan ruang atau rumah, sedangkan menurut W.J.S Poerwadar (1986) ada dua yaitu, benteng menurut wujud fisiknya adalah bangunan atau dinding yang berbentuk tembok dari batu, tanah, dan sebagainya untuk melindungi kota dari serangan musuh sedangkan pengertian benteng menurut arti kiasan yaitu apa saja yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan diri dari berbagai

bahaya yang mengancam, lebih jauh benteng adalah bangunan yang digunakan oleh militer (Poerdawa minta dalam Mujib, 1995:227).

Menurut sejarahnya, Kerajaan Gowa Tallo mulai mengenal benteng pertahanan pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, dimana saat itu banyak terjadi perang dalam usaha memperluas daerah kekuasaan kerajaan. Perkembangan Makassar sebagai bandar niaga dan pangkalan pertahanan diawali ketika Raja Gowa IX Daeng Matunru Karaeng Tumapakrisi Kallonna (1510-1546) memerintahkan pemindahan ibukota kerajaan dari daerah Tamalate ke daerah Somba Opu dan menetapkan Somba Opu sebagai ibukota dan pusat kegiatan administrasi pemerintahan dan perekonomian Kerajaan Gowa.

Sejalan dengan berkembangnya pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara akhirnya muncullah kekuatan baru di Asia Tenggara yaitu Kerajaan Gowa dengan ibu kotanya Somba Opu yang berkembang menjadi kota bandar yang besar. Hal ini didukung dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 dan kemunduran bandar-bandar niaga di daerah Jawa sehingga para pedagang mengalihkan jalur mereka ke Somba Opu (Iqbal, 2004).

Usaha untuk menjamin keamanan kerajaan dibangunlah benteng-benteng pertahanan. Dalam beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa raja Gowa IX Karaeng Tumapakrisi Kallonna yang mengawali pembangunan Benteng Kale Gowa dan Benteng Somba Opu dari gundukan tanah liat dan disebutkan bahwa hampir setiap raja yang memerintah membangun benteng atau minimal memberikan penguatan-penguatan tertentu pada benteng yang telah dibangun raja sebelumnya hal inilah yang

mendukung mengapa Kerajaan Gowa memiliki benteng pertahanan yang cukup banyak yaitu 14 buah yang tersebar sepanjang pesisir pantai Selat Makassar.

Kini sebahagian dari keberadaan bekas-bekas struktur benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa hanya berupa puing-puing tinggalan struktur di tengah-tengah hiruk-pikuk infrastruktur pembangunan kota. Bahkan sebagian lagi telah raib, hanya menyisakan catatan sejarah dan tradisi tutur dalam masyarakat, namun masih patut disyukuri karena dari sekian tinggalan benteng yang ada, masih terdapat beberapa bagian struktur benteng yang tetap bertahan yang merupakan sebuah warisan budaya yang perlu mendapatkan perhatian. Terlepas dari fungsinya sebagai alat pertahanan peninggalan benteng-benteng tersebut merupakan warisan budaya materi alhasil cipta, rasa dan karsa manusia yang kehadirannya memiliki peran yang sangat penting bagi upaya pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Benteng-benteng di Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting pengetahuan, menjadikannya sebagai salah satu objek kajian para peneliti. Kegiatan penelitian terhadap peninggalan benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa Tallo telah banyak dilakukan oleh para peneliti lokal, peneliti asing, instansi pemerintah terkait maupun oleh mahasiswa Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya. Tercatat beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya kegiatan-kegiatan ekskavasi penyelamatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Balai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Benteng Somba Opu, Sanrobone,

Kalegowa, Tallo, Garassi dan Benteng Ujungpandang. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Sejarah Antropologi (1976). Penelitian yang dilakukan oleh Drs Darwas Rasyid (1983) dengan judul *Benteng-Benteng Pertahanan Kerajaan Gowa*. Penelitian yang dilakukan Francois David Bulbeck (1991) dalam "South Sulawesi Prehistoric and Historical Archaeology Project (SSPHAP)" yang dituangkan dalam disertasi yang berjudul *A Tale Of Two Kingdoms Of Gowa-Tallo*. Penelitian yang dilakukan oleh Hasir Sonda (1999) dengan judul *Benteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi-Selatan Tinjauan Bentuk dan Fungsinya (Kajian Arkeologi Sejarah)*. Penelitian lain dilakukan oleh Padlan (1993) dengan judul *Konstruksi Benteng Sanrobone Sebagai Salah Satu Pertahanan Kerajaan Gowa, Tinjauan berdasarkan Tata letak*. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ridha (1997) dengan judul *Ukuran Batu Bata Benteng Sanrobone, Tinjauan Arkeologi Sosial*. Penelitian yang dilakukan oleh Erland Djulani (2001) dengan judul *Benteng Garassi Suatu Tinjauan Arkeologi Sejarah*. Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal (2004) dengan judul *Determinasi Lingkungan Dalam Penempatan Benteng-Benteng Kerajaan Gowa Abad 16-17*. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Perdana (2006) yang berjudul *Pola Pemukiman di Dalam Wilayah Benteng Kalegowa*. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rostia (2007) dengan judul *Pertimbangan Keletakan Sumur Dalam Wilayah Benteng Kalegowa*. Serta penelitian yang dilakukan Yusriana (2011) dalam rangka penyelesaian studi Magister Arkeologi, dengan judul *Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang*. Penelitian terbaru yaitu mengenai Benteng Ujungpandang yang dilakukan oleh Ardhi Ramadhan pada tahun 2020 dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai Sarjana Arkeologi Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin.

Penelitian tersebut berjudul Sejarah Perkembangan Struktur Dinding Benteng Rotterdam (Kajian Analisis Konstruksi Benteng Eropa). Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa Benteng Ujungpandang yang dibangun oleh Kerajaan Gowa Tallo menggunakan konsep Benteng Portugis yang berbentuk seperti benteng medieval. Hal ini merefleksikan adanya kerjasama antara Kerajaan Gowa Tallo dan Portugis pada masa itu. Setelah VOC Belanda mengambil alih benteng ini, kemudian membangun ulang dengan konsep baru yaitu dengan melengkapi bastion pada sudut-sudut benteng, yang disebut dengan *Mutire Fortress*. Konstruksi benteng dengan konsep *Mutire Fortress* ini dirancang untuk bertahan dari serangan pengepungan dan senjata canggih pada masa itu yaitu meriam. Hal ini juga terkait dengan fungsi dari Benteng Rotterdam yang digunakan oleh Belanda untuk pusat pemerintahan, perdagangan, sekaligus pertahanan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada benteng-benteng di Kerajaan Gowa Tallo itu semakin memperkuat pentingnya kita bersama-sama turut menjaga dan melestarikan keberadaan dari benteng tersebut, termasuk tentunya Benteng Ujungpandang. Dengan demikian tetap dapat menjadi objek kajian yang akan semakin membuka cakrawala dan wawasan kesejarahan kita mengenai Kerajaan Gowa dan Tallo sebagai salah satu kerajaan maritim besar di Nusantara.

Uraian sebelumnya menerangkan bahwa benteng-benteng Kerajaan Gowa yang berjumlah 14 buah umumnya terletak di sekitar pesisir pantai dan muara sungai. Hal tersebut mengindikasikan suatu bentuk pola keletakan yang didasarkan pada pertimbangan pemilihan lahan dalam penempatan benteng-benteng tersebut atau pertimbangan-pertimbangan lain yang

menjadi dasar dalam penempatannya. Pola keletakan yang dimaksudkan adalah tata cara atau aturan yang disepakati dan berulang secara teratur dalam penempatan benteng yang satu dengan benteng yang lainnya, atau patron dan patokan dalam penempatannya.

Benteng dalam Sistem Pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terhadap benteng-benteng tersebut, memperlihatkan bahwa keletakan masing-masing benteng sangat ditentukan pada apa fungsi dan peranan mengapa benteng itu dibangun. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pembangunan sebuah benteng ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan jaminan keamanan bagi wilayah teritorial kerajaan dan menjadi alat legitimasi politik Kerajaan Gowa-Tallo.

Berbicara tentang fungsi keletakan benteng dalam subsistem alat pertahanan, pemukiman mencerminkan bahwa secara umum fungsi keletakan benteng ditujukan bagi pertahanan pusat-pusat pemukiman terutama bagi bangsawan-bangsawan kerajaan dalam hal ini raja dan keluarganya, serta pembesar-pembesar kerajaan yang lain. Peranan keletakannya adalah adanya penguasaan wilayah-wilayah inti bagi terjaminnya pertahanan dan ketahanan Kerajaan Gowa Tallo pada masa itu.

Keletakan benteng-benteng Kerajaan Gowa Tallo bersifat teratur sesuai penempatan lokasi benteng tersebut dibangun yang disesuaikan dengan kehendak sang penguasa pada saat benteng itu dibangun, ini berarti ada ketentuan terhadap lokasi-lokasi penempatan benteng, seperti benteng yang ditujukan untuk

pertahanan bagi kerajaan taklukkan untuk tujuan konfederasi politik Kerajaan Gowa yang umumnya terletak di daerah yang mempunyai struktur pemerintahan sendiri, dan merupakan lokasi-lokasi pusat hunian, dari segi konstruksi nampak lebih rapi serta fasilitas yang ada pada benteng tersebut lebih memadai, begitupun benteng yang dibangun untuk difungsikan sebagai subsistem pertahanan atau sebagai mesin perang cenderung sangat dipengaruhi oleh pasang-surut dinamika politik Kerajaan Gowa Tallo.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal (2004) pada benteng-benteng di Kerajaan Gowa dan Tallo memperlihatkan bahwa keletakan benteng selain sebagai alat pertahanan, pemukiman, juga merupakan alat legitimasi politik. Hal tersebut tercermin pada beberapa benteng yang dibangun pada prakejayaan Kerajaan Gowa-Tallo seperti benteng Somba Opu, Tallo, Kale Gowa dan Sanrobone. Pernyataan bahwa keletakan benteng merupakan alat legitimasi politik juga tampak pada benteng yang dibangun pada masa puncak kejayaan Kerajaan Gowa yaitu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin seperti benteng Ana Gowa, Galesong, Panakkukang dan benteng yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin sebagai wujudantisipasi terhadap ancaman perang terbuka antara VOC dan Kerajaan Gowa seperti benteng Mariso, Bontorannu Bayoa.

Dalam penelitiannya mengenai benteng-benteng di Kerajaan Gowa dan Tallo, Muhammad Iqbal (2004) menyimpulkan bahwa keletakan benteng-benteng Kerajaan Gowa dan Tallo mempunyai keteraturan dalam penempatannya yang disesuaikan pada fungsi dan peranan keletakan benteng, Seperti benteng yang terletak di daerah pesisir dan muara sungai serta daerah

pedalaman umumnya berfungsi sebagai pertahanan bagi pusat politik, pemerintahan, ekonomi, perdagangan di tempatkan pada daerah-daerah pusat kota atau pusat pemerintahan. Oleh karena sumber kekuasaan berada di istana maka ke letakan benteng juga berperan sebagai mesin perang untuk mempertahankan ibukota kerajaan diperlukan lahan yang mampu mengcover secara luas baik kota, jalur jalan, jalur pelayaran, jalur transportasi air (sungai) misalnya Benteng Somba Opu, Tallo, Sanrobone, Galesong. Begitupun dari segi perlengkapan persenjataan yang tangguh dan kontruksi yang rapi merupakan bukti pendukung fungsi dan peranan keletakan benteng. Dalam hal ini Benteng Kale Gowa juga dapat digolongkan sebagai benteng yang berpola teratur sebab benteng tersebut merupakan rangkaian dari fungsi dan peranan keletakan benteng sebagai legitimasi dari kharisma politik Kerajaan Gowa dan Tallo untuk jaminan keamanan daerah-daerah inti kerajaan.

Keteraturan pola keletakan benteng juga terlihat pada benteng yang berfungsi sebagai penyangga ibu kota kerajaan atau benteng yang fungsi dan peranan keletakannya adalah sebagai benteng pendukung keletakan benteng induk, baik sebagai pertahanan atau secara umum sebagai mesin perang, misalnya Benteng Mariso, Panakkukang, Barombong, maupun sebagai pertahanan untuk lokasi hunian, serta pertahanan lokasi-lokasi sumber daya alam disekitarnya seperti benteng Ujung Tanah, Ujung Pandang, Garassi, Ana Gowa yang cenderung terletak di sekitar benteng induk. Dan benteng sebagai bagian dari strategi perang melawan VOC Belanda, terbukti membuat Belanda kewalahan dalam menaklukan Kerajaan Gowa dan Tallo.

Keberadaan benteng-benteng di Kerajaan Gowa dan Tallo baru dapat dihancurkan setelah Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya dengan pihak VOC Belanda pada Jum'at 18 November 1667. Salah satu pasal dalam perjanjian tersebut pihak Belanda (VOC) memaksa Sultan Hasanuddin untuk menghancurkan semua benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa di pesisir pantai selat Makassar kecuali Benteng Ujung Pandang yang diperuntukkan bagi Belanda dan benteng Somba Opu yang diperuntukkan bagi Kerajaan Gowa (Mattulada, 1982;86).

Benteng Somba Opu sebagai benteng pertahanan ibukota kerajaan dan lebih berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan perdagangan menjadi benteng pertahanan terakhir Kerajaan Gowa yang hancur dua tahun pasca perjanjian Bungaya setelah melalui peperangan yang cukup besar (Mattulada, 1991;92). Sedangkan Benteng Ujungpandang beralih menjadi milik Kompeni Belanda dan berganti nama menjadi Fort Rotterdam.

Perjanjian Bongaya ini merupakan sebuah kunci yang penting sekali artinya bagi pihak VOC untuk sewaktu-waktu mencampuri urusan dalam negeri hampir seluruh kerajaan-kerajaan tidak saja di Sulawesi Selatan, tetapi juga kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri di seluruh Indonesia bagian timur. Campur tangan Belanda yang sangat lihai sedikit demi sedikit mengurangi dan akhirnya melenyapkan sama sekali keleluasaan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan itu.

Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan orang-orang Makassar ini sangat melegakan orang-orang VOC yang sesungguhnya sudah sangat payah keadaannya. Pasukan-pasukan

VOC sangat menyedihkan keadaannya. Tidak kurang dari 182 orang serdadu dan 96 orang pelaut Belanda sangat gawat keadaannya. Tiap hari delapan sampai sepuluh orang yang mati karena sakit. Sebagian besar orang-orang Belanda itu menderita penyakit disentri. Bahkan dokter-dokter Belanda banyak yang jatuh sakit, sehingga keadaan orang-orang Belanda betul-betul payah.

Bagi Belanda Perjanjian Bongaya itu dianggap sebagai sebuah kemenangan yang beritanya sampai di Batavia pada 14 Maret 1668. Pemerintah Belanda dengan segera menyebarkan isi perjanjian itu di Batavia, juga kepada Sultan-sultan yang belum takluk kepada VOC. Maksudnya untuk memberi kesan kepada mereka betapa hebatnya kekuasaan dan kekuatan VOC. Tindakan mereka ini menunjukkan betapa pentingnya kemenangan VOC atas Kerajaan Gowa Tallo bagi Belanda.

Meski demikian perlawanan bersenjata di seluruh persada Nusantara Indonesia tidak pernah berhenti. Bahkan Sultan Hasanudin pun kembali bangkit melancarkan perlawanan dari April 1668 hingga Juni 1669. Kemudian, berlanjut dengan membantu pemberontakan Trunojoyo, 1675-1680 M. Hal ini menandakan bahwa bagi Kerajaan Gowa Tallo dan termasuk Sultan Hasanuddin, Perjanjian Bungaya bukanlah sebuah akhir dari perjuangan, tetapi merupakan pemantik perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan penidasan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin inilah yang menjadikannya beliau layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Dengan demikian memaknai nilai penting Benteng Ujungpandang tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Kerajaan Gowa Tallo. Adapun secara arsitektural, sebagai wujud

budaya material yang merefleksikan strategi pertahanan, menjadi bukti bahwa VOC Belanda pada saat itu memiliki ketakutan pada Kerajaan Gowa dan Tallo, sehingga benteng ini dibangun ulang dengan menerapkan konsep *murtuary fortress* agar diharapkan dapat menghalau perlawanan dari Kerajaan Gowa Tallo. Benteng ini menjadi bukti bagaimana Kerajaan Gowa Tallo memiliki pengetahuan yang strategis dalam pemilihan lokasi Benteng Ujungpandang. Hal ini secara tidak langsung diakui oleh Belanda yang kemudian menjadikan lokasi benteng ini sebagai pusat pemerintahannya yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Makassar. Hal ini semakin memperkuat nilai penting Benteng Ujungpandang yang terkait dengan sejarah Kota Makassar, sehingga keberadaan benteng ini harus selalu kita jaga, lindungi, dan lestarikan.

DaftarPustaka

- Andaya, Leonard. 2004. *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan*. Terjemahkan oleh Nurhadi Sirimorok. Inninawa Makassar.
- Anonim, 2010. Laporan Pemintakatan (*Zoning*) Benteng Ujung Pandang Kota Makassar. Kelompok Kerja Perlindungan. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Isbahuddin, 2016. Sumber Bahan Batuan Struktur Benteng Rotterdam (Kajian Analisis Material Batuan). Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tidak Terbit.
- Iqbal A.M., Muhammad 2004 "Determinasi Lingkungan Dalam Penempatan Benteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo Abad XVI-XVII". *Skripsi*: Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Makassar: Tidak Terbit.

- Mansyur, Syahrudin 2002 Kota Makassar Akhir Abad XVII hingga Awal Abad XX (Suatu Studi Arkeologi Ruang, *Skripsi*, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar: Tidak Terbit.
- Mappangara, Suriadi. 2012. Perang Makassar. Indonesia dalam Arus Sejarah 4. Kolonisasi dan Perlawanan. Penerbit PT. Ihtiar Baru Hoeve. Atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mattulada, 1982, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700), Ujung Pandang: Bhakti Baru-Berita Utama.
- , 1998. Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan . Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Mulyadi, Yadi. 2017. Meneratas Jejak Perjanjian Bungaya. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 2002 Makassar Abad XIX, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia Bekerjasama Dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Ramadhan, Ardhi. 2020. "Sejarah Perkembangan Struktur Dinding Benteng Rotterdam (Kajian Analisis Konstruksi Benteng Eropa)". Skripsi: Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Makassar: Tidak Terbit.
- Rasyid, Darwas 1994 Beberapa Catatan Tentang Benteng-Benteng Pertahanan Kerajaan Gowa. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional
- Sonda, Hasir. 1999. "Benteng-Benteng Kerajaan Gowa-Tallo di Sulawesi-Selatan Tinjauan Bentuk dan Fungsi (Kajian Arkeologi Sejarah)". Tesis Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sumalyo, Yulianto, 1999, "Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20", dalam *Panggung Sejarah: Persembahan kepada*

Prof. Dr. Denys Lombard, Ecole Francaised'extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tjandrasasmita, Uka. 1986. Pemugaran Benteng Ujung Pandang Sulawesi Selatan dan Benteng Malborough, Bengkulu. Benteng Durrstede, Maluku.

Yusriana, 2011. Arahana Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang. Program Studi Arkeologi. Kelompok Bidang Ilmu Humaniora. Program Pasca sarjana Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

FORT ROTTERDAM PELABUHAN TERAKHIR SANG PANGERAN DIPONEGORO

oleh
Nusriat



Saya menginjak kaki di Benteng Rotterdam sekitar bulan Maret 1984. Saya langsung menuju ke bangunan E dimana salah satu ruangan di lantai 2 merupakan ruang kerja Kepala Museum UPTD Museum Lagaligo Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Drs. Harun Kadir, yang juga merupakan Dosen pengajar di Universitas Hasanuddin

Fakultas Sastra Jurusan Sejarah dan Arkeologi (saat ini berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya Departemen Arkeologi). Kepentingan saya menemui beliau adalah untuk mengikuti mata kuliah Museologi pada setiap hari rabu berlangsung selama satu semester. Selanjutnya pada

tahun 1987 dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) SI, saya kembali rutin masuk di Benteng Rotterdam karena Pembimbing 2 saya adalah Bapak Bahru Kallupa, beliau adalah Kepala Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Makassar (Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan) yang menempati salah satu ruangan lantai 2 bangunan N, disinilah awal mulanya saya memperoleh informasi tentang, Pangeran Diponegoro yang konon menjadi tawanan bersama istri anak dan pengikutnya di lantai bawah atau basement yang sempit di bangunan gedung N atau bastion Bacan di sudut barat daya Benteng Rotterdam. Setelah tahun 1987, saya berkali-kali masuk ke Benteng Rotterdam. Kemudian sejak tahun 1989 saya resmi menjadi bagian dari Benteng Rotterdam karena saya harus masuk kantor sesuai hari dan jam kerja sebagai pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang berkantor di dalam Kompleks Benteng Rotterdam.

Maka tanpa mencari informasi yang valid mengenai kebenaran informasi di gedung mana tahanan Pangeran Diponegoro dengan keyakinan penuh saya menyampaikannya secara resmi kepada pengunjung Benteng Rotterdam bahwa di ruang sempit dan pengap yang langit-langit ruangnya melengkung rendah bagian tertinggi pada bagian tengah hanya berukuran 2,2 meter dengan dua pintu jeruji yang salah satu pintunya hanya berukuran tinggi 1,2 meter. Hasilnya ketika pengunjung memasuki ruang tahanan yang dimaksud dengan spontan mereka terharu bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan air mata. Informasi tersebut berlangsung terus-menerus tidak diketahui sumber pertamanya sejak kapan dari mana dan oleh siapa.



Pencerahan akhirnya datang dikala masa kerja saya di Benteng Rotterdam sudah 31 tahun tepatnya di bulan Februari tahun 2020, ketika saya bertemu langsung dengan Bapak Peter Carey seorang sejarawan Inggris sekarang menjadi YAD *Adjunct Profesor* di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang telah melakukan penelitian tentang riwayat Pangeran Diponegoro selama 30 tahun

Mari lakukan perubahan demi pembenaran informasi mengenai tempat penawanan Pangeran Diponegoro beserta istri anak dan para pengawalnya di Benteng Rotterdam. Untuk itu saya berpedoman pada buku *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855* yang ditulis oleh Peter Carey, khususnya pada bagian



Gedung N lantai 1 diklaim sebagai ruang tahanan Pangeran Diponegoro
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

IV berjudul Perang dan Pengasingan (1825-1855) atau pada Bab 12 Bertahan Hidup di Gulag Belanda: Tahun-Tahun Pengasingan dan Kematian (1825-1855).

Sebagai pendahuluan dalam bab 12 Peter Carey menjelaskan tentang perjalanan laut yang merupakan pengalaman yang melelahkan bagi seorang Pangeran Diponegoro lantaran selama perjalanan dengan menggunakan kapal Belanda bernama Pollux yang dikawal langsung oleh ajudan Van den Bosch bernama Letnan dua Knoerle, kapal berjalan lambat dikarenakan tidak ada angin yang mendorong sehingga perjalanan mereka berlangsung lambat pada tanggal 4 Mei-12 Juni 1832 (selama 40 hari) terombang ambing di tengah laut menyebabkan banyak serdadu dan awak kapal yang jatuh sakit membuat Pangeran gundah hatinya teriris-iris. Bahwa perjalanan tersebut adalah rangkaian pengasingan Pangeran Diponegoro menuju Manado maka dimulailah penahan beliau di Fort Nieuw Amsterdam selama 3 tahun, ditempatkan pada 4 kamar dalam benteng ini. Untuk kepentingan tersebut maka benteng Nieuw Amsterdam di renovasi agar elegan lengkap dengan rak buku, meja tulis beserta lacinya dilengkapi lampu minyak besar keluaran terakhir. Pangeran juga diberi 2 ekor kuda sebagai perlengkapan agar Pangeran dapat berjalan-jalan keliling di daerah itu, sayangnya Pangeran tidak merasa cocok untuk menjelajahi desa-desa Manado dengan berkuda, sejak itu beliau meminta untuk di sapa dengan panggilan Pangeran Ngabulkamit. Permintaan Pangeran kepada gubernur Van den Bosch agar mendatangkan 2 orang guru spritual, istri-istrinya dan istri-istri para pengawalinya yang masih di Jawa untuk di datangkan ke Manado, namun di tolak. Kesengsaraan beliau masih ditambah lagi dengan pemotongan tunjangan yang mestinya 600 gulden menjadi hanya 200 gulden



Lukisan Pangeran Diponegoro bersama istri dan pengikutnya
(sumber: wikipwdia.org)

saja, padahal beliau harus menggaji para pengawal dan membeli bahan makanan.

Dalam kehidupan seks Pangeran Diponegoro sangat menarik, Pietermaat melaporkan bahwa percakapan yang paling digemari beliau adalah masalah perempuan sebagai kekasih yang hebat, terbukti bahwa selama dalam dipengasingan Pangeran mendapat 7 orang anak kebanyakan dari wanita-wanita yang berasal dari Jawa diluar istri resminya.

Masih di pengasingan Benteng Nieuw Amsterdam Manado Pangeran Diponegoro sempat bertengkar dengan saudarinya bernama Raden Ayu Dipowiyono dan suaminya yang menambah kegundahnya. Ketegangan tersebut akhirnya sirna lantaran dari

hasil laporan residen ternyata adik dan ipar pangeran beserta para pembantu sang adik bersedia pulang ke Jawa pada Agustus 1832.

Pangeran merasa lega atas pilihan adiknya yang mau kembali ke Jawa, sehingga ruangan/kamar bekas saudaranya tersebut sepenuhnya bebas ditempati pangeran sekeluarga untuk membesarkan anak pertamanya berusia 8 bulan, yang lahir pada tanggal 4 Januari 1832 bernama Raden Mas Kindar dari istrinya yang setia mengikutinya dari Jawa bernama Retnoningsih. Menurut Cambier inilah yang menyemangati dan menyenangkan hati Pangeran, anak ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan penuh semangat dan seorang muslim yang taat dan hangat, ia dididik sendiri oleh ayahandanya Pangeran Diponegoro dengan penuh perhatian yang berlanjut pula terhadap anak-anaknya Raden Mas Sarkuno (lahir 1884) dan Raden Dulkalbi (lahir sekitar 1885), mereka dididik dalam tradisi pesantren, juga menumbuhkan rasa benci kepada Belanda, hal ini diungkapkan oleh Gubernur Celebes Alexander Van der Hart (menjabat 1853) bahwa Pangeran telah mendidik anak-anaknya tentang kekejaman pemerintah Kerajaan Belanda dengan mencontohkan pengalamannya yang pahit dan memilukan.

Pangeran Diponegoro membuat autobiografi mengenai kepedihan hatinya atas keinginannya untuk berangkat haji yang ternyata justru diasingkan ke Manado, merupakan cara-cara Kerajaan Belanda untuk menghentikan perang dengan cara yang curang. Dalam pengasingannya Pangeran tidak pernah lelah menulis meskipun tidak ada dukungan dari manapun yang menghasilkan naskah Babad tanah Jawa menggunakan aksara pegon yang panjang aslinya 1.151 halaman.

Pada awal tahun 1833 Van den Bosch berkeinginan memindahkan Pangeran Diponegoro ke Belanda (benteng Nieuwe Hollandse Waterlinie), mengingat ada indikasi perang di Eropa sehingga perlu mengantisipasi pergerakan Pangeran yang bisa saja memihak ke Inggris namun berubah karena dikhawatirkan Pangeran tidak tahan terhadap temperatur udara 69 derajat fahrenheit, dan Raja Belanda Willem I menolak usul Van den Bosch. Sebagai gantinya maka Rencana tersebut dialihkan ke wilayah lain di Hindia Belanda, secara rahasia Pangeran bersama istri anak dan 23 pengawalnya dipindahkan ke Makassar (Fort Rotterdam) hingga ajal menjemputnya. Benteng ini dipilih karena memiliki kekokohan dan lebih luas dengan garnisum pengawal yang sangat ketat berjumlah 200 orang sedangkan di Fort Nieuw Amsterdam Manado hanya berkekuatan 40 pengawal.

Pemindahan lokasi tahanan Pangeran Diponegoro bersama istri 2 anak dan 23 orang pengawalnya berlangsung selama 21 hari tepatnya pada tanggal 20 Juni - 11 Juli 1833 dari Fort Niuw Amsterdam Manado ke Fort Rotterdam Makassar, menggunakan kapal sekunar Angkatan laut bernama Circe, perjalanan yang cukup mengagetkan dewan Hindia atas kejadian para awak kapal yang bereaksi negatif (rusuh) ketika mengetahui bahwa ada sang Pemimpin (Pangeran Diponegoro), sehingga pejabat *Raad van Indie* waktu itu, menyarankan jika terjadi pemindahan berikutnya agar menggunakan pengangkutan dengan kapal dagang kolonial.

Pangeran Diponegoro, istri anak dan pengawalnya sesampainya di Fort Rotterdam Makassar ditempatkan di ruangan perwira dekat dengan Pos Utama, dengan pemandangan dari lotengnya mengarah ke teluk Makassar, namun tembok bagian dalam menghalangi pemandangan ke arah kota (Carey 2015: 405).

Ruangan yang dimaksud menurut Peter Carey adalah salah satu ruangan staf perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan di lantai 2 Gedung J, ruangan berukuran 510 x 370 cm, memiliki 2 pintu besar berdaun kembar ukuran (260 x135 cm), yakni di sebelah selatan dan disebelah barat dilengkapi dengan jendela di sisi timur sebanyak 6 daun jendela ganda (kaca dan papan naco), terdapat ruang kecil mungkin dulunya berfungsi sebagai tempat lampu minyak di sudut barat laut ukuran 170 x 145 cm, sedangkan tinggi dinding disisi barat 5,00 cm dan di sisi timur 240 cm. Penunjukan ruangan ini dapat dibenarkan mengingat Pangeran adalah seorang pemimpin sehingga sangat mungkin jika ditempatkan di ruangan khusus.



Foto ruangan yang diklaim sebagai kamar Pangeran diponegoro. Tampak sisi timur dan utara, sisi utara dan sisi timur, nampak pintu masuk dari sebelah barat. (sumber: Nusriat)

Perlu diketahui bahwa posisi ruangan yang dimaksud sangat strategis pada masanya karena letaknya persis di atas pintu gerbang utama *hoofdwacht* (markas utama penjaga) tepatnya pintu gerbang sisi timur yang saat ini telah tertutup oleh rumah penduduk. Sekarang bangunan ini di beri nama Gedung J dengan luas bangunan 838,24 m² posisi di sisi timur Benteng Rotterdam,

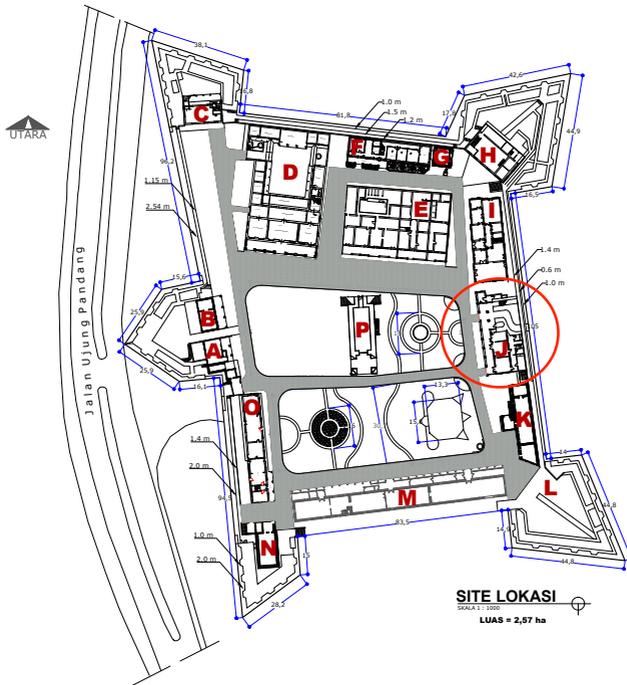


Foto Gedung J tampak depan, pintu utama, dan denah Fort Rotterdam.
 (sumber: nationaalarchief.nl, denah: BPCB Prov. Sul-Sel)

bangunan berlantai 2 memanjang utara-selatan, pada lantai bawah arah hadap pintu ke barat terdiri atas 5 kamar/pintu sedangkan pada lantai atas hanya satu pintu utama di sebelah timur, akses dari lantai bawah ke lantai atas menggunakan tangga menyerupai terowongan terdiri atas 17 anak tangga, bersebelahan dengan tangga yang dimaksud terdapat pula terowongan berlekuk yang dahulu berfungsi sebagai akses keluar masuk benteng bahkan disebut sebagai pintu gerbang utama. Khusus untuk ruang tahanan Pangeran Diponegoro pada denah yang digambar oleh J. Wilbur Wright dari Oxford, diberi simbol ruang F7.

Mengenai pernyataan pemandangan teluk Makassar dari loteng untuk kondisi bangunan saat ini tidak mendukung karena tidak terdapat celah atau jendela dari atap, mungkin dimaksud loteng adalah lantai 2 bangunan. Selanjutnya pernyataan "*namun tembok bagian dalam yang tinggi menghalangi pandangan ke arah kota*" dapat dipersepsi ketika berada di lantai bawah, tentu saja tidak dapat melihat ke arah kota yakni sebelah timur Benteng Rotterdam karena pasti terhalang tembok benteng.

Selama Pangeran berada di Benteng Rotterdam beliau bersama istri anak dan pengawalnya tidak diizinkan berkeliaran di luar tembok, penjagaan sangat ketat ketimbang di Manado. Aktifitas Pangeran yang dominan adalah menulis termasuk menulis surat yang mencengangkan blokade keamanan Van den Boshch, dalam pembatasan ruang gerak yang demikian rapi ternyata pangeran berhasil mengirim surat korespondensi dengan pejabat Mayor Jenderal Cleerens tertanggal 13 Oktober 1835. Hal ini disebabkan karena para pengawal beliau melakukan kontak dengan para pelayanan benteng dan bergaul bebas dengan anggota-anggota garnisum tentara dan orang sipil yang

memberikan kesempatan untuk menyelundupkan berita-berita penting baik kedalam maupun dari luar benteng. Bahwa karena Pangeran seorang Islam yang taat meskipun dicampur dengan Kejawan sehingga membuat simpati masyarakat Bugis-Makassar yang terlanjur membenci Belanda.

Pada awal maret tepatnya tanggal 7 Maret 1837, Pangeran kedatangan tamu istimewa dikediamannya yang panas dan sesak di Fort Rotterdam yakni Pangeran Hendrik sang Pelaut (*Prince Hendrik de Zeevaarder*) seorang anak remaja berusia 16 tahun sebagai putra bungsu Raja Willem II yang sedang melakukan pelayaran jarak jauh dari Eropa ke Hindia Belanda dengan pengawalan tutornya Pieter Arriens, kapal bernama *Fregat Bellona* dengan kaptennya bernama Pieter Arriens berangkat meninggalkan Belanda. Pada tanggal 10 maret 1837, pangeran Hendrik menulis surat untuk ayahnya, berisi antara lain bahwa dia bertemu dengan tahanan bernama Diepo Negoro (Pangeran Diponegoro) yang tampak tidak bahagia karena cara penawanannya oleh bangsa kita (Belanda) dilakukan secara curang, bahwa sang Pangeran Diepo Negoro mendatangi dan menggandeng tangannya lalu menarik tangannya mengajak masuk ke kamarnya di lantai satu. Selanjutnya bahwa Diepo Negoro mengatakan kepada Gubernur kalau dirinya sangat bahagia atas kedatangan tamu yang mengunjunginya ditempat kediaman yang menyedihkan itu. Bahwa menurut Pangeran muda Hendrik ketika Diepo Negoro tertawa raut kegirangannya itu terlihat dipaksakan, tidak spontan, tidak wajar, sebab ia terlihat lebih suka menyendiri, bahkan awalnya ia tidak suka bercakap dalam bahasa Melayu, padahal sebenarnya Diepo Negoro orangnya sangat menyenangkan dan sang Pangeran muda melihat semangat Diepo Negoro masih membara. Dalam catatan harian

Pangeran Hendrik bahwa perlakuan yang diterima mantan pemimpin Perang Jawa itu akan memotivasi para pangeran dan penguasa lokal lainnya melakukan perlawanan kepada Belanda di masa mendatang, lebih jauh sang Pangeran Muda mencatat bahwa cara-cara penangkapan Diepo Negoro merupakan aib bagi pamor generasi tua (pendahulu) karena dikala Pangeran Diponegoro datang untuk mengakhiri perang yang telah menelan kerugian dan korban jiwa yang banyak bagi kedua belah pihak namun atas perintah Jenderal de Kock menangkapnya dengan anggapan sebagai pemberontak, sang Pangeran Muda memperkirakan bahwa keuntungan menangkap pemimpin Perang Jawa untuk menguasai seluruh tanah Jawa merupakan sebuah kesalahan karena justru akan memberikan dampak perang berkepanjangan lantaran tidak ada lagi petinggi-petinggi di Jawa yang mau bekerjasama dengan Belanda.

Dua tahun kemudian di bulan Juni 1839 , berita-berita tentang Pangeran Diponegoro semakin gencar, beliau berkorespondensi dengan kaum kerabatnya di Yogya, bahkan diakhir tahun ini beliau mencoba menyurati ibunya yang ditolak oleh pejabat Belanda karena ketahuan masih menggunakan gelar seperti pada masa perang Jawa. Hal ini sempat menjadi pemberitaan dalam pers Prancis menjelang revolusi di bulan Februari 1848 yang mengkritik tajam cara-cara Belanda memperlakukan Pangeran Diponegoro (Carey: 409)

Pada tahun 1838, Pangeran Diponegoro mulai menyusun dua naskah lain dengan aksara *pegon* (Arab gundul) berjudul Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa, ditulis dalam bahasa Jawa yang aneh dengan banyak kata-kata dan ungkapan-ungkapan Arab yang merupakan ciri khas dalam gaya surat-surat

pribadi Pangeran, jadi tidak seperti irama sastra babad karyanya yang lain.

Adapun isi Buku tentang Sejarah Ratu Tanah Jawa berkisah tentang sejarah Jawa dan legenda-legenda sejarah Jawa mulai dari Nabi Adam hingga jatuhnya Majapahit sekitar 1510-an dan proses kedatangan Islam di Jawa. Menurut Peter Carey bahwa naskah tersebut tidak mengikuti alur kronologis secara ketat melainkan ditulis dengan gaya anekdot yang menjelajahi topik-topik lain; seperti wayang, pahlawan-pahlawan legendaris, dan tempat-tempat suci, bahwa naskah ini dibuat seolah-olah Sang Pangeran sedang bercakap-cakap dengan keluarganya dan menuliskan uraian panjang untuk memberi nasihat dan humor yang menyusul kemudian.

Buku kedua tentang Hikayat Tanah Jawa, berisi tentang pemahaman Pangeran Diponegoro tentang Islam, pengalaman dan latihan religiusnya, doa-doa sufi, dan berbagai teknik meditasi, serta denah-denang mistik (daerah) untuk menyebut kata-kata Arab dan latihan pernapasan saat berzikir, seluruh rangkaian buku ini memberikan tuntunan kepada pembaca tentang ramalan Jawa atau *prinbon*

Pada bulan Januari 1844, Diponegoro meminta kepada Gubernur sejumlah teks Jawa untuk keperluan pendidikan bagi ke-6 anak lelakinya karena tiga diantaranya sudah akil balik, sayangnnya pemerintah belanda tidak menanggapi permintaan tersebut dengan alasan mengapa Pemerintah Belanda harus membantu Diponegoro untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim yang taat?, maka teks *serat menak* dicoret dari daftar yang mestinya disalin di Keraton Surakarta dengan alasan tidak ada

ongkos/biaya, sementara yang lain dikirim pada tahun 1846 (Carey: 412)

Pada bulan april 1844 Gubernur Celebes P.B.J de Perez bertanya kepada Diponegoro, apakah ia ingin pindah ke bagian lain Hindia Belanda agar lebih lapang tempatnya mengingat anggota keluarganya bertambah banyak? Namun beliau menjawab 'tidak' beliau melanjutkan bahwa ingin menghabiskan sisa hidupnya di makassar.

Menteri Jajahan J.C Baud (menjabat 1840-1848), menulis surat pada bulan april tahun 1844 untuk mengklarifikasi dan meyakinkan kembali Raja Willem II bahwa Pangeran Diponegoro sebetulnya tidak ditahan di sebuah benteng kecil melainkan di lingkungan yang cukup luas di Fort Rotterdam, dimana Pangeran menempati ruang salah satu perwira. Juga tidak benar bahwa Pangeran dipisahkan dari keluarga, karena istri dan ke tujuh anaknya yang lahir dipengasingan tetap berada di sampingnya, bahkan salah satu anaknya telah memasuki usia siap menikah. Kemudian karena jumlah anggota keluarga Pangeran Diponegoro semakin banyak maka ruangan perwira disebelahnya diberikan juga kepada Pangeran.

Pada tahun 1847 ketika Makassar menjadi pelabuhan bebas telah menarik lebih banyak kapal-kapal dagang asing seperti dari Arab demikian juga kapal-kapal nusantara untuk singgah di Makassar, sehingga dengan sendirinya telah menciptakan berbagai peluang untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Pemberitaan tentang Pangeran Diponegoro, mungkin secara jalur tidak resmi telah diketahui oleh seorang pelukis Jawa keturunan Arab Raden Saleh Syarif Bustaman (hidup sekitar tahun 1811-1880) yang berbasis di Semarang yang juga menjalin kontak dengan

Keraton Yogyakarta mengenai kesulitan hidup Pangeran Diponegoro dalam pengasingan. Raden Saleh sendiri sangat mungkin menjadi narasumber untuk laporan pers Perancis, mengingat Raden Saleh beberapa kali pergi ke Paris dan tinggal beberapa waktu di Kota Paris sekitar akhir 1840-an (Carey: 411).

Perlu diketahui bahwa Pangeran Diponegoro sebagai tahanan negara (*staatsgevangene*) tidak diperbolehkan menulis surat, tetapi diperbolehkan menulis untuk kesenangan sendiri dan menlis buku maupun naskah-naskah Jawa yang disalinkan baginya atas biaya Pemerintah Belanda. Hal ini terbukti ketika Pangeran Hendrik datang mengunjungi Pangeran Diponegoro, mencatat bahwa Pangeran Diponegoro menghabiskan banyak waktu untuk menyalin ayat-ayat suci Al Quran dan menggambar. Hal ini merupakan bahagian dari minat Pangeran Diponegoro dalam hal menggambar sesuatu denah mistik.

Dalam dekade terakhir hidupnya Pangeran, mulai mempersiapkan saat kematiannya dengan cara mistik *syatariah* atau dikenal dengan istilah *plawanganing pati* (membuka pintu gerbang kematian). Pada akhir tahun 1844, Pangeran meminta lagi kepada Gubernur agar diizinkan bertemu dengan kedua putranya di Jawa (Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raib) yang telah diasingkan ke Ambon tahun 1840 bersama saudara mereka yang sakit Jiwa (Pangeran Diponingrat), Pangeran juga menghawatirkan nasib anak tertuanya (Pangeran Diponegoro II) yang juga dalam pengasingan di Sumenep.

Sekalipun otoritas Belanda mengakomodir sejumlah keperluan Pangeran dengan menaikkan tunjangan bulanan dan memperluas ruangan tempat tinggalnya di fort Rotterdam, namun tidak sepenuhnya meluluskan permintaan bekas Pemimpin Perang

Jawa tersebut untuk berkumpul kembali dengan anak-cucunya yang juga diasingkan. Bahwa menurut Peter Carey, kemungkinan Pemerintah Belanda menghendaki agar Pangeran Diponegoro tidak perlu tahu tentang tragedi yang menimpa keluarganya seperti; kematian putra nomor dua termuda (Raden Mas Jonet), karena berselisih dan berkelahi dengan seorang perwira Belanda di Yogya pada bulan April 1837, perihal pengasingan putra-putranya yang lain yang berakibat salah seorang menjadi gila, perlakuan buruk terhadap dua anak perempuannya oleh bekas panglima tentaranya (Basah Mertogono), dan perubahan kawasan Tegalrejo menjadi lahan rumput untuk ternak kuda milik Residen Yogya (Carey:413).

Akhir Juni 1849, ketika sejumlah orang khususnya kalangan Perintahan Belanda berharap tidak lagi merasa takut terhadap Pangeran Diponegoro, justru salah seorang saudaranya (Pangeran Ario Ronggo), diasingkan juga ke Ternate karena kejahatan sepele yakni melakukan kontak dengan kaum alim ulama dan berperilaku sebagai muslim yang soleh serta siap mengorbankan diri demi kakaknya dengan menyebut kakaknya sebagai *Sultan Erucokro*, gelar tersebut dilarang penggunaannya baik Pangeran Diponegoro sebagai Pimpinan Perang Jawa maupun anggota kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan.

Hal yang menggembirakan bagi Pangeran adalah ketika datang sepucuk surat dari ibunya Raden Ayu Mangkorowati, maka sang Pangeran berkomunikasi secara langsung dengan Gubernur Celebes De Perez, bahwa kerinduan terbesarnya adalah mengharapakan kehadiran ibundanya melewati sisa-sisa hidupnya disampingnya. Untuk menghadirkan ibundanya Pangeran mengusulkan agar nantinya menumpang di kapal uap

ditemani bekas komandan tentaranya di Bagalen bernama Basah Kerto Pangalasan, yang diperkirakan hanya lima hari perjalanan dari Semarang ke Makassar. Dalam penantian sebagai orang pengasingan yang pilu ditikam rindu tak tertahan, sang Pangeran membalas surat ibundanya bahwa sejak saat itu dan sampai kapanpun Pangeran dan anak-anaknya akan selalu menaiki tangga ke atas loteng untuk melihat ke pelabuhan siapa tau sang ibunda datang dengan kapal uap yang rutin bersandar di teluk Makassar. Menanggapi surat Mangkorowati Residen Yogya Baron A.H.W de Kock (menjabat 1848-1851), secara rahasia melampirkan surat tersebut kepada Gubernur Jenderal J.J Rochussen (menjabat 1845-1851), mengusulkan agar Pangeran Diponegoro tidak diizinkan meninggalkan Fort Rotterdam mengingat situasi politik di Keraton Yogya masih sangat rawan, sehingga dikhawatirkan Pangeran melarikan diri dari Makassar karena pelabuhan Makassar menjadi Pelabuhan Bebas.

Diawal Maret 1849 lebih kurang empat bulan setelah pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Gubernur De Perez, putra kedua Pangeran yang berusia 14 tahun bernama Raden Mas Sarkumo, sakit dan akhirnya meninggal yang kemudian dimakamkan di sebidang tanah milik Pemerintah Belanda di Kampung Melayu. Tragedi ini menambah kepiluan sang Pangeran yang telah berusia 60-an tahun tubuhnya semakin lemah, mengingat pernah hidup melarat di hutan dan lalu dipengasingan jauh dari tanah kelahiran. Pangeran Diponegoro lalu meminta kepada Gubernur yang baru Pieter Vreede Bik (menjabat 1849-1852) untuk rencana kedepan harus melakukan persiapan ketentaraman untuk dirinya dan keluarganya antara lain memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah dan mempersiapkan pusaranya sendiri disamping makam putranya,



Makan Pangeran Diponegoro beserta istrinya
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

sedangkan untuk keluarganya (istri, anak dan pembantunya) beliau meminta dibuatkan rumah lengkap dengan sebuah mesjid kecil dengan maksud agar Pangeran dapat menikmati kebebasan disisa hidupnya, sekalipun ia tidak diperbolehkan meninggalkan Fort Rotterdam, namun Pangeran mengharapkan anak istrinya memiliki kediaman yang layak di Makassar setelah wafatnya. Petter Carey menganggap bahwa Pangeran Diponegoro, memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur keuangan, melakukan persuasif dengan para pejabat Pemerintahan Belanda demi menjamin masa depan anak keturunannya setelah beliau wafat.

Pada tanggal 11 Mei 1849 Gubernur Jenderal di Batavia melayangkan surat rahasia yang memerintahkan bahwa Pangeran Diponegoro harus tetap tinggal dalam tembok benteng Speelman sampai akhir hidup. Surat menyurat dalam arsip Belanda di awal tahun 1850-an kebanyakan menyoroiti perihal keuangan Sang Pangeran.

Pada hari senin pagi tanggal 8 Januari 1855, para petugas Belanda di Fort Rotterdam dibangunkan dari tidur, atas berita duka meninggalnya Sang Pangeran pada pukul 06.30 pada usia 70 tahun. Surat Sertifikat kematiannya dinyatakan bahwa beliau meninggal karena kondisi fisiknya makin menurun lantaran sudah berusia lanjut, pemakamannya di lakukan pada sore hari yang sama dikebumikan di Kampung Melayu bersama keris pusakanya Kanjeng Kiai Bondoyudo disamping makam putra keduanya Sarkumo. Sebulan kemudian diberitakan dalam surat kabar Javasche Belanda (*Nieuwe Rotterdamsche Courant* tanggal 2-4-1855) bahwa upacara penguburan Pangeran Diponegoro dilaksanakan dengan hak-hak penuh menurut agama Islam dengan penuh penghormatan yang pantas sesuai martabatnya

sebagai bangsawan dan keinginan terakhirnya untuk dimakamkan di samping makam putra keduanya, Cerey:416).

Kisah hidup Pangeran Diponegoro sebagai putra Sultan Hamengkubuwono ke III dari perkawinannya dengan putri dari Bupati Pacitan yang bernama Raden Ayu Ratna Ningsih, yang lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan nama kecil Ontowiryo dengan berbagai gelar antara lain Adipati Anom, Ratu Adil, Sultan Erucokro dan lain-lain, beliau termasuk orang yang taat menjalankan perintah agama namun tetap berpegang teguh pada adat istiadat. Kehadiran kolonial Belanda memicu perlawanan Pangeran Diponegoro yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda, dan dibawa ke Batavia kemudian untuk menjauhkan dari pendukung dan pengikut yang masih loyal akhirnya beliau diasingkan ke Menado dan ditempatkan dalam Benteng Nieuw Amsterdam. Selanjutnya beliau dibawa ke Makassar pada tahun 1834 dan ditempatkan di Fort Rotterdam hingga beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855, untuk mengunjungi makam Pangeran Diponegoro beserta istri dan anak keturunan juga kerabatnya sangat mudah karena terletak di jantung Kota Makassar tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Tujuh hari setelah kematian Pangeran Diponegoro, istri dan anak-anaknya bertemu dengan Gubernur Celebes Van der Hart, mengutarakan keinginannya untuk tetap tinggal di Makassar agar dekat dengan makam almarhumah. Keinginan keluarga almarhum untuk tetap tinggal di Makassar ternyata menjadi ketetapan Pemerintah Hindia Belanda yang khawatir jika anak keturunan Pangeran terutama Raden Mas Kindar (putra pertama di

pengasingan) menyusun titik-titik pemberontakan baru jika kembali ke Jawa.

Pada 10 Mei 1855, Gubernur Jenderal A.J. Duymaer Van Twist (menjabat 1851-1856) mengeluarkan dekrit rahasia di Dewan Hindia Belanda yang berisi tentang perintah memperlakukan istri dan anak-anak Pangeran Diponegoro sebagai tahanan asing yang dibatasi ruang geraknya di Makassar. Untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka di Makassar maka diberikan tunjangan tahunan sebesar 6.000 gulden yang dibebankan kepada Keraton Yogya. Selanjutnya atas inisiatif Gubernur Van Der Hart maka keluarga Pangeran diberi lahan seluas satu hektar yang letaknya bersebelahan dengan makam almahrum, yang dilengkapi dengan bangunan rumah bergaya Belanda yang sederhana sebagai tempat tinggal keluarga Pangeran yang akhirnya diperbolehkan meninggalkan Fort Rotterdam.

Daftar Pustaka

Carey, Peter. 2014. *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro* (1785-1855). Jakarta : Buku Kompas PT.Kompas Media Nusantara

SISTEM PENATAAN RUANG SITUS CAGAR BUDAYA BENTENG ROTTERDAM KOTA MAKASSAR. PROVINSI SULAWESI SELATAN

oleh
Iswadi

A. Latar Belakang

Warisan budaya atau yang disebut *cultural heritage* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilestarikan dari generasi masa lalu dan diwariskan kepada generasi sekarang. Kelompok masyarakat yang diwarisi akan mewarisakannya kembali pada generasi yang akan datang. Dalam pengertian ini, warisan budaya dapat berupa suatu ide, nilai-nilai, maupun benda. Oleh karena itu, warisan budaya mencakup bidang yang sangat luas, karena seluruh karya manusia merupakan budaya. (Aksa, 2004: 1).

Benteng sebagai salah satu sumberdaya Arkeologi (warisan budaya) seringkali ditemukan di wilayah perkotaan. Kota-kota yang memiliki warisan budaya yang unik baik bendawi (*tangible*) seperti tinggalan-tinggalan kuno, maupun tradisi (*intangible*) berupa adat istiadat dan kegiatan-kegiatan budaya, kini lebih menarik wisatawan daripada kota-kota yang tanpa warisan budaya (Nuryanti, 2010). Tentu saja, daya tarik ini akan sangat terkait dengan bagaimana sumberdaya budaya itu disajikan kepada masyarakat. Untuk menyajikan secara menarik, ada

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di antaranya, keaslian (*authenticity*), kontekstualisasi (*contextualization*), dan interaktivitas (*interactivity*) (Tanudirjo, 2006).

Perkembangan kota di Indonesia pada awalnya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya India, Cina dan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kota-kota besar di Indonesia sekarang ini tidak lepas dari peranan bangsa Eropa terutama Belanda – pada saat mereka menguasai hampir seluruh wilayah kepulauan Nusantara - yang memulai perkembangannya dengan kehidupan dalam benteng (*intra muros*). Hal ini dibuktikan dengan masih dominannya struktur fisik kota-kota di Indonesia yang pernah dirancang oleh bangsa Eropa, seperti yang tampak pada kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan bahkan Semarang disebut sebagai “Little Netherlands” dan Bandung sebagai “Paris van Java” (Mansyur, 2001:1)

Pada awal kehadirannya, sekitar abad 15-16 mereka mendirikan loji-loji perdagangan (*gudang*) untuk menimbun barang dagangan berupa rempah-rempah dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya loji-loji tersebut di beberapa kota pelabuhan di Nusantara seperti Banten, Surabaya dan Makassar. Pembangunan loji-loji tersebut merupakan usaha awal Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Usaha untuk menguasai Nusantara semakin mantap dengan menjadikan loji-loji tersebut sebagai benteng pertahanan. Selain itu, maksud memperkuat bangunan-bangunan tersebut ialah sebagai pertahanan dalam bersaing dengan pedagang-pedagang bangsa lain sekaligus sebagai tempat tinggal (Soekiman, 1997:1-2). Beberapa contoh bangunan benteng tersebut adalah Fort Jacatra di Batavia, Fort Vastenburg di Solo,

Fort Vredeborg di Yogyakarta, Fort Belvedere di Surabaya dan Fort Rotterdam di Makassar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cikal bakal kota-kota di Indonesia sebagai kota kolonial memiliki persamaan yaitu berawal dari bangunan benteng.

Dari bangunan benteng itulah Belanda kemudian melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaannya. Selain itu, benteng juga menjadi kawasan permukiman Belanda dan berfungsi antara lain sebagai pusat pemerintahan, militer dan pertahanan bahkan ada juga yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan (Sumalyo, 1999:303).

Kemudian, setelah keamanan di sekitar benteng dapat dikendalikan perlahan-lahan kehidupan dalam benteng mulai ditinggalkan dan beralih di luar benteng. Selain itu akibat desakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim, alam sekeliling, demi kekuasaan dan tuntutan hidup sesuai dengan daerah tropis mereka kemudian mendirikan rumah tempat tinggal serta kelengkapannya yang disesuaikan dengan keadaan dan mengambil unsur budaya setempat (Soekiman, 1997:2). Hal ini sesuai dengan pendapat Sumalyo (1993:3), yang mengemukakan bahwa pada masa penjajahan Belanda, bentuk kota dan bangunan di Indonesia dikembangkan oleh para arsitek Belanda dengan menerapkan konsep lokal atau tradisional. Oleh karena itu, kajian tentang kota kolonial menjadi penting untuk dapat mengungkapkan unsur budaya lokal yang nampak pada bentuk dan morfologi kota yang dikembangkan oleh Belanda (Mansyur, 2001:1-2).

Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah salah satu kota yang memiliki warisan budaya yang cukup menonjol di antaranya adalah Benteng Ujungpandang atau Benteng

Rotterdam¹. Benteng yang berada di tengah kota ini, tepatnya di jalan Ujungpandang Nomor 1, pada awalnya merupakan benteng milik Kerajaan Gowa-Tallo. Benteng ini menjadi salah satu di antara empat belas benteng pertahanan Kerajaan Gowa-Tallo yang didirikan di pesisir Selat Makassar. Semula Benteng Ujungpandang dibangun oleh Raja Gowa X, Karaeng Tumapakrisi Kallonna, kemudian diambil alih oleh Belanda melalui Perjanjian Bongayya 18 November 1667 (Poelinggomang 2002, Andaya 2004).

Pada awal pertumbuhan kerajaan Gowa langkah pembangunan benteng merupakan usaha memberi ciri dan corak pada wilayah kekuasaannya, sekaligus ciri ekspansif yang tinggi dalam menghadapi kerajaan di sekitarnya baik dalam kalangan etnis Makassar maupun mengantisipasi perkembangan kerajaan Bugis di Teluk Bone dan sekitarnya. Itulah sebabnya pada daerah yang dikalahkan dibangun benteng baik sebagai pemukiman maupun alat perekat terciptanya jaringan kewilayahan yang terintegrasi atau berkonfederasi di bawah kharisma hegemoni kerajaan Gowa-Tallo (Sonda 1999:176).

Kedudukan politik dan ekonomi Makassar yang kuat menjadi ancaman besar bagi VOC, yang menjalankan kebijakan monopoli. Pertentangan dan permusuhan di antara Kerajaan Gowa Tallo dengan VOC (Belanda) yang berlangsung sejak tahun 1615, hingga mencapai puncaknya dalam bentuk perang Makassar

¹Nama lain benteng ini adalah Benteng *Panynyua* (kura-kura) penampakan dari atas atau denah benteng ini mirip kura-kura dengan kepala mengarah ke laut. Setelah Speelman berkuasa, benteng ini kemudian di pugar dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam, Sesuai dengan nama tempat kelahirannya.

pada Desember 1666 sampai 18 November 1667. VOC unggul dan berhasil memaksa Kerajaan Gowa Tallo (Makassar) untuk menandatangani Perjanjian Bongaya (*Het Bongaais Verdrag*) (Poelinggomang, 2016:29-30). Salah satu isi perjanjian dimana menyebutkan bahwa Seluruh benteng sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu Barombong, Pa'nakukkang, Garassi, Mariso, Baro'boso. Hanya Somba Opu yang boleh tetap berdiri untuk ditempati raja. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan baik, bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya (Andaya, 2013:373-374).

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, Kota Makassar mulai tumbuh secara fisik. Hal ini ditandai dengan penghunian kompleks benteng oleh VOC. Benteng menjadi pusat pemerintahan, pertahanan dan perdagangan. Sesuai dengan nama benteng yang diberikan Belanda, Kota Makassar dimaksudkan untuk meniru kota kelahiran Speelman itu. Tidak mengherankan, jika penataan Kota Makassar lama menyerupai pola kota Rotterdam di Belanda (Sutherland dalam Poelinggomang 2002:36).

Namun, posisi benteng yang berada di tengah kota sebenarnya menimbulkan kerawanan terhadap pelestariannya, mengingat kawasan benteng dalam beberapa tahun ini mulai mengalami tekanan pembangunan. Kondisi ini akan sangat merugikan benteng itu sendiri, seperti terlihat dari gejala penurunan kualitas fisiknya seperti dapat diamati pada kawasan kota bersejarah/tua, tersebut. Padahal benteng ini merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah kota Makassar (sebagai pusat kegiatan perekonomian dan sosial budaya). (Yusriana, 2011).

Menurut Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan (konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Makassar merupakan salah satu kota yang dikembangkan oleh kolonial Belanda. Hal ini tidak lain karena pada masa penjajahan baik masa VOC maupun kerajaan Belanda, Makassar dijadikan sebagai pusat perdagangan untuk kawasan timur Nusantara. Peran kota Makassar pada saat itu sangat penting bagi perdagangan Belanda yaitu sebagai pelabuhan transito, terutama bagi daerah-daerah Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Makassar sendiri sebelum masa kolonial merupakan sebutan untuk kerajaan kembar yang terletak di pesisir barat-jasirah selatan yaitu Gowa-Tallo. Makassar kemudian menjadi terkenal pada abad XVI karena merupakan bandar terkenal yang berkedudukan di Somba Opu.

Benteng Rotterdam tidak hanya sebagai cikal bakal Kota Makassar, namun telah menjelma menjadi salah satu *landmark* dan

identitas Kota Makassar. Terlepas dari hal tersebut, kondisi Benteng Rotterdam mengalami banyak permasalahan utamanya adalah aspek keruangan.

B. Permasalahan

Perkembangan kota dapat diartikan perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik. Dinamika perkembangan kota dapat ditinjau dari peningkatan aktivitas kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus mobilitas penduduk, yang pada akhirnya menuntut kebutuhan ruang bagi pemukiman (Koestoer, 2001).

Menurut Sjafrizal (2012), perkembangan kota pada umumnya digerakkan oleh pengaruh dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam berupa rencana pengembangan dari para perencana kota, desakan warga kota dari luar berupa berbagai daya tarik bagi daerah belakang kota. Apabila kedua pengaruh itu bekerja bersama-sama maka pemekaran kota akan terjadi lebih cepat. Terdapat tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu manusia, kegiatan manusia, pola pergerakan antara pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan manusia lainnya. Faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan tempat kerja, status sosial dan perkembangan kemampuan dan teknologi. Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. Faktor pola

pergerakan adalah sebagai aktivitas dari perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan yang akan memacu pola perkembangan antara pusat-pusat kegiatan.

Permasalahan dasar yang dihadapi oleh perkotaan, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang (*developing country*) adalah terus berlangsung proses pertumbuhan (*growth*) yang berjalan secara paralel dengan perubahan baik secara fisik dan non fisik, menuju pada suatu kondisi tertentu sebagai hasil tekanan kekuatan ekonomi, politik, sosial maupun budaya masyarakat. Isu ini menjadi titik tolak dalam mengatasi dan memunculkan solusi bagi setiap permasalahan yang muncul di perkotaan. Pertumbuhan di kota berpangkal tolak dari semakin meningkat populasi yang terjadi baik secara alami maupun melalui urbanisasi yang menyebabkan permintaan akan ruang (*space*) semakin meningkat. Hal ini didukung oleh adanya perubahan perilaku masyarakat penghuni kota baik perilaku sosial, budaya, ekonomi, politik maupun perilaku dalam penggunaan teknologi. Akibatnya, terjadi ekspansi, berupa meluasnya kota hingga merambah ke daerah-daerah penyangga dan rural, dan intensifikasi ruang di pusat kota, baik melalui upaya daur ulang, *air-right*, *underground-right* atau upaya-upaya untuk berbagi ruang (*sharing space*) secara lokasi maupun waktu. (Danisworo dalam Cahyono, 2009:3)

Menurut Tanudirjo (2006) warisan budaya di wilayah perkotaan memang lebih banyak menghadapi ancaman perubahan. Hal ini disebabkan oleh ciri-ciri kota. Pada umumnya, kota itu memiliki penduduk yang relatif padat, sehingga kebutuhan lahan menjadi tinggi, sementara rangsangan untuk

menganut budaya baru atau gaya hidup baru begitu kuat. Akibatnya, proses transformasi yang digambarkan oleh Schiffer berjalan lebih dinamis. Proses daur-ulang banyak terjadi untuk mengikuti kecenderungan budaya baru. Bangunan lama digusur dan digantikan dengan yang baru. Gaya hidup yang lama cepat digantikan dengan gaya hidup baru. Di perkotaan yang berciri kehidupan materialis dan konsumtif, sumber daya yang memiliki nilai-nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dengan mudah dikorbankan untuk kepentingan komersial semata. Karena itulah, sumber daya budaya amat rawan menghadapi kehancuran, dengan mengatasnamakan dinamika perkembangan kota itu sendiri (Tanudirjo, 2006). Memang pada umumnya kawasan kota lama umumnya berada dalam tekanan pembangunan. Tekanan pembangunan cenderung akan menyingkapkan bangunan-bangunan lama dan digantikan bangunan baru permanen yang bisa saja menenggelamkan citra kawasan bersejarah jika tidak diawasi dengan baik. Perhatian terhadap kondisi cagar budaya yang terhimpit oleh tekanan pembangunan sudah terlihat di beberapa negara, juga di Indonesia yang mencoba merumuskan konsep-konsep pelestarian sumberdaya arkeologi budaya khususnya yang berada di tengah kota.

Dari definisikan di atas, berkaitan dengan tata ruang Penataan ruang disebutkan adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengenai perencanaan dapat disetarakan dengan definisi pengelolaan sesuai dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi) yang intinya adalah bagaimana proses, cara merancang atau membuat untuk tujuan tertentu. Kemudian dalam konteks sumberdaya arkeologi yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya, kemudian didefinisikan sebagai Cagar Budaya. sedangkan pengelolaan sebagaimana yang tercantum pada Bab I, ketentuan umum Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa:

“Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Pengelolaan sumberdaya budaya yang berorientasi pada kawasan dilakukan dalam rangka pelestarian sumberdaya budaya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya arkeologi dipadukan dengan sumberdaya budaya lainnya. Dengan demikian, keberadaan sumberdaya arkeologi tetap dapat dipertahankan kelestarian dan kebermanfaatannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini mutlak dilakukan karena tinggalan arkeologi merupakan jati diri dari suatu bangsa (Ardika, 2007).

Secara umum, dalam pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen sumberdaya budaya dan pendekatan perencanaan yang bersifat *sustainable culture resource management*, pelestarian dinamis, keserasian tata ruang dan ekologi, serta *sustainable visitor management* (Nuryanti, 2006). Pengelolaan ataupun perencanaan Sumberdaya Arkeologi atau Cagar Budaya, tidak dapat dilepaskan pada konteks ruang dimana cagar Budaya tersebut berada. Sehingga dalam hal ini membutuhkan sebuah sistem pengaturan ruang dalam hal peruntukan, luas, tata letak dan pengelolaannya dan pemanfaatannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hal tersebut di dalam Pasal 1 ayat 26 tentang zonasi cagar budaya. Zonasi adalah penentuan batas-

batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Hal terpenting yang harus diperhatikan di dalam perencanaan tata ruang sumberdaya arkeologi adalah kontinuitas (keberlanjutan), Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi), *kon.ti.nu.i.tas* : *n* kesinambungan; kelangsungan; kelanjutan; keadaan kontinu. Kontinuitas yang dimaksud bukan hal pada perencanaan tata ruang sumberdaya arkeologi semata, tapi lebih dari itu, hal ini juga terkait dengan bagaimana tinggalan arkeologi yang sampai kepada kita, dengan segala macam kondisi fisiknya dapat dipertahankan keberadaannya dari berbagai macam ancaman baik itu karena faktor internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kemusnahannya. Hal itu dilakukan untuk menjamin sumberdaya arkeologi, dapat diwariskan kegenerasi yang akan datang, bukan hanya pada bendanya tetapi beserta nilai-nilai yang dikandungnya. Mewariskan pengetahuan dibaliknya, menemukan dan mengungkapkan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, tidak hanya sampai disitu. Pada akhirnya sumberdaya arkeologi dapat menjadi jati diri dan identitas bangsa yang memiliki kekayaan budaya khususnya budaya materi. (Nayati, 2017).

Pengelolaan sumberdaya arkeologi di Kawasan Kota Lama secara umum dan Kawasan Benteng Ujungpandang secara khusus memiliki kaitan erat dengan "ruang" yang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. Ruang itu menjadi tempat hidup manusia serta makhluk lainnya dan tempat untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungannya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan aktivitas manusia

dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa bertambah setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi (Dardak, 2006).

Adapun permasalahan yang dihadapi sumberdaya arkeologi khususnya Kawasan Benteng Ujungpandang adalah (1) *Kesalahan Penanganan*, penataan taman yang sangat kontras atau kurang harmonis dengan benteng dan bangunan sendiri memberikan efek sangat signifikan yang dapat terlihat pada pemberian tanaman hias dan pembuatan jalan setapak yang kemungkinan besar masih terdapat tinggalan arkeologis di bawahnya. (2) *Penambahan Bangunan Baru di Sekitar Benteng Rotterdam*, akibat dari perkembangan kota yang semakin berkembang menyebabkan lahan yang tersedia semakin berkurang menyebabkan pemukiman penduduk semakin mengancam keberadaan Benteng Ujungpandang sebagai benda cagar budaya, kelayakan pandang (*visibilitas*) sangat terbatas dengan adanya bangunan-bangunan pemukiman dan kantor pemerintah dan swasta yang ada di sekeliling benteng, pada bagian depan atau sisi barat terdapat restoran fast food yang dapat memberikan efek visibilitas atau mengganggu kelayakan pandang dari benteng ke laut, selain itu terdapat ruko-ruko di sepanjang jalan Ujungpandang yang dapat memberikan efek yang sama pula. (3) *Reklamasi Pantai*, yang merupakan proses penimbunan laut menjadi darat yang dilakukan meniyasati kekurangan lahan tersedia di depan benteng. Hal tersebut hal ini dapat dilihat dari aktivitas reklamasi pelabuhan peti kemas sisi barat laut dan barat daya yang dilakukan oleh pengelola Hotel Pantai Gapura, Makassar Golden Hotel dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan pencemaran akibat adanya aktivitas tersebut di atas.

Saat ini di kawasan kota bersejarah banyak berdiri bangunan baru yang permanen dan kebanyakan didesain dengan gaya arsitektur yang modern. Kondisi ini menyebabkan bangunan-bangunan kolonial yang menjadi ciri kawasan itu mulai termarginalkan di antara bangunan-bangunan modern yang perlahan menanggalkan identitas kesejarahannya. Kebanyakan bangunan disesuaikan dengan fungsi baru yang dianggap lebih menguntungkan daripada mempertahankan bangunan-bangunan lama/kuno yang dianggap kurang memberi manfaat. Kondisi ini cukup serius dan meresahkan sebagian kalangan yang masih peduli terhadap kelestarian kawasan bersejarah di Makassar.

Wajah kota yang ditata di jaman kolonial pasti meninggalkan kesan kolonialisme melalui wujud bangunan arsitektur kolonial yang saat ini sudah diwariskan kepada generasi saat ini. Walaupun beberapa di antaranya ada yang masih bagus namun tidak sedikit juga yang sudah dihancurkan akibat pembangunan kota. Hal yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memahami tentang warisan masa lalu ini. Apabila bangunan tersebut dipandang sebagai tanda kekuasaan kolonial yang tidak mau diingat-ingat kembali atau dihilangkan sama sekali dari memori masyarakat. Namun apabila bangunan tersebut dipandang sebagai sebuah warisan bersama (*mutual urban heritage*) yang unik dan juga spesifik Indonesia, karena ini tidak ditemukan di negara lain, maka dipertahankannya hasil budaya ini sama pentingnya dengan mempertahankan bangunan-bangunan dari masa yang lebih lama lagi.

Jika sumberdaya budaya sudah tidak ada, maka lambat laun generasi ke depan tidak dapat lagi menemukan dan mengenali jejak sejarah bangsanya. Upaya revitalisasi suatu

kawasan bersejarah tentu harus mengupayakan agar cagar budaya di sekitar kawasan bersejarah itu tetap lestari dan jejak sejarah kota dan jati diri masyarakat Makassar masih dapat diteruskan untuk generasi berikutnya. Selain itu, revitalisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai pentingnya, sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat terutama warga di kawasan sekitar sumberdaya budaya itu. Kawasan Benteng Ujungpandang menjadi sangat menarik bukan hanya karena lokasinya yang bersejarah, tetapi juga lingkungannya yang diperkaya dengan sumberdaya arkeologis yang masih dapat disaksikan saat ini. Sumberdaya budaya itu unik dan tidak dijumpai di tempat lain, seperti misalnya Gedung *Societeit de Harmonie*, gedung kantor walikota, gedung Museum Kota dan pola jalur jalan lama yang masih digunakan hingga saat ini (Yusriana, 2011).

Keberadaan Benteng Rotterdam, termasuk bangunan-bangunan bernilai historis dan arsitektonis yang ada di Kota Makassar, menampilkan cerita visual yang menunjukkan sejarah dari Kota Makassar, mencerminkan perubahan-perubahan waktu tata cara kehidupan dan budaya dari penduduknya. Tanpa adanya warisan budaya yang terpelihara masyarakat akan merasa terasing dari asal-usul lingkungannya, tidak punya orientasi pada masa lampau. Warisan budaya kota atau yang disebut dengan *urban heritage* adalah objek-objek dan kegiatan di perkotaan yang memberi karakter budaya yang khas bagi kota yang bersangkutan. Di sisi lain, pembangunan di sekitar Benteng Rotterdam berlangsung tanpa terkendali, sehingga menenggelamkan makna Benteng Rotterdam sebagai *landmark* Kota Makassar.

Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya pada tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Keputusan

FOTO UDARA SITUS CAGAR BUDAYA BENTENG ROTTERDAM



Skala 1: 3000



Legenda :

Delimitasi Batas Situs CB

Luas SK: 28.595 m²

Luas (verifikasi): 123.172 m²

Sistem Koordinat Referensi:

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)

Sistem Grid : Grid UTM

Datum : WGS 1984

Zona : 50 M

Sumber :

- Foto Udara Hasil Pemotretan Drone dengan tinggi terbang 200 m
- Survei Lapangan pada tanggal 25 September 2017
- Data BPCB Makassar 2017



PEMETAAN CAGAR BUDAYA 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

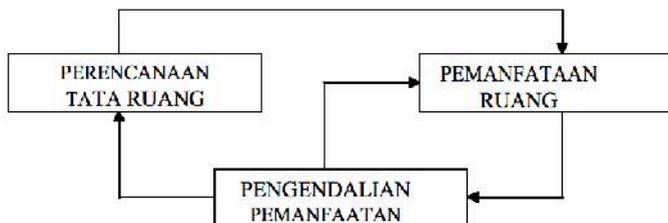
Gambar. Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam
(sumber: BPCB Prov. Sul-Sel)

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010. Pada tahun 2011 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan revitalisasi Benteng Rotterdam. Kemudian Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025/M/2014 Tentang Penetapan Benteng Rotterdam Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Kawasan Fort Rotterdam sebagai objek vital nasional di sektor pariwisata, Nomor KM. 70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan objek vital Nasional di Sektor Pariwisata. Bersama dengan 50 objek vital nasional di Indonesia lainnya.

C. Strategi dan Implementasi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam)

Kawasan Cagar Budaya Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) dibuat sebagai salah satu upaya pelestarian budaya dan alam. Upaya tersebut ditekankan pada konservasi atas perkembangan teknologi pada jamannya, yang antara lain dibuktikan dengan keberadaan situs-situs bersejarah, bangunan kuno di sekitar Benteng Ujungpandang. Pelestarian budaya ini berfungsi sebagai refleksi sejarah peradaban manusia. Bahkan dewasa ini upaya pelestarian budaya semakin dikaitkan dengan fungsi sosial ekonomi, yang antara lain untuk pengembangan kawasan wisata di wilayah perkotaan khususnya kota tua Makassar.

Dalam upaya memantapkan konsepsi pengembangan pelestarian alam dan budaya agar lebih bermakna, diperlukan penataan ruang. Penataan ruang fisik dilakukan guna mewujudkan tempat yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang terdiri dari aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam upaya penguatan pelestarian budaya, diatur pemanfaatan ruang agar serasi dengan



Gambar . Bagan Penataan Ruang



Kawasan Benteng Rotterdam
(sumber: Google Earth dan BPCB Prov. Sul-Sel)

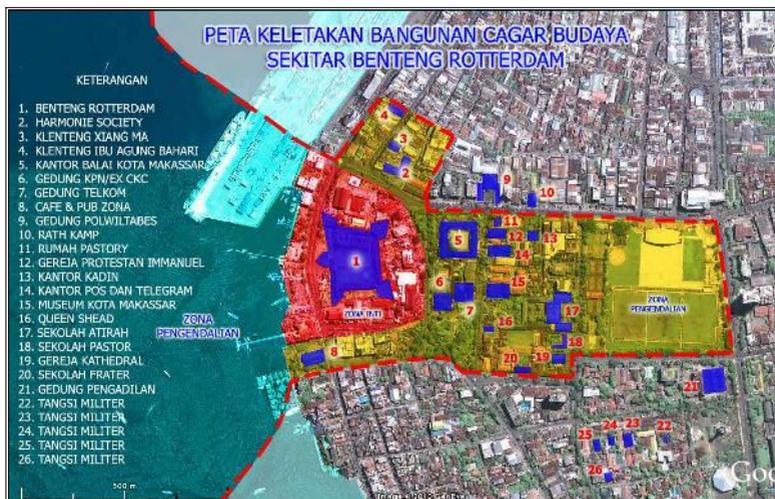
pemanfaatan ruang di sekitarnya. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk perencanaan tata ruang kawasan, yang dalam tulisan ini difokuskan di KCB Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam) Kota Makassar. Landasan hukum untuk penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2008 untuk operasionalisasinya. Selain itu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

1. Perencanaan Tata Ruang

Proses perencanaan tata ruang merupakan satu kesatuan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan bentang lahan, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada

maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya (Dardak, 2006). Keseluruhan input kemudian dianalisis secara integral baik kondisi saat ini maupun ke depan untuk masing-masing hirarki Tata Ruang Nasional, Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota sehingga menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang yang menyeluruh.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPCB Sulawesi Selatan, KCB Benteng Ujungpandang memiliki kondisi alam dan bentang lahan yang khas, serta kondisi sosial budaya yang unik. Di Kawasan ini, merupakan daerah pesisir/pantai dengan sebaran pulau-pulau kecil (*Spermonde*) di depan Benteng Ujungpandang dengan perpaduan kota kolonial yang dibentuk oleh Belanda dan Kota Makassar sebagai kota metropolitan yang dicanangkan sebagai salah satu kota dunia di Indonesia. Secara sosial dan



Sebaran Bangunan Kolonial di Sekitar Kawasan Benteng Ujungpandang (sumber: Google Earth dan BPCB Prov. Sul-Sel)

budaya, di sekitar Benteng Ujungpandang terdapat sebaran sumberdaya budaya berupa: Jaringan kanal, Gedung perkantoran, perdagangan, rumah tinggal, fasilitas pendidikan dan sosial, dan lain sebagainya. Berikut ini dapat di lihat keletakan bangunan Cagar Budaya di sekitar Kawasan Benteng Ujungpandang. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kawasan ini diarahkan pada penataan ruang Benteng Ujungpandang sebagai KCB, berdasarkan pada kondisi alam dan bentang lahan serta sebaran sumberdaya budayanya.

Rencana tata ruang KCB Benteng Ujungpandang berisi rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang di Benteng Ujungpandang. Rencana struktur ruang adalah arahan pengembangan elemen-elemen pembentuk struktur ruang yang meliputi sistem pusat-pusat pemukiman, sistem jaringan prasarana, dan sarana. Struktur ruang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana pola pemanfaatan ruang berisi arahan distribusi penggunaan ruang di Kawasan Benteng Ujungpandang. Hal ini diaplikasikan dalam bentuk panduan perencanaan ruang yang dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang di kawasan ini. (Mulyadi, 2009:127).

a. Rencana Struktur Ruang

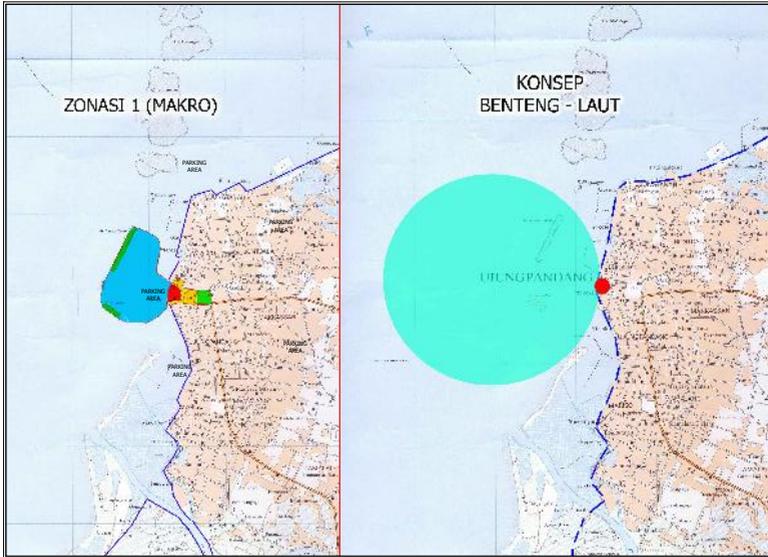
Benteng Ujungpandang sebagai kawasan pesisir pantai, telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai wilayah permukiman. Hubungan antara manusia dengan ruang merupakan salah satu dari sekian banyak relasi manusia yang dipelajari oleh para antropolog. Dalam kajian arkeologi, wujud relasi ini tampak

nyata dalam pemukiman manusia dan pola-pola yang dihasilkannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pola pemukiman (*settlement pattern*) merupakan pengejawantahan (*ekspresi*) dari konsepsi manusia mengenai ruang, serta merupakan hasil dari upaya untuk mengubah dan memanfaatkan lingkungan fisiknya, berdasarkan atas pandangan-pandangan dan pengetahuan yang dimilikinya mengenai lingkungan tersebut (Permana, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka perencanaan struktur tata ruang Kawasan Benteng Ujungpandang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam pelestarian kawasan. Prinsip-prinsip pelestarian kawasan meliputi: (1) identifikasi dan investigasi; (2) penilaian; (3) penetapan formal suatu bangunan atau kawasan sebagai situs yang dilindungi dan penentuan klasifikasi pelestarian; (4) penyusunan rencana induk pelestarian; (5) implementasi rencana induk; dan (6) pemantauan rencana induk secara periodik (Dardak, 2006.) Keenam prinsip pelestarian kawasan tersebut menjadi panduan bagi Pemkot Makassar dalam perencanaan tata ruang KCB Benteng Ujungpandang.

b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

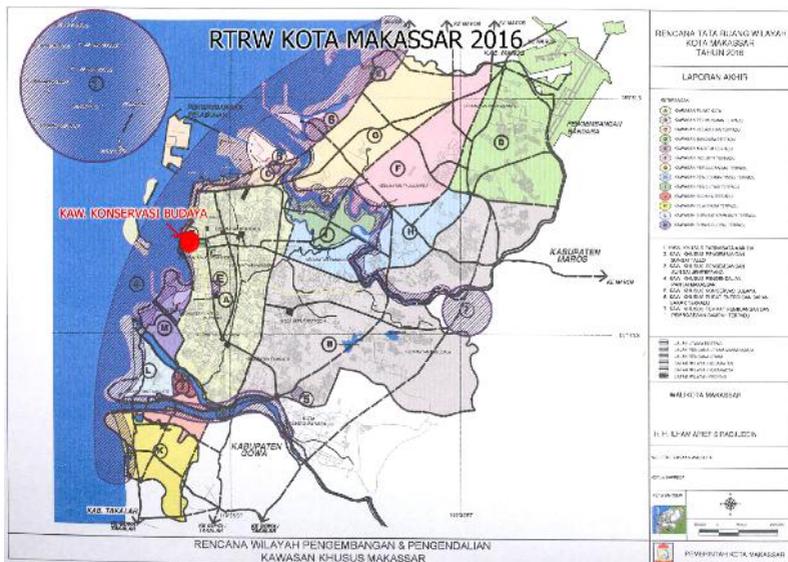
Dalam pola pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kawasan Benteng Ujungpandang, dilakukan berdasarkan pada aspek lokalitas dan ekologi. Dengan demikian, batas subsistem misalnya, ekosistem, geofisik, ekonomi, sistem biologis, dan lain-lain menjadi sangat penting untuk menentukan area mana dalam wilayah pesisir dan laut yang tepat sebagai kawasan pelestarian



Gambar . Konsep Benteng Ujungpandang sebagai waterfront Kota Makassar (sumber:BPCB Prov. Sul-Sel)

sumberdaya alam demi keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut.

Pola pemanfaatan ruang seperti ini berpeluang untuk menciptakan penataan ruang laut yang terpadu dengan daratan, dalam hal ini adalah daratan berupa Kota tua dan Kota Metropolitan. Dengan demikian, penataan ruang yang dilakukan tidak lagi dilihat sebagai satu persatu lansekap, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, dengan satu kata kunci yaitu keterpaduan. Sebagaimana Canning (2003), menyatakan bahwa pada setiap penataan ruang laut, hendaknya terintegrasi dengan sistem penataan ruang daratan untuk menjamin terpadunya pengelolaan darat dan lautan. Hal ini dapat



Gambar. RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015

diaplikasikan dalam bentuk penataan ruang daratan seperti, membuat tembok laut di tepi pantai atau penanaman bakau untuk mencegah erosi dan abrasi. Dengan demikian ekosistem laut, seperti terumbu karang dapat dilestarikan, karena penataan ruang di daratan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lanskap laut. Demikian juga penataan ruang laut yang terintegrasi dengan penataan ruang daratan, dapat diaplikasikan dalam bentuk pembagian ruang lautan, misalnya area budidaya maupun area tangkap ikan dan area wisata laut. Pengintegrasian kawasan Benteng Ujungpandang dan laut dengan konsep *waterfront*, Kawasan khusus konservasi budaya (Perda No. 6 Tahun 2006) Tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015). RTRW Kota Makassar yang terbaru saat ini dalam pembahasan.

2. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Program tersebut disusun sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Dalam penyusunan dan pelaksanaan program masing-masing pemangku kepentingan khusus bidang pelestarian cagar budaya *stakeholder* yang terkait (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Tata Ruang Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, BPCB Sulawesi Selatan, BALAR Sulawesi Selatan, Akademisi dan masyarakat) harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Dalam rangka pemanfaatan ruang, para pemangku kepentingan (termasuk masyarakat dan dunia usaha) dituntut untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang mencakup jenis dan besaran program, lokasi pembangunan, serta pembagian peran dan tanggung jawab termasuk pembagian/*sharing* pembiayaan. Dalam pembangunan infrastruktur jalan misalnya, perlu dikoordinasikan dengan sektor-sektor yang akan memanfaatkan jalan, sehingga jaringan jalan yang dibangun dapat bermanfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya.

Selain masalah koordinasi, permasalahan yang berkaitan dengan konsistensi dalam menjadikan rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan juga masih banyak dijumpai. Contoh kasus, akibat adanya motif atau kepentingan pihak-pihak tertentu,

perencanaan kota mengorbankan rencana tata ruang yang ada. Minat investasi seringkali justru dipandang sebagai dasar untuk merubah/merevisi rencana tata ruang. Akibatnya rencana tata ruang tidak lagi berfungsi untuk mengarahkan lokasi investasi, tetapi sebaliknya menjadi piranti yang dapat disesuaikan sebagai pembenaran bagi kegiatan investasi (Dardak, 2006). Keinginan Pemkot Makassar untuk menjadikan kawasan ini sebagai objek wisata, perlu didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat. Keberadaan sumberdaya budaya di kawasan ini harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang, termasuk pemanfaatan ruang yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki kawasan ini.

Pemanfaatan ruang yang dilakukan di Kawasan Benteng Ujungpandang mengacu pada karakter kawasannya yang unik. Selain itu, pengembangan perangkat insentif dan disinentif secara efektif dapat mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu yang meliputi pemanfaatan ruang laut dan pesisir/pantai (daerah pantai terpadu), dan tinggalan sumberdaya budayanya.

c. Pemanfaatan Ruang dan Pengelolaan Daerah Pantai Terpadu

Kawasan Benteng Ujungpandang meliputi wilayah pesisir dan laut yang saat ini telah dimanfaatkan oleh Pemkot Makassar menjadi objek wisata Pantai Losari, area perkantoran, perhotelan, pusat perekonomian, dan area pengembangan Pelabuhan Makassar (Soekarno Hatta). Pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pengelolaan daerah pantai (wilayah pesisir) yang harus

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan daerah pantai terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di daerah pantai. Pada intinya pengembangan wilayah pesisir tidak boleh dilakukan secara sektoral. Dengan demikian, pengembangan wilayah pesisir dapat berlangsung berkesinambungan yang berarti sumberdaya pantai yang ada dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan saat ini maupun untuk masa yang akan datang (Yuwono: 2008).

Daerah pantai pada umumnya memiliki sumberdaya yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian, Kawasan Benteng Ujungpandang yang juga merupakan daerah pantai tentu memiliki sumberdaya tersebut. Sumberdaya pantai yang dimaksud terdiri atas: (a) Sumberdaya yang dapat diperbaharui meliputi: terumbu karang; sumberdaya perikanan; dan bahan-bahan bioaktif. (b) Jasa-jasa lingkungan, meliputi tempat rekreasi dan pariwisata; media transportasi; sarana pendidikan dan penelitian; dan kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi).

Berdasarkan pengumpulan data lapangan, daerah pantai di sekitar Benteng Ujungpandang ini mempunyai panorama yang khas dan menarik, dan memiliki potensi untuk dijual sebagai objek wisata. Potensi tersebut berupa: (a) Hamparan pulau-pulau (Spermonde) Dan (b) Terdapat terumbu karang dan biota laut yang menghiasi panorama bawah laut Selat Makassar. Dengan demikian, pengelolaan daerah pantai terpadu di Benteng Ujungpandang diarahkan pada pengembangan daerah pantai untuk kegiatan wisata bahari dan budaya. Kegiatan wisata bahari yang dapat dikembangkan meliputi: (a) Wisata taman laut dan

terumbu karang dengan kegiatan utama: *diving*, *snorkeling*, dan *submarine touring*. Hal ini dapat dilakukan di Pantai Losari karena beberapa bagian pantai merupakan perairan dangkal. (b) Wisata pantai dengan kegiatan utama: selancar, jet ski, kayak, perlombaan perahu tradisional, menikmati sunset. Untuk memudahkan pelaksanaannya, diperlukan batas wilayah pengelolaan yang jelas, meliputi batas arah laut dan daratan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, model pengelolaan ini dilakukan secara lintas sektoral dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait baik dari instansi pemerintah, akademisi, swasta, maupun masyarakat. Peranan lembaga terkait dalam pengelolaan daerah pantai terpadu meliputi pengembangan dan pembangunan, perlindungan dan pengamanan, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, dalam teknis pelaksanaannya mempertimbangkan lima aspek pengelolaan daerah pantai sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air yaitu: (1) Konservasi daerah pantai; (2) Pendayagunaan daerah pantai; (3) Pengendalian kerusakan daerah pantai; (4) Sistem informasi daerah pantai, dan (5) Pemberdayaan masyarakat pantai.

d. Pemanfaatan Ruang Kawasan Cagar Budaya Benteng Ujungpandang (Fort Rotterdam)

Kawasan Budaya Benteng Ujungpandang yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang tinggi. Keberadaan KCB tersebut, memberikan nilai tambah dan daya tarik bagi kawasan ini. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor

utama untuk menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai KCB yang memadukan potensi *natural landscape* dan *heritage landscape*. Letaknya yang berada di wilayah pesisir, menjadikan Kawasan Benteng Ujungpandang sebagai KCB yang mengkolaborasikan pengelolaan daerah pantai terpadu dan pengelolaan cagar budaya.

Adapun Peluang pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Benteng Ujungpandang dapat dilihat di bawah ini: (a) Menjadi Kawasan Konservasi Sejarah dan Budaya, (b) Menjadi Pusat Kegiatan Kesejarahan dan Budaya Sekaligus Menyemarakkan 'Suasana' di Benteng dan Lingkungan Sekitarnya, (c) Menjadi Tempat Edukasi yang Kreatif, (d) Menjadi Tujuan Wisata Unggulan kota, (e) Menjadi Tujuan Ekonomi Masyarakat, (f) Pengembangan wilayah laut sebagai wisata *waterfront*, (g) Revitalisasi Museum La Galigo dan (h) Pengembangan lingkungan dalam dan luar benteng.

Tahapan Pengembangan Kawasan Benteng Ujungpandang dan Sekitarnya tahun 2010–2016 sebagai berikut: (a). Penelitian/kajian interdisipliner arkeologi, museologi, sejarah, sosiologi, ekonomi, arsitektur, planologi, manajemen dll. (b). Pembuatan Masterplan pelestarian dan pengembangan kawasan benteng termasuk revitalisasi museum dan *Societeit de harmony*. (c). Pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia. (d). Sayembara desain penataan kawasan Benteng Ujungpandang dan sekitarnya. (e). Penyusunan DED kawasan Benteng Ujungpandang dan sekitarnya. (f). Pemindahan bangunan di luar Benteng Ujungpandang yang terletak di dalam zona inti. (g). Penataan kawasan dan konservasi bangunan dalam benteng, dan (h). Pembentukan lembaga pengelola terpadu.



Gambar . Rencana Zonasi (zoningplan)
Benteng Ujungpandang.
(sumber: Google Earth dan BPCB Prov. Sul-Sel)

Berdasarkan hasil Pemintakan Benteng Ujungpandang pada tahun 2010 Oleh Balai Peninggalan Purbakala Makassar (saat ini berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan). Akan diuraikan di bawah ini: Penentuan batas mintakat (zonasi) Benteng Ujungpandang selain mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu, mintakat inti, penyangga dan mintakat pengembangan, juga mempertimbangan kajian arkeologis dan historis Benteng Ujungpandang sebagai *urban heritage*. Maka, area mintakat Benteng Ujungpandang terdiri dari mintakat inti dan mintakat pengendalian yang merupakan perpaduan dari mintakat penyangga dan mintakat pengembangan. Hal ini juga sejalan dengan konvensi internasional yang terkait dengan pelestarian kawasan budaya, dimana kelayakan pandang dan keterkaitan historis antara cagar budaya dan kawasan menjadi salah satu prasyarat dalam penentuan pemintakatan atau zonasi. Dengan pertimbangan



Gambar Detail Pembagian Zona Dalam Zona Inti Benteng Ujungpandang (Sumber: BPCB Makassar)

tersebut, maka area mintakat Benteng Ujungpandang dibagi menjadi dua mintakat, yaitu mintakat inti dan mintakat pengendalian.

Luas lahan yang ditetapkan sebagai lahan mintakat adalah seluas 277, 3 Ha yang meliputi Zona inti seluas 11,7 Ha yang dibagi menjadi Zona inti cagar budaya I seluas 2,5 Ha, zona cagar budaya II seluas 5,3 Ha, zona cagar budaya III seluas 3,9 Ha. Zona pengendalian seluas 277,3 Ha yang meliputi zona pegendalian darat: zona pengendalian I seluas 4,1 Ha, zona pengendalian II seluas 17,5 Ha, zona pengendalian III seluas 10,7 dan zona pengendalian laut seluas 245 Ha.

D. Penutup

Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional merupakan cikal bakal Kota Makassar, bahkan saat ini telah menjelma menjadi salah satu *landmark* kota ini. Pada

awalnya benteng ini digunakan sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian hingga pertahanan oleh pemerintah Kolonial Belanda (VOC).

Keberadaan benteng ini tidak terlepas dari adanya potensi ancaman dan gangguan yang dapat menyebabkan degradasi potensi tinggalan budaya dan nilai penting yang dikandungnya. Sehingga dibutuhkan sistem penataan ruang baik dalam hal perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dilakukan untuk kelestarian Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aksa, Laode Muhammad. 2004. "Integritas Sumberdaya Budaya Arkeologi dan Pembangunan". <http://www.arkeologi.com>.
- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Ininnawa.
- Anonim. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
- , Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2006 Tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005-2015.
- , 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- , 2010a. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- , 2010b. *Laporan Pemintakatan Benteng Ujungpandang*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Makassar.
- , 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- , 2013. Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Dunia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.
- , 2014. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 025/PM/2014 Tentang Benteng Rotterdam Sebagai Situs Cagar Budaya Nasional.
- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Canning, Robert. 2003. *The Element of Marine Spatial Planning in the Coastal and Marine Environment: Next Step Actions*, University of London.
- Dardak, A. Hermanto. 2006. "Perencanaan Tata Ruang yang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan". Makalah dalam *Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir*. Yogyakarta, 28 Februari 2006.
- Gunn, Clare A. 1993. *Tourism Planning: Basic, Concept, Cases*. Edisi ketiga. Washington. USA: Taylor and Francis Publisher.
- Koestoer et all. 2001, "*Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus*". Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Mansyur, Syahrudin. 2001. "Kota Makassar Akhir Abad XVII hingga Awal Abad XX (Suatu Studi Arkeologi Ruang)". Skripsi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mulyadi, Yadi. 2009. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Sulaa di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tesis. Program Studi Arkeologi. Kelompok Ilmu Humainora. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nayati, Widya 2017. Perencanaan Tata Ruang Sumberdaya Arkeologi. Disampaikan dalam perkuliahan. Program Studi Arkeologi. Kelompok Ilmu Humainora. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

- Nuryanti, Wiendu. 2006. Pemanfaatan Sumberdaya Budaya Melalui Pariwisata. Materi Kuliah *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. UGM Yogyakarta. Tidak Terbit.
- Permana, Cecep Eka. 2006. *Tata Ruang Masyarakat Badui*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sjafrizal 2012. "*Ekonomi wilayah dan perkotaan*". Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Suatu Pengantar". Makalah untuk Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi, di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus-1 September 2004.
- ,2006. Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Perkotaan. Disampaikan dalam Seminar Pengelolaan Warisan Budaya di Hotel Suwarnadwipa Palembang, 30-31 Mei 2006.
- Yusriana, 2011. Arahan Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang. Tesis. Program Studi Arkeologi. Kelompok Ilmu Humainora. Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yuwono, Nur. 2008. Pengelolaan Daerah Pantai Terpadu dan Berkesinambungan. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Tidak terbit.
- <http://makassar.rakyatku.com/post/canangkan-perda-kota-dunia-pemkot-makassar-hadirkan-layanan-berkualitas.html>. diakses tanggal 1 Juni 2017.
- (<http://sulsel-prov.blogspot.co.id>) diakses tanggal 1 Juni 2017.
- Http://www.kompasiana.com/intishar1924/kota-anging-mamiri-wajahmu-kini-dan-nanti_54f7a737a333112b6f8b49c7. diakses tanggal 1 Juni 2017.
- <http://kbbi.web.id/>diakses tanggal 2 Juni 2017.

ARSITEKTUR FORT ROTTERDAM

oleh:

**Adang Sujana
dan Nafsiah Aswawi**

Kata Pengantar

Benteng telah menjadi penting dalam sejarah umat manusia, Secara konvensional benteng dibangun untuk memastikan permukiman manusia yang aman dan terjamin, untuk menjaga musuh dan untuk memastikan memiliki keunggulan selama perang. Benteng memiliki tempat penting di antara sumber material. Beberapa jenis benteng utama adalah benteng bukit, benteng hutan, benteng laut dan benteng di dataran. Benteng dibangun untuk tujuan strategis. Ini membantu dalam mempertahankan wilayah dari serangan orang luar dan juga bertindak sebagai tempat berlindung selama masa perang. Benteng biasanya terdiri dari 2 (dua) jenis: permanen dan lapangan. Benteng permanen termasuk benteng yang rumit dan tempat perlindungan pasukan dan paling sering didirikan pada masa damai atau ancaman perang. Di Makassar terdapat benteng baik permanen maupun lapangan. Salah satu Benteng permanen dan jenis benteng laut yakni Benteng/Fort Rotterdam. Fort Rotterdam memiliki ciri khas arsitektur tersendiri terutama pada bangunan-bangunan dalam benteng (kastel/kastil) yang berbeda dengan arsitektur benteng-benteng permanen lainnya di seluruh Indonesia. Karya Arsitektur merupakan perpaduan dari bentuk,

fungsi, dan struktur yang oleh karenanya tulisan ini membahas perpaduan tersebut terhadap Fort Rotterdam.

Pendahuluan

Sejarah Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam ini merupakan prakarsa Raja Gowa ke-9 yang bernama Raja I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa'risi' kallonna. Awalnya terbuat dari tanah liat, yang selanjutnya dibangun kembali menggunakan batu padas. Rekonstruksi ini dilakukan pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-14 Sultan Alauddin. Pada tanggal 23 Juni 1635, dibangun lagi dinding tembok kedua dekat pintu gerbang. Fort Rotterdam merupakan bukti kebesaran kesultanan Gowa dan Kerajaan Gowa-Tallo di masa lalu. Benteng ini menjadi bukti bahwa Makassar adalah kota bandar yang sangat ramai karena diperlukan pembangunan benteng disekitar pantai sebagai pengamanan dari ancaman invasi dari kerajaan lain.

Ciri khas benteng portugis dengan bentuk segi empat merupakan bentuk awal dari benteng Ujungpandang. Ciri Khas Benteng Portugis yang berbahan dasar batu dan tanah liat yang dibakar hingga kering membuat benteng tetap berdiri kokoh. Keterlibatan kerajaan Portugis sebagai kerajaan sahabat dari kerajaan Gowa telah membantu banyak hal dalam peningkatan pertahanan dan dunia militer kesultanan Gowa sebut saja salah satu sumbangan terbesar yakni Meriam Anak' Makassar yang berhasil membantu kemenangan perang laut Masalembo antara Gowa dan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Spellman.

Speelman atau Cornelis Janzoon Speelman (Lahir di Belanda, 2 Maret 1628. Meninggal di Batavia, Hindia Belanda, 11

Januari 1684) adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada periode 1680 hingga 1684. Pada tahun 1666, ia dikirim ke Makassar sebagai laksamana pemimpin armada perang untuk menumpas pemberontakan di Makassar. Pada 18 November 1667, ia menandatangani Perjanjian Bongaya. Pada tahun yang sama, ia juga dijadikan sebagai Komisioner (*commissaris*) di Amboina, Banda dan Ternate. Pada masa Kolonial Belanda, Benteng Ujung Pandang dibangun kembali dan nama benteng pun berubah menjadi Fort Rotterdam yang tidak lain merupakan daerah kelahiran Cornelis Speelman di Belanda.

Pembahasan

Metode analisis yang digunakan deskriptif yaitu *sample purposive* dari hasil pengamatan, baik pengamatan secara langsung yaitu pengamatan di lapangan dan pengamatan tak langsung yaitu melalui literatur.

A. Bentuk

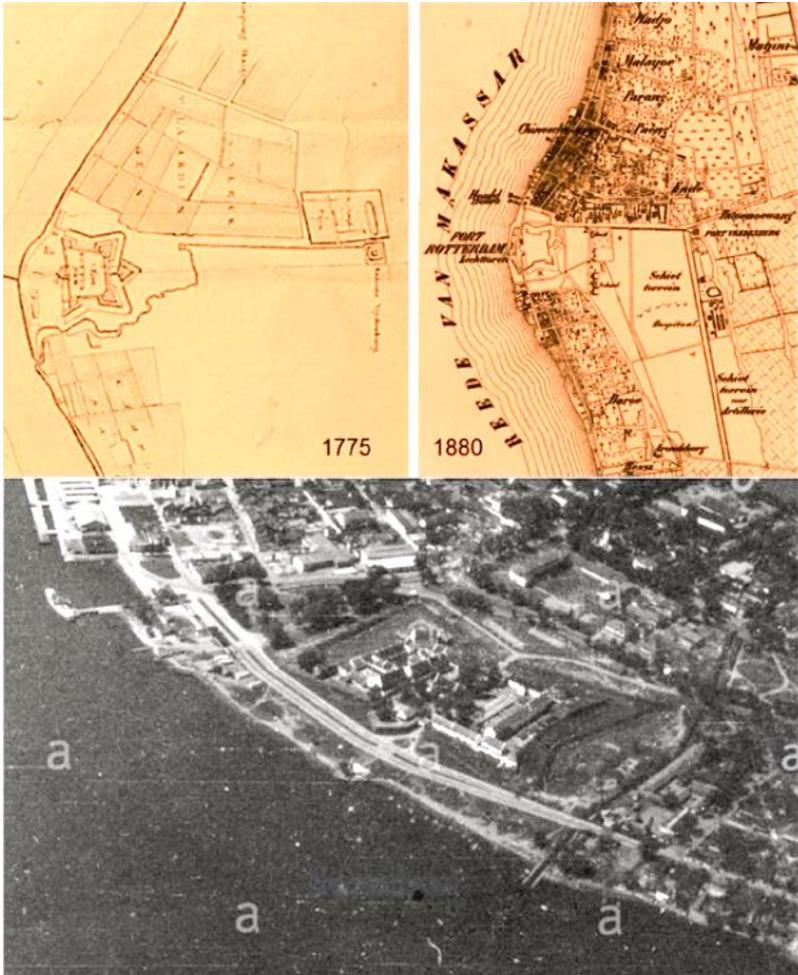
Lokasi Fort Rotterdam adalah dekat dengan laut, dikelilingi oleh tembok yang lebar dan tinggi. Fort Rotterdam, salah satu monumen paling menarik di Celebes yang berasal dari zaman *East-India Company*. Dibangun dengan gaya Portugis kuno oleh mantan penguasa Makassar Pada abad ke-17, dulunya disebut Benteng *Oedjoeng Pandang*. setelah tanaman Padanus, yang tumbuh subur di sana. Dengan jatuhnya Goa (Gowa) pada tahun 1607 Benteng diambil oleh Laksamana Speelman yang menamainya Fort Rotterdam, setelah tempat kelahirannya. Itu sepenuhnya dibangun kembali oleh Belanda sesuai dengan gaya

awal abad ketujuh belas. Lukisan oleh Valentin menunjukkan Benteng seperti dulu.

Di depan gerbang Timur, di sebelah tiang gantungan, ada sebuah benteng kecil atau "ravelyn": maka nama jalan yang berdekatan "Ravelinsweg", Selatan Benteng dibangun pemakaman Eropa pertama dengan nama "Kerkhofpad" (=Jalan Pemakaman). Terdapat Gereja tua-Belanda di dalam Benteng. Istana Gubernur, dulunya adalah markas Panglima Militer pada akhir tahun 1920. Banyak bangunan juga dipugar untuk melestarikan tempat bersejarah ini dalam kondisi aslinya. Awalnya Benteng digunakan untuk menampung seluruh komunitas Belanda: kemudian pemukiman meluas ke utara menjadi bagian yang disebut "Stad Vlaardingen": bagian tertua dari perempatan Eropa saat ini. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1605, selama perang Gowa terakhir, para istri dan anak-anak penduduk Eropa di Makasar ditempatkan di Benteng.

Casteel (kastil) di Makassar mengampil posisi di ujung pantai (semacam tanjung). Di satu sisi untuk pertahanan strategis dan di sisi lain posisi yang diambil juga mudah untuk melakukan *escape* (tidak mudah terkepung). Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam yang dibangun diatas lahan dengan luas bangunan Benteng sekitar 25.700 M² atau 2,57 Ha yang bentuknya seperti kura-kura atau penyu. Itulah sebabnya Fort Rotterdam juga disebut pula Benteng *Panynyua*.

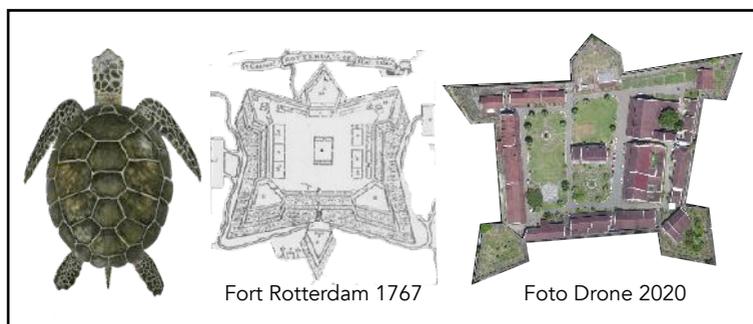
Bentuk yang memiliki kemiripan dengan beberapa benteng permanen lainnya seperti: Benteng Batavia (Jakarta), Fort Morborough (Bengkulu), Fort Vrederburg (Yogyakarta), Benteng Orange dan Benteng Kalamata (Ternate). Mengapa bentuk metamorfosa penyu?. Bila ditelisik karakter kura-kura atau penyu



Fort Rotterdam 1947 (alamy stock photo)

yang memiliki Cangkang keras mereka membantu melindungi mereka dari predator saat bahaya sudah dekat. Selain itu, penyusut laut biasanya adalah perenang yang sangat terampil yang cepat berada di habitat alami mereka, lautan, yang membantu mereka

menyingkirkan situasi berbahaya saat mereka datang. Habitat hidup penyu yaitu di laut namun terkadang datang ke darat untuk bertelur.

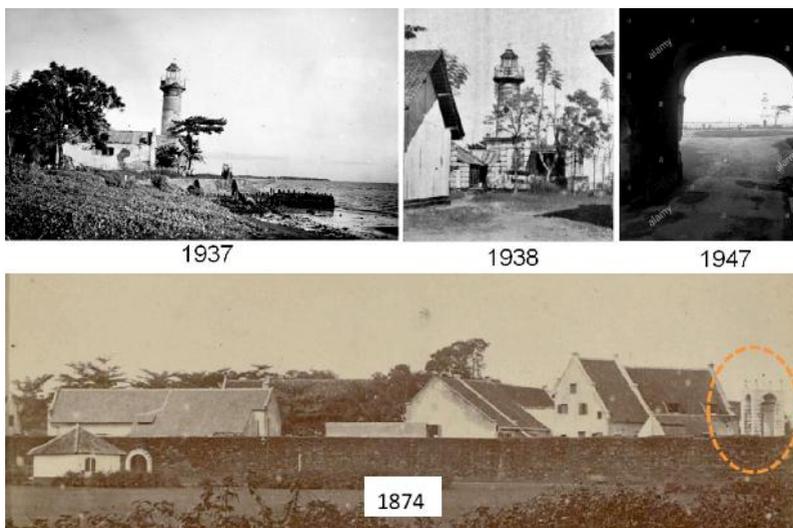


Gambar Filosofis Bentuk Benteng

Fort Rotterdam mempunyai 5 (lima) bastion, antara lain: Bastion Bone, Butung (Buton), Mandarsyah dan Amboina. Bastion merupakan bagian yang menjorok keluar, dulu ditempatkan kanon atau meriam yang terletak di tiap sudut benteng dan terdapat beberapa lubang bidik agar dapat dilakukan pengintaian atau pengawasan. Bangunan bastion sebagai kubu pertahanan dibuat lebih kokoh dan lebih tebal.

Nama setiap bastion kemungkinan besar karena kelima kerajaan/kesultanan memiliki keterkaitan dengan Cornelis J. Speelman dimasa itu. Menurut catatan sejarah, peran Cornelis J. Speelman yang berhasil mengadu domba Kerajaan Bone (Arung Palakka) dengan Kerajaan Gowa (Sultan Hasanuddin) dan akhirnya setelah VOC melakukan perang ke-3 kalinya terhadap Kerajaan Gowa dengan mengerahkan pasukan yang sangat besar termasuk menggalang pasukan Arung Palakka dan Buton dan pada akhirnya

Kerajaan Gowa dinyatakan kalah. Di periode yang sama pula Cornelis J. Speelman menjabat sebagai Komisioner (commissaris) beberapa wilayah kepulauan Maluku termasuk Amboina (Ambon-Aru), Banda, termasuk wilayah Bacan (Halmahera) dan Mandarsyah (Ternate).



Gambar Keberadaan Mercusuar dan Tugu
(sumber: nationaalarchif.nl)

Di depan Benteng terdapat mercusuar bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Pada paruh kedua abad ke-19, transportasi antara Eropa dan Hindia dan antara bagian-bagian Kepulauan semakin diambil alih oleh (kebanyakan) kapal uap buatan Eropa. *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) memainkan peran utama dalam hal ini. Perusahaan ini memulai layanan regulernya pada tahun 1891. Namun, butuh beberapa waktu sebelum Makassar menjadi pusat

jalur KPM di Timur Besar (bagian timur India), peran yang sebenarnya dimainkan oleh Singapura untuk sementara waktu. Pemerintah di Nusantara harus membangun jaringan mercusuar untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang semakin padat. (P. Orchard, 2001). Di Bastion Mandarsyah juga terdapat tugu jam yang besar. adalah Namun kini mercusuar, Benteng Vredenburg dan tugu jam sudah tidak ada.

Fort Rotterdam memiliki tembok sangat tebal. Pintu masuk Fort Rotterdam melewati benteng setinggi sekitar 3 meter, dengan tebal sekitar 2,5 meter, dengan pintu utama berukuran kecil. Bahan tembok benteng menggunakan campuran batu dan tanah liat yang dibakar sampai kering. Memasuki bagian dalam Fort Rotterdam, terdapat taman hijau yang berada di tengah-tengah benteng. Bangunan-bangunan (kastil) di dalam Fort Rotterdam bertingkat 2 (dua) berjajar menghadap arah dalam (taman) yang luas. Orientasi Bangunan ke rumah ibadah, bangunan gereja (protestan) yang posisinya berada di tengah taman.



Gambar Entrance Fort Rotterdam
(sumber: nationaalarchif.nl)

Bangunan-bangunan (kastil) dalam Fort Rotterdam bergaya Kolonial Eropa, tepatnya Gaya Kolonial Belanda. Meski telah mengalami beberapa kali peralihan fungsi dari masa VOC hingga saat ini tetapi bentuk arsitekturnya masih tetap dipertahankan melalui tahapan-tahapan proses pemugaran. Pada masa VOC, benteng dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan penampungan rempah-rempah Belanda di Indonesia. Pada masa kolonial Jepang, benteng ini beralih fungsi menjadi pusat studi pertanian dan bahasa. Sementara setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai pusat komando yang kemudian beralih menjadi pusat kebudayaan dan seni Makassar hingga saat ini.

Pada dasarnya gaya kolonial (*Dutch Colonial*) menurut Wardani (2009) adalah gaya desain yang cukup populer di Belanda (Netherlands) tahun 1624-1820. Gaya desain ini timbul dari keinginan dan usaha orang Eropa untuk menciptakan daerah jajahan seperti negara asal mereka. Pada kenyataannya, desa ini tidak sesuai dengan bentuk aslinya karena perbedaan iklim, kurangnya ketersediaan material dan perbedaan teknik di negara jajahan. Akhirnya, diperoleh bentuk modifikasi yang menyerupai desain di negara mereka.

Yulianto Sumalio menyebutkan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia adalah fenomena budaya yang unik, tidak terdapat di lain tempat, juga pada negara-negara bekas koloni, karena arsitektur kolonial Belanda di Indonesia terdapat pencampuran budaya penjajah dengan budaya Indonesia. Seperti benteng Vastenburg, Bank Indonesia di Surakarta dan masih banyak lagi termasuk bangunan yang ada di Karaton Surakarta dan Puri Mangkunegaran. Helen Jessup (1988;44). Pada masa penjajahan

Belanda, Indonesia mengalami pengaruh *Occidental* (Barat) dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam tata kota dan bangunan. Para pengelola kota dan arsitek Belanda banyak menerapkan konsep lokal atau tradisional Belanda didalam perencanaan dan pengembangan kota, permukiman dan bangunan-bangunan. Adanya pencampuran budaya, membuat arsitektur kolonial di Indonesia menjadi fenomena budaya yang unik. Arsitektur kolonial di berbagai tempat di Indonesia apabila diteliti lebih jauh, mempunyai perbedaan-perbedaan dan ciri tersendiri antara tempat yang satu dengan yang lain¹.

Arsitektur kolonial menyiratkan adanya akulturasi diiringi oleh proses adaptasi antara dua bangsa berbeda. Proses adaptasi yang dialami oleh dua bangsa terbentuk dengan apa yang dinamakan arsitektur kolonial. Hal ini mencakup penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan iklim, ketersediaan material, cara membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan senibudaya yang terkait dengan estetika. Ditinjau dari proses akulturasi yang terjadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya arsitektur kolonial Belanda, yaitu faktor budaya setempat dan faktor budaya asing Eropa atau Belanda. Arsitektur kolonial adalah arsitektur cangkokan dari negeri induknya Eropa ke daerah jajahannya, Arsitektur Kolonial Belanda adalah arsitektur Belanda yang dikembangkan di Indonesia, sekitar awal abad 17 sampai tahun 1942. Arsitektur

¹Nama lain benteng ini adalah Benteng Pannyuya (kura-kura) penampakan dari atas atau denah benteng ini mirip kura-kura dengan kepala mengarah ke laut. Setelah Speelman berkuasa, benteng ini kemudian di pugar dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam, Sesuai dengan nama tempat kelahirannya.

kolonial Belanda merupakan bangunan peninggalan pemerintah Belanda dan bagian kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan aset besar dalam perjalanan sejarah bangsa. Gaya yang mendominasi masa kolonial dapat dibagi menjadi tiga periode: Zaman Keemasan Belanda (abad ke-17 akhir abad ke-18), periode gaya transisi (akhir abad ke-18-abad ke-19), dan modernisme Belanda (abad ke-20).

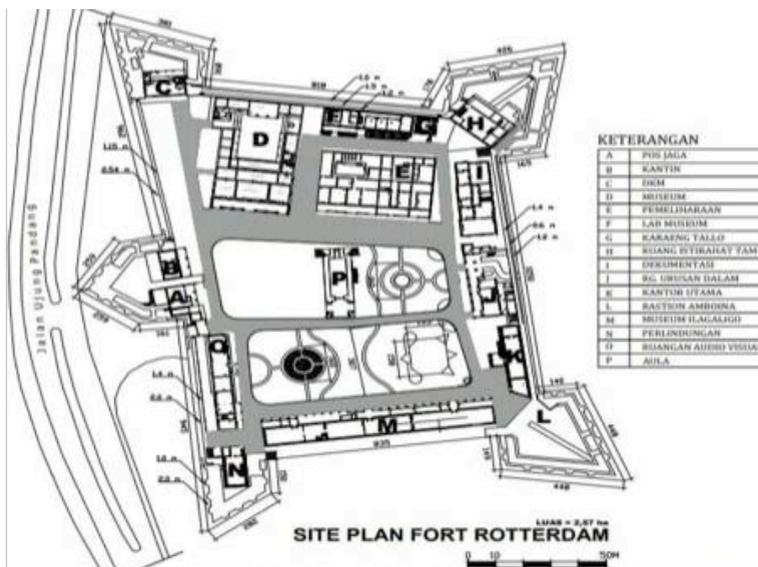
B. Fungsi

Terlepas dari beberapa kali mengalami proses peralihan fungsi bangunan, namun konteks dalam kajian arsitektur ini penekanannya tetap kembali melihat fungsi awal dari bangunan-bangunan di dalam Fort Rotterdam. Fungsi dapat dikategorikan sebagai penentu atau panduan menuju bentuk. Fungsi menunjukkan kearah mana bentuk harus ditemukan. Fungsi dan bentuk memang diperlukan untuk menjelaskan arsitektur, tapi belum memadai (*necessary but not efficient*) (Saliya, 1999).

Fungsi tidak mutlak menentukan bentuk. Konsep *form follows function* banyak dibantah oleh para modernis. Sebagai contoh satu fungsi dapat menghasilkan bermacam-macam bentuk. Bentuk adalah bagian integral dari kadar spiritual bagi pernyataan bangunan. Bentuk harus sebagai media bagi komunikasi (ruang). Yaitu, akan mungkin melalui bentuk yang sesuai untuk memancarkan informasi tertentu (Sohirmbeck, 1988).

Fungsi Fort Rotterdam sebagai barak, benteng pertahanan, benteng pengintai, gudang senjata, gudang museum, gudang logistik dan gudang penyimpanan hasil bumi (rempah-rempah), tempat tinggal, rumah ibadah, klinik pengobatan,

perkantoran, ruang rapat, dan lain-lain sangat mempengaruhi kebutuhan dan dimensi ruang, bentuk bangunan (fasad), serta material yang diaplikasikan pada bangunan. Berikut fungsi bangunan pada masa lalu.



Gambar Situasi Fort Rotterdam

1. Bangunan A dan B

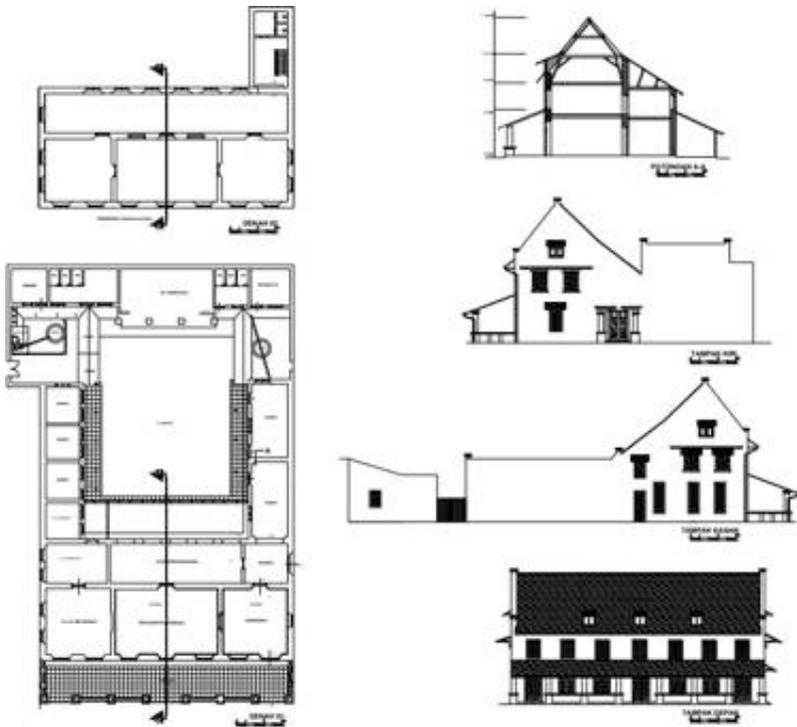
Bangunan A sebagai pos jaga. Penjaga dan pengontrol bagi para tamu yang masuk kedalam benteng. Bangunan B kantor / tempat melakukan pembayaran. Di tahun 1940-an disamping pos jaga masih nampak Barak/wisma untuk tamu Bone pada Bastion Bone.



Bangunan A dan B Fort Rotterdam

3. Gedung D

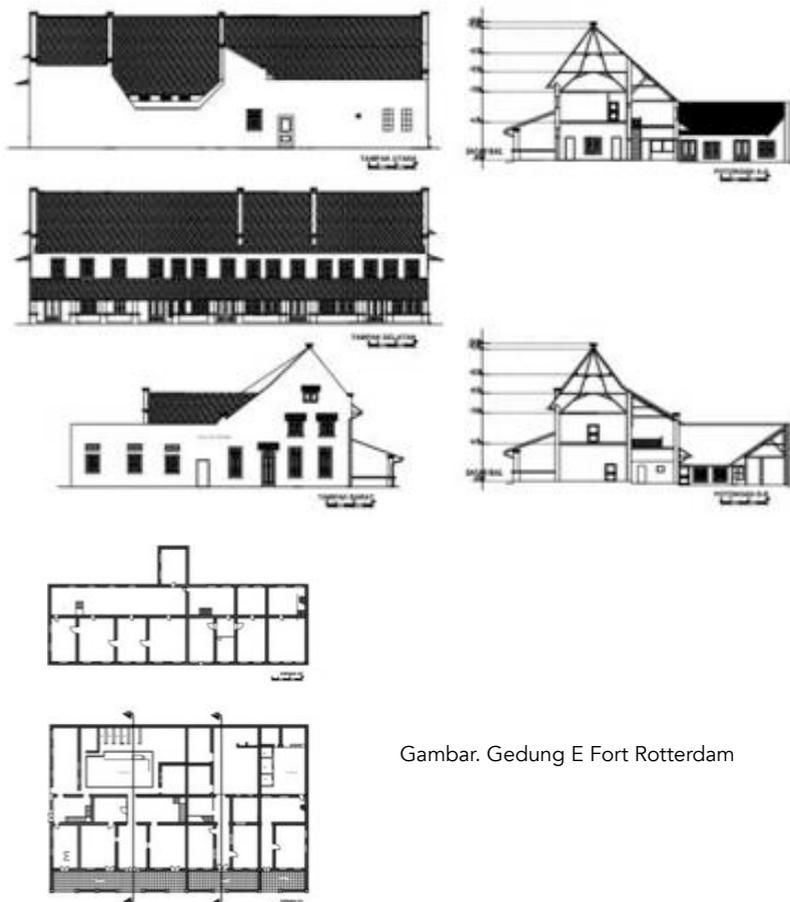
Governor's *quarters* atau ruangan Gubernur.



Gambar. Gedung D Fort Rotterdam

4. Gedung E

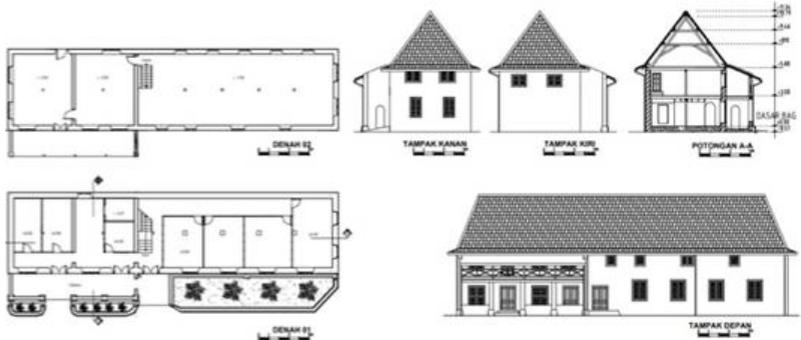
Gedung E dibagi menjadi 3 (tiga) tempat tinggal. Bagian barat (sisi kiri) *chief merchant* tempat kepala/pimpinan dagang, bagian tengah Pastor dan bagian timur (kanan) tempat sekretaris



Gambar. Gedung E Fort Rotterdam

5. Gedung F

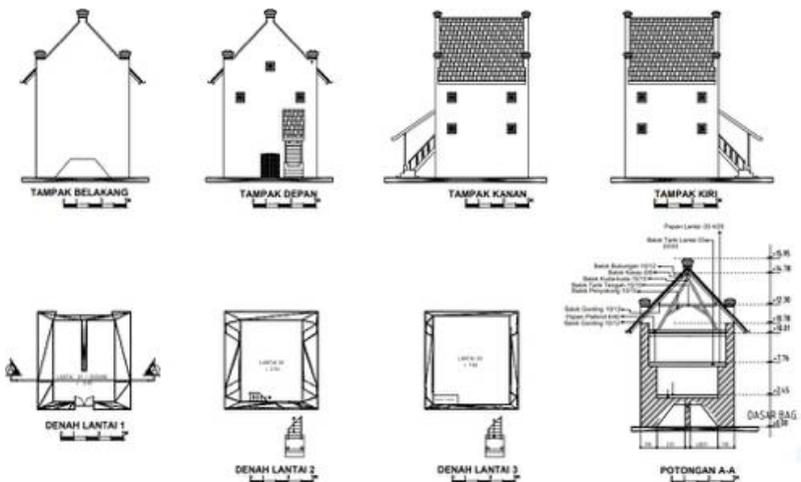
Armoury (gudang senjata).



Gambar. Gedung F Fort Rotterdam

6. GEDUNG G

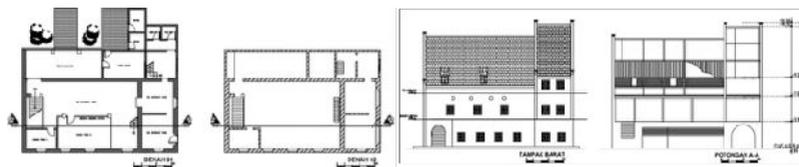
Gunpowder shed (gudang bubuk mesiu)



Gambar. Gedung G Fort Rotterdam

7. Gedung H

Tempat tinggal/asrama Wisma bagi tentara Mandarsyah.



Gambar. Gedung H Fort Rotterdam

8. Gedung I

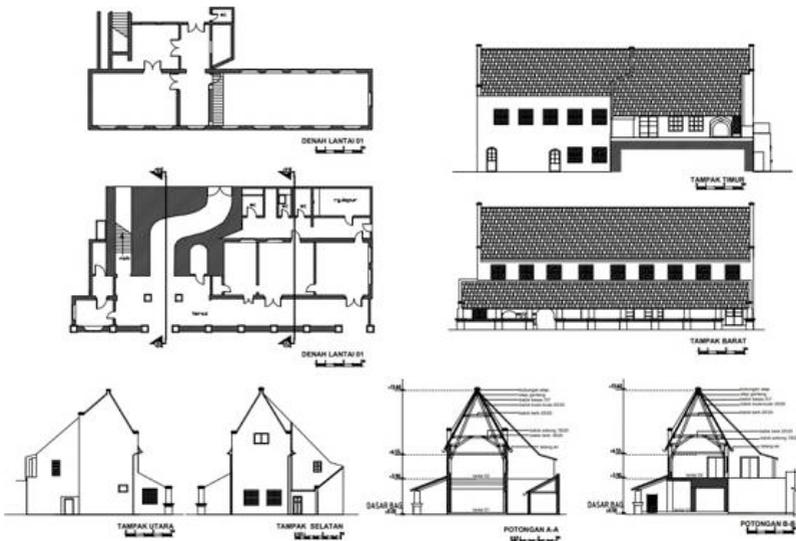
Sebelumnya adalah ruang kepala milisi dan prajurit. Kemungkinan bangunan hancur total, kemudian dibangun oleh Jepang pada tahun 1941. Dimasa itu Jepang melawan Belanda. Belanda kalah meski bergabung dengan sekutu. Gedung oleh Jepang dijadikan sebagai pusat bahasa agar mampu memahami beberapa bahasa yang ada dalam hubungan akan kekuasaan Jepang.



Gambar. Gedung I Fort Rotterdam

9. Gedung J

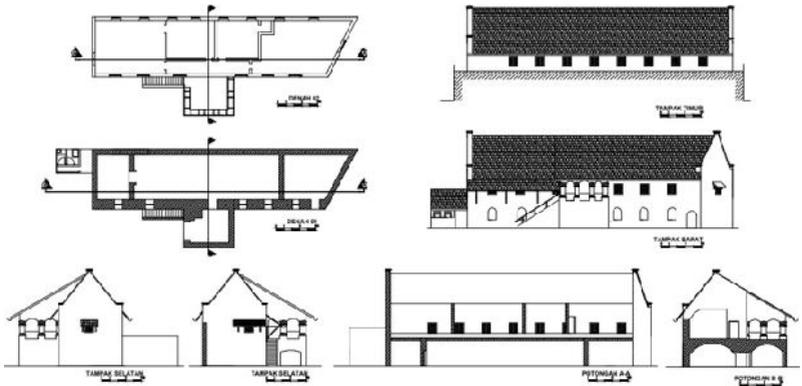
Tempat para penjaga toko. Namun sumber lain menyatakan Gedung J sebagai kantor pusat para perwira angkatan bersenjata Belanda. Olehnya dibagian sisi belakang gedung terdapat pintu masuk terowongan para pasukan.



Gambar. Gedung J Fort Rotterdam

10. Gedung K

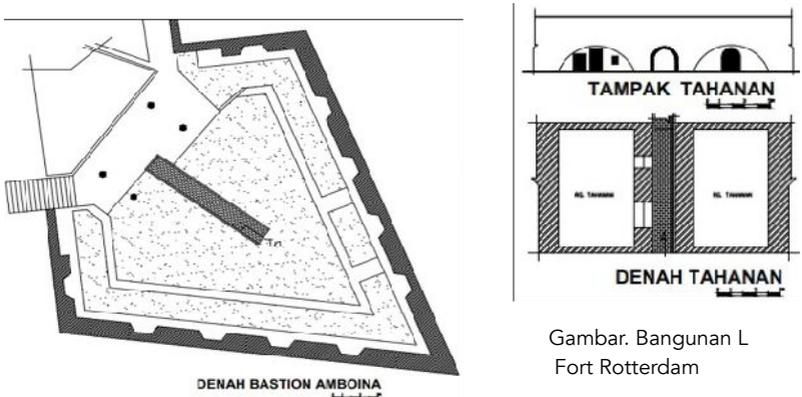
Sebagai kantor Balai Kota. Diruang bawah dan samping terdapat penjara untuk para bangsawan yang masih melakukan perlawanan terhadap Belanda.



Gambar. Gedung K Fort Rotterdam

11. Bangunan L

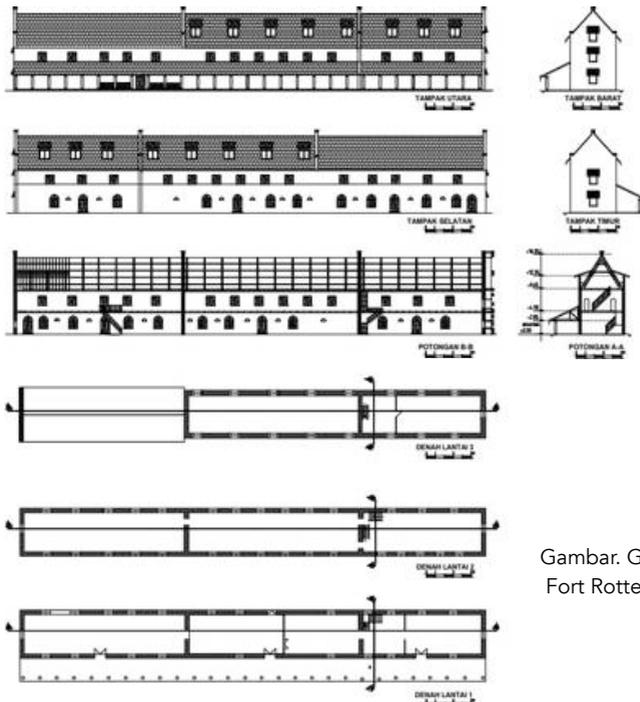
Tempat pasukan tentara Amboina (Ambon).



Gambar. Bangunan L Fort Rotterdam

12. Gedung M

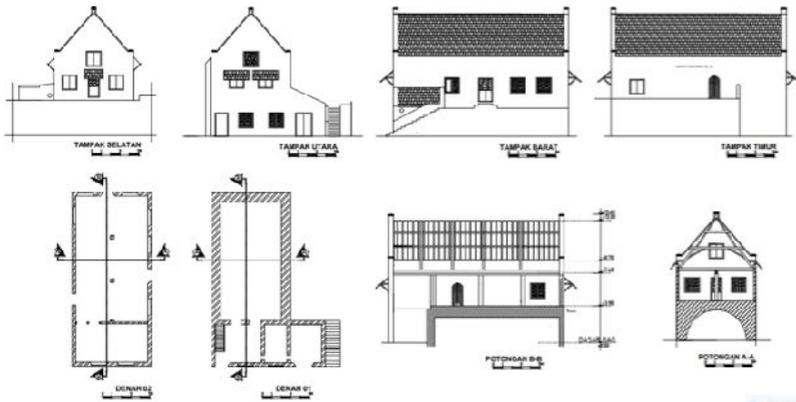
Sebagai bagian bawah (lantai 1) gudang tempat rempah-rempah sedangkan bagian atas (lantai 2) untuk barak bagi tentara Belanda saat itu. Jendela-jendela bagian atas terdapat *dormer*. Dormer adalah dinding yang memanjang melalui atap utama gudang. Berisi jendela dan atap dengan kemiringan atap yang lebih rendah dari atap utama. Area ini membuka atap di bagian dalam gudang untuk memungkinkan lebih banyak ruang penyimpanan dan cahaya matahari. Jendela bagian atas (*dormer*) juga dimanfaatkan untuk meletakkan para sniper (penembak).



Gambar. Gedung M
Fort Rotterdam

13. Gedung N

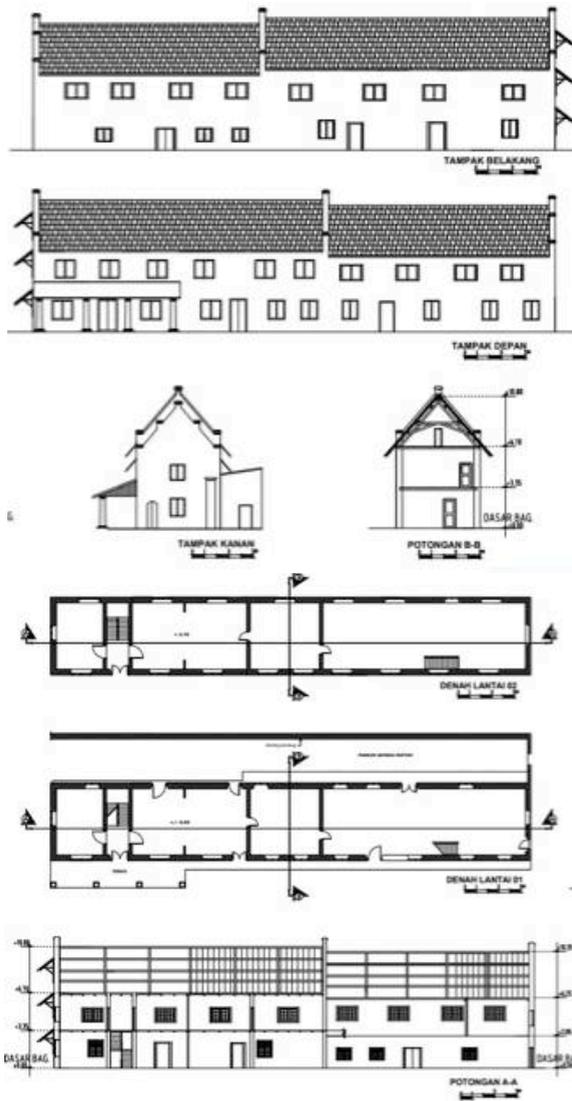
Selain tempat/barak tamu dan pasukan dari Bacan juga rumah tahanan/penjara Pangeran Deponegoro ketika ditaklukkan oleh Belanda.



Gambar. Gedung N Fort Rotterdam

14. Gedung O

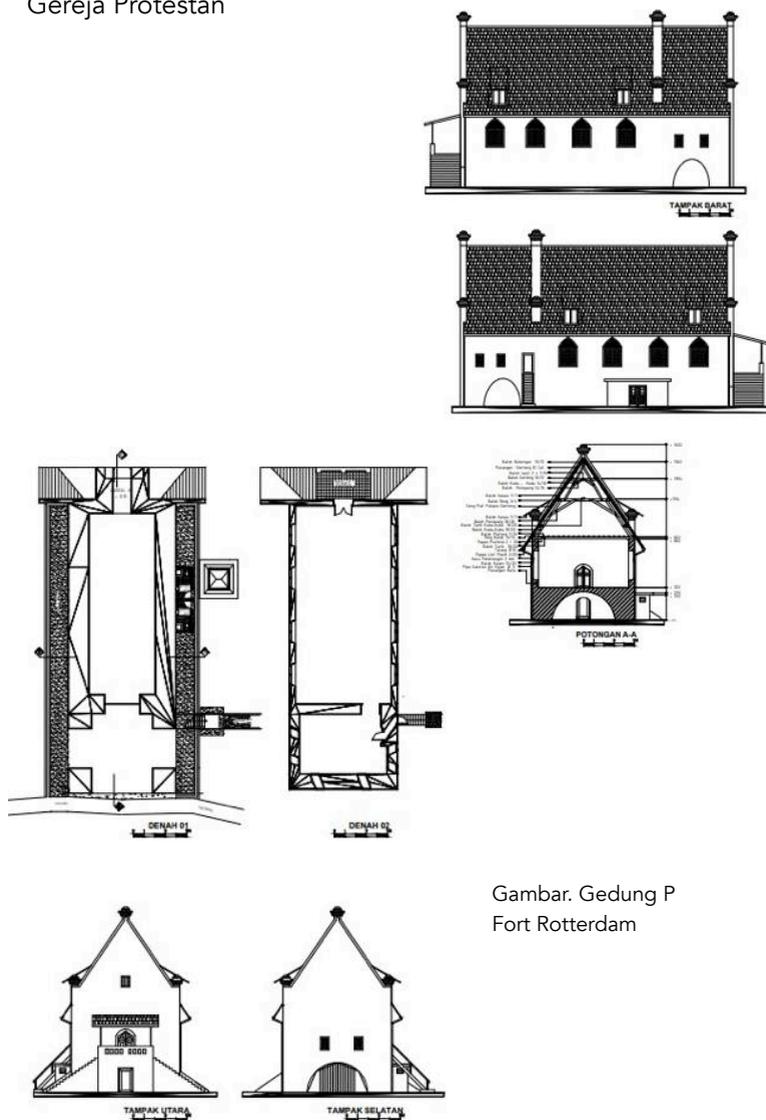
Ruang disisi Selatan sebagai area bagian kesehatan dan perawatan. Termasuk ruang Ahli Bedah Utama (*Prinsipal Surgeon*), tempat tinggal para dokter lain dan suster juga bangsal pasien. Di bagian tengah komandan artileri (*commander of artilleri*), sebagai gudang senjata, Arsonal Storch, tempat meriam, peluru dan lain-lain. dan ruang sisi Utara kantor pembayaran (*pay office*).



Gambar. Gedung O Fort Rotterdam

15. Gedung P

Gereja Protestan



Gambar. Gedung P
Fort Rotterdam

Ukuran Bangunan pada Fort Rotterdam

Nama Gedung	Dimensi Bangunan (cm)								Tinggi Bangunan
	Lebar Bangunan (cm)				Panjang Bangunan (cm)				
	Lt 01	Lt 02	Lt 03	Courtyard	Lt 01	Lt 02	Lt 03	Courtyard	
Gedung C	672	1128	747	-	155	1507	1515	-	1380
Gedung D	3144	2796	2796	1484	4787	2796	2796	1745	1380
Gedung E	2840	1360	-	610	4388	4388	-	1145	1450
Gedung F	795	795	-	-	3268	3268	-	-	1134
Gedung G	751	751	751	-	781	781	781	-	1275
Gedung H	1355	1355	1355	-	2040	2040	2040	-	1610
Gedung I	1300	-	-	-	3240	-	-	-	910
Gedung J	1600	660	-	-	3340	3120	-	-	1360
Gedung K	750	3330	-	-	750	3330	-	-	1160
Bangunan L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedung M	510	510	510	-	5182	5182	5182	-	1695
Gedung N	850	1840	-	-	850	1840	-	-	1300
Gedung O	690	690	-	-	4292	4292	-	-	1035
Gedung P	1018	1018	1018	-	2707	2707	2707	-	1570

Nama Gedung	Jmlh Lt.	Elevasi Lantai	Tebal Dinding (cm)						Posisi Atap, Jendela, Dormer.
			Lt. 01		Lt. 02		Lt. 02		
			D. Utama	D. Praktis	D. Utama	D. Praktis	D. Utama	D. Praktis	
Gedung C	3	295	53	20	50	-	30	-	belakang
Gedung D	3	450	75	68,8	67,5	49	67,5	49	depan
Gedung E	2	415	50	20	50	-	-	-	-
Gedung F	2	300	60	42	60	42	-	-	-
Gedung G	3	245	130	40	130	73	68	40	-
Gedung H	3	390	50	20	50	20	50	-	depan & belakang
Gedung I	1	-	40	-	-	-	-	-	-
Gedung J	2	390	40	20	40	20	-	-	-
Gedung K	2	340	120	70	40	30	-	-	-
Bangunan L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedung M	3	490	50	-	50	-	50	-	depan & belakang
Gedung N	2	420	100	40	100	40	-	-	-
Gedung O	2	335	50	30	50	30	-	-	-
Gedung P	3	325 & 5110	150	100	150	100	-	-	kanan & kiri

C. Struktur

Berikut hasil analisis pada bangunan-bangunan yang terdapat didalam Fort Rotterdam, antara lain;

1. Dinding Batu-Bata (*Briks Wall*)

Dinding dengan ketebalan yang variatif pada bangunan-bangunan yang ada dalam Fort Rotterdam memiliki fungsi selain sebagai dinding sekaligus sebagai struktur pemikul beban pada bangunan itu sendiri. Dinding utama dengan ketebalan 40 cm-150 cm berfungsi sebagai Struktur Dinding Pemikul (*bearing wall structure*) struktur bangunan massif.

Fungsi dinding disini sebagai pembatas ruang sekaligus sebagai dinding struktur beban-beban dari atas misal atap disalurkan ke pondasi melalui dinding. Dinding menerima beban-beban sekaligus membentuk ruang pelobangan dinding yang terjadi untuk pintu dan jendela mengharuskan penyaluran beban dipindahkan ke permukaan dinding sebelahnya.

Dinding praktis dengan ketebalan dari 20 cm-100 cm Struktur Dinding Bukan Pemikul (*non bearing wall structure*). Fungsi dinding disini hanya sebagai pembatas ruang, bukan sebagai fungsi struktur. Dinding Utama/dinding pemikul pada lantai 1 (satu) dibeberapa bangunan dibuat lebih tebal tetapi dilantai 2 (dua) dan 3 (tiga) ketebalannya direduksi walau dinding menerus keatas sampai di ujung dinding sebagai dudukan kuda-kuda.

2. Atap

Atap dan jendela dormer tipikal (*sheddormer*) posisinya dilantai 3 (tiga). Penempatan dormer pada ruang di bawah atap (*attic*) atau loteng pada lantai 3 (tiga) sangat dibutuhkan terutama pada daerah iklim tropis selain untuk sirkulasi udara, meminimalisir panas dan efek lembab pada saat musim hujan, juga pencahayaan serta celah pengintai musuh bagi sniper (penembak jitu).



Foto bentuk atap dan jendela

Sudut kemiringan atap sandar atau atap tempel (*shedroof*) model atap yang menempel pada dinding di bagian atas teras dengan sudut kemiringan 20° - 22° . Agar posisinya kuat, beban ditumpukan pada kuda-kuda dengan kemiringan sekitar 20° - 40° . Atap pelana dengan kemiringan sekitar 40° , 50° , 60° , pada bangunan-bangunan induk salah satu cara Belanda beradaptasi terhadap iklim "Nusantara" panas dan curah hujan yang tinggi. Dengan sudut kemiringan atap yang tinggi untuk melindungi sengatan panas matahari dan derasnya hujan yang turun dapat mengalir dengan lancar sehingga bangunan dapat terhindar dari bocor dan air yang merembes. Tambahan tritisan yang lebar sekitar 90 cm hingga 120 cm untuk melindungi teras, dinding dan jendela dari tampias hujan dan sinar matahari langsung.



3. Pintu dan Jendela

Bentuk pintu dan jendela pada bangunan kolonial Belanda di Fort Rotterdam memiliki bentuk-bentuk yang geometris dan simetris. Ciri ornamen bentuk yang sering digunakan pada rancangan pintu/jendela adalah tata-susun bentuk-bentuk persegi. Bentuk daun jendelanya dan bukaannya pun memiliki bentuk yang bervariasi, misalnya ada jendela yang terdiri dari dua buah daun jendela, adapula jendela yang hanya terdiri dari satu daun jendela saja, adapula yang daun jendelanya hanya menutup sebagian dari lubang jendela. Model bukannya berupa bukaan ayun. Adapula variasi bukaan ayun dengan bagian bidang daun jendela atas dan bawah dapat dibuka dan ditutup secara terpisah/jendela koboy.

Jendela rangkap merupakan ciri khas jendela bangunan kolonial. Terdapat tiga model Jendela yaitu jendela panel kayu masif, jendela kreyak dan jendela panil kaca. Jalusi dari kayu dan jendela ganda dengan ornamen persegi berbahan kaca polos. Jendela yang berbentuk jalusi model sisir/kreyak sebagai

ventilasi udara meneruskan aliran udara masuk kedalam bangunan. Jendela rangkap (dua lapis), yaitu menggunakan empat buah daun pintu/jendela. Kecenderungan dominan daun pintu/jendela lapis depan menggunakan panil masif dari kayu jati.



Foto bentuk pintu dan jendela

Jendela rangkap merupakan ciri khas jendela bangunan kolonial. Terdapat tiga model Jendela yaitu jendela panel kayu masif, jendela krepyak dan jendela panil kaca. Jalusi dari kayu dan jendela ganda dengan ornamen persegi berbahan kaca polos. Jendela yang berbentuk jalusi model sisir/krepyak sebagai ventilasi udara meneruskan aliran udara masuk kedalam bangunan. Jendela rangkap (dua lapis), yaitu menggunakan empat buah daun pintu/jendela. Kecenderungan dominan daun pintu/jendela lapis depan menggunakan panil masif dari kayujati.

Khusus Jendela Gedung P (gereja) tampaknya berbeda dengan bentuk jendela bangunan gedung yang lain. Bagian atas jendela berbentuk setengah lingkaran segitiga atau sudut tumpul (*obtuseangle*) seperti tipe-tipe jendela pada gereja tua yang lain.

Window hook (hak angin jendela) dipasang di sudut bawah dari sebuah jendela. Fungsi *window hook* adalah untuk menahan dan menyangga daun jendela. Bentuknya seperti semacam pengait yang dikaitkan pada kusen dan daun jendela. Pemasangan hak angin jendela dilakukan agar ketika angin berhembus dengan kencang ada pengait yang menahan daun jendela agar tidak terhempas menutup. Jendela rangkap kolonial Belanda ini juga menggunakan *espanyolet* sebagai pengunci sayap jendela pada ibu jendela.

Selain jendela, pintu sebagai sarana keluar masuknya seseorang ke sebuah ruangan memiliki fungsi yang penting. Ada beberapa tipe pintu utama pada bangunan dalam Fort Rotterdam diantaranya; bukaan bagian atas berbentuk klasik seperti *lengkung busur* atau setengah lingkaran. Daun pintu rangkap terdiri dari 2 (dua) buah daun pintu yang ukurannya sama besar. Daun pintu menggunakan lembaran papan kayu masif. Pintu untuk bangunan yang terkait keamanan, seperti kantor polisi pariwisata, bekas penjara/ruang tahanan dan lain-lain daun pintunya juga rangkap tetapi masing terdiri dari satu daun pintu. Yang membedakan daun pintu kearah dalam juga menggunakan lembaran papan kayu masif sedang bukaan kearah luar menggunakan grill besi yang kokoh untuk keamanan akses kedalam bangunan.



Foto bentuk serambi

4. Serambi, Ballustrade dan Arkade

Balustrade atau pagar pembatas pada bangunan Gedung D, E, dan J terdapat pada serambi. *Balustrade* peninggalan kolonial Belanda memanjang serambi depan memiliki bentuk klasik dengan ketinggian *Balustrade* 75 dari peilteras dan 90-100 cm dari jalan dengan ornamen pilar persegi bergaya *smoothclassic* atau gaya klasik yang dibuat lebih sederhana dan minim dekoratif.

Style arkade (*arcade*) pada Serambi Gedung M atau gaya lorong pejalan kaki yang beratap dengan deretan di kedua sisinya. Kolom/pilar *tuscan* dicat dengan warna putih terlihat bentuk sederhana namun berciri klasik mewah dan kokoh. Tuscan adalah salah satu bentuk arsitektur tertua dan paling sederhana yang dipraktikkan di Italia kuno. Di Amerika Serikat, kolom yang dinamai wilayah Tuscany di Italia adalah salah satu jenis kolom paling populer untuk menopang beranda depan Amerika. Gaya desain Kolonial adalah gaya desain yang berkembang di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Serambi di Gedung K, juga berupa arkade bergaya *Spanish Colonial*. Gaya ini kemungkinan bagian



dari pengaruh imperial Spanyol bagi Portugis. Dan menjadi catatan sejarah sebelum VOC berkuasa di Makassar bahkan seantero Celebes Portugis terlebih dahulu melakukan hubungan politik dagang dengan masyarakat lokal/pribumi

5. Gable/ Gevel

Salah satu ciri khas bangunan kolonial Belanda adalah *Gable/gevel*, berada pada bagian tampak bangunan, berbentuk segitiga yang mengikuti bentukan atap. Menggunakan *Gevel* (*gable* atau atap runcing) pada tampak depan bangunan dapat dikenali dari bentuk segitiga simetris yang dibuat di bagian atas bangunan oleh dua panel atap. Kedua panel ini harus bernada sehingga mereka bertemu di tengah bangunan di punggung bubungan/nok.



Kesimpulan

Fort Rotterdam adalah salah satu monumen paling menarik di Celebes yang berasal dari zaman *East-India Company*. Dibangun dengan gaya Portugis kuno oleh mantan penguasa Makassar Pada abad ke-17, dulunya disebut Benteng Oedjoeng Pandang. Dengan jatuhnya Goa (Gowa) pada tahun 1607 Benteng diambil oleh Laksamana Speelman yang menamainya Fort Rotterdam, setelah tempat kelahirannya. Bangunan-bangunan

(kastil) dalam Fort Rotterdam bergaya Kolonial Eropa, tepatnya Gaya Kolonial Belanda. Meski telah mengalami beberapa kali peralihan fungsi dari masa VOC hingga saat ini tetapi bentuk arsitekturnya masih tetap dipertahankan melalui tahapan-tahapan proses pemugaran.

Arsitektur Fort Rotterdam memiliki ciri khas pada dinding, atap dan dormer. Ketebalan dinding variatif pada bangunan dalam Benteng Rotterdam, memiliki fungsi sebagai dinding sekaligus sebagai struktur pemikul beban. Dinding utama berfungsi sebagai Struktur Dinding Pemikul (*bearing wall structure*) struktur bangunan massif. Atap dan jendela dormer tipikal (*sheddormer*) posisinya dilantai 3 (tiga). Bentuk pintu dan jendela memiliki bentuk yang bervariasi, geometris dan simetris. Balustrade atau pagar pembatas terdapat pada serambi, memiliki bentuk klasik dengan ornamen pilar persegi bergaya *smoothclassic* atau gaya klasik yang dibuat lebih sederhana dan minim dekoratif. serta salah satu ciri khas bangunan kolonial Belanda adalah Gable/gevel.

Arsitektur kolonial menyiratkan adanya akulturasi diiringi oleh proses adaptasi antara dua bangsa berbeda. Proses adaptasi terbentuk dengan apa yang dinamakan arsitektur kolonial. Hal ini mencakup penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan perbedaan iklim, ketersediaan material, cara membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan seni budaya yang terkait dengan estetika. Ditinjau dari proses akulturasi yang terjadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya arsitektur kolonial Belanda, yaitu faktor budaya setempat dan faktor budaya asing Eropa atau Belanda. Arsitektur kolonial adalah arsitektur cangkakan dari negeri induknya Eropa ke daerah jajahannya,

Arsitektur kolonial Belanda merupakan bangunan peninggalan pemerintah Belanda dan bagian kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan aset besar dalam perjalanan sejarah bangsa

DAFTAR PUSTAKA

www.alamy.com

<https://dzargon.com/sejarah-berdirinya-benteng-rotterdam-dan-wajah-pariwisata-budaya-makassar-di-dalamnya>.

en.wikipedia.org

Gids van makassar en omstreken, n.v. Celebes drukkerli.p.

PoestahaDepok: *Sejarah Makassar (1)*: Casteel Rotterdam, Cikal KotaMakassar; 'Maluku Masa Lalu, Jawa Masa Kini, Sumatra Masa Depan'

https://id.wikipedia.org/wiki/Fort_Rotterdam#/media/Berkas:Collectie_Tropenmuseum_De_westpoort_van_Fort_Rotterdam_te_Makassar_op_Celebes.TMnr_60013051.jpg

Pipiet Gayatri Sukarno, Antariksa, Noviani Suryasari. Karakter visual fasade bangunan kolonial belanda rumah dinas bakorwil kota madiun, jurnal arsitektur nalars volume 13 no 2 juli 2014: 99-112.

<https://dheavours.wordpress.com/2015/06/11/arsitektur-kolonial/>

Larry Tyrone Tarore, Sangkertadi, Ivan R.B Kaunang, Karakteristik Tipologi Arsitektur Kolonial Belanda Pada RumahTinggal.

Samsudi1 *, Agung Kumoro W2 ,Dyah Susilowati Pradnya P3, Anita Dianingrum 4. The Aspects of Dutch Colonial Architecture in the Building of "Pendopo Puri Mangkunegaran Surakarta", Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Binaan, Volume 18 Issue 1 April 2020, pages:166-174.

- Gunawan Tjahjono, ed. (1998). *Architecture. Indonesian Heritage*.
6. Singapore: Archipelago Press. ISBN 981-3018-30-5. - The
house was bought by Van der Parra in 1767.
- Endah Harisuna, M. Amrin MS Conorasb*, *Karakteristik Tipologi
Arsitektur Kolonial Belanda Rumah Bastion Benteng Fort
Oranje Di Ternate*, *Journal of Science and Engineering*,
Universitas Khairun, Ternate, Indonesia, 5 Mei 2018.

VANDALISME DI BENTENG ROTTERDAM : EKSISTENSI KELIRU GENERASI MUDA

oleh

Yusriana

Prolog

Siapa yang tidak kenal dengan Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang yang merupakan benteng kebanggaan warisan kerajaan Gowa. Sudah sejak lama benteng ini memiliki daya tarik, sejak masa VOC benteng ini diambil alih karena posisi strategisnya yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, sehingga pada pasca Perjanjian Bungayya, posisi benteng dianggap penting bagi VOC dalam mengontrol perdagangan di jalur laut. Atas rasa kepemilikan Belanda pula kemudian benteng ini dinamakan Fort Rotterdam dan saat ini menjelma menjadi objek tujuan wisata populer dan unggul di Sulawesi Selatan.

Menilik sejarahnya, benteng ini sudah sejak lama terdaftar sebagai monumen (*monument verklaard*) dan sebagai monumen Benteng Rotterdam berada di bawah pengawasan Pemerintah (Sagimun, tanpa tahun: 169). Kemudian, benteng telah banyak difungsikan dan saat ini dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus objek wisata dengan daya tariknya sebagai warisan budaya dan sejarah bangsa, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Warisan budaya dan sejarah merupakan daya tarik penting bagi wisatawan di banyak destinasi dan karenanya

mewakili sumber daya fundamental untuk menarik turis baik saat ini maupun di masa depan (Groizard & Santana-Gallego, 2018).

Pemanfaatan Benteng Rotterdam dari Masa Ke Masa

Benteng Rotterdam memiliki bentuk spesifik yang membedakannya dengan peninggalan benteng-benteng kerajaan Gowa yang lain begitu pula dengan bahan baku pembuatan benteng yang tersusun dari batuan andesit, tertata dengan baik dan rapi. Bangunan tembok atau dinding Benteng Rotterdam berbentuk trapesium (jajaran genjang) yang membujur dari utara ke selatan dengan ukuran panjang bagian depan tembok bagian barat 225 meter, sisi tembok bagian utara berukuran 204 meter bagian timur, 152 meter dan sebelah selatan 165 meter (Rasyid 1983;75).

Dalam Kompleks benteng terdapat bangunan-bangunan bergaya Eropa khususnya Belanda abad pertengahan (Abad XVI-XVII) dengan luas keseluruhan bangunan berdasarkan hasil pengukuran Pokja Pemugaran Suaka PSP Sulselra adalah 12,99 99,57 m² (Iqbal, 2004). Selain bangunan, area taman yang luas dan bersih menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung untuk bersantai dan berfoto di area taman.

Menurut sejarahnya, Benteng Rotterdam dibangun oleh Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapakrisi Kallonna dan diselesaikan oleh puteranya, Raja Gowa ke X, I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng, pada tahun 1545 dengan gaya Portugis. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan khas tradisional Makassar yang bertiang (Asmunandar, 2008). Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin,



TAMU
LAPOR DI POS
←
VISITOR SHOULD
REPORT TO THE GUARD

benteng ini pernah dijadikan sebagai pusat persiapan perang dan upacara membasuh panji-panji dengan darah dalam menghadapi VOC Selanjutnya pada masa pemerintahan Kolonial Belanda antara tahun 1667-1942, benteng ini dijadikan sebagai markas Komando Pertahanan, Pusat Perdagangan, pemerintahan dan pemukiman bagi pejabat-pejabat Belanda, serta tahanan bagi penentang Belanda. Tahun 1834-1855, Pangeran Diponegoro pernah ditawan di benteng ini. Pada masa ini Belanda mengganti bangunan-bangunan tradisional Makassar dengan bangunan bergaya Eropa/Gotik, untuk menunjang kegiatan penghuni benteng (Andaya, 2004). Berdasarkan pasal 11 tersebut sejak ditandatanganinya perjanjian Bungaya maka Benteng Rotterdam beralih milik kompeni Belanda. Pada tanggal 1 November 1667, Speelman mulai tinggal di dalam Fort Rotterdam, meriam-meriam diletakkan di atas tembok, peralatan perang dipersiapkan baik untuk pertahanan dan penyerangan serta merombak semua bangunan yang ada dalam benteng dengan corak arsitektur kolonial. Nama lain dari Benteng Rotterdam adalah Benteng *Panynyua* (Penyu) sesuai dengan bentuknya apabila dilihat dari udara menyerupai seekor penyu yang hendak bergerak ke laut (Rasyid, 1983 ; 74) dalam (Iqbal, 2004).

Adapun penamaan awal Benteng Ujung Pandang, disebut demikian karena dahulu di sekitar benteng itu banyak tumbuh pohon pandan yang daunnya dapat dianyam (Dumadi, 1992). Benteng Ujung Pandang pertama kali dimanfaatkan pada sekitar abad ke-16 dan 17 sebagai benteng pertahanan Kerajaan Gowa, kemudian pada tahun 1667 benteng direbut oleh Belanda dan namanya diubah menjadi Fort Rotterdam. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda antara tahun 1667 hingga tahun 1942, benteng ini berfungsi sebagai Markas Komando Pertahanan,

Pusat Perdagangan, pemerintahan dan pemukiman bagi pejabat-pejabat Belanda, serta tahanan bagi penentang Belanda.

Ketika masa pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945, Benteng Rotterdam dijadikan sebagai kantor Pusat Penelitian Pertanian dan Bahasa. Pada masa ini, Jepang mendirikan satu gedung dengan menyesuaikan dengan bentuk gedung yang sudah ada. Pada masa pendudukan KNIL pada tahun 1945-1950, benteng dijadikan sebagai Pusat Pertahanan dalam memberantas gerakan perlawanan TNI dan pejuang Republik Indonesia. Selanjutnya di tahun 1950-1969, benteng difungsikan sebagai tempat pemukiman bagi tentara dan sipil lalu pada tahun 1970 benteng dikosongkan dan diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemeliharaan dan pelestariannya. Pemanfaatan untuk kepentingan kebudayaan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat dimulai setelah Indonesia Merdeka yaitu pada saat kalangan budayawan merintis kembali pendirian Museum Celebes yang diresmikan pada tanggal 1 Mei 1970 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan No.182/V/1970 dan berubah nama menjadi Museum La Galigo (Perdana, 2020).

Tahun 1974, Benteng Rotterdam ditetapkan sebagai Pusat Budaya Sulawesi Selatan, Sarana Wisata Budaya dan Pendidikan. Pada tahun 1976 salah satu bangunan didalam Benteng Rotterdam dimanfaatkan sebagai pusat latihan tari Indonesia (Konservatory Tari Indonesia) di Ujungpandang (Tjandrasmita, 1986:12), setelah itu digunakan sebagai Pusat Kesenian Makassar atau lebih dikenal sebagai bangunan DKM (Dewan Kesenian Makassar) (BPCB, 2010). Pemanfaatan Benteng Rotterdam sebagai ruang publik diambil alih oleh pihak Balai Pelestarian Cagar

Budaya yang sekaligus mengawasi pelestarian Benteng Rotterdam sedangkan pengelolaan museum La Galigo diambil alih oleh Dinas Kebudayaan.

Saat ini, benteng dimanfaatkan sebagai museum, perkantoran dan ruang publik. Benteng menjadi ruang publik yang sangat diminati dan populer di Sulawesi Selatan. Sayangnya, seiring kepopulerannya, benteng mengalami gangguan-gangguan berupa coretan-coretan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, itulah resiko yang selalu dihadapi oleh cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga seringkali memberi dampak negatif terhadap cagar budaya itu sendiri. Coretan-coretan pada fisik cagar budaya menjadi salah satu dampak negatif akibat ulah pengunjung. Coret-coretan tersebut disebut juga sebagai bentuk vandalisme.

Dalam pariwisata, vandalisme dapat dibuktikan tidak hanya pada jejak yang ditinggalkan, tetapi barang-barang yang disingkirkan dengan sengaja oleh turis merupakan bagian-bagian dari suvenir dinding, bebatuan, tumbuhan, bunga, cangkang, karang, dan bahkan hewan hidup dan burung (Weaver, 2006 dalam (Bhati & Pearce, 2016)). Fasilitas dan barang yang dipamerkan mungkin rusak, diwarnai atau dirusak oleh tindakan vandalistik yang disengaja, sementara istilahnya vandalisme cukup ketat diterapkan pada manifestasi fisik perilaku yang tidak diinginkan, juga dapat dikatakan bahwa gagal untuk menghormati tradisi budaya seperti tidak melepas sepatu di kuil, lalai memakai jilbab di masjid dan memotret secara asertif mereka yang tidak ingin difoto adalah tindakan sekutu vandalisme (Bhati & Pearce, 2016).

Vandalisme dan Jenis-Jenisnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, dan sebagainya). Perusakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita lakukan terhadap suatu benda atau properti yang menjadikan benda atau *property* tersebut lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, vandalism hanya boleh dikatakan pada suatu bentuk kejahatan yang membuat suatu benda atau properti menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Bila hal yang dilakukan justru membuat benda atau properti tersebut lebih indah, maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai vandalism.

Cohen (1973) dalam (Bentar, R, & Buamona, 2021) menjelaskan empat macam Vandalisme berdasarkan motivasi yakni:

- a. , merupakan jenis vandalism yang dimotivasi oleh keinginan memperoleh uang atau barang, misalnya penempelan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- b. , merupakan jenis vandalism yang dimotivasi oleh tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi, misalnya adalah tindakan yang pernah dilakukan oleh seorang artis senior Pong Hardjatmo yang menuliskan kalimat “Jujur, adil, tegas” di atap Gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada para anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil rakyat harus berlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.

- c. , merupakan jenis vandalism yang dimotivasi untuk membahas dendam atas suatu kesalahan, misalnya sekumpulan anak yang dengan sengaja melempar jendela tetangga mereka dengan batu hingga pecah karena tetangga tersebut sering memarahi mereka karena ribut di saat bermain.
- d. , adalah vandalism yang dilakukan karena pelaku vandalism mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan pada orang lain atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain. Contohnya adalah dengan sengaja mencoret



Coretan yang tersisa di langit-langit dan dinding lorong menuju bastion Amboina (Yusriana, 2021)

kendaraan orang lain karena si pelaku senang melihat pemilik marah.

e. , adalah vandalisme yang dilakukan untuk menunjukkan dan medemonstrasikan kemampuan yang dimiliki, dan bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain. Contohnya adalah seorang anak sekolah yang mencoret-coret bangku atau meja belajar di kelasnya.

Vandalisme di Benteng Ujungpandang

Berdasarkan rekapitulasi data pengunjung BPCB Sulawesi Selatan, tahun 2019 merupakan tahun kunjungan terakhir ke BPCB karena akibat pandemi Covid 19 di tahun 2020, objek wisata ini ditutup untuk kunjungan. Hingga pengamatan di awal tahun 2021, kondisi tersebut belum berubah. Selama tahun 2019 terdapat sebanyak 124.211 pengunjung yang datang ke benteng ini. Pengamatan terhadap vandalisme di Benteng Rotterdam dilakukan oleh (Kurata, 2019) dan menunjukkan banyak jejak vandalisme dan beberapa masih dapat teramati di tahun 2021. Berikut bentuk-bentuk vandalisme yang teridentifikasi di tahun 2019 dan 2021 antara lain:

a. Coretan

Coretan merupakan hasil dari kegiatan mencoret-coret. Coretan yang tampak di beberapa dinding bangunan dan dinding struktur benteng menggunakan alat tulis berupa spidol warna. Coretan tidak menyebabkan pengelupasan, namun mengurangi keindahan. Adapun coretan tersebut terdiri atas tulisan



Goresan di struktur benteng dan bangunan. (Yusriana, 2021)



Sampah sisa konsumsi pengunjung yang dibiarkan berserakan di struktur benteng . (Dok. Kurata, 2019)



Pengamatan di sisi selatan benteng tampak area ini menjadi titik pembuangan dan pembakaran sampah. (Dok. Yusriana, 2021)

menunjukkan nama, tanggal (waktu), komunitas, nama tempat dan kalimat-kalimat tertentu.



Bentuk coretan yang berbekas di dinding bangunan C dan di Lorong menuju bastion Amboina (Kurata, 2019)

B. Goresan

Goresan-goresan tampak pada dinding bangunan J, K, dan N serta pada dinding benteng sisi timur, serta pada bastion Amboina. Goresan menyebabkan pengelupasan lapisan dinding karena dibuat dengan menggunakan benda tajam/runcing. Goresan tersebut berupa nama kelompok, nama orang, dan juga merujuk tanggal (waktu).

Selain coretan dan goresan, salah satu bentuk *vandalism* yang ditemukan di Benteng Rotterdam adalah sampah. Sampah yang teramati di tahun 2019 sangat jelas menunjukkan perilaku pengujung yang tidak bertanggungjawab terhadap benteng. Sampah terlihat di sekitar halaman benteng maupun di struktur benteng di titik-titik favorit pengunjung seperti bastion Bone. Sedangkan, di tahun 2021 diamati sudah tidak begitu banyak sampah, hanya di titik tertentu di sisi selatan benteng. Jika diperhatikan pada area ini dijadikan sebagai tempat penumpukan sampah.

Eksistensi Versus Penghargaan Terhadap Warisan Budaya

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa kebanyakan vandalisme di Fort Rotterdam adalah coretan yang diketahui kemungkinan besar diciptakan oleh kalangan remaja dimana ditandai dengan coretan yang berisi tulisan nama geng atau kelompok dan asalnya. Jika mengacu keteori Cohen (1973) maka jenis vandalisme tersebut digolongkan kedalam *play vandalisme*, dimana oknum ingin menunjukkan dan mendemonstrasikan kemampuan yang dimiliki, dan bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.

Hasil-hasil penelitian mengenai kebiasaan buruk kalangan remaja ketika berada di tempat-tempat publik menunjukkan bahwa remaja identik dengan perilaku vandalism dengan mencoret dinding, meja belajar di sekolah, maupun di perpustakaan. Hal tersebut dapat dijelaskan, generasi muda utamanya kalangan remaja berada pada batas peralihan kehidupan dari masa anak ke masa dewasa, sehingga pengalaman mengenai alam dewasa belum ada. Menurut Singgih Gunarso (1989) hal tersebut terlihat pada:

- a. Kegelisahan remaja yang mempunyai banyak keinginan tetapi selalu tidak dapat terpenuhi dirinya selalu merasa belum mampu sehingga menimbulkan rasa ketidaktenangan remaja.
- b. Adanya pertentangan dalam dirinya sendiri sehingga menimbulkan rasa kebingungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Kadang-kadang timbul perselisihan dan pertentangan antara dirinya dengan orang tua tetapi remaja tidak berani untuk mengambil resiko.

- c. Ingin mencoba sesuatu yang belum diketahuinya yang kadang-kadang berakibat negatif.
- d. Keinginan untuk mengetahui alam sekitarnya yang lebih luas.
- e. Senang mengkhayal dan berfantasi karena adanya batasan-batasan kemampuan.
- f. Adanya tantangan dengan keinginannya namun tidak berdaya sehingga lebih senang dengan berkumpul antar teman sesama remaja. Sebagai aplikasi khayalan dan keinginan para remaja kadang-kadang mereka menyalurkan kegiatannya kearah yang kontroversial dengan norma-norma sosial yang ada di lingkungan, bahkan kadang-kadang merusak atau merugikan masyarakat (Gunarso, 1989).

Ada satu kebutuhan perkembangan remaja yang harus dipenuhi yakni kebutuhan fisiologis, jaminan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan dan kesempatan pengembangan diri yang semua harus terpenuhi dan apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan cenderung ke arah kegiatan negatif yang mengarah pada kenakalan remaja dengan mengganggu ketertiban lingkungan termasuk diantaranya adalah vandalisme (Salmah, 2015).

Apabila kita berbicara dalam konteks penghargaan terhadap warisan budaya, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang gemar melakukan tindakan mencoret-coret di bangunan cagar budaya merupakan orang-orang yang tidak menghargai masa lalu. Mengapa demikian karena, warisan budaya dalam hal ini Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah warisan kerajaan Gowa yang sarat nilai antara lain, nilai budaya, nilai perjuangan, nasionalisme dan nilai lainnya. Tindakan

mencoret sudah dikategorikan sebagai bentuk pengrusakan. Jika dikaitkan lagi dengan aturan hukum, maka si pencoret ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ada ketidakpahaman generasi muda khususnya oknum pencoret mengenai eksistensi diri. Masih banyak bentuk eksistensi diri yang bisa ditunjukkan dengan cara yang lebih kreatif dan berwawasan lestari, misalnya memperkenalkan kembali jejak kesejarahan dan nilai penting dari Benteng Rotterdam melalui tulisan pada *caption* foto yang diunggah di media sosial, misalnya Instagram. Dengan begitu, apa yang kita lakukan memberikan dampak positif setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat luas utamanya generasi milenial mengenai pentingnya cagar budaya Benteng Rotterdam, sehingga harus dijaga dan dilestarikan.

Tindakan Preventif Vandalisme

Pencegahan vandalisme dapat dilakukan setidaknya dari sisi pengelola. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya vandalisme.

- a. Pihak pengelola memberlakukan standar bagi pengunjung. Standar bagi pengunjung memuat ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situs.
- b. Pihak pengelola memperketat sistem pengawasan dalam area benteng, misalnya penempatan cctv di titik-titik yang diperkirakan rawan coretan.
- c. Pihak pengelola menyediakan fasilitas khusus bagi pengunjung yang ingin eksis di lokasi cagar budaya. Hal ini merupakan

upaya pencegahan terjadinya tindakan coret-mencoret pada bangunan maupun struktur benteng serta fasilitas lain. Fasilitas ini tentunya ditempatkan pada titik-titik yang merupakan spot favorit dari pengunjung sehingga apa yang ingin disampaikan melalui coretan tadi, dapat tersampaikan kepada pengunjung lain.

- d. Pihak pengelola baiknya berkoordinasi dengan pemerintah lokal maupun organisasi masyarakat terutama terkait program-program kampanye penyadaran cagar budaya utamanya untuk generasi muda dan masyarakat di sekitar situs. Program-program kampanye penyadaran seperti ini sebenarnya telah banyak dilakukan di tempat lain, salah satu yang pernah dilakukan ditahun 2016 oleh *tread lightly* sebuah organisasi di Amerika Serikat yang memprakarsai perlindungan, peningkatan akses dan promosi etika rekreasi di luar ruangan. Adapun program yang dijalankan adalah "*Respect and Protect*" berupa kampanye penyadaran publik untuk menghapuskan penjarahan dan vandalisme Sumber Daya Arkeologi, Paleontologi dan Alam di Utah, Amerika Serikat. Adapun strategi kampanye yang dilakukan adalah membuat gerakan masif taktik komunikasi eksternal melalui berbagai platform media guna menjangkau target audiens secara lebih efektif. Termasuk di dalamnya kampanye melalui website, media sosial (Facebook, Tumblr, Twitter, dan Instagram) dengan membagikan dan menandai postingan dengan komunitas/kelompok pemangku kepentingan dan memasukkan *hashtag* *#respectandprotect* untuk mendorong sosial berbagi media dan visibilitas untuk mendorong sosial berbagi media dan visibilitas kampanye. Selain melalui website juga dilakukan pemasaran online dan media cetak. Dalam bentuk ini, mitra kampanye akan

memaksimalkan keterpaparan logo kampanye, pengumuman layanan publik, dan pesan utama di media online dan cetak untuk menjangkau khalayak sasaran (<https://treadlightly.org/campaigns/respect-and-protect/>).

Dalam kepentingan publikasi yang masih juga dibutuhkan keterlibatan media, baik media tradisional dan online, termasuk siaran pers, liputan editorial dan blog, penempatan iklan layanan masyarakat.

Bentuk konvensional seperti baliho luar ruang secara efektif menargetkan khalayak luas dengan menyewa papan reklame pengumuman layanan publik yang dapat terekspos di lokasi-lokasi utama di seluruh wilayah kota. Dapat pula dengan membangun kesadaran terhadap 'brand tambahan' yang akan meningkatkan visibilitas kampanye tadi dapat berupa promosi produk pendidikan dalam bentuk kaos oblong, topi, tumbler, pin, stiker, mug dan lain sebagainya.

Epilog

Benteng Rotterdam sebagai warisan budaya dari masa lalu merupakan saksi bisu yang masih eksis bertahan ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Daya Tarik yang dimilikinya menarik banyak pengunjung yang datang untuk sekedar melihat, menikmati, dan sebagian lain menjadikannya sebagai wahana eksistensi diri. Namun, salah satu bentuk eksistensi yang ditunjukkan berupa coretan adalah eksistensi yang keliru. Generasi muda harusnya menunjukkan penghargaan, bukan dengan mengotori bahkan merusak fisik bangunan dengan coretan nama individu maupun kelompoknya.

Benteng Rotterdam diharapkan dapat tetap eksis hingga generasi berikutnya tanpa jejak vandalisme. Pengelola dan seluruh *stakeholders* merupakan penentu eksistensi dari Benteng Rotterdam dimasa yang akan datang.

“Salam Lestari”.

Daftar Pustaka

- Andaya, L. (2004). *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Makassar: Innawa.
- Asmunandar. (2008). *Membangun Identitas Masyarakat melalui Kota Kuna Makassar*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Bentar, W. A., R, A. I., & Buamona, F. A. (2021). Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya). *Sinektika Jurnal Arsitektur*, 18(1), 101-106.
- Bhati, A., & Pearce, P. (2016). Vandalism and tourism settings: An integrative review. *Tourism Management*, 91-105.
- Dumadi, S. M. (1992). *Benteng Ujung Pandang*. Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Groizard, J. L., & Santana-Gallego, M. (2018). The destruction of cultural heritage and international tourism: The Case of The Arab Countries. *Journal of Cultural Heritage*, 1-8.
- Gunarso, S. D. (1989). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Iqbal, M. (2004). *Determinasi Lingkungan dalam Penempatan Benteng – Benteng Kerajaan Gowa*. Makassar: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

- Kurata, E. S. (2019). *Pemanfaatan Berwawasan Pelestarian: Situs Fort Rotterdam Makassar sebagai Ruang Publik*. Makassar: Skripsi. Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
- Perdana, A. (2020). Nilai Budaya Naskah La Galigo dan Perahu Pinisi di Museum untuk Generasi Milenial. *Walasuji*, 153-169.
- Salmah, S. (2015). Perilaku Vandalisme Remaja di Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 39, No. 1, Maret 2015, 15-29.

PENGELOLAAN BENTENG UJUNGPANDANG DI MASA MENDATANG

oleh

Andini Perdana

"Preserving the past for future" (melestarikan masa lalu untuk masa depan) merupakan kalimat yang sering kita dengar. Pernyataan bahwa kita perlu melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang merupakan kebijakan umum di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya adalah pada pasal 4 *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) World Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage* tahun 1972 menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab mengidentifikasi, melindungi, memelihara, menyajikan, dan mentransmisi warisan budaya untuk generasi mendatang.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan hal serupa. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Cagar Budaya harus dilestarikan untuk generasi mendatang, karena penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Cagar Budaya perlu dikelola, dilindungi, dan dikembangkan

secara tepat. Bahkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Benteng Ujungpandang, merupakan salah satu Situs Cagar Budaya yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip pelestarian. Statusnya pun merupakan Cagar Budaya peringkat nasional, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025/M/2014 tentang Penetapan Benteng Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Selain itu, benteng juga telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya peringkat kota melalui Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 574/432.2/tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Benteng Fort Rotterdam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota.

Benteng Ujungpandang memiliki nilai penting dan merupakan sumberdaya langka, unik, terbatas, dan tidak terbaru. Sebagai monumen mati (*dead monument*), benteng sudah tidak berfungsi seperti awal pendiriannya dalam kehidupan masyarakat. Benteng Ujungpandang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan ruang saat ini (*adaptive reuse*). Oleh karenanya, pemikiran terkait bagaimana pengembangan dan pemanfaatan benteng ke depan diperlukan. Tujuannya agar Benteng Ujungpandang sebagai kekayaan bangsa dapat tetap lestari dan dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.

Upaya pengembangan dan pemanfaatan Benteng Ujungpandang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Bahkan rencana pengembangan berskala makro, seperti menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai salah satu titik dalam kota lama

Makassar telah dipikirkan. Akan tetapi upaya tersebut belum semuanya terealisasi. Sehingga perlu perencanaan “bagaimana menghidupkan kembali Benteng Ujungpandang sesuai kondisi masa kini sekaligus melestarikannya untuk generasi mendatang?” Hal tersebut setidaknya merupakan salah satu bentuk realisasi pembangunan cagar budaya berkelanjutan. Cagar budaya bukan hanya sebuah tinggalan atau tempat masa lalu yang mengandung memori melainkan memiliki peran terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya.

Tulisan ini akan membahas pengembangan dan pemanfaatan seperti apa yang dapat diterapkan di Benteng Ujungpandang di masa yang akan datang, tentunya dengan tidak mengesampingkan upaya pengembangan dan pemanfaatan yang telah ada dan berjalan saat ini. Selain itu, menyesuaikan paradigma baru dalam pelestarian cagar budaya di masa yang akan datang. Paradigma yang berorientasi pada pengelolaan kawasan; peran serta masyarakat; desentralisasi pemerintahan; perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pengembangan dan Pemanfaatan Saat Ini

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Sementara pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, dan sebagainya. Sedangkan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menghambat generasi yang akan datang untuk melakukan hal serupa. Konsep berkelanjutan pada Warisan Budaya telah dijelaskan dalam *UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Benteng Ujungpandang telah dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Adapun pengembangan yang dilakukan adalah penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan. Sementara pemanfaatannya dilakukan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, pariwisata.

Penelitian, yang dilakukan mencakup penelitian murni maupun terapan. Contoh penelitian murni diantaranya dilakukan oleh Muhammad Ikbal (2005) terkait determinasi lingkungan dalam penempatan benteng-benteng Kerajaan Gowa abad 16-17; Isbahuddin (2016) terkait sumber bahan batuan struktur Benteng Ujungpandang (kajian analisis material batuan); Ardhi Ramadhan (2020) terkait sejarah perkembangan konstruksi pertahanan Benteng Ujungpandang (kajian analisis konstruksi Benteng Eropa; dan sebagainya. Sementara contoh penelitian terapan dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (2010) terkait pemintakatan (zoning) Benteng Ujungpandang Kota Makassar; Yusriana (2011) terkait arahan kebijakan revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang; Annisa Senja Rucita (2021) terkait biografi objek Benteng Ujungpandang; dan sebagainya.

Revitalisasi fisik Benteng Ujungpandang telah dimulai pada tahun 1969/1970 dengan dilakukannya pemugaran atau rehabilitasi bangunan di dalam benteng dan pengadaan peralatan serta koleksi Museum La Galigo. Revitalisasi tersebut masih berlanjut hingga kini, bukan hanya pada aspek fisik namun juga pada aspek non fisik. Revitalisasi tersebut mencakup penataan kembali fungsi ruang dan juga penumbuhan kembali nilai budaya. Beberapa contoh adalah dilakukannya revitalisasi bangunan (interior dan eksterior) dan lingkungan Benteng Ujungpandang (pembuatan kanal dan taman) di tahun 2010-2012; penataan ruang informasi di gedung O dan gedung bawah aula; serta pembuatan *Virtual Realty* (VR) pada ruangan yang dapat diakses publik di Benteng Ujungpandang pada tahun 2021.

Adaptasi Benteng Ujungpandang dengan bentuk yang ada saat ini telah dilakukan sejak bangunan ini berpindah tangan dari Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Bangunan yang awalnya dijadikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan dan pemerintahan VOC dan Hindia Belanda kemudian beralih fungsi menjadi kantor dan pusat penelitian ilmiah pada ilmu pertanian dan bahasa oleh Jepang. Adaptasi kemudian berlanjut pasca Indonesia merdeka. Benteng diadaptasi menjadi pusat pertahanan Belanda dalam menumpas pejuang-pejuang Republik Indonesia (1945-1949), tempat tinggal anggota TNI dan warga sipil (1950), salah satu gedung di dalam benteng difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan La Galigo (1970-hingga sekarang), Pusat Kebudayaan Sulawesi Selatan (1977), Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 27 April 1977 hingga sekarang). Selain itu, Benteng

Ujungpandang juga dialihfungsikan menjadi ruang publik, sehingga beberapa ruang diadaptasi menjadi ruang informasi, perpustakaan, ruang audio visual, dan ruang pertemuan.

Pemanfaatan Benteng Ujungpandang dilakukan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, pariwisata. Kecuali untuk kunjungan individu yang bersifat umum dan kunjungan ke Museum La Galigo, berbagai pemanfaatan tersebut harus melalui proses perizinan pada kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa contoh pemanfaatan tersebut adalah Makassar International Writer Festival (2012, 2016, dan beberapa tahun kemudian), Makassar Jazz Festival (2019), pertunjukan teater I La Galigo (2019), perayaan hari Kebudayaan Makassar (2020), dan berbagai kegiatan lainnya.

Pengembangan dan pemanfaatan Benteng Ujungpandang yang lebih luas, telah direncanakan sejak lama, bahkan telah diimplementasikan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (disingkat Ditjen Cipta Karya PUPR), Ditjen Cipta Karya telah melakukan pengembangan atau revitalisasi kawasan Benteng Ujungpandang-Gedung Kesenian. Visi utamanya adalah penataan bangunan bersejarah yang terletak di sekitar Benteng Ujungpandang hingga lapangan Karebosi. Visi pengembangan berorientasi pada situs kota lama, sehingga benteng dapat menjadi simpul dari sistem wisata Pantai Losari dan Pelabuhan Makassar. Pengembangan tersebut telah diimplementasikan dua tahap. Tahap I (2001) dilakukan perbaikan bangunan gedung kesenian, pembuatan jalur pejalan kaki dari gedung kesenian ke kawasan pedagang kaki lima Pantai Losari, dan perbaikan



Bastion Amboina Benteng Ujungpandang 2018

(sumber: BPCB Sul-Sel)

landskap berupa perbaikan tanggul pantai, pelataran kaki lima dan berbagai perlengkapan lainnya. Tahap II (2002) dilakukan pembangunan lanjutan tahap I, perbaikan pelataran dan taman depan benteng, pembuatan jalan penghubung antara gedung kesenian dan benteng.

Benteng Ujungpandang sebagai *Archaeological Open Air Museum*

EXARC (sebuah organisasi Afiliasi ICOM *internasional untuk archaeological open-air museums and experimental archaeology*), mendefinisikan *archaeological open air museum* sebagai lembaga yang bersifat permanen, tidak mencari keuntungan dengan merekonstruksi arsitektur outdoor sesuai ukuran dan bentuk aslinya berdasarkan bukti arkeologis. Koleksinya juga dapat berupa warisan budaya tak benda yang dilengkapi interpretasi tentang bagaimana masyarakat hidup dan beraktivitas di masa lalu; yang diperoleh dengan metode ilmiah untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan kesenangan bagi pengunjungnya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan konsep open air museum secara umum yang telah dirumuskan *International Council of Museums (ICOM)*.

Tujuan utama pendirian *archaeological open-air museum* adalah pelestarian *tangible* (bangunan) dan *intangible* (aktivitas atau tradisi masyarakat). Koleksinya dapat berupa kawasan dan bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis, bahkan bangunan yang telah hancur dapat direkonstruksi kembali dengan menggunakan metode ilmiah. Bangunan tersebut diatur kembali sesuai dengan konteksnya di masa lalu. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait lingkungan dan kehidupan masa lalu yang telah hilang.

Konsep penyajian dapat lebih menonjolkan aspek estetis atau interpretasi koleksi. Penyajian yang menekankan aspek estetis lebih memperlihatkan keindahan desain visual lanskap museum dibuat lebih nyata, sehingga pengunjung merasa terbawa suasana dalam berpetualangan menjelajahi berbagai bangunan sesuai

panduan, baik digital maupun non digital. Sementara penyajian yang menekankan interpretasi koleksi memberikan informasi yang minim, sehingga pemaknaan sepenuhnya diserahkan kepada pengunjung. Pengunjung dapat berimajinasi dan memahami informasi secara bebas tanpa bantuan pengelola atau panduan.

Benteng Ujungpandang sebagai situs Cagar Budaya menyimpan berbagai informasi masa lalu yang dapat dikomunikasikan melalui museum. Konsep *archaeological open-air museum* kiranya dapat diterapkan di Benteng Ujungpandang sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan. Berbagai tradisi masa lalu yang masih berlangsung dan terkait dengan benteng dapat digali untuk memperkaya tampilan museum. Selain itu, prinsip dasar *archaeological open air museum*, meliputi prinsip bentuk, lokasi, koleksi, dan penyajianya dapat terpenuhi di Benteng Ujungpandang. Prinsip dasar tersebut yaitu

Prinsip bentuk *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang berupa lapangan atau ruang terbuka yang didalamnya terdapat koleksi berupa benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya. Berbagai koleksi ini perlu diinventarisir lebih lanjut, mengingat jenisnya yang bervariasi dan juga tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku pengelola dan pemilik Benteng Ujungpandang. Selain itu, tinggalan *intangible* sesuai konteksnya juga masih dapat ditelusuri melalui sumber sejarah dan tradisi yang masih berlangsung.

Prinsip lokasi *archaeological open-air museum* berada dalam Situs Benteng Ujungpandang, sesuai dengan hasil kajian zonasi benteng oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

Prinsip koleksinya berupa benda, bangunan, atau struktur yang saat ini masih berada di tempat aslinya (*in situ*), sehingga masih terdapat keterkaitan konteks. Meskipun konteks budaya asli dalam benteng telah hilang karena bangunan ini tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi aslinya. Beberapa contoh koleksi yaitu unsur-unsur arsitektur atau bangunan kolonial, puing atau struktur bangunan, bastion, parit, kuburan, struktur benteng, dan benda Cagar Budaya yang saat ini dilestarikan oleh BPCB Sul-Sel dan Museum La Galigo.

Selain *tangible* juga disajikan aktivitas manusia berupa simulasi dari hasil interpretasi di masing-masing bangunan atau ruang pada masa itu. Objek *intangible* berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional dapat diintegrasikan dengan arsitektur bangunan benteng. Bahkan dapat disimulasikan sesuai dengan pemaknaan cagar budaya di dalam benteng. Beberapa jenis kesenian yang sering dilakukan masyarakat Makassar antara lain tarian-tarian berupa tari *pakkarena*, *ganrang bulo*, tari *pepeka rimakka*, *ma'raga*, tari *kondo bule*, jenis music, dan lagu tradisional seperti *makacaping*, *gambusu*, dan *keso-keso* yang sering dipentaskan pada acara penyambutan tamu dan acara peresmian. Objek *intangible* tersebut menjadi pendukung *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang.

Prinsip penyajian *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang lebih memanfaatkan kualitas visual desain gaya bangunan, suasana, dan lanskapnya yang saat ini terlestarikan dengan baik di dalam benteng. Keindahan arsitektur bangunan dan lansekap benteng dibuat lebih nyata, sehingga

pengunjung merasa terbawa suasana dalam berpetualangan menjelajahi bangunan-bangunan kolonial sesuai panduan, baik digital maupun non digital. Gaya bangunan dan desain lansekap merupakan sajian utama, ditambah dengan bentuk dan tipologi bangunan beserta perlengkapannya, Suasana dan keadaan di masa lampau sesuai konteks budaya dihadirkan sepenuhnya, sehingga memberikan pengalaman interaktif. Meskipun kajian lebih lanjut terkait sejarah mana yang akan ditampilkan di museum diperlukan. Adapun lima pilihan yang dapat diangkat menjadi tema pada *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang, yaitu:

1. Benteng Ujungpandang sebagai salah satu benteng pertahanan Kerajaan Gowa;
2. Benteng Ujungpandang pada masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda;
3. Benteng Ujungpandang pada masa kependudukan Jepang;
4. Benteng Ujungpandang pada pasca kemerdekaan;
5. Peristiwa yang terjadi di Benteng Ujungpandang sesuai dengan Cagar Budayanya.

Pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai tema pameran tetap pada *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam benteng disesuaikan dengan cagar budaya eksisting saat ini. Cagar budaya yang terkait dengan Benteng Ujungpandang sebagai salah satu benteng pertahanan Kerajaan Gowa, pada masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda, serta pada masa

kependudukan Jepang. Untuk merealisasikannya, diperlukan kajian tata pameran museum.

Selain pameran tetap di *archaeological open-air museum* Benteng Ujungpandang, juga dapat diselenggarakan pameran temporer. Penentuan tema pameran temporer dipilih sesuai dengan hasil kajian pengunjung, koleksi yang tersedia, atau isu yang berkembang. Sebagai contoh adalah jalur rempah di Benteng Ujungpandang. Informasi pada tema tersebut dapat dikaitkan dengan cagar budaya yang saat ini terdapat di benteng, dengan *story line* sebagai berikut:

1. Hegemoni Kerajaan Gowa

Cerita pada sub tema ini dapat bermula sekitar tahun 1600 Bandar Makassar, Somba Opu, Ibu Kota Kerajaan Gowa telah menjadi kota dagang penting karena perdagangan transito rempah-rempah yang luas dan digemari oleh pedagang. VOC pun mulai melirik dan berusaha melakukan hubungan dagang dengan Raja Gowa di tahun 1601 dan diterima dengan baik. Akan tetapi, VOC hendak bekerja sama dengan Kerajaan Gowa untuk memonopoli perdagangan rempah, namun ditolak.

Pada sub tema ini dapat dijelaskan pula terkait Perang Makassar, sebuah perang antara VOC dengan Kerajaan Gowa dan berakhir dengan penandatanganan perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya dekat Barombong. Pasal 11 perjanjian Bungaya mengharuskan agar Benteng Jumpandang berikut perkampungan dan lingkungan sekitarnya diserahkan kepada VOC. Laksamana Speelman, pemimpin armada VOC pada Perang Makassar, mengubah nama Benteng Jumpandang menjadi

Benteng Rotterdam dan menjadikannya sebagai benteng pertahanan sekaligus pusat pemerintahan. Penataan di dalam dan di luar benteng juga dilakukan meskipun sempat terhenti dikarenakan penyerangan dan Perang Makassar yang terus berkecamuk.

2. Berpindahnya “Penguasa Rempah”

Pada sub tema ini dijelaskan tentang perpindahan hegemoni dari Kerajaan Gowa ke VOC. Pasca Perang Makassar dan perjanjian Bungaya tahun 1667, VOC langsung menempatkan pasukan-pasukannya dan melakukan perombakan bangunan Benteng Ujungpandang. Bangunan-bangunan berupa rumah-rumah khas Makassar bertiang tinggi, berbahan kayu, beratap sirap atau daun nipa digantikan oleh bangunan permanen sesuai dengan kebutuhan VOC. Sementara tembok lingkaran benteng yang dibangun pada masa pemerintahan Karaeng Tunipalangga tetap dipertahankan. Perombakan sempat tertunda akibat perang hingga perjanjian Bungaya kedua ditandatangani.

Benteng dijadikan sebagai tempat tinggal Laksamana Speelman dan benteng pertahanan pasukan-pasukan VOC. Dikarenakan kekhawatiran akan serangan mendadak dari pasukan-pasukan Kerajaan Gowa-Tallo, Speelman meminta Aruppalaka dan pasukannya untuk tinggal di Bontoala. Sebuah perkampungan yang letaknya tidak jauh dari Benteng Ujungpandang. Hegemoni Makassar dalam dunia perdagangan maritim menurun drastis karena VOC menguasai pusat pelabuhan. VOC mulai mengendalikan jalur pelayaran dan perdagangan rempah di Benteng Ujungpandang. Meskipun demikian, semangat para

petinggi dan pedagang Makassar untuk melakukan perdagangan laut bebas tidak pudar. Para penguasa VOC di benteng tidak mampu mengawasi pelayaran dan perdagangan laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores, serta perairan yang lebih luas lagi. Mereka hanya mengeluarkan sistem surat jalan yang digunakan oleh penguasa pelabuhan VOC untuk memastikan navigasi di wilayah yang dianggap tidak mengancam monopoli perdagangan VOC dalam memproduksi rempah dan masuknya tekstil dari India.

Pada sub tema ini dapat dijelaskan bahwa meskipun perjanjian Bungaya telah ditandatangani, berbagai penyerangan belum berakhir, terutama di Benteng Ujungpandang. Pada tanggal 21 April 1668, Karaeng Karunrung, Karaeng Langkese, dan Arung Matowa Wajo melakukan serangan bersama terhadap VOC di benteng. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan tanpa perlawanan yang berarti dari VOC. Dalam catatan harian Speelman tertulis bahwa "pertempuran berlangsung sengit, banyak orang Belanda mati atau luka-luka. Arung Palakka juga luka-luka dan Speelman jatuh sakit. Dalam kurun waktu 4 minggu, 135 orang mati di dalam Benteng Ujungpandang dan 52 orang tewas di kapal"

Cerita tersebut didukung oleh bukti-bukti pertempuran di sekeliling benteng, terutama sisi barat. Cukup banyak lubang-lubang bekas bersarangnya peluru, baik peluru meriam kuno maupun peluru tajam. Hal ini didukung oleh temuan ekskavasi di bagian depan (dekat sisi barat) Benteng Ujungpandang yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara tahun 1992. Temuan ekskavasi diantaranya 35.266 butir peluru meriam kuno berbagai ukuran, senjata tajam dan senjata berupa parang tanpa hulu, 446 buah



Sisi Barat Benteng Ujungpandang 2021
(sumber: BPCB Sul-Sel)

mata tombak, 356 buah mata lembing, dan 25 bayonet, serta temuan lainnya. Senjata berupa mata tombak dan mata lembing serupa dengan temuan di Benteng Somba Opu yang mengindikasikan pembuat atau pemakainya berasal dari Kerajaan Gowa. Saat ini meriam, mata tombak, dan lembing dari Benteng Ujungpandang dan Benteng Somba Opu disajikan di ruang pameran Museum Karaeng Pattingalloang.

Sub tema ditutup dengan cerita tentang berakhirnya Perang Makassar dengan penghancuran Benteng Somba Opu pada dan penandatanganan kembali Perjanjian Bungaya pada 18 Juli 1669 di Binanga (dekat Benteng Panakkukang). Sejak saat itu VOC menjadi penguasa baru perdagangan rempah. Mereka mulai



menata pemerintahan, pertahanan, dan juga perdagangan di Benteng Ujungpandang. Pada paruh akhir abad 17, Makassar dijadikan sebagai pos pengaman bagi monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

3. Benteng Rotterdam dan Pos Pengaman Monopoli Rempah-Rempah

Sub tema ini dimulai dengan cerita kedudukan Benteng Ujungpandang menjadi semakin penting bagi VOC, setelah perang Makassar tahun 1669 berakhir. Benteng difungsikan sebagai pusat pertahanan, pusat pemerintahan, serta pusat

kegiatan perdagangan VOC. Pendirian bangunan-bangunan berarsitektur Eropa berlanjut dan selesai pada tahun 1677. Bangunan kediaman gubernur didirikan tahun 1686 dengan bentuknya saat ini. Sementara bastion yang awalnya berbentuk bulat diubah menjadi runcing.

Benteng Ujungpandang dan sekitarnya dirancang menjadi kota baru yang terdiri dari markas tentara, pusat administrasi, dan kantor perwakilan di dalam benteng, pusat perdagangan di sebelah utara benteng disebut *Negory Vlaardingen*, dan wilayah pemukiman penduduk yang disebut *wanua* atau kampung. Benteng Ujungpandang dibangun dengan tembok-tembok batu yang besar, kubu-kubu, dan pintu gerbang. *Vlaardingen* dikelilingi oleh stokade yang lebih sederhana dan dibelakangnya terdapat kampung dan ditata menurut kelompok pendatang. Pejabat, pegawai pemerintahan, dan tentara umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya. Pedagang Eropa dan Cina tinggal di pusat perdagangan. Para saudagar Melayu, Bugis, Makassar telah membangun tempat pemukiman yang disebut Kampung Melayu. Disebelah timur *vlaardingen* terdapat pemukiman orang-orang Wadjo, sebelah utara Kampung Wadjo terdapat pemukiman orang-orang Cina disebut Kampung Cina. Sementara Pelabuhan VOC terletak di wilayah pesisiran *Vlaardingen*.

Pada tahun 1677, VOC mengizinkan para bangsawan Gowa membangun permukiman di selatan Benteng Ujungpandang. Pada perkembangan selanjutnya pada wilayah ini dibangun kantor pemerintah, pengadilan, tangsi militer, rumah sakit, dan permukiman pegawai. Pemekaran kota selalu ke arah timur dan selatan benteng.

Penataan ini dilakukan sebagai usaha Belanda untuk menguasai Kota Makassar sekaligus menjamin monopoli di Maluku. Makassar dijadikan sebagai pos pengawasan rempah-rempah bagi pelayaran ke bagian timur. Para pegawai yang ditempatkan di kota ini diberi tugas utama mengawal pelayaran ke Maluku. Gedung M yang saat ini dialihfungsikan menjadi Museum La Galigo awalnya merupakan gudang dan kantor perdagangan Belanda.

Pada masa ini kegiatan yang masih berlangsung adalah perdagangan beras dari pesisir. Beras diperoleh VOC melalui pajak penghasilan, penyerahan wajib kerajaan taklukan, serta transaksi niaga dengan pedagang Melayu dan Bumiputra lainnya.



Gedung M tahun 1920
(digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Hasil transaksi selanjutnya diekspor ke Maluku dengan menggunakan kapal VOC yang melakukan pelayaran niaga dari Batavia ke Maluku melalui Makassar. Selain beras, juga diperdagangkan produk lain dari Selayar, Sanrobone, dan sebagainya.

Makassar berkembang serta maju dengan pesatnya menjadi sebuah kota dan pelabuhan terbesar dan terpenting di Sulawesi Selatan. Kota disekitar Benteng Ujungpandang dinamakan Makassar oleh orang Belanda. Makassar menggantikan kedudukan Somba Opu sebagai kota pelabuhan internasional.

Beberapa contoh *archaeological open-air museum*, yaitu *the Scottish Crannog Centre* (United Kingdom), *HOME* (Belanda), *the Pfahlbaumuseum* (Jerman), *Lofotr* (Norway), *Parco Montale* (Italia), *Araisi* (Latvia), *Matrica Museum* (Hungaria), dan *Fotevikens Museum* (Swedia). Kesembilan contoh tersebut pada umumnya melakukan rekonstruksi terhadap koleksinya yang didasarkan pada hasil ekskavasi arkeologis. Misalnya *Fotevikens Museum* di Swedia merupakan museum yang dikhususkan untuk menginformasikan arkeologi bawah air di Pantai Vellinge Swedia. Konsepnya didasarkan pada sejarah maritim kota yang terkait dengan sejarah jaman Viking dan pertempuran *Foteviken*. Salah satu koleksinya adalah 22 rumah jaman Viking yang arsitekturnya diperoleh dari ekskavasi arkeologis dan informasi umum dari manuskrip abad 11-12. Museum ini menginformasikan tentang arkeologi maritim, lanskap budaya maritim Scandinavia, kehidupan Viking awal hingga pertengahan dengan menghidupkan kembali sejarah melalui penggunaan teknologi digital.

Untuk menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai *archaeological open-air museum*, diperlukan kajian pendirian lebih

lanjut. Kajian tersebut menelaah dokumen syarat pendirian museum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2015 tentang Museum, yaitu visi dan misi museum, koleksi, lokasi, sumberdaya manusia, sumber pendanaan tetap, nama museum, dan sebagainya. Selain itu juga dapat dibahas tentang program publik dan edukasi, interpretasi koleksi, pengunjung, pengelolaan, dan tata pameran museum.

Benteng Ujungpandang sebagai Bagian dari Kota Tua Makassar

Kota bersifat dinamis dan akan berubah mengikuti perkembangan jaman. Dinamika perkembangan kota seringkali berdampak pada hilangnya kawasan atau unsur-unsur kota yang menjadi bukti identitas awal mula perkembangan kota. Oleh karenanya keberadaan awal sebuah kota perlu dilestarikan, dikaji, dan dikomunikasikan kepada masyarakat untuk menghindari hilangnya unsur-unsur kota yang terbawa arus globalisasi dan modernisasi.

Akan tetapi, pelestarian cagar budaya perkotaan terkadang dianggap sebagai proses yang saling bertentangan dan tidak sejalan dengan pembangunan kota yang mengutamakan konsep modern dan futuristik. Ditambah lagi rendahnya pemahaman masyarakat dan pemerintah akan nilai penting cagar budaya serta adanya perubahan kondisi ekonomi penduduk seperti tingginya kebutuhan tempat tinggal dan mencari nafkah, meningkatnya nilai tanah, dan faktor lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, UNESCO pada tahun 2011 memperkenalkan sebuah konsep pelestarian warisan budaya berkelanjutan untuk wilayah perkotaan, disebut *Historic Urban Landscape* (HUL). *Historic Urban Landscape* adalah suatu pendekatan holistik dan multidisplin yang digunakan untuk pengelolaan warisan budaya dalam lingkungan dinamis dan terus berubah. Dengan tujuan untuk memandu perubahan di kota bersejarah tersebut. Hal ini didasarkan pada rekognisi, identifikasi lapisan dan interkoneksi antara alam, budaya baik *tangible* maupun *intangible*, nilai internasional serta lokal saat ini. Nilai tersebut dapat dijadikan sebagai nilai penting dalam pengelolaan dan pengembangan kota secara kesekuruhan.

Dalam penerapannya, pendekatan HUL lebih menekankan konteks lokal pada kota bersejarah. Sehingga setiap kota akan menghasilkan pendekatan pengelolaan yang berbeda. Adapun enam tahapan dalam penerapan HUL adalah:

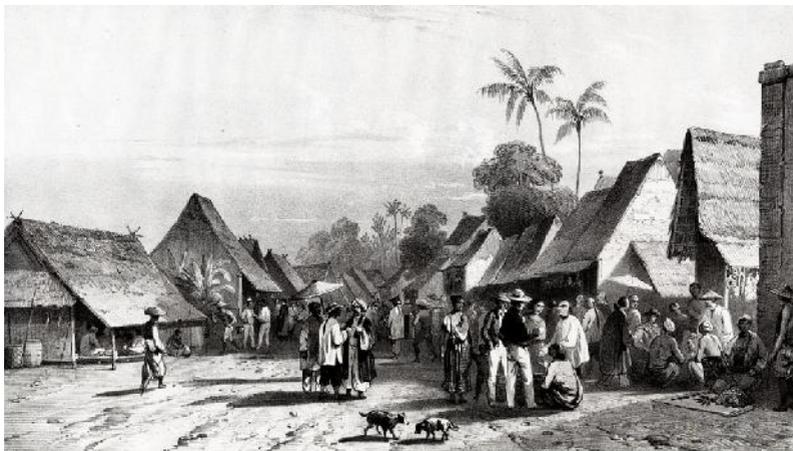
1. Melakukan survei dan pemetaan sumberdaya alam, budaya, dan manusia secara komprehensif;
2. Mencapai konsensus dengan menggunakan perencanaan partisipatif dan konsultasi kepada pemangku kepentingan tentang nilai-nilai apa yang harus dilindungi agar dapat ditransmisikan ke generasi mendatang dan untuk menentukan atribut yang mengandung nilai-nilai tersebut;
3. Menilai kerentanan atribut-atribut (budaya) terhadap tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim;
4. Mengintegrasikan nilai-nilai warisan perkotaan dan status kerentanannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas;

5. Mengutamakan tindakan konservasi dan pembangunan; serta
6. Membangun kemitraan yang tepat dan kerangka kerja manajemen lokal untuk mengidentifikasi pekerjaan konservasi dan pembangunan, serta mengembangkan mekanisme untuk berkoordinasi dengan berbagai aktor, baik publik maupun swasta pada berbagai kegiatan.

Dalam pedoman UNESCO dijelaskan lebih lanjut bahwa HUL memiliki empat (empat) komponen, yaitu keterlibatan masyarakat (*community engagement*), pengetahuan dan perencanaan yang baik (*knowledge and planning*), sistem peraturan (*regulatory system*), dan pembiayaan (*financial tools*). Komponen ini dapat disesuaikan dengan konteks kelokalan bahkan dapat dirancang ulang. Hingga saat ini komponen tersebut diterapkan pada *urban heritage* yang terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.



Perkembangan Kota Makassar
(sumber: daenggassing.wordpress.com)



Kampung Melayu 1846
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)



Sisi Barat Benteng Ujungpandang 1915
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)



Kampung China 1900-an
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)



Kampung China 1915
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Adapun manfaat penerapan HUL pada sebuah Kawasan perkotaan diantaranya, meningkatkan pelayanan dari sektor bisnis; memperkuat *sense of place* suatu kawasan: meningkatkan nilai lahan dan properti menjadi lebih tinggi; menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk restorasi dan rehabilitasi; memajukan sektor pariwisata; serta meningkatkan perencanaan dan perancangan perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendekatan HUL dapat diterapkan di Kota Makassar, sebuah kota tua yang terus berkembang dari masa ke masa. Keberadaan Kota Makassar sebagai kawasan warisan budaya sudah sepatutnya dipertahankan. Didalamnya tersimpan nilai historis perkembangan kota yang dilengkapi dengan tinggalan budaya, baik *tangible* maupun *intangible*. Salah satu upaya pengembangan yang dapat dilakukan adalah menjadikan Kawasan Budaya menjadi Kota Tua Makassar.

Konsep perencanaan Kota Tua Makassar telah mengemuka sejak lama. Hal ini terlihat dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan untuk membangun identitas masyarakat Makassar melalui Kota Tua. Dalam penerapannya, konsep ini sangat erat kaitannya dengan Benteng Ujungpandang sebagai cikal bakal Kota Makassar.

Ketika Benteng Ujungpandang dan lingkungan sekitarnya diserahkan kepada VOC, Speelman mengubah namanya menjadi Rotterdam dan menjadikan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertahanan. Setelah keamanan di sekitar benteng dapat dikendalikan perlahan-lahan kehidupan dalam benteng mulai ditinggalkan dan beralih di luar benteng. Makassar ditata menjadi empat elemen. Pertama; pusat pemerintahan yang



Museum Kota 1905
(sumber: nationaalarchif.nl)

berada di dalam Benteng Rotterdam sementara sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Kedua; disebelah timur laut Benteng Rotterdam disebut *negory vlaardingen* yang dijadikan sebagai perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang. Ketiga; perkampungan di sebelah utara *vlaardingen*, yaitu Kampong Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Keempat; di bagian selatan benteng Rotterdam, di dekat pantai terdapat Kampong Beru atau kampung Baru .

Konsep Kota Tua Makassar ini dikaitkan dengan sejarah perkembangan kota dan bangunan-bangunan didalamnya. Bangunan tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan masa pendirian dan juga fungsi awal pendiriannya. Klasifikasi berdasarkan masa

pendirian, yaitu pola perkembangan kota Makassar akhir abad ke-17 hingga awal abad ke 18, awal abad ke 18 hingga ke-19, dan akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20. Sementara klasifikasi berdasarkan fungsi pendirian, yaitu kelompok bangunan pemerintahan, perumahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, militer, perdagangan, dan sarana sosial. Selain itu, berbagai cerita sejarah dan tinggalan budaya dapat dikaitkan dengan budaya *intangibile*. Diantaranya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Integrasi antara *tangible* dan *intangibile* membuat kota lama Makassar kaya akan informasi yang mencerminkan identitas masyarakat.

Penerapan empat komponen HUL, merupakan tahap awal dalam perencanaan Kota Makassar sebagai kota tua. Komponen tersebut meliputi keterlibatan masyarakat (*community engagement*), pengetahuan dan perencanaan yang baik (*knowledge and planning tools*), sistem peraturan (*regulatory system*), dan pembiayaan (*financial tools*).

Komponen pertama; keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama agar upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kota Tua Makassar dapat berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya agar proses peran serta masyarakat dapat berjalan. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan publisitas (*publicity*), dialog dan konsultasi, pemberdayaan masyarakat, pemetaan budaya, dan sebagainya.

Komponen kedua; pengetahuan dan perencanaan merupakan alat untuk membantu perlindungan integritas dan keaslian elemen warisan budaya perkotaan. Didalamnya memberikan rekognisi signifikansi dan keberagaman budaya serta mencakup pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, hingga paska dilakukan kegiatan pelestarian Kawasan Kota Tua Makassar secara berkala, Hal ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan kesinambungan dalam perencanaan dan perancangan pelestarian kawasan.

Komponen ketiga; sistem regulasi mencakup tata cara, tindakan, atau perilaku yang terkait dengan pengelolaan komponen warisan budaya perkotaan *tangible* maupun *intangible*, termasuk nilai sosial dan lingkungan. Aturan adat dan nilai-nilai tradisional yang masih berlangsung di Makassar harus selalu



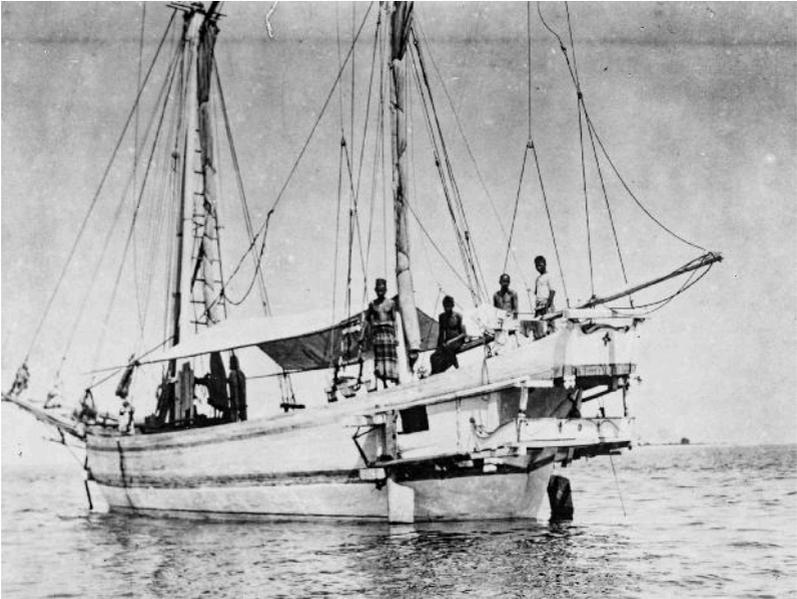
Straat te Makassar 1910
(sumber: nationaalarchif.nl)

dihormati, dijaga, dan dipertahankan keberadaannya sebagai upaya pengembangan Kawasan Kota Tua Makassar.

Komponen keempat; pembiayaan perlu dipikirkan untuk menjadikan Makassar sebagai kawasan kota tua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi perkotaan dan juga melestarikan nilai penting warisan budaya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, atau lembaga internasional. Pembiayaan digunakan untuk mempromosikan warisan budaya di tingkat lokal, agar investasi dari skala lokal dapat terwujud dan berkelanjutan. Pembiayaan tersebut diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk proses perencanaan maupun pembangunan, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi ekonomi daerah maupun masyarakat sekitar melalui promosi kawasan kota tua ke tingkat regional hingga nasional. Promosi ini bertujuan untuk menarik para wisatawan datang hingga menarik para investor agar membangun usaha di sekitar lokasi, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi peluang bisnis bagi masyarakat Makassar.

Benteng Ujungpandang sebagai Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah Air Indonesia

Kondisi geografis dan letak Sulawesi Selatan yang strategis membentuk jiwa penduduknya menjadi jiwa pelaut ulung dan mendiami daerah pesisir sejak jaman dahulu. Bahkan jauh sebelum itu, bukti arkeologis di gua-gua prasejarah di Kawasan Karst Maros Pangkep, Sulawesi Selatan menunjukkan adanya gambar/relief perahu. Kepandaian orang Bugis-Makassar dalam berlayar dan mengembangkan perahu layar terbukti dengan



Perahu, Makassar 1930
(sumber: nationaalarchif.nl)

adanya suatu hukum niaga dalam pelayaran yang ditulis dalam naskah lontara *ade' Allopi-lopung Bicaranna Pabbalu* oleh Amanna Gappa pada abad ke 17.

Kepiawaian tersebut terlihat dengan banyaknya jenis perahu yang digunakan dalam keseharian masyarakat di Sulawesi Selatan sejak dulu hingga kini. Berbagai jenis perahu itu, saat ini terdisplay di ruang pameran tetap bertema maritim dan pesisir di Gedung M, Museum La Galigo, di dalam Benteng Ujungpandang. Perahu tersebut diantaranya lepa-lepa, pinisi bagang perahu, bangang tancap, perahu lambo, dan lepa-lepa batangeng. Selain itu, juga terdisplay peralatan berlayar, peralatan menangkap ikan, dan peralatan pembuatan perahu.

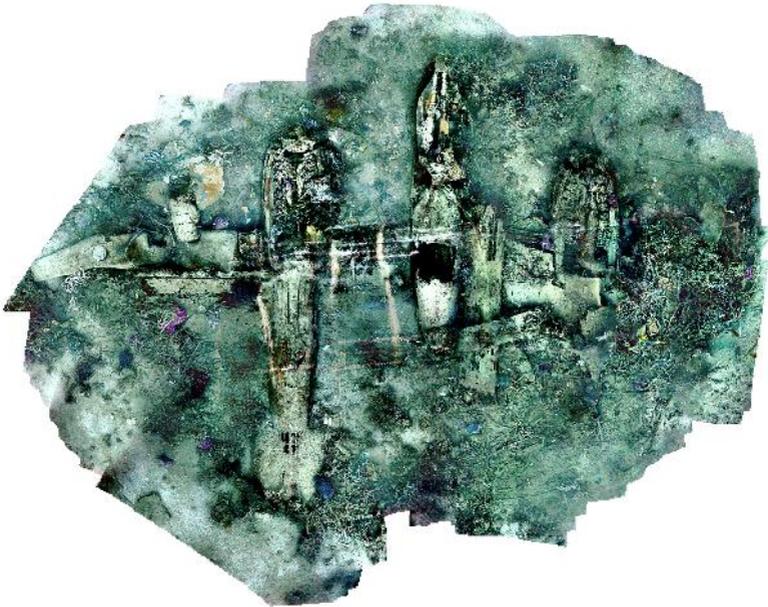
Selain terkenal dengan tradisi kebahariannya, di perairan Sulawesi juga banyak ditemukan tinggalan cagar budaya bawah air. Salah satu contohnya adalah Situs Sangkulu-Kulu di Perairan Bontosikuyu Kabupaten Selayar, situs bawah air di Danau Matano, situs bawah air di Barrang Lompo, Lae-Lae, dan di beberapa titik lainnya. Situs tersebut hingga kini masih dijadikan sebagai objek kajian untuk menjaga kelestariannya.

Sebagai upaya untuk melestarikan dan mengelola berbagai tinggalan cagar budaya bawah air, pada tahun 2011, Kemendikbud (saat ini Kemendikbudristek) berencana mendirikan tiga pusat pelatihan arkeologi bawah air masing-masing di wilayah barat, tengah, dan timur. Untuk wilayah barat dipilih Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung, wilayah tengah di Karimun Jawa Provinsi Jawa Tengah, dan wilayah timur di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, beberapa kegiatan pelatihan difokuskan di Makassar untuk merealisasikan perencanaan tersebut.

Pada tulisan ini, Benteng Ujungpandang diusulkan bukan hanya dijadikan sebagai Pusat Pelatihan Bawah Air, melainkan Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah Air. Selain berfungsi untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Cagar Budaya Bawah Air. Pusat pemajuan tersebut juga dijadikan sebagai media komunikasi hasil pelestarian yang telah dilakukan. Penyaluran informasi melalui publikasi, penetapan kebijakan, pengembangan wisata, program publik, hingga pendirian ruang informasi. Ruang informasi mengomunikasikan berbagai tinggalan arkeologi bawah air dan hasil interpretasinya.

Perlunya ruang informasi pada Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah Air, dengan pertimbangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan belakangan ini dituntut untuk lebih berorientasi pada publik yang lebih luas dan dirasakan manfaatnya. Berbagai cagar budaya bawah air yang diperoleh dari muatan kapal tenggelam bukan hanya disimpan, namun memerlukan kajian lebih lanjutan dari perspektif ilmu lain untuk memperkuat informasi. Cagar budaya tersebut juga perlu diinformasikan pada masyarakat yang lebih luas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pameran merupakan salah satu media komunikasi pada Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah Air. Sifatnya *research-based*



Pesawat P-38 *Lightning* di Situs Bawah Air Perairan Lae-Lae
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

exhibition (pameran hasil penelitian) yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai di balik cagar budaya bawah air. Selain itu, pameran temporerinya dapat bersifat *market driven exhibition* (pameran berdasarkan permintaan masyarakat) yang tentunya didasari oleh *visitor study*.

Koleksinya adalah berbagai jenis cagar budaya bawah air yang telah diteliti bahkan situsnya dapat direkonstruksi dan dijadikan sebagai media informasi interaktif. Pusat informasi dapat menunjukkan sebuah replika hasil rekonstruksi situs bawah air berupa bangkai kapal karam, muatan, dan lingkungannya di Sulawesi. Agar masyarakat dapat melihat langsung dan merasakan berada dalam situs bawah air. Sehingga informasi yang disampaikan lebih lengkap dan akurat dengan cara menarik.

Selain itu, dalam pusat informasi juga dijelaskan metode dan teknis pekerjaan salah satu bidang ilmu terkait cagar budaya bawah air, yaitu arkeologi bawah air (*underwater archaeology*), baik pekerjaan pengkajian, penyelaman, pengangkatan, hingga pemeliharaan temuan tinggalan arkeologi bawah air. Hal ini sekaligus mengedukasi masyarakat untuk turut andil dalam melestarikan berbagai temuan, mengingat maraknya pengangkatan ilegal tinggalan muatan kapal tenggelam.

Pengelolaan Benteng Ujungpandang sebagai Badan Layanan Umum

Terminologi Badan Layanan Umum (selanjutnya disingkat BLU) dapat kita lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk

memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengertian BLU tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan pelestarian Cagar Budaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, juga sejalan dengan pilar utama permuseuman Indonesia sebagai lembaga non profit yang berupaya untuk mencerdaskan bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

Salah satu bentuk pengelolaan yang dapat diterapkan adalah menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai Badan Layanan Umum. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Untuk menjadi BLU tentunya pengelola Benteng Ujungpandang, yaitu BPCB Sul-Sel harus memenuhi persyaratan substansif, teknis, dan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pengelola Benteng Ujungpandang dapat memberikan layanan umum berupa penyediaan jasa layanan umum. Jasa yang dimaksud adalah informasi dinamika kebudayaan yang akan memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Benteng diibaratkan sebagai ruang waktu yang ketika kita masuk kedalamnya, kita akan merasakan berada pada masa itu.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda. Pertama; jasa tidak berwujud (*intangibility*), sehingga menjadikan Benteng Ujungpandang sebagai BLU harus didahului dengan promosi dan pemasaran dengan berbagai media untuk dapat meningkatkan kepercayaan calon pengunjung. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud, menekankan pada manfaat yang diperoleh, menciptakan suatu nama merek (*brand name*) bagi jasa, atau memakai nama orang terkenal untuk meningkatkan kepercayaan pengunjung, seperti *influencer* atau komunitas. Kedua; tidak terpisahkan (*inseparability*), dengan kata lain jasa umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan, sehingga mutu dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa berlangsung. Seperti, seorang pemandu benteng yang sedang melayani pengunjung maka pada saat itulah dia memproduksi jasa dan pengunjung menerima jasa. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten, sarana, dan prasarana untuk mewujudkannya. Ketiga; keragaman (*variability*), jasa sangat beragam artinya memiliki banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut disediakan. Oleh karenanya pengelola benteng harus menentukan segmen pengunjung agar dapat menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Keempat; tidak tahan lama (*perishability*), jasa tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Oleh karenanya diperlukan berbagai inovasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Disamping itu, *visitor study* untuk mengetahui keinginan pengunjung juga diperlukan.

Penutup

Wilayah perkotaan tersusun dari berbagai lapisan, berkembang, dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Lapisan baru terus bertambah dari perspektif tertentu. Sudah bukan masanya, warisan budaya bertentangan dengan pembangunan modern. Karena warisan budaya merupakan evolusi besar dan berkelanjutan dari pembangunan perkotaan. Pengembangannya harus diintegrasikan antara pembangunan perkotaan dan pengelolaan warisan budaya. Dengan memperhatikan kewasannya, Benteng Ujungpandang memiliki banyak makna, signifikansi, dan relevansi kolektif serta individu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dilakukan di Benteng Ujungpandang, diantaranya menjadikannya sebagai *Archaeological Open Air Museum* atau Pusat Pemajuan Cagar Budaya Bawah air pada tingkat mikro serta Kawasan Kota Tua Makassar pada skala makro. Dimana konsep pengelolaannya dapat berbentuk Badan Layanan Umum. Tentunya upaya tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut serta tidak dapat terlaksana tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, komunitas, hingga masyarakat.

Sebagai penutup, perlu diketahui bersama bahwa dalam sejarah, harapan untuk masa depan tidak selalu atau bahkan menjadi kenyataan. Hal ini mengingat banyaknya inovasi atau pemikiran yang lebih baik di masa depan. Namun tujuan perencanaan ke depan bukanlah untuk mengantisipasi, memprediksi atau mengendalikan apa yang akan terjadi di masa depan, namun sebagai upaya serius untuk berusaha merencanakan yang dapat dilakukan saat ini. Selain itu, dapat

meningkatkan kemampuan kita untuk membuat masa depan lebih baik atau disebut *future literacy*. Mengutip pernyataan Unesco “membaca masa lalu, menulis masa depan (*reading the past, writing the future*).

Daftar Pustaka

- Asba, Andi Rasyid. 2007. Kopro Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Asriana, Nova dan Mega Sesotyaningtyas. 2018. “Pendekatan Historic Urban Landscape untuk Pelestarian Kawasan Kampung Al-Munawar 13 Ulu”, Palembang dalam Prosiding Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) 7.
- Alnoza, dkk. 2020. Kota Tua Punya Banyak Cerita, Jilid 1. Sukabumi: Farha Pustaka
- Asmunandar. 2008. Membangun Identitas Masyarakat Melalui Kota Kuna Makassar. Tesis Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. 2010. Laporan Pemintakatan (Zoning) Benteng Ujung Pandang Kota Makassar. Kelompok Kerja Perlindungan. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Dengtawang. 2012. “Makassar dari Masa ke Masa” diakses dari <https://daenggassing.wordpress.com> pada 8 November 2021.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Penataan dan Revitalisasi Kawasan Benteng Rotterdam-Gedung Kesenian 2001-2004” diakses pada <http://ciptakarya.pu.go.id> pada tanggal 5 November 2021.

- Holtorf, Cornelius dan Anders Högberg . 2021. "Introduction: Cultural heritage as a Futuristic Field" dalam Cultural Heritage and the Future. New York: Routledge.
- ICOMOS. 2016. Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors. Austria: Unesco.
- Inajati Adrisijanti (ed). 2014. Benteng Dulu Kini dan Esok. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kuswanto. 2013. Kajian Konsep Open Air Museum Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Trowulan. Tesis Universitas Indonesia.
- Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang. 1975. Benteng Rotterdam. Ujung Pandang: Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang.
- Maha P Donny dan Sintong "Memahami Badan Layanan Umum Sebagai Ujung Tombak Pemerintah Dalam Pelayanan Publik" dalam <http://blu.djpbk.kemenkeu.go.id> diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 03.19 Wita.
- Mattulada. 1982. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510-1700). Ujung Pandang: Bhakti Baru-Berita Utama.
- Paardekooper, Roeland. 2012. The Value of an Archaeological Open-Air Museum is in Its Use. Leiden: Slidestone Press.
- Pabittei Aminah 1975. Benteng Ujung Pandang Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi, Ujung Pandang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum
- Perdana, Andini. "Nilai Budaya Naskah La Galigo Dan Perahu Pinisi Di Museum Untuk Generasi Milenial" dalam Jurnal Walasuji Volume 11, No.1, Juni 2020. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.

- Poelinggomang, Edward L. 2016. Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta: KPG.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud. 2020. Modul Pemajuan Kebudayaan. Jakarta: t.tb
- Rahman, Darmawan Mas'ud, dkk. 1993. Ekskavasi Penyelamatan Peluru Meriam Kuno di Benteng Ujung Pandang. Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Sagimun. 1992/1993. Benteng Ujung Pandang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- UNESCO. 1972. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: UNESCO.
- United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. 2016. The HUL Guidebook: Managing Heritage In Dynamic and Constantly Changing Urban Environments. Paris: Unesco

BENTENG ROTTERDAM SEBAGAI PUBLIC SPACE

oleh

Anggi Purnamasari

Sekilas Sejarah Benteng Ujungpandang

Benteng Rotterdam yang merupakan ikon Kota Makassar telah berdiri kokoh selama lebih dari 400 abad. Bahkan benteng ini telah ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014. Selama perjalanannya berabad-abad, Benteng Rotterdam telah melalui berbagai perubahan fungsi.

Awal pendirian dimulai pada tahun 1545 dengan nama Benteng Ujungpandang. Pembangunan benteng masih terus dilanjutkan oleh pemegang tahta Kerajaan Gowa selanjutnya. Benteng ini dibangun bukan sebagai benteng utama, seperti Benteng Somba Opu. Namun, hanya benteng pengiring bersama dengan 13 benteng lainnya yang dibangun oleh Kerajaan Gowa.

Dalam Perang Makassar, Kerajaan Gowa yang sangat tangguh tidak dapat memenangkan perang melawan tentara Belanda. Akibat kekalahan Kerajaan Gowa, maka Belanda meminta Kerajaan Gowa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya. Melalui Perjanjian Bungaya, Belanda menduduki Benteng Ujungpandang. Setelah itu, terjadi perombakan besar-besaran pada struktur dinding dan bangunan bagian dalam benteng. Awalnya terdiri dari rumah tradisional bertiang-tiang



Halaman muka aplikasi Virtual Reality Fort Rotterdam
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

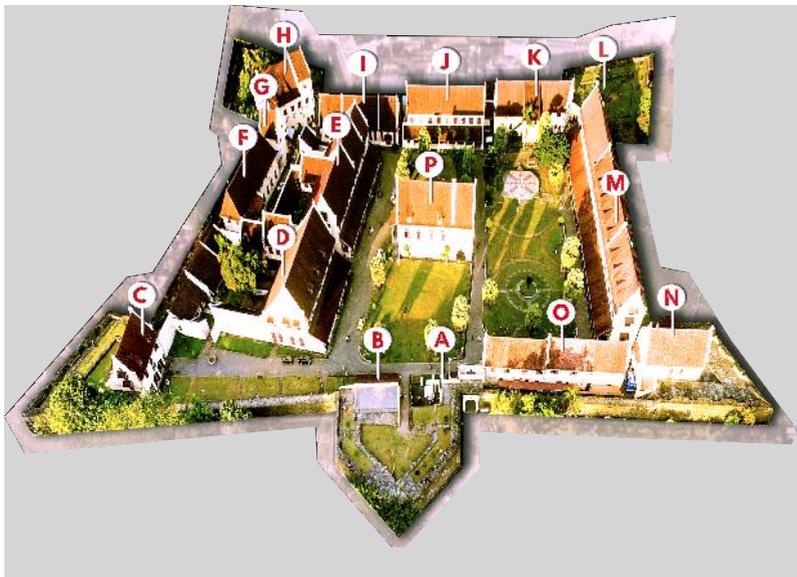
kayu, diubah menjadi bangunan dengan arsitektur. Pada struktur benteng, ditambahkan gerbang dan parit di sekeliling benteng. Nama Benteng Ujungpandang pun diubah menjadi Fort Rotterdam. Pembangunan yang awalnya dimulai oleh Raja Gowa sebagai benteng pertahanan kini telah berubah fungsi menjadi ruang publik dan perkantoran.



Benteng Rotterdam dari Bastion Bone
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Pembagian Ruang di Benteng Rotterdam

Terdapat 16 bangunan di dalam Benteng Rotterdam. Sebagian besar bangunan di Benteng Rotterdam digunakan oleh kantor BPCB Prov. Sul-Sel dan Museum Provinsi La Galigo. Penggunaan bangunan pada saat ini, yaitu:



Pembagian ruang Benteng Rotterdam
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan A: ruang pengaman Benteng Rotterdam. Tamu-tamu yang akan mengunjungi Benteng Rotterdam wajib lapor di Bangunan A sebelum memasuki area Benteng Rotterdam.



Bangunan A tampak dari barat dan dari timur
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan B: Sebelum terlihat seperti sekarang, Bangunan B sangat hancur. Bangunan ini merupakan hasil rekonstruksi yang dilakukan pada tahun 1994. Saat ini Bangunan B digunakan sebagai ruang Pelayanan Publik BPCB Prov. Sul-Sel.

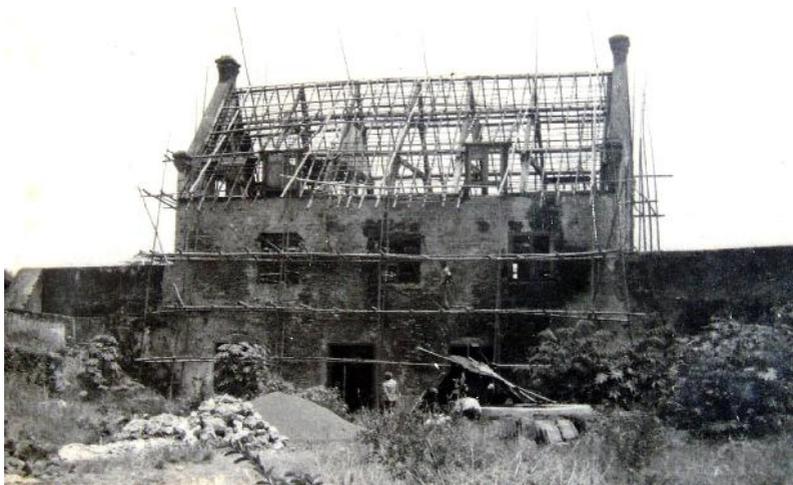


Bangunan B tahun 1926 dan tahun 1942
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)



Bangunan B tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: BPCB Prov. Sul-sel)

Bangunan C: Setelah di rehabilitasi pada tahun 1976, Bangunan ini digunakan sebagai pusat latihan tari Indonesia. Saat ini dimanfaatkan oleh para seniman sebagai Dewan Kesenian Makassar sebagai pusat kesenian di Makassar.



Bangunan C, tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan D: Saat ini Bangunan D bagian belakang digunakan sebagai kantin dan kantor Kelompok Kerja Pengendalian Cagar Budaya Bawah Air. Sedangkan dibagian depan digunakan oleh Museum Lagaligo sebagai ruang pameran museum.



Bangunan D, tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan E: Saat ini digunakan sebagai kantor induk Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



Bangunan E, tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan F: Saat ini digunakan sebagai ruang penyimpanan dan laboratorium Museum Lagaligo.



Bangunan F, tahun 1920 dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan G: Saat ini dimanfaatkan sebagai ruang pelukis tanah liat di lantai satu, sedangkan di lantai dua sebagai ruang sekretariat lembaga adat.



Bangunan G, tahun 1915 dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan H: Saat ini digunakan sebagai tempat beristirahat bagi beberapa pegawai dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang tinggal di luar Kota Makassar.



Bangunan H, tahun 2021
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan I: Bangunan ini digunakan sebagai kantor penelitian bahasa dan pertanian oleh Jepang. Saat ini digunakan sebagai kantor oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



Bangunan I, tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan J: Saat ini, Bangunan J digunakan sebagai kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat perpustakaan di lantai dua, sedangkan Taman Baca Anak di lantai satu.



Bangunan J, tahun 1953 dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan K: Sejak direhabilitasi pada tahun 1976, Bangunan K digunakan sebagai kantor Balai Kota. Saat ini digunakan sebagai ruang *storage* Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



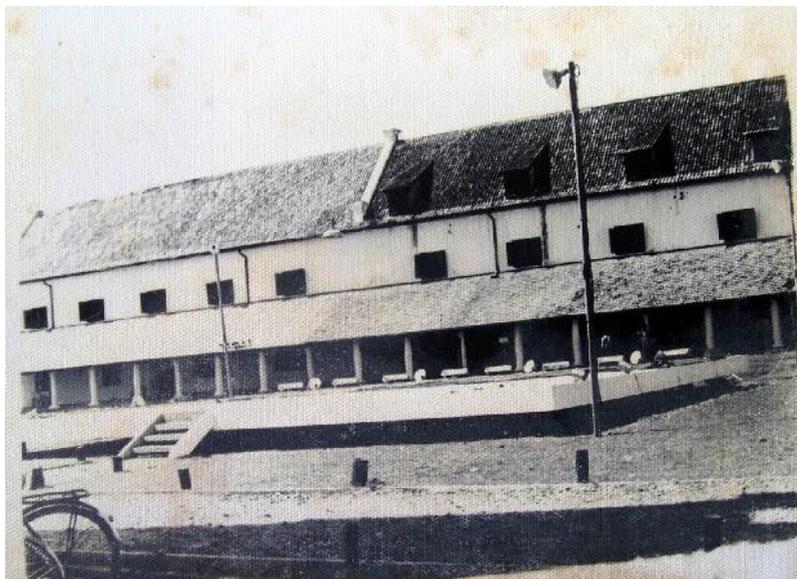
BangunanJ, tahun 1920 dan tahun 2005
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan L: Saat ini difungsikan sebagai bengkel dan gudang untuk teknisi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



Bangunan K, tahun 2015
(sumber: BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan M: Saat ini menjadi salah satu ruang pameran Museum Lagaligo.



Bangunan M tahun 1920, tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan N: Saat ini digunakan sebagai kantor Museum Lagaligo dan juga ruang visualisasi tempat tinggal Pangeran Diponegoro.



Bangunan N tahun 1930, dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan O: Saat ini Bangunan O bagian utara digunakan sebagai kantor Museum Lagaligo dan pada bagian Selatan digunakan sebagai ruang audio visual Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.



Bangunan O tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Bangunan P: Saat ini digunakan sebagai Aula pada lantai 2. Sedangkan pada lantai 1 sebagai ruang informasi mengenai Benteng Rotterdam



Bangunan P tahun 1970-an dan tahun 2021
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl, dan BPCB Prov.Sul-Sel)

Pengelolaan Cagar Budaya sebagai *Public Space*

Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 disebutkan bahwa Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Dengan demikian, pemanfaatan Cagar Budaya sebagai ruang publik dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Pasal 95 menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat. Kemudian pasal 97 menyebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan sosial.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 mendefinisikan pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Benteng Rotterdam saat ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan (BPCB Prov. Sul-Sel).

Apakah Benteng Rotterdam merupakan *Public Space*?

Pada masa Pemerintahan Belanda, benteng ini pernah digunakan sebagai markas komando, kantor balai kota, perwakilan dagang, rumah sakit, wisma tentara, tempat tinggal dokter dan pimpinan perdagangan, ruang tahanan, gudang VOC, tempat penerimaan tamu, gereja, dan lain sebagainya. Pada masa pendudukan Jepang, sebuah gedung dibangun untuk kantor penelitian bahasa dan pertanian. Pada masa lalu, ruang-ruang di Benteng Rotterdam telah menjadi *Public Space* walaupun hanya untuk orang-orang tertentu.

Public Space adalah ruang yang digunakan bersama, dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun komunitas (Holuj, 2017, p. 129). Definisi lain dari *Public Space* yaitu ruang yang terpisah dari ruang alam. Bangunan-bangunan pada *Public Space* ditata untuk merepresentasikan identitas urban. Di sini lah terdapat keterkaitan antara ruang urban, fungsi dan aktivitas yang secara langsung mempengaruhi kesenangan dan reaksi pengguna terhadap lingkungan tersebut (Zalloom & Tarrad, 2020, p. 362). Dapat disimpulkan bahwa *Public Space* merupakan ruang bersama yang mencerminkan suatu identitas dimana pengguna yang datang mendapatkan kesenangan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, *Public Space* mengalami krisis. Tahapan krisis dibagi menjadi tiga tahapan menurut Bolici,

“First, the principles of neoliberalism have exacerbated inequalities and segregation, therefore weakening the social living mixité and privatizing

both common goods and public spaces. Then, Public Administrations have slowly dropped their capability to organize public spaces able to please everyone's rights and needs. Finally, the growth of the urban intricacy has increased traffic, mobility and equipment needs too (information, communication and other facilities as garbage management, etc.) - public spaces have been gradually obstructed with objects (signs, parking meters, garbage bins, etc.), worsening fruition condition and not respecting places' identity (Bolici, Gambaro, & Giordano, 2017, p. 46)

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi krisis adalah paham neoberalisme yang mengubah ketidaksetaraan sosial membuat ruang publik hanya menjadi ruang privat bagi beberapa komunitas; petugas *public space* yang mengalami penurunan dalam mengelola; dan pertumbuhan kota yang ruwet dan menutupi *public space*. Tiga hal tersebut yang menghilangkan identitas dari sebuah *public space*. Bagaimana dengan Benteng Rotterdam?

Setelah tahun 1970, telah terjadi peralihan fungsi pada Benteng Rotterdam. Benteng diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan perawatan dan pelestarian. Kemudian pada 1974, Benteng dijadikan sarana wisata budaya dan pendidikan. Hingga saat ini, Benteng Rotterdam masih dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Saat ini Benteng Rotterdam telah menjadi salah satu destinasi bagi masyarakat Kota Makassar maupun wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung. Tujuan dari pengguna Benteng

Rotterdam juga berbeda-beda, mulai dari wisata edukasi, rekreasi, menghadiri acara suatu komunitas, atau hanya sekedar mengambil foto dan video di tempat yang begitu ikonik ini. Dapat dikatakan bahwa Benteng Rotterdam telah menjadi *Public Space* untuk berbagai masyarakat dan komunitas.

Tanpa disadari, Benteng Rotterdam telah menjadi *Public Space* dimana masyarakat, pengunjung dan pengguna dapat menggunakannya secara bersamaan dan melakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan.

Pengelolaan Benteng Rotterdam sebagai *Public Space*

BPCB Prov. Sul-Sel selaku pengelola memiliki tugas dan fungsi dalam pelestarian Cagar Budaya yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Salah satu Cagar Budaya yang dilestarikan dan dijadikan pusat perkantoran BPCB Prov. Sul-Sel yaitu Benteng Rotterdam. Pengelolaan Benteng Rotterdam sebagai *Public Space* dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan publik.

Bolici membuat tujuh strategi dalam merancang *Public Space*, yaitu *The identity of the city and systemic vision*; *The System of open spaces as a 'skeleton'*; *The environmental components of sustainable open spaces*; *Orderly, "free", safe and comfortable public space*; *Culture as a "plus"*; *The historic center as a setting for functional diversity*; dan *Open spaces as common goods*. Dengan melihat tujuh strategi ini, BPCB Prov. Sul-Sel berusaha menerapkannya dalam pengelolaan Benteng Rotterdam.

1. *The identity of the city and systemic vision*

Identitas dari sebuah kota dan pandangan sistemik yang dimaksudkan di sini adalah Benteng Rotterdam mencerminkan identitas Kota Makassar. Sebagai ruang publik yang mencerminkan Kota Makassar, maka Benteng Rotterdam harus dilindungi sebagai warisan budaya.

Setelah Perang Makassar, muncul 'kota baru' dengan Benteng Rotterdam sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan. Pemukiman baru mulai tumbuh di sekitar Benteng Rotterdam. Bahkan, salah satu bangunan di Benteng Rotterdam, yaitu Bangunan K, pernah menjadi kantor Balaikota di tahun 1976. Dengan demikian, pertumbuhan Kota Makassar saat ini, tidak bisa lepas dari Benteng Rotterdam merupakan identitas awal Kota Makassar.

2. *The System of open spaces as a 'skeleton'*

Sistem ruang terbuka sebagai "dasar" merupakan bagaimana menghubungkan ruang publik tidak hanya dengan fasilitas biasa di dalam ruang publik, tetapi juga terintegrasi dengan ke khas-an morfologis, fungsi tempat dan popularitasnya.

Saat ini, selain membenahi fasilitas di dalam Benteng Rotterdam, BPCB Prov. Sul-Sel menyediakan berbagai fasilitas tambahan untuk pengunjung, seperti ruang audio visual, ruang pelayanan publik, dan ruang informasi mengenai Benteng Rotterdam. Selain itu, pengunjung juga dapat berfoto dengan pakaian adat Bugis Makassar dan has Eropa abad pertengahan.

3. *The environmental components of sustainable open spaces*

Komponen lingkungan ruang terbuka yang berkelanjutan dimaksudkan agar kelestarian ruang publik tetap terjaga dengan turut melestarikan lingkungannya. Penataan taman di Benteng Rotterdam dibuat semaksimal mungkin untuk kelestarian bangunan di dalamnya dan juga kenyamanan pengunjung. Sebagai ruang publik, maka ruang-ruang dengan lingkungan yang asri selalu dijaga.

4. *Orderly, "free", safe and comfortable public space*

Public space yang teratur, "bebas", aman dan nyaman yaitu dengan menjadikan ruang publik dapat diakses dengan mudah, aman dan nyaman bagi masyarakat. Saat ini, BPCB Prov. Sul-Sel telah membuat Kelompok Kerja Pelayanan Publik agar Benteng Rotterdam dan Cagar Budaya lain di wilayah kerja BPCB Prov. Sul-Sel dapat di akses dengan mudah.

5. *Culture as a "plus"*

Kebudayaan sebagai "nilai tambah" merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan pada ruang publik. Menceritakan keberadaan Benteng Rotterdam di masa lalu dapat membangkitkan identitas Kota Makassar. Informasi mengenai Benteng Rotterdam telah disiapkan pada bagian depan halaman Benteng Rotterdam agar masyarakat dapat mengetahui sejarah dari Benteng Rotterdam.

6. *The historic center as a setting for functional diversity*

Pusat sejarah sebagai tempat keberagaman merupakan unsur yang cukup penting. Sebuah ruang publik harus merangkul berbagai aktivitas beragam, hal ini disebabkan





masyarakat yang kontemporer dan kompleks. Pada akhir pekan, dapat ditemukan berbagai aktivitas masyarakat di Benteng Rotterdam, mulai dari kunjungan wisata sampai perkumpulan komunitas-komunitas.

7. *Open spaces as common goods.*

Ruang terbuka sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut aktif terlibat karena bisa saja di masa depan ruang publik dikelola bersama masyarakat.

Benteng Rotterdam sebagai *Public Space*

Pengelolaan Benteng sebagai *Public Space* harus dikelola dengan baik, karena tidak seperti *public space* pada umumnya tetapi merupakan Cagar Budaya yang perlu juga diprioritaskan pelestariannya. Walaupun BPCB Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas untuk melakukan pelestarian di seluruh situs di wilayah kerjanya, namun Benteng Rotterdam menjadi salah satu Cagar Budaya yang pengelolaannya diutamakan.

Selama Pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan tentu juga negara lainnya, Benteng Rotterdam tertutup untuk publik sejak Maret 2020. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI untuk Penutupan Layanan Galeri, Museum dan Cagar Budaya. Pada pertengahan tahun 2021, setelah adanya vaksin dan beberapa aktivitas sosial budaya dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan peserta, maka Benteng Rotterdam kembali dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik.

Pemanfaatan Benteng Rotterdam selama masa pandemi terkhusus untuk kepentingan edukasi, seperti penelitian, permintaan data, pengambilan gambar foto dan video, dan kunjungan edukasi. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Benteng Rotterdam didahului dengan melayangkan surat permohonan izin kepada BPCB Prov. Sul-Sel, dengan begitu protokol kesehatan dan pembatasan dapat diterapkan.

Selama pandemi, beberapa sarana dan prasarana ditingkatkan oleh BPCB Prov. Sul-Sel. Selain itu, beberapa fasilitas tambahan ditambahkan diantaranya adalah pemasangan informasi mengenai bangunan-bangunan di dalam Benteng Rotterdam, mempersiapkan ruang audio visual dan film yang akan diputar, dan menyiapkan kostum ala Eropa dan baju adat Bugis dan Makassar untuk berfoto. Setelah pandemi berakhir, Benteng Rotterdam sebagai *public space* diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Holuj, D. (2017). *Public Spaces and Cultural Heritage in Community Projects - The Example of Warsaw* (Vol. 24). Groningen, Netherland: European Spatial Research and Policy.
- Zalloom, B., & Tarrad, M. (2020, May). The Role of Public Spaces in Reviving the Historical Areas: The Case Study of As-Salt City in Jordan. *International Journal of Sustaining Development and Planning*, 15(3), 361-367.

Bolici, R., Gambaro, M., & Giordano, C. (2017). The Regaining of Public Spaces to Enhance the Historic Urban Landscape. *The Journal of Public Space*, 2(1), 45-56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 *Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta.



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kompleks Benteng Ujung Pandang, Jalan Ujung Pandang No. 1,
Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Tlp: 0411 - 3621701
f. 0411-3621702 e: bpcbmakassar@yahoo.com,
w: bpchsulsel.id

© 2021

ISBN 978-623-99092-0-8

